

DR. ZULY QODIR
DR. ACHMAD NURMANDI
DR. M. NURUL YAMIN

IJTIHAD POLITIK MUHAMMADIYAH: POLITIK SEBAGAI AMAL USAHA

Ijtihad Politik Muhammadiyah: Politik sebagai Amal Usaha

Editor: Dr. Zuly Qodir, Dr. Achmad Nurmandi, Dr. M. Nurul Yamin

•
Penyelarasan Kata: Ratih Indriastuti

Desain Cover: Haitomy el-Jaid

Penata Aksara: Dwi Agus M.

Pracetak: si Jack

Cetakan I: November 2015

•
Penerbit

PUSTAKA PELAJAR

Celeban Timur UH III/548 Yogyakarta 55167

Telp. (0274) 381542; Fax (0274) 383083

E-mail: pustakapelajar@yahoo.com

Website: pustakapelajar.co.id

Bekerja sama dengan

Jusuf Kalla School of Government

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Lingkar Barat, Tamantirto, Kasihan Bantul

ISBN: 978-602-229-538-9

Daftar Isi

Muhamadiyah dan Negara: Arah Pemikiran dan Gerakan Abad Keuda

ZULY QODIR, ACHMAD NURMANDI
DAN M. NURUL YAMIN – v

1. Teologi Politik Muhammadiyah

AHMAD SYAFII MAARIF

Pendahuluan – 1

Muhammadiyah dan Politik – 2

Penjajahan Barat, lahirnya Muhammadiyah dan tujuan
yang hendak dicapai – 4

Penutup – 9

2. **Teologi Politik Muhammadiyah**
BAHTIAR EFFENDY
Pendahuluan – 11
Pandangan Dasar Muhammadiyah – 14
Lingkungan Penjajahan – 17
Lingkungan Kemerdekaan – 18
Konsistensi Muhammadiyah – 24
Penutup – 26

3. **Muhammadiyah dan Politik**
AZYUMARDI AZRA, CBE
Muhammadiyah sebagai Civil Society – 31
Muhammadiyah: Interest Group – 32
Muhammadiyah dan Politik Nasional – 34

4. **Meletakkan Muhammadiyah dalam Dinamika Politik:
Upaya Merumuskan Kembali Ijtihad Politik Muhammadiyah**
HAJRIYANTO Y. THOHARI
Ijtihad politik: sarat kekhawatiran – 43
Ijtihad politik Muhammadiyah: Apalagi? – 47
Parpol, multipartai, politik biaya tinggi – 50
Muhammadiyah perlu “Memiliki” Parpol – 52

5. **Reformulasi Ijtihad Politik Muhammadiyah**
MUHADJIR EFFENDY DAN ASEP NURJAMAN
Pendahuluan – 57
Ijtihad Politik – 59
Muhammadiyah dan Politik: sebuah tinjauan historis – 62
Orientasi Teologi Politik Muhammadiyah – 66
Perlunya Jaringan dan Sinergi – 69
Bahan Bacaan – 72

6. **Budaya Politik Muhammadiyah**
ACHMAD JAINURI
Muhammadiyah dan Politik – 75
Memahami makna Politik – 77
Negara yang dicitakan – 79
Sikap Politik Warga Muhammadiyah – 80
Etika Politik Politisi Muhammadiyah – 81
Tradisi Politik Muhammadiyah – 82
Penutup – 84

7. **Politik “Narsis” Muhammadiyah: Darwinisme VS Welas Asih, antara Gengsi dan Kebutuhan**
ABDUL MUNIR MULKHAN
Pendahuluan – 85
Perilaku Politik Muhammadiyah – 88
Muhammadiyah dan Gerakan Politik – 90
Muhammadiyah Pasca Masyumi – 96
Memihak Kaum Mustad’afin – 99
Penutup – 103

8. **Kompleksitas Relasi Muhammadiyah dan Politik**
DR. H. HAEDAR NASHIR
Pandangan Politik – 107
Berpolitik Praktis – 118
Partai Politik – 124
Kerumitan Politik – 131
Jalan Keluar – 141
Khatimah – 147

9. **Muhammadiyah dan Politik Global**
TULUS WARSITO
Pendahuluan – 151
Masalah dalam Negeri dan Isu Non Teologis – 153
Kelompok Penekan yang Handal – 155
Politik Cangkok (Politik Implantasi) – 156
Isu Politik Global – 157
Human Security: Spiritual Security, educational – 159

10. **Muhammadiyah di Hadapan Negara: Melihat Peran di Aras Global**
SYAFIQ A. MUGHNI
Pendahuluan – 163
Masyarakat Sipil Global (MSG) – 164
Program Muhammadiyah – 167
Faith-Based Organizations – 169
Gerakan Perdamaian – 170
Humanitarian Actions – 172
Interfaith Dialogue – 173
Kesimpulan – 174

11. **Muhammadiyah dan Negara**
ZULY QODIR
Muhamadiyah dan Urusan Politik – 179
Muhammadiyah dalam Politik Kebangsaan – 187
Muhammadiyah sebagai Arena – 192
Penutup – 198

- 12. Muhammadiyah dan Gerakan Masyarakat Madani di Tengah Mimpi Negara Kesejahteraan Sosial**
SAID TUHULELEY
Iftitah – 203
Gagasan Masyarakat Madani – 204
Memahami Realitas – 208
Kiprah Muhammadiyah sebagai Kekuatan Masyarakat Madani – 218
Khatimah: Beberapa Agenda Penting – 229
- 13. Politik Elektoral Muhammadiyah di Aras Lokal (Di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Maros)**
ACHMAD NURMANDI, ANDI LUHUR PRIANTO, DAVID EFENDI
Pendahuluan – 231
Kerangka Teori – 236
Perilaku Pilihan Politik (electoral politics) – 236
Metode Penelitian – 242
Kepercayaan dan Perilaku Politik – 243
Otoritas Muhammadiyah sebagai Pemain Politik – 249
Agama an Politik Alokatif – 252
Muhammadiyah dan Rezim Politik – 255
Kesimpulan – 266
Referensi – 269
- Indeks - 273**

MUHAMMADIYAH DAN NEGARA

ARAH PEMIKIRAN DAN GERAKAN ABAD KEDUA

: ZULY QODIR, ACHMAD NURMANDI DAN M. NURUL YAMIN

Muhammadiyah telah memasuki abad kedua. Tantangan dakwah abad ini tentu tak kalah rumit jika dibandingkan abad pertama. Pasalnya, Muhammadiyah tidak lagi berdiri sebagai ormas modern berbasis sosial kemasyarakatan di Indonesia, tetapi kini berhadapan dengan berbagai persoalan serius nasional maupun internasional. Persoalan nasional maupun internasional itu merupakan peluang bagi Muhammadiyah untuk semakin berkiprah untuk umat secara global. Muhammadiyah yang sejak awal tidak didisain untuk menjadi partai politik dan karenanya sering gamang dalam berhadapan berpolitik, terutama gerakan massif politik praktis yang penuh pragmatisme perlu mendapatkan perhatian serius Muhammadiyah. Muhammadiyah tidak boleh lagi “hanya menjadi penonton dan pembantu” negara dengan pelbagai amal usaha yang telah dikerjakan. Muhammadiyah harus menjadi bagian penting dari negara, dan syukur jika Muhammadiyah dapat menjadi “imam” dinegara ini yang secara kultur berislam moderat dan membutuhkan organisasi social keagamaan seperti Muhammadiyah.

Dalam konteks Muhammadiyah kekinian, tidak berlebihan bila tiga Profesor yang memiliki perhatian besar terhadap masa depan Muhammadiyah, yaitu Prof. M. Amin Abdullah, Prof. Mitsuo Nakamura dan Prof. Martin van Bruinessen, menyarankan bahwa persyarikatan ini mesti berbagi dengan menduniakan pengalaman dan pemikirannya menembus batas-batas teritorial suatu negara sehingga kontribusinya semakin nyata dalam berbangsa dan bernegara. Khusus untuk Indonesia Muhammadiyah harus pula berkontribusi untuk mengurus negara ini agar lebih baik dan beradab serta berkemanusiaan. Nasionalisasi peran dan Internasionalisasi kontribusi adalah kata kunci, di mana pesan-pesan sosial keagamaan dapat dinikmati oleh umat manusia dari seluruh belahan dunia. Dengan bekal pengalaman berorganisasi selama seabad yang lalu, Muhammadiyah diharapkan mampu mewarnai jagat pemikiran dan praksis sosial yang dibawa sebagai role model ditingkat nasional maupun global. Meminjam istilah Haedar Nashir (2011) dengan fondasi ideologi reformis dan moderat yang menjadi karakter gerakannya plus pandangan Islam yang berkemajuan dan berbagai potensi sumberdaya manusia, amal usaha, dan jaringan yang dimiliki, Muhammadiyah akan mampu menghadapi masalah dan tantangan yang menghadang betapa pun kompleksnya.

Peran serta kontribusi yang lebih nasional serta global inilah tantangan Muhammadiyah pada abad kedua mendatang. Muhammadiyah harus berusaha dengan keras mencoba memberikan sesuatu kepada publik nasional dan internasional dengan modal sosial yang telah dimiliki. Setidaknya, Muhammadiyah dapat berperan dalam tiga hal utama. Yaitu, ranah politik, ekonomi, dan kultural. Ranah politik merupakan kajian terhadap pilihan politik Muhammadiyah sejak awal pendiriannya. Seperti saat Kiai Dahlan “berkompromi” terhadap pemerintah Hindia-

Belanda untuk mendapatkan cap “legal” pendirian sebuah ormas. Kiai Dahlan perlu membangun kekuatan di Boedi Oetomo guna memperkuat dukungan agar Muhammadiyah tidak mendapatkan resistensi dari pemerintah kolonial. Dalam perjalanan selanjutnya, Muhammadiyah turun serta dalam kancah politik tahun 1955. Di mana Muhammadiyah menjadi anggota aktif Partai Masyumi dengan semboyan “Berpolitik dengan Masyumi, berdakwah dengan Muhammadiyah”. Peran kebangsaan dalam bidang politik pun terus bergulir di masa Orde Baru. Di mana memuncak saat Kiai AR Fachruddin menerima asas tunggal Pancasila. Pak AR dengan lobby yang kuat kemudian menelorkan istilah “politik helm”. Politik helm menjadi cara Pak AR untuk mendekati diri kepada pemerintahan yang sah. Melalui ijtihad itu, Muhammadiyah pun dapat selamat dari “pembredelan” ala Soeharto. Ijtihad politik Muhammadiyah pun kini memasuki jihad konstitusi. Di mana Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengajukan serangkaian uji materi kepada Mahkamah Konstitusi terkait UU yang tak berpihak kepada umat, seperti UU Migas.

Ijtihad Amien Rais membentuk Partai Amanat Nasional (PAN) tentu sesuatu kemajuan besar bagi Muhammadiyah, sekalipun akhirnya antara PAN dan Muhammadiyah tampak berjalan sendiri-sendiri, sebab dialog tidak selalu berjalan dengan “mulus dan dialektis” sehingga kadang muncul pula paradoks di sana antara aktivis PAN dengan Muhammadiyah sebagai ormas yang jamaahnya paling banyak mendukungnya. Oleh sebab itu, perlu sebuah ijtihad yang konkret pula dalam kaitannya antara Muhammadiyah dan Negara pada abad kedua ini. Muhammadiyah yang pernah menjadi anggota Istimewa Masyumi sebenarnya memiliki basis historis ketika Muhammadiyah harus berkontribusi nyata dalam hal politik, yakni politik berperadaban serta politik yang menjunjung etika. Muhammadiyah diharapkan mampu mempersiapkan kader-kader terbaiknya untuk disumbangkan kepada negara ketika negara ini menghendaki dan memang negara sebenarnya membutuhkan Muhammadiyah dalam ranah politik yang belakangan karut marut dengan persoalan korupsi, kecurangan dan minus etika.

Muhammadiyah sudah selayaknya kuat untuk menopang sistem kenegaraan yang bermartabat dan beretika dimana dalam praktek politik itu membutuhkan banyak uang. Muhammadiyah secara organisasi merupakan ormas Islam yang nyaris tiada tandingan dalam hal amal usaha, sangat kaya dan luar biasa, namun agaknya masih kurang dalam praktek politik. Muhammadiyah tampak galau dan gamang, terdapat gap di sana antara Muhammadiyah dengan negara, padahal riil Muhammadiyah adalah organisasi Islam *the biggest Islamic Organization* yang telah diakui oleh dunia maupun nasional. Tetapi mengapa “gamang dan galau” dalam hal berkontribusi dalam hal politik untuk turut mengurus negara. Inilah pertanyaan penting yang harus dijawab Muhammadiyah dalam abad kedua untuk diperbincangkan secara serius menjelang muktamar dan kontribusi Muhammadiyah pasca muktamar 2015 untuk Indonesia sepuluh sampai tiga puluh tahun ke depan yang kita harapkan jauh lebih baik, beradab dan bermartabat dalam politik.

Kontribusi Muhammadiyah melalui jalur kultural sudah sangat nyata yakni dalam dunia pendidikan yang berhaluan mencerdaskan bangsa. Muhammadiyah tidak diragukan lagi telah memberikan kontribusi dengan mendirikan lembaga pendidikan dari tingkat Pendidikan Usia Dini sampai Perguruan Tinggi tidak kurang dari 16.000 lembaga. Sebuah sumbangan yang fantastik untuk sebuah organisasi sosial

keagamaan yang tidak hanya bergerak dalam dunia pendidikan. Gerakan Muhammadiyah dalam dunia pendidikan menjadi sumber inspirasi dunia dalam menjalankan ranah ini. Sekolah-sekolah Muhammadiyah tumbuh dan berkembang dengan coraknya sendiri. Sekolah Muhammadiyah dengan sistem “ala Barat” di awal pendiriannya, kini telah bermetamorfosis menjadi lembaga unggulan yang tak boleh dianggap sebelah mata. Namun, kini kehadiran sekolah Muhammadiyah sudah tersaingi oleh sekolah lain. Sekolah Muhammadiyah pun kemudian seringkali dianggap nomor dua. Apalagi kini pemerintah menggalakkan sekolah negeri dengan gratis. Banyak masyarakat kemudian tak lagi mempercayakan putra-putrinya untuk dididik oleh sekolah Muhammadiyah. Hal itu pun secara riil merupakan tantangan Muhammadiyah di bidang kultural (pendidikan). Terhadap tantangan besar itu masih ada sedikit aktivis gerakan ini yang terus menggelorakan dan merevitalisasi pendidikan Muhammadiyah agar tetap menjadi inisiator perubahan.

Sebagian sudah melakukan dan menunjukkan sinyal positif sebagian lagi masih dalam proses penemuan. Oleh karena itu, perlu ada ruang dan promosi gagasan pemikiran yang mendasar dari Muhammadiyah yang telah banyak berkontribusi di ranah nasional seperti dalam dunia pendidikan, namun gagap ketika harus berkontribusi nyata dalam dunia politik yakni hubungannya antara MUHAMMADIYAH DAN NEGARA, sehingga ketika proses politik berlangsung Muhammadiyah tampak tidak atau kurang siap memberikan kader terbaiknya untuk menjadi IMAM di negara ini.

Oleh sebab itu perlu kajian yang mendalam (ijtihad politik) kekinian bukan menjadikan Muhammadiyah sebagai partai politik, namun reposisioning gerakan politik Muhammadiyah di Indonesia sehingga Muhammadiyah dapat benar-benar berkontribusi secara nasional maupun internasional menghadapi berbagai masalah kemungkaran sosial seperti korupsi, kerusakan lingkungan, pembalakan liar, makelar kasus, pencurian uang rakyat dan penggelapan pajak serta lainnya.

Buku ini diangkat dari seminar Pra Muktamar yang diselenggarakan Panitia Pusat Muktamar Muhammadiyah dan Program pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk turut memikirkan secara serius (ijtihad politik) Muhammadiyah memasuki abad kedua ini serta membagi pengalaman dan kisah sukses Muhammadiyah selama ini. Muktamar Muhammadiyah ke-47 akan mengambil peran penting sebagai pioneer untuk memberikan kontribusi nasionalisasi dan internasionalisasi pemikiran dan gerakan Muhammadiyah dalam hubungannya dengan Negara dalam memasuki abad kedua. Ikhtiar intelektual ini tidak hanya akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan pemikiran dan gerakan Islam di Indonesia dan dunia, tetapi juga secara akademik dan kontekstual, akan mengoreksi pandangan yang menyebut bahwa, elan vital Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid telah meredup dan pemikiran keagamaannya mengalami kebuntuan.

Kepada para pembicara yang tulisannya diikutsertakan dalam buku ini serta para pengelola program pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta disampaikan terima kasih. Kepada rector Universitas Muhammadiyah Yogyakarta disampaikan terima kasih tak terhingga. Demikian pula kepada para peserta yang telah turut memperkaya kajian seminar. Kepada penerbit Pustaka Pelajar kami sampaikan terima kasih atas kerjasamanya selama ini.

TEOLOGI POLITIK MUHAMMADIYAH

Oleh: Ahmad Syafii Maarif

Pendahuluan

Sepanjang pengetahuan saya, Muhammadiyah belum pernah membicarakan secara khusus tentang masalah teologi politik ini, sehingga tidak mudah bagi saya menelusuri dari sumber-sumber resmi mengenai apa yang dimaksud dengan konsep itu. Kenyataan ini dapat difahami, karena sejak kelahirannya lebih dari satu abad yang lalu, Muhammadiyah memang tidak dirancang untuk mengurus politik kenegaraan sebagai bagian dari teologi atau filsafat politik dalam pengertian modern. Tetapi, kira-kira yang dimaksud dengan konsep teologi politik itu adalah: "... bagian dari filsafat politik dan teologi yang meneliti cara-cara yang di dalamnya konsep-konsep teologis atau cara-cara berfikir bertalian dengan politik, masyarakat, dan ekonomi,"¹ Definisi lain diberikan oleh Muhammed Hashas: "...teritoria yang berjaln-berkelindan antara agama dan politik, yaitu, penyatuan dan penafsiran beberapa aspek teologis agama dalam debat publik bagi kepentingan public (2014:149)." ². Ringkasnya, teologi politik dalam kaitan dengan judul di atas adalah kajian tentang hubungan agama dan politik kenegaraan menurut pandangan Muhammadiyah.

Wacana teologi politik di era Islam klasik

Muhammadiyah dan Politik

Dalam menyusun wacana pemikiran, termasuk di ranah politik, Muhammadiyah tidak mungkin melompat dari sesuatu yang kosong. Oleh sebab itu, apa yang berlaku di era klasik perlu ditinjau selintas. Adalah Abu al-Hasan al-Mawardi (974-1058 M) yang membuka diskusi teologi politiknya dalam sebuah pernyataan terkenal yang berbunyi: "Al-imâmah maudhû'atun likhilâfati al-nubuwwah fî hirâsati al-dîn wa siyâsati al-dunyâ." Kepemimpinan politik dilembagakan sebagai pengganti peran kenabian untuk melindungi agama dan

¹ Lih. Political Theology dalam *Wikipedia, the free encyclopedia*.

² Muhammed Hashas, "Abdolkarim Soroush: The Neo-Mu'tazilite that Burries Classical Islamic Political Theology in Defence of Religious Democracy and Pluralism" dalam *Studia Islamica* 109 (2014), hlm. 149, catatan kaki no. 4.

mengatur urusan dunia (Al-Mawardi dan Al-Sultaniyah 1881:3).³ Bagi al-Mawardi, masalah politik kenegaraan tidak bisa dipisahkan dengan peran yang pernah dijalankan oleh nabi di era Madinah (622-632 M). Sekalipun nabi telah wafat, masalah kepemimpinan komunitas Muslim harus dilanjutkan, sebab jika tidak demikian, sejarah Islam sudah pasti lumpuh sejak masa-masa awal dengan segala masalah pelik yang menyertainya.

Karena selama ratusan tahun pengaruh sistem kekuasaan dinastik demikian kuat sepeninggal nabi dan *al-khulafâ' al-râsyidûn* (632-661 M), teori-teori politik yang berangkat dari prinsip syura (permusyawaratan) tidak pernah muncul. Dalam karya di atas al-Mawardi masih menempatkan keturunan Quraisy yang harus berada di pucuk pimpinan, berdasarkan hadith al-Bukhari, Muslim, dan al-Nawawiy, sesuatu yang perlu dikaji kembali karena berlawanan dengan al-Qur'an tentang prinsip egalitarianism (Kamil,2012:268).⁴ Bagi saya, sebuah sistem politik yang tidak menghargai manusia sebagai manusia penuh (*full human*) harus ditolak. Sampai hari ini dunia Islam masih saja bingung untuk menentukan dan memilih sistem politik mana yang lebih sejalan dengan al-Qur'an tentang syura dan ajaran persamaan tentang manusia. Dalam perpektif ini, penelitian atas hadist-hadist tertentu mutlak diperlukan oleh suatu lembaga akademik Muslim yang kompeten dan berwibawa, sebagaimana Turki kontemporer tengah melakukannya.

Sejak terbelahnya komunitas Muslim Arab akibat pertarungan politik kekuasaan, terutama sebagai akibat Perang Şiffîn (657 M) yang kemudian memicu munculnya kelompok sunni, syi'î, dan khawarij, dunia Islam sampai hari ini masih sibuk dibuatnya. Al-Qur'an tidak lagi dijadikan pedoman tertinggi untuk mencari solusi dari perbelahan politik itu. Di era modern dengan munculnya konsep negara-bangsa, ideologi nasionalisme telah dijadikan perangkat ideologis untuk memperparah iklim perbelahan itu. Memang di era klasik, kemajuan duniawi sebelum datang penjajahan Barat cukup dahsyat dan diakui dunia, tetapi perbelahan umat tidak pernah bisa dipertautkan. Ini adalah tragedi komunitas

³ Abul Hasan al-Mawardi, *Al-Ahkâm al-Sultâniyah*. Kairo 1881, hlm. 3. Karya ini ditulis pengarangnya di saat imperium 'Abbasiyah sedang digoyang oleh kelompok amir-amir Syi'ah al-Buwaihid.

⁴ Lih. Abdul Qawi al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, terj. Pipih Imran Nurtsani dan Fitri Nurhayati. Solo: Insan Kamil, 2012, hlm. 268, hadist no. 1194: "Lâ yazâlu hâdza al-amru fî quraisyin mâ baqiya mina al-nâsi istnâni."

Islam yang telah menguras energi dalam bilangan kurun yang panjang. Alangkah sukarnya umat Islam memahami teks suci agamanya dalam masalah teologi politik yang dasar-dasarnya jelas terdapat dalam al-Qur'an. Ibn Taimiyah (1263-1328), seorang yuris revolusioner masih saja mencantumkan hadist ini dalam teori politiknya: "Sultan adalah bayangan Tuhan di muka bumi, 60 tahun di bawah seorang imam yang tiranik lebih baik dari semalam tanpa sultan."⁵

Penjajahan Barat, lahirnya Muhammadiyah dan tujuan yang hendak dicapai

Kedatangan penjajahan Barat ke dunia Islam yang memang sudah terbelah itu di abad ke-16 yang berlangsung sampai ke abad ke-20, hanyalah semakin merunyamkan suasana internal umat yang berada dalam lingkaran berbagai negara bangsa. Inilah pernyataan A.J. Toynbee tentang tragedi itu: "Sungguh, sebelum akhir abad ke-16, pihak Barat, berkat penaklukan atas lautan, telah berjaya melemparkan tali lasso di kitaran leher Islam; tetapi barulah di abad ke-19 pihak Barat berani menarik keras tali itu."⁶ Ujungnya hampir seluruh dunia Islam jatuh ke bawah kekuasaan penjajahan, termasuk Indonesia yang pernah diberi nama Hindia Timur Nederland itu. Muhammadiyah yang muncul pada awal dasa warsa kedua abad ke-20, di saat sistem penjajahan Belanda mulai mendapat perlawanan kultural secara lunak, dimulai dengan terbentuknya Budi Utomo 1908, disusul oleh Serikat Islam tahun 1912, sebagai pengembangan dari Serikat Dagang Islam tahun 1911.

Sebagai gerakan Islam non-politik, Muhammadiyah dalam AD (Anggaran Dasar) 1912, Artikel 2a merumuskan tujuan berdirinya: "menyebarkan pengajaran Igama Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wassalam kepada penduduk Bumiputera di dalam residensi Yogyakarta."⁷ Dua tahun kemudian dalam AD 1914, Artikel 2a, perumusan tujuan itu mengalami perubahan yang cukup penting: "memajukan dan menggembirakan pengajaran dan pelajaran Igama Islam di Hindia Nederland."⁸ Perubahan AD yang fundamental tentang tujuan organisasi terjadi pada Mukhtamar Muhammadiyah ke-31 (21-26 Desember 1950)

⁵ Ibn Taimiyah, *Al-Siyâsa al-Shar'îya*. Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Arabiya, 1966, hlm. 139.

⁶ A.J. Toynbee, *Civilization on Trial and the World and the West*. Cleaveland and New York: The World Publishing Company, 1963, hlm. 248.

⁷ Lih. Mh. Djaldan Badawi (ed), *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah, 1912-1985*. Jogjakarta: Sekretariat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1998, hlm. 1.

⁸ *Ibid.*, hlm. 4.

di Jogjakarta dalam iklim pasca revolusi kemerdekaan yang mulai bersinggungan dengan teologi politik. Dalam Fasal 2, tujuan itu dirumuskan sebagai berikut: “Maksud dan tujuan Persyarikatan ini akan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga dapat mewujudkan masyarakat Islam yang sebenarnya.”⁹ Tentang bagaimana bentuk dan corak masyarakat Islam itu tidak dijelaskan. Dalam Fasal 3g yang berbunyi: “Berusaha dengan segala kebijaksanaan supaya kehendak dan peraturan Islam berlaku dalam masyarakat.”¹⁰ Sesungguhnya fasal ini secara implisit telah mengandung aspek teologi politik karena untuk berlakunya kehendak dan peraturan Islam dalam masyarakat tidaklah mungkin tanpa melibatkan negara sebagai lembaga pemaksa bagi tegaknya UUD (Undang-Undang Dasar), hukum, dan segala peraturan lainnya. Muhammadiyah tidak menjelaskan peran negara untuk mencapai tujuan usahanya itu, karena lapangan amal-usahanya adalah kemasyarakatan yang lebih bercorak sosial dan kultural.

Era tahun 1950-an ditandai oleh pertarungan ideologis untuk mencari dan menetapkan Dasar Negara bagi Indonesia merdeka. Aspirasi politik Muhammadiyah di era itu disalurkan lewat Partai Masyumi, karena memang Persyarikatan ini adalah salah pilar utamanya. Bulan September 1955 diselenggarakan Pemilu I untuk DPR dan bulan 1955 untuk Majelis Konstituante yang bertugas merumuskan UUD baru bagi Indonesia. Meskipun majelis ini telah merampungkan 90% dari tugasnya, masih ada 10% yang tersisa: pilihan tentang Dasar Negara: Pancasila atau Islam. Dalam perdebatan di majelis ini beberapa tokoh Muhammadiyah terlibat aktif, seperti Kahar Muzakir, Hamka, Hasbi Ashshiddiqy. Mereka dalam kapasitasnya masing-masing telah mengartikulasikan argumennya sebagai bagian dari kerja teologi politik Islam/Muhammadiyah.

Perdebatan menjadi demikian keras dan alot, tetapi tanpa pemenang. Akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 dengan membubarkan Majelis Konstituante dengan menyatakan UUD 1945 berlaku kembali menggantikan UUDS 1950. Dengan dekrit ini, cita-cita untuk memperjuangkan Islam sebagai Dasar Negara menghadapi jalan buntu.

⁹ *Ibid.*, hlm. 54.

¹⁰ *Ibid.*

Kegagalan memperjuangkan Dasar Islam di atas punya imbas langsung dalam perumusan AD Muhammadiyah sebagai hasil Muktamar Muhammadiyah ke-34 (Nop. 1959) di Jogjakarta. Sebelumnya selama 47 tahun Muhammadiyah tidak pernah mencantumkan dasar atau asas dalam AD-nya, maka sekarang pada Fasal 2, asas itu ditegaskan: "Persyarikatan berasaskan Islam."¹¹ Inilah untuk pertama kali Muhammadiyah mencantumkan asas dalam AD-nya sejak Persyarikatan ini didirikan Ahmad Dahlan pada 18 Nop. 1912. Rumusan maksud dan tujuan tidak mengalami perubahan sampai tahun 1985, saat Pancasila wajib dicantumkan. Berhadapan dengan kondisi riil politik yang tidak sehat, dalam Muktamar Muhammadiyah ke-41 di Surakarta (Desember 1985), asas dalam AD Fasal 2 diubah menjadi: "Persyarikatan ini berasaskan Pancasila."¹² Maksud dan tujuan Persyarikatan tidak lagi untuk "mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya", tetapi berubah menjadi "terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhai Allah Subhanahu wata'ala."¹³

Demikianlah siasat Muhammadiyah dalam mempertahankan identitasnya di era kemerdekaan dalam mengadangi fluktuasi politik yang tidak menentu. Pokoknya aspek teologi politik tidak boleh terpisah dari AD. Tidak hanya sampai di situ. Dalam AD 1985 Fasal 1:1 teologi politik itu dikuatkan lagi dengan perumusan: "Persyarikatan ini bernama MUHAMMADIYAH, adalah gerakan Islam dan Dakwah Amar Makruf Nahi Munkar, beraqidah Islam dan bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah."¹⁴ Muhammadiyah tampaknya kecewa sekali dengan dibuangnya Asas Islam yang sudah menjadi bagian dari identitasnya sejak 1959, seperti dikatakan di atas, sesuatu yang tidak menjadi perhatian Ahmad Dahlan dan pimpinan yang lain selama sekian puluh tahun.

Demikianlah perubahan politik kekuasaan jatuh dan naik. Di era reformasi dalam Muktamar Muhammadiyah ke-44 di Jakarta (Juli 2000), Asas Islam kembali dicantumkan, setelah absen sejak 1985. Dengan kembali ke Asas Islam, apakah gerak langkah Muhammadiyah mengalami perubahan yang fundamental? Kelihatannya juga tidak. Muhammadiyah tetap sebagai pembantu penting negara

¹¹ *Ibid.*, hlm. 67.

¹² *Ibid.*, hlm. 139.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

dalam urusan kemasyarakatan, pendidikan, dan kemanusiaan. Pertanyaan yang muncul setelah melalui satu abad perjalanannya, apakah Muhammadiyah akan tetap hanya sebagai pembantu negara, atau mau bergerak lebih jauh untuk juga sebagai penentu perjalanan negara Indonesia? Pilihan tergantung kepada pemikiran dan pertimbangan warga Persyarikatan.

Penutup

Muhammadiyah seperti yang telah dibicarakan di muka belum pernah secara sengaja mengartikulasikan konsepnya tentang teologi politik yang menjadi pokok bahasan dalam sesi ini. Dari sumber-sumber primer yang tersedia, kita hanya bisa menafsirkan beberapa sinyal dari teologi politik Muhammadiyah itu yang langsung atau tidak langsung bersentuhan dengan negara. []

Catatan Belakang

@ Makalah disampaikan pada seminar Pra-Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar, diselenggarakan oleh Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 25 April 2015)

Lih. Political Theology dalam *Wikipedia, the free encyclopedia*.

2 Muhammed Hashas, "Abdolkarim Soroush: The Neo-Mu'tazilite that Burries Classical Islamic Political Theology in Defence of Religious Democracy and Pluralism" dalam *Studia Islamica* 109 (2014), hlm. 149, catatan kaki no. 4.

Abul Hasan al-Mawardi, *Al-Ahkâm al-Sultâniyah*. Kairo 1881, hlm. 3. Karya ini ditulis pengarangnya di saat imperium 'Abbasiyah sedang digoyang oleh kelompok amir-amir Syi'ah al-Buwaihid.

Lih. Abdul Qawi al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, terj. Pipih Imran Nurtsani dan Fitri Nurhayati. Solo: Insan Kamil, 2012, hlm. 268, hadist no. 1194: "Lâ yazâlu hâdza al-amru fî quraisyin mâ baqiya mina al-nâsi istnâni."

Ibn Taimiyah, *Al-Siyâsa al-Shar'iyah*. Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Arabiya, 1966, hlm. 139.

A.J. Toynbee, *Civilization on Trial and the World and the West*. Cleaveland and New York: The World Publishing Company, 1963, hlm. 248.

Lih. Mh. Djaldan Badawi (ed), *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah, 1912-1985*. Jogjakarta: Sekretariat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1998, hlm. 1.

Ibid., hlm. 4.

Ibid., hlm. 54.

Ibid.

Ibid., hlm. 67.

Ibid., hlm. 139.

Ibid.

Ibid.

Seminar Pra Muktamar Muhammadiyah
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Sesi Reformulasi Ijtihad Politik Muhammadiyah
25 April 2015

Keharusan Tajdid Politik Muhammadiyah

Oleh : Bahtiar Effendy

Pendahuluan

Mungkinkah politik menjadi amal usaha Muhammadiyah --sebagaimana pendidikan dan kesehatan, atau ekonomi dan kebudayaan?

Pertanyaan ini barangkali akan dijawab secara negatif oleh sebagian besar warga Persyarikatan. Hal ini bukan karena para kader dan anggota organisasi berlambang Sang Surya itu alergi terhadap politik. Tidak pula mereka menghindar untuk berpolitik. Salah satu faktor mengapa jawaban terhadap pertanyaan di atas cenderung bersifat negatif adalah karena keberhasilan luar biasa organisasi di bidang pendidikan dan kesehatan di satu pihak, dan belum adanya bukti yang nyata bahwa politik membawa manfaat bagi Muhammadiyah di pihak lain. Bahkan telah berkembang luas pendapat yang mengatakan bahwa politik justru berpotensi membahayakan atau mengganggu amal usaha yang selama ini ditekuni Muhammadiyah --yakni masalah pendidikan dan kesehatan.

Meski demikian, tetap saja para anggota dan kader Muhammadiyah tidak mampu atau tidak siap untuk sama sekali memisahkan diri dari politik. Tidak bisa mereka itu acuh terhadap persoalan-persoalan politik, walaupun hal tersebut berada pada tataran --meminjam istilah yang dulu pernah dipopulerkan oleh M. Amien Rais-- *low politics* atau *partisan politics*. Hemat saya seminar pra-Muktamar Muhammadiyah ini dengan judul, "Reformulasi Ijtihad Politik Muhammadiyah," pun dengan jelas menunjukkan bahwa Muhammadiyah, sebagaimana organisasi sosial-keagamaan lain, tak bisa jauh dari kehidupan politik.

Kegamangan dan ambiguitas seperti ini telah menyebabkan pimpinan Muhammadiyah mengambil sikap defensif yang tak pernah bakal bisa direalisasikan

dalam kehidupan nyata. Sikap itu adalah bahwa Muhammadiyah mengambil jarak atau kedekatan yang sama dengan kekuatan-kekuatan politik.

Kembali harus ditegaskan bahwa sikap seperti ini bukan tanpa konteks, dan bukan pula bebas dari pengaruh sejarah politik, khususnya politik Islam di Indonesia. Keterlibatan Muhammadiyah, setidaknya para tokoh dan pemimpinnya, di Sarekat Islam, Masyumi, dan mungkin juga di Parmusi yang kemudian menjadi salah satu unsur penting dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP), untuk sebagian besar telah menorehkan kegetiran atau pengalaman buruk, di mana mereka kurang dihargai secara politik, dan bahkan ada yang pernah dikeluarkan atau dikudeta dari kepemimpinan organisasi atau partai politik. Berdirinya Partai Amanat Nasional (PAN), yang tak lain adalah ijtihad politik Amin Rais (dan Muhammadiyah), yang awalnya diharapkan bakal mencatatkan cerita keberhasilan Muhammadiyah di dunia politik, tidak juga meyakinkan Muhammadiyah bahwa politik perlu dipertimbangkan secara sungguh-sungguh sebagai sebuah amal usaha Persyarikatan.

Saya tidak sedang menawarkan gagasan bahwa Muhammadiyah hendaknya mendirikan sebuah partai politik. Saya hanya ingin berpendapat bahwa ijtihad politik Muhammadiyah senantiasa perlu diperbaharui, dirumuskan kembali mengingat tak terhindarinya warga Muhammadiyah untuk tidak berpolitik. Ambiguitas organisasi dalam berpolitik hanya akan menimbulkan kebingungan tidak saja para anggota organisasi tetapi juga pemimpinnya. Lebih-lebih ketika politik berada di alam demokrasi, sebagaimana keadaan Indonesia satu setengah dasawarsa terakhir ini, tak dapat dihindari format yang lebih sesuai bagi Muhammadiyah sangat diperlukan. Para pemimpin Muhammadiyah bisa saja berhelah bahwa posisi politik Muhammadiyah sudah sangat jelas dan tegas --dengan mengusung semboyan Muhammadiyah tidak kemana-mana, tetapi Muhammadiyah ada di mana-mana.

Padahal, kita semua mafhum bahwa sikap menjaga jarak atau kedekatan yang sama dengan kekuatan politik yang ada, dan mimpi untuk menjadi *omnipresent* (i.e Muhammadiyah ada di mana-mana) dalam kaitannya dengan organisasi sosial politik yang ada, merupakan sesuatu yang mustahil diwujudkan. Muhammadiyah tidak mungkin berdekatan-dekat dengan Partai Damai Sejahtera (PDS). Tidak mungkin pula Muhammadiyah memiliki ikatan emosional yang sama dalam menciptakan jarak atau kedekatan dengan PAN vis-a-vis PKB.

Merumuskan posisi politik Muhammadiyah di Indonesia bukanlah perkara mudah. Setiap pemimpin Muhammadiyah dituntut untuk merumuskan pemikiran yang tepat demi kemaslahatan organisasi, anggota, dan mereka yang sudah terlanjur berharap banyak kepadanya.

Untuk itu saya ingin mengajak kita semua mempertimbangkan kembali "kisar-kisar" perjalanan Muhammadiyah dari sudut pandang politik. Hal ini perlu agar kita dapat belajar dari sejarah, memperoleh bekal yang cukup untuk merumuskan kembali ijtihad politik Muhammadiyah.

Pandangan Dasar Muhammadiyah

Ketika Muhammadiyah dilahirkan 100 tahun yang lalu, saya kira yang dipikirkan oleh KH Ahmad Dahlan adalah sesuatu yang sangat sederhana. Jika diletakkan dalam perspektif agama, maka yang menjadi perhatian beliau adalah bagaimana orang Islam Indonesia bisa mengamalkan ajaran agamanya dengan baik dan benar. Dengan demikian, klaim bahwa Islam adalah rahmat bagi sekalian alam dapat diwujudkan dalam kehidupan nyata. Jargon pembaharuan, tajdid, dan purifikasi hanyalah sesuatu yang dilekatkan belakangan sebagai tafsir-identitas (*defining factor*) atas apa yang dilakukan oleh organisasi ini.

Akan tetapi, niat dan motivasi yang tampaknya sederhana ini di dalam sejarah perwujudannya mengalami proses diversifikasi yang luar biasa. Beragama dengan benar dan baik itu, apalagi jika diletakkan dalam konteks Islam sebagai rahmat bagi sekalian alam, ternyata luas sekali cakupannya. Karena itu, Kyai Dahlan dan para penerusnya memasukkan banyak hal di dalamnya, meliputi masalah sosial, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, dan juga politik.

Oleh Kyai Dahlan, mengayomi dan memelihara anak yatim diyakini sebagai bagian dari tindak kewajiban keagamaan. Hal ini bukan sesuatu yang mengada-ada, sebab Al-Qur'an dengan jelas memerintahkan amar tersebut. Dengan kata lain, jika kita mau ber-Islam secara benar dan baik, jika kita ingin melihat Islam bermanfaat bagi semua, maka kita tidak boleh menghardik anak yatim; kita tidak diperkenankan -- bahkan dilarang-- untuk memakan harta fakir-miskin; dan sebagai kelanjutannya kita harus memperlakukan anak-anak yatim dan komunitas fakir-miskin dengan baik.

Untuk bisa ber-Islam dengan benar dan baik diperlukan pendidikan. Sebab hanya dengan proses belajar-mengajar ini apa yang dipersepsi sebagai Islam yang benar dan baik bisa ditanamkan kepada umatnya. Demikian pula, agar umat Islam bisa menjalankan agamanya secara baik dan benar, mereka harus memiliki sumberdaya atau modal yang cukup. Kewajiban untuk melaksanakan ibadah ritual (*mahdhah*) seperti sembahyang, puasa, membayar zakat, bersedekah, atau naik haji dalam kenyataannya memerlukan pembiayaan yang tidak sedikit. Begitu juga dengan pelaksanaan ibadah non-ritual (*ghaeru mahdhah*). Pelaksanaan perintah untuk bertetangga dengan baik -- baik dalam konteks individual, komunal, dan bahkan internasional-- hingga mempraktikkan doktrin amar makruf nahi munkar juga membutuhkan biaya. Pendeknya, ber-Islam itu tidak lepas dari hukum besi "*jer basuki mowo beo*". Tidak ada yang gratis dalam hidup ini. Semuanya harus ada biaya atau sumberdaya yang menopang seseorang di dalam mewujudkan cita-citanya.

Kyai Dahlan dan para pemimpin Muhammadiyah lainnya memahami betul hal ini. Karena itu Muhammadiyah menciptakan berbagai sarana untuk mendatangkan sumberdaya. Dengan segala keterbatasan yang ada, organisasi ini mendirikan berbagai lembaga yatim-piatu; membikin klinik kesehatan; mendirikan lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Selain, tentu saja, juga mendakwahkan Islam.

Ketika kegiatan politik nasional mulai semakin diperlukan, kader-kader Muhammadiyah terlibat di dalamnya --meskipun dalam kapasitas individual. Mas Mansyur yang mendirikan Partai Islam Indonesia, Ki Bagus Hadikusumo yang aktif di BPUPKI, dan Kasman Singodimedjo merupakan pioner-pioner Muhammadiyah dalam berpolitik. Meski demikian, termasuk ketika masih menjadi anggota istimewa partai Islam Masyumi, organisasi ini tidak pernah menjadikan politik sebagai titik-tekan amal usahanya. Sepertinya, Muhammadiyah tidak memiliki passion, kegairahan dan semangat yang sungguh-sungguh untuk menggeluti bidang yang satu ini.

Dalam konteks sejarah berdirinya, amal usaha itu merupakan turunan atau konsekuensi logis dari tekad untuk melaksanakan niat dan motivasi yang sederhana di atas. Bidang-bidang garapan itulah yang kemudian ditekuni sebagai amal usaha Muhammadiyah. Benar bahwa niat dan motivasi Muhammadiyah adalah agar orang Islam bisa menjalankan ajaran agamanya dengan benar dan baik. Pertanyaannya

kemudian, mengapa bentuk konkretisasi dari niat di atas adalah membangun rumah yatim piatu, mendirikan rumah sakit, membangun lembaga pendidikan, dan sebagainya?

Lingkungan Penjajahan

Pelbagai jawaban bisa diberikan terhadap pertanyaan di atas. Dalam tulisan ini, saya hanya ingin meletakkan jawaban atas pertanyaan di atas dalam perspektif lingkungan atau situasi langsung yang dihadapi Muhammadiyah, sehingga bentuk konkret dari realisasi niat dan motivasi di atas mengambil bentuk amal usaha seperti itu.

Seperti diketahui, Muhammadiyah lahir tidak dalam situasi kosong. Ketika organisasi ini didirikan pada 1912, Indonesia masih merupakan daerah jajahan. Belanda masih menguasai Nusantara meski pada tahapan sejarah yang menuju akhir. Di awal abad kedua puluh itu kesadaran nasional mulai bangkit secara lebih sistematis, yang bermuara pada sebuah keyakinan bahwa kolonialisme harus segera diusir. Fajar nasionalisme yang mulai menyingsing yang ditandai oleh munculnya berbagai organisasi sosial-keagamaan-politik yang membersitkan tekad untuk lepas dari belenggu kolonialisme. Boedi Oetomo (1908) dan Sarekat Islam (1911) adalah pionir dari gerakan ini yang kemudian mengilhami atau menginspirasi munculnya organisasi sosial-politik dan tokoh-tokoh pergerakan sejak daswarsa 1920-an hingga 1940-an.

Penjajahan panjang telah menyebabkan situasi sosial-ekonomi dan politik yang buruk bagi rakyat Nusantara. Menjadi warga terjajah telah menggerus harkat dan martabat kemanusiaan rakyat kebanyakan. Benar bahwa akibat-akibat sosial, ekonomi, pendidikan, dan politik yang disebabkan oleh penjajahan merupakan masalah yang harus ditangani. Akan tetapi, keterpanggilan seorang Ahmad Dahlan sebagai tokoh agama, sebagai da'i, barangkali memang lebih diletakkan dalam konteks sosial-keagamaan --dan bukan kekuasaan. Dalam pandangannya, masyarakat yang lapar, rakyat yang bodoh, umat yang kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan, merupakan persoalan yang lebih nyata, konkret, dan mendesak untuk ditangani daripada orang yang tidak berkuasa.

Inilah lingkungan yang dihadapi Muhammadiyah. Lingkungan ini pulalah yang sedikit banyaknya mempengaruhi bidang garapan atau amal usaha Persyarikatan. Dalam konteks ini, sebagaimana luas dicatat, Muhammadiyah telah menorehkan sejarahnya dengan baik. Setidaknya, organisasi ini telah ikut menyadarkan umat Islam akan

pentingnya menolong rakyat kecil, para yatim, dan dzu'afa. Demikian pula, Muhammadiyah telah ikut mendorong orang-orang Islam untuk memperhatikan bidang pendidikan dan kesehatan. Bahkan, Muhammadiyah dianggap sebagai pioner pendidikan moderen --di luar negara.

Lingkungan Kemerdekaan

Berubahkah amal usaha Muhammadiyah setelah Indonesia merdeka?

Lingkungan kemerdekaan berbeda dengan lingkungan kolonial. Kemerdekaan telah membuat keadaan berubah. Sekurang-kurangnya, Nusantara tidak lagi merupakan koloni atau kawasan terjajah. Lenyapnya kolonialisme Belanda telah memungkinkan rakyat dan pemimpin Republik mengelola sendiri persoalan-persoalan sosial-budaya, ekonomi, dan politik mereka. Seperti dipercaya oleh Soekarno, kemerdekaan merupakan jembatan emas bagi kemakmuran, kejayaan, kesejahteraan, dan harkat-kehormatan Indonesia.

Meski demikian, masalah bukan berarti tidak ada. Sampai tingkat tertentu, lingkungan yang dihadapi Muhammadiyah --dan rakyat Indonesia pada umumnya-- ternyata lebih pelik. Jika pada periode sebelum merdeka musuh yang hendak diperangi jelas sosoknya, di sepanjang sejarah Indonesia merdeka yang sudah 70 tahun itu, apa yang harus dilawan dan dengan cara apa melumpuhkannya seringkali tidak jelas dan rumit. Bukankah kenyataan bahwa 87 persen penduduk Indonesia beragama Islam menyiratkan asumsi bahwa sebagian besar persoalan bermuara pada atau berkaitan dengan orang Islam?

Ketika kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, apa yang sekarang ini kita saksikan, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, sebagian besar belum ada. Lima tahun pertama setelah proklamasi kemerdekaan, negeri ini masih diliputi suasana revolusi. Dari pertengahan 1945 sampai akhir 1949, Indonesia disibukkan oleh berbagai peristiwa yang lahir dari sesuatu yang sebenarnya bertolak-belakang: keinginan Belanda untuk kembali menjajah di satu pihak, dan tekad bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan di pihak lain.

Dalam situasi seperti itu, tidak ada yang lebih penting bagi Indonesia kecuali berjuang untuk mempertahankan eksistensinya sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Hal-hal yang berkaitan dengan tugas atau fungsi dasar negara, termasuk

menciptakan stabilitas-keamanan dan menyejahterakan rakyat, terpaksa dinomorduakan. Seluruh perhatian dan enersi dimobilisasi untuk mengusir penjajahan. Dan hanya dengan tekad "merdeka atau mati," sebagaimana tertulis di banyak tembok pada waktu itu, pengakuan kemerdekaan dan pelimpahan kekuasaan dapat diperoleh.

Suasana cukup melegakan setelah Belanda pergi pada 1949. Namun, hal itu tidak lantas membuat segala sesuatu lebih mudah. Usaha bina-negara (*state-crafting*) yang dilakukan oleh para pendiri republik ternyata bukan perkara gampang. Ideologi negara dan undang-undang dasar memang sudah dirumuskan sejak pertengahan 1945 -- beberapa bulan sebelum Indonesia merdeka. Meski demikian, untuk membuat keduanya diterima sebagai pijakan bersama, sebagai konsensus ideologis dan politis nasional, kesepakatan antar elite yang lebih luas diperlukan.

Melalui pemilu pertama yang diselenggarakan pada 1955, lembaga untuk membicarakan ideologi negara dan undang-undang dasar dibentuk, yang diberi nama Dewan Konstituante. Kurang lebih tiga tahun Konstituante bekerja keras. Sayangnya, tugas utama untuk merumuskan dasar negara dan konstitusi tak dapat diselesaikan. Pembilahan ideologis yang tak terjembatani antara mereka yang menginginkan Islam atau Pancasila sebagai dasar negara menyebabkan sidang Konstituante mengalami kebuntuan (*deadlock*). Kenyataan ini dijadikan alasan oleh Soekarno, dengan dukungan tentara, untuk mengeluarkan dekrit pada Juni 1959. Peristiwa itu mengembalikan kedudukan Pancasila dan UUD 1945 sebagai ideologi dan konstitusi negara.

Berakhirnya perdebatan ideologis ini mestinya menjadi momentum di mana negara bisa menjalankan fungsi dasarnya secara lebih fokus. Seperti diisyaratkan di atas, selama satu dasawarsa setelah proklamasi kemerdekaan diakui dan pemindahan kekuasaan terjadi (1949-1959), perhatian elite politik kita, terutama yang ada di eksekutif maupun legislatif, lebih diarahkan untuk merumuskan hal-hal yang bersifat *state-crafting*. Ini dimaksudkan agar aturan-aturan dasar bernegara tertata terlebih dahulu. Sebagai akibat, agenda-agenda pembangunan yang lebih konkrit, yang lebih mencerminkan kehendak atau kebutuhan rakyat, banyak yang tidak bisa diwujudkan. Pemenuhan terhadap hal-hal yang menjadi kebutuhan dasar publik seperti sandang, papan, dan pangan banyak yang terbengkalai.

Apa mau dikata, periode paska berakhirnya pergolakan ideologis ini belum juga ditandai oleh kegiatan-kegiatan pembangunan yang lebih bersifat tangible dan "non-

politis." Alih-alih, negara justru tetap menjadi ajang rivalitas politik kekuasaan (*power politics*), yang untuk periode ini melibatkan Presiden Soekarno, tentara, dan partai politik --khususnya PKI.

Sementara itu, apa yang dilakukan Soekarno tidak banyak membantu pelaksanaan agenda untuk menyejahterakan rakyat. Sebagai kepala negara, dan terutama tokoh yang paling berpengaruh, Soekarno lebih memosisikan diri sebagai solidarity-maker. Melalui pidato-pidato yang menggelegar tentang banyak hal -- nasakom, manipol-usdek, nekolim, *new emerging forces*, gotong royong, marhaenisme dan sebagainya-- ia hanya ingin meyakinkan publik bahwa perjuangan untuk mewujudkan cita-cita Indonesia masih panjang. Karenanya revolusi --apapun itu artinya-- harus tetap digelorakan.

Meskipun Indonesia telah merdeka, kemerdekaan itu hanyalah sekedar "jembatan emas." Sementara itu, kekuatan neo-kolonialisme tetap mengancam. Karena itu, menurut Soekarno, cita-cita Indonesia harus diperjuangkan secara revolusioner. Rakyat Indonesia harus bersatu, harus berani hidup meskipun dengan menyerempet-nyerempet bahaya --*vivere peri coloso*.

Sebagai tokoh dengan pengalaman panjang dalam memerangi penindasan dan ke-tidak-adilan, sebagai orator yang sangat percaya akan kekuatan kata, tema-tema di atas membuat Soekarno terpana. Namun, pada waktu yang sama, ia abai --atau setidaknya kurang tertarik-- terhadap tanggung-jawabnya sebagai administrator pemerintahan yang juga harus mengurus soal-soal yang bersifat teknis dan "non-politis." Di tambah dengan kecenderungan politik yang autarkik, semua itu menyebabkan proyek stabilitas politik dan pembangunan ekonomi tertatih-tatih.

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika akhir pemerintahan Soekarno ditandai dengan pendapatan per kapita yang hanya US \$ 80 dolar, dan inflasi yang mencapai 650 persen. Buruknya kondisi ekonomi ini dilukiskan oleh Anwar Nasution dengan kalimat: "*production and trade were stagnant, economic infrastructure in disrepair, public administration had deteriorated, and foreign debts were mounting*".

Ini semua menunjukkan bahwa, sampai pemerintahan Soekarno jatuh pada 1966, negara belum berfungsi sebagai agen pembangunan yang sistematis dan terencana. Kecuali kenyataan sejarah bahwa Indonesia telah menjadi bangsa merdeka, tak banyak yang secara material dapat dinikmati oleh rakyat.

Pemerintahan Orde Baru yang lahir pada 1966 dimaksudkan sebagai panacea terhadap situasi sosial- ekonomi dan politik masa-masa sebelumnya. Dalam pandangan Presiden Soeharto, pemerintah perlu menciptakan stabilitas-keamanan. Dengan itu, diharapkan situasi menjadi lebih kondusif untuk membangun. Dalam konteks ini, dua kebijakan penting segera diambil: restrukturisasi kehidupan politik dan mendatangkan investasi --termasuk utang.

Dalam banyak hal, keinginan pemerintah untuk mewujudkan dua cita-cita dasar, yaitu stabilitas-keamanan dan pembangunan ekonomi boleh dikatakan cukup berhasil. Inilah periode di mana Indonesia mulai membangun dalam pengertian yang sebenarnya. Jalan, jembatan, dam, dan infrastruktur ekonomi lain seperti pelabuhan, lapangan terbang, mulai dibangun. Dengan kebijakan ekonomi yang sesuai serta didukung oleh ketersediaan sumberdaya alam yang melimpah, khususnya minyak, batubara, kayu dan lain sebagainya, antara pertengahan 1970an sampai awal 1990an Indonesia mengalami pertumbuhan rata-rata 7 persen. Karenanya wajar jika pada 1996 pendapatan per kapita mencapai US \$ 1,120, dengan PDB hampir Rp. 400 triliun. Angka-angka ini membuat Bank Dunia menganggap Indonesia sebagai anak emas dan calon negara industri baru -- sebanding dengan Malaysia dan Thailand.

Meski demikian, capaian-capaian itu harus dibayar mahal dengan hilangnya kebebasan publik. Tiga piramida kekuasaan yang terdiri dari Soeharto, tentara, dan Golkar telah membuat politik dan ekonomi menjadi kemewahan yang hanya dinikmati oleh kalangan terbatas. Partisipasi hanya dimungkinkan sepanjang mengikuti apa yang didektekan oleh tiga pilar kekuasaan di atas.

Inilah antara lain yang menyokong krisis 1997, yang memuncak dan menimbulkan implikasi luas pada 1998, yang menyebabkan mundurnya Presiden Soeharto dari tampuk kekuasaan yang pernah digenggamnya selama 32 tahun. Inilah masa di mana kita semua kembali pada titik awal --meskipun bukan tanpa modal dan pengalaman yang memadai-- untuk menata kehidupan sosial, ekonomi, politik, hukum dan lain sebagainya. Mirip dengan suasana tahun-tahun pertama paska kemerdekaan, kita dituntut untuk merumuskan kembali cita-cita kemerdekaan dan dengan cara apa hal tersebut dapat dicapai dengan baik.

Konsistensi Muhammadiyah

Jika bacaan saya terhadap sejarah Muhammadiyah paska kemerdekaan benar, maka sesungguhnya organisasi ini tidak banyak berubah. Apa yang dilakukannya sekarang merupakan kelanjutan dari hal-hal yang sudah dilaksanakan di tahun-tahun pertama berdirinya, yang menekankan amal usahanya di bidang pendidikan, kesehatan, menyantuni anak yatim dan sebagainya.

Hal yang membedakan hanyalah kedalaman, keluasaan, dan cakupan amal usaha tersebut. Dengan kata lain, hanya kualitas dan kuantitas amal usaha Persyarikatan saja yang berubah. Di sepanjang tujuh dasawarsa Indonesia merdeka, lebih-lebih selama tiga dasawarsa pemerintahan Orde Baru, tak pernah Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi tergoda untuk melakukan diversifikasi amal usaha yang berbeda dengan ciri dasarnya sebagai organisasi sosial-keagamaan. Tetap saja yang menjadi bidang garapan utama adalah masalah sosial-keagamaan, dengan amal usaha di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi umat. Tercatat, tak kurang Muhammadiyah memiliki 17.268 lembaga pendidikan dari sekolah usia dini, taman kanak-kanak, sekolah dasar hingga perguruan tinggi; 284 pusat-pusat kesehatan seperti poliklinik dan rumah sakit; 508 panti asuhan dan panti jompo; 565 baitul mal wat tamwil serta lembaga keuangan mikro.

Dapat dipastikan ini adalah bentuk amal usaha yang luar biasa besarnya -- mungkin terbesar di luar negara. Mengingat keterbatasan negara dalam melayani kebutuhan publik di bidang pendidikan dan kesehatan, ribuan lembaga pendidikan dan ratusan pusat-pusat kesehatan yang dimiliki Muhammadiyah, sumbangsih yang telah diabdikan merupakan bentuk konkrit dari peran suplementer dan komplementer organisasi terhadap kesejahteraan, peradaban, dan kebangsaan Indonesia.

Pertanyaanya adalah dengan reputasi sebagai organisasi pembaharu (*tajdid*) yang berorientasi pada kemajuan, akankah Muhammadiyah tergerak untuk melakukan terobosan-terobosan baru memasuki abad keduanya? Atau justru organisasi ini telah merasa nyaman dengan amal usaha yang diraihinya secara spektakuler? Apakah lingkungan yang dihadapi pada abad kedua ini dianggap sama dengan ketika Muhammadiyah lahir dan kemudian berkembang? Akankah Muhammadiyah tetap -- atau hanya-- menggeluti bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ekonomi umat?

Barangkali banyak hal baru yang bisa dilakukan Muhammadiyah di dalam memasuki abad keduanya. Jika merujuk pada karya sejarahnya lima dasawarsa terakhir ini adalah reformulasi ijtihad politik atau menjadikan politik sebagai amal usahanya merupakan salah satu hal yang perlu segera dilakukan.

Pada tahap sekarang substansi keterlibatan Muhammadiyah di bidang politik belum terlalu penting untuk segera dirumuskan. Yang lebih mendesak untuk dilakukan adalah membangun kesadaran kolektif warga Muhammadiyah bahwa politik itu sama mulianya dengan pendidikan dan kesehatan. Tanpa sikap seperti ini, substansi apapun dalam kaitannya dengan masalah politik hanya akan mendatangkan perdebatan panjang tanpa mampu menghasilkan keputusan yang tidak bersifat helah. Termasuk di dalam kesadaran kolektif ini adalah pemahaman bahwa berpolitik itu tidak identik dengan mendirikan partai politik --walaupun bukan berarti tidak boleh.

Penutup

Konsistensi itu penting. Mempertahankan yang lama dan baik adalah kewajiban. Namun demikian kesediaan untuk bertajdid terhadap hal-hal baru yang lebih baik dan lebih relevan adalah tanda kehidupan yang progresif --yang berkemajuan.

Semangat inilah mungkin yang belum dikelola dengan baik oleh Muhammadiyah. Kehadirannya di dalam ranah kemanusiaan dan peradaban Indonesia hanya dipusatkan pada pendidikan, kesehatan, dan perekonomian umat. Tak sedikitpun organisasi ini memperlihatkan keinginan, tekad, dan kerja yang sungguh-sungguh dan solid untuk mendiversifikasi amal usahanya. Organisasi ini gamang untuk bergerak melampaui bidang-bidang konvensional yang digelutinya selama ini.

Itulah mengapa soal politik --misalnya-- menjadi sesuatu yang problematik bagi Muhammadiyah. Organisasi ini memiliki banyak kader yang mempunyai panggilan (*calling, beruf*) di bidang politik. Akan tetapi, Muhammadiyah belum mampu mengelolanya dengan baik panggilan politik yang dimiliki warganya. Energi yang berlebih di bidang ini tak tertangani secara sinergis. Dengan begitu, alih-alih politik mendatangkan manfaat bagi organisasi, yang sering muncul justru konflik dan beda kepentingan yang diakibatkan oleh pesebaran atau pembiaran anggota Muhammadiyah di organisasi-organisasi politik yang ada. Bahkan dalam konteks apa yang sering disebut oleh para pemimpin Muhammadiyah, yang "non-politik" pun --yaitu bahwa

Persayarikatan ini hanya melibatkan diri dalam politik amar makruf nahi munkar atau politik kenegaraan dan bukan dalam politik kepartaian, partisan, atau praktis-- sering tidak memiliki kesatuan sikap dan pandangan!

Pengalaman Muhammadiyah ini dalam banyak hal merupakan cermin dari politik umat Islam Indonesia yang selalu terbelah, terfragmentasikan, dan tidak sinerjik. Inilah salah satu alasan mengapa politik umat Islam --mungkin juga politik Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan lain sebagainya-- tak pernah mencatatkan sesuatu yang membanggakan.

Termasuk dalam hal ini adalah kenyataan bahwa kita semua merasa lebih bangga menjadi orang Indonesia daripada orang Islam. Betul bahwa antara Islam dan Indonesia bukanlah sesuatu yang bisa --apalagi harus-- dipertentangkan. Akan tetapi, dalam realitas kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan lebih-lebih lagi politik, sehari-hari diskordansi di antara keduanya sering muncul. Dan kita sering merasa lebih terhormat, akan lebih dihargai orang lain, dan bakal dianggap toleran jika kita "mengenyampingkan" Islam dan menomor-satukan Indonesia.

Inilah masalah politik Indonesia yang sampai kini masih tidak terselesaikan dengan tuntas. Bagian-bagian tertentu dari ketegangan antara ke-Islaman dan ke-Indonesiaan yang di masa Orde Baru dianggap telah selesai segera muncul kembali begitu sistem yang menopangnya rontok.

Saya tidak mengharuskan Muhammadiyah untuk mendirikan partai politik. Tetapi hal yang ingin ditekankan di sini adalah kesediaan untuk terus bertajdid, memperbaharui diri, dan tidak menghindar dari masalah. Di luar persoalan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi umat, yang sebenarnya masih tetap problematis hingga kini, politik juga merupakan salah satu sumber masalah yang hingga kini belum terselesaikan. Muhammadiyah tidak harus menyelesaikan semua masalah. Akan tetapi, kenyataan bahwa warga Muhammadiyah --bahkan para pemimpin Muhammadiyah-- banyak juga yang terpanggil untuk ikut berpolitik, adalah kewajiban organisasi untuk mengelolanya dengan baik. Selama ini, Muhammadiyah sebagai organisasi lebih menonjolkan sikap yang secara substantif menghindar dan mengelak daripada menyelesaikan.

MELETAKKAN MUHAMMADIYAH DALAM DINAMIKA POLITIK : Upaya Merumuskan Kembali Ijtihad Politik Muhammadiyah¹

Oleh Hajriyanto Y. Thohari²

SAYA, meski tidak lagi menjadi salah satu anggota PP Muhammadiyah, masih banyak diundang dalam forum-forum Muhammadiyah, baik tingkat pusat, wilayah, dan daerah, maupun cabang dan ranting; baik Muhammadiyah maupun ortom-ortomnya. Mungkin karena saya dipandang sebagai tokoh Muhammadiyah yang pernah dipercaya menjadi Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah (1993-1998) dan Sekretaris Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah (2000-2005) melalui jalur tambahan Hal yang terakhir ini penting saya kemukakan oleh karena saat menjadi Anggota PP Muhammadiyah tersebut saya merangkap sebagai pengurus DPP Partai Golkar dan anggota DPR RI. Walhasil saya masih sangat banyak terlibat dan berinteraksi dengan warga Muhammadiyah: masih merasakan denyut jantung gerakan dengan baik.

Dalam berbagai forum tersebut saya menangkap kesan, bahkan lebih dari sekadar kesan, mungkin kesimpulan, bahwa warga Muhammadiyah cenderung negatif dan pesimis, dan tidak fair, atau bersikap ambivalen, dalam memandang dunia politik. Intinya politik itu tidak begitu baik, tidak begitu positif bagi Muhammadiyah: dikatakan akan mengalihkan perhatian warga Muhammadiyah dari dakwah atau kerja-kerja kemanusiaan besar yang digeluti selama ini.

Politik itu, demikian kesan saya, cuma lahan baru dan instan untuk lompatan dan mobilitas vertikal para kader saja, politik itu glamour dan cuma soal bagaimana enakunya menjadi pejabat. Bahkan ada yang secara sinikal mengatakan "**lihat itu** kader yang dulu bukan apa-apa sekarang menjadi parlente, sementara amal usaha bisa terabaikan, tidak ada manfaatnya bagi gerakan, dan sebagainya. ToR-ToR seminar dan diskusi yang dibuat oleh beberapa majelis pun seringkali nadanya seperti itu. Sebaiknya politik Muhammadiyah itu maksimal adalah *high politics* saja seperti yang dulu dilakukan Prof. Amien Rais ketika belum terjun ke dalam politik praktis.

¹ Makalah untuk Seminar Nasional "Muhammadiyah, Civil Society, dan Negara: Arah Pemikiran dan Gerakan Abad Kedua", kerjasama Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Panitia Pusat Mukhtamar Muhammadiyah ke-47", tanggal 25 April 2015, di Yogyakarta.

² Mantan Wakil Ketua MPR RI (2009-2014); mantan anggota DPR RI (empat periode, 1997-2014); mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah (1993-1998); mantan Wakil Sekretaris PP Muhammadiyah (2000-2005), Ketua Badan Pengurus LAZISMU (2005-2010 dan 2010-2015).

Ijtihad politik: sarat kekhawatiran

Secara normatif bagaimana hubungan antara Muhammadiyah dan politik sudah diatur secara jelas dan terang benderang dalam dokumen-dokumen resmi organisasi, mulai dari *Muqaddimah Anggaran dasar Muhammadiyah; Kepribadian Muhammadiyah; Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah; Khittah Perjuangan Muhammadiyah; Khittah dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara; dan Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah*, sampai dengan *Keputusan-Keputusan Muktamar dan Tanwir*. Kesemuanya itu telah membentuk sebuah khazanah yang sangat kaya dan komprehensif yang antara lain berisi ketentuan-ketentuan normatif mengenai Khittah Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, dakwah, dan *amar ma'ruf nahiy munkar*, yang bersifat nonpolitik³.

Di atas kertas pandangan Muhammadiyah terhadap politik kadang-kadang sangat positif dan optimis. Kalau kita membaca pada dokumen-dokumen resmi organisasi sepertinya Muhammadiyah memiliki pandangan yang bernada seperti itu. Dalam buku *Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah* di samping dituntunan (ada enam pokok tuntunan atau pedoman) bagaimana mestinya warga Muhammadiyah menjalankan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara, juga ada penegasan yang sangat mengesankan tentang politik:

Warga Muhammadiyah perlu mengambil bagian dan tidak boleh apatis (masa bodoh) dalam kehidupan politik melalui berbagai saluran secara positif sebagai wujud bermuamalah sebagaimana dalam bidang kehidupan lain dengan prinsip-prinsip etika/akhlak Islam dengan sebaik-baiknya dengan tujuan membangun masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.⁴

³ Lihat Haedar Nashir, *Muhammadiyah Gerakan Pembaruan* (Suara Muhammadiyah, Yogyakarta: 2010). Saya rasa sejauh menyangkut penjelasan khittah Muhammadiyah, buku ini sangatlah ensiklopedis.

⁴ Dalam *Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah* (hal 36-39) ada tuntunan bagaimana mestinya warga Muhammadiyah menjalankan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Ada enam pokok tuntunan atau pedoman: (1) Warga Muhammadiyah perlu mengambil bagian dan tidak boleh apatis (masa bodoh) dalam kehidupan politik melalui berbagai saluran secara positif sebagai wujud bermuamalah sebagaimana dalam bidang kehidupan lain dengan prinsip-prinsip etika/akhlak Islam dengan sebaik-baiknya dengan tujuan membangun masyarakat Islam yang sebenar-benarnya; (2) Beberapa prinsip dalam berpolitik harus ditegakkan dengan sejujur-jujurnya dan sungguh-sungguh yaitu menunaikan amanat dan tidak boleh mengkhianati amanat, menegakkan keadilan, hukum, dan kebenaran, ketaatan kepada pemimpin sejauh sejalan dengan perintah Allah dan Rasul, mengemban **risalah Islam, menunaikan amar ma'ruf, nahi munkar, dan mengajak orang untuk beriman** kepada Allah, mempedomani **Al-Qur'an dan Sunnah, mementingkan persatuan dan persaudaraan** umat manusia, menghormati kebebasan orang lain, menjauhi fitnah dan kerusakan, menghormati hak hidup orang lain, tidak berkhianat dan melakukan kezaliman, tidak mengambil hak orang lain, berlomba dalam kebaikan, bekerjasama dalam kebaikan dan ketaqwaan serta tidak bekerjasama (konspirasi) dalam melakukan dosa dan permusuhan, memelihara hubungan baik antara pemimpin dan warga, memelihara keselamatan umum, hidup berdampingan dengan baik dan damai, tidak melakukan fasad dan kemunkaran, mementingkan ukhuwah Islamiyah, dan prinsip-prinsip lainnya yang maslahat, ihsan, dan ishlah; (3) Berpolitik dalam dan demi kepentingan umat dan bangsa sebagai wujud ibadah

Dalam buku *Muhammadiyah Gerakan Pembaruan* (Yogyakarta: 2010), Dr Haedar Nashir menulis:

Khittah Muhammadiyah juga dapat dijadikan sebagai pagar pembatas agar naluri "**primitif**" (**syahwat politik**) **perseorangan untuk berkiprah dalam** perjuangan politik kekuasaan (*power struggle*) **atau disebut "politik praktis"** tidak menyeret-nyeret Muhammadiyah secara kelembagaan. Partai politik itu, sebagaimana juga kekuasaan negara, sangatlah penting dan strategis, termasuk untuk menegakkan dakwah Islam melalui tangan negara. Tetapi wilayah yang penting itu sengaja tidak dipilih oleh Muhammadiyah yang sejak kelahirannya telah memosisikan diri sebagai gerakan Islam nonpolitik dengan keyakinan bahwa dakwah di bidang pembangunan masyarakat pun tidak kalah penting dan strategisnya dengan perjuangan politik di jalur kekuasaan negara.

Dalam buku *Islam dan Dakwah: Pergumulan antara Nilai dan Realitas* (1998), buku resmi terbaik yang pernah diterbitkan oleh PP Muhammadiyah Majelis Tabligh, dapat ditemukan sebuah pandangan yang sangat positif dan optimis tentang politik dan kekuasaan, yang berbeda dengan pandangan-pandangan resmi organisasi yang lebih banyak dikutip seperti di muka, yang sebagian besar cenderung pesimis dan kurang positif itu, sebagai berikut:

Bagi seorang Muslim, kegiatan politik harus menjadi bagian integral dari kehidupannya yang utuh. Mengherankan kalau ada muslim yang menjauhi apalagi membenci kegiatan tertentu yang menentukan arah kehidupan dan nasibnya, misalnya menjauhi politik dan ekonomi. Kehidupan dunia harus direbut dan dikendalikan **agar sesuai dengan ajaran Tuhan" (hal 87). Dikatakan juga bahwa "suatu gerakan Islam yang bercorak sosio-keagamaan tidak boleh alergi terhadap politik. Wawasan keagamaannya justru harus menyatu dengan wawasan kekuasaan. Yang perlu dijaga adalah dan hanyalah bagaimana agar kita tidak terjebak oleh isu-isu politik praktis yang tidak menguntungkan. Berfikir strategis dalam rangka menatap masa depan yang agak jauh dari diri kita sekarang.⁵**

Walhasil, di satu sisi dikatakan politik itu sangat penting dan strategis, tetapi di sisi lain eksesnya sangat dikhawatirkan, kalau bukannya sangat

kepada Allah dan islah serta ihsan kepada sesama, dan jangan mengorbankan kepentingan yang lebih luas dan utama itu demi kepentingan diri sendiri dan kelompok yang sempit; (4) Para politisi Muhammadiyah berkewajiban menunjukkan keteladanan diri (*uswah hasanah*) yang jujur, benar, dan adil serta menjauhkan diri dari perilaku politik yang kotor, membawa fitnah, fasad (kerusakan), dan hanya mementingkan diri sendiri; (5) Berpolitik dengan kesalihan, sikap positif, dan memiliki cita-cita bagi terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dengan fungsi **amar ma'ruf dan nahi munkar yang tersistem dalam satu kesatuan imamah yang kokoh**; dan (6) Menggalang silaturahmi dan ukhuwah antar politisi dan kekuatan politik yang digerakkan oleh para politisi Muhammadiyah secara cerdas dan dewasa.

⁵ PP Muhammadiyah Majelis Tabligh, *Islam dan Dakwah: Pergumulan antara Nilai dan Realitas* (1998), hal. 90.

ditakuti. Dr. Haedar Nashir selanjutnya menggambarkan dengan nada getir kekhawatiran atau ketakutan tersebut sebagai berikut:

Muhammadiyah sungguh “kenyang” dengan hiruk pikuk dunia politik. Muhammadiyah merasakan betul betapa rumitnya bersentuhan dengan dunia politik. Sekali melibatkan diri dalam pergumulan politik kekuasaan, ketika itu pula centang-perentang dan konflik di dalam maupun keluar akan terjadi, yang pada akhirnya membuat gerakan Islam ini kehilangan kepribadian dan peran utamanya sebagai gerakan Islam yang menjalankan fungsi dakwah dan tajdid untuk menyebarkan Islam sebagai *rahmatan lil 'alamien* di muka bumi ini.⁶

Kekhawatiran atau bahkan ketakutan akan ekses-ekses politik tersebut di atas tentu terasa romantis dan sedikit sentimental jika diletakkan dalam konteks belantara politik praktis yang digambarkan sedemikian gelap dan pekat itu. Sebab, bagaimanapun juga politik itu, didefinisikan dari segi manapun juga, akhirnya berujung pada soal kekuasaan juga. (ingat ungkapan: *Who gets what, when, why, and how*). Dan untuk meraih itu pasti memerlukan perjuangan yang jalannya tidak mulus dan landai-landai saja, memerlukan setidaknya 45M (mind, mass, media, money), bahkan juga kontroversial. Ibnu Chaldun (1332-1406), bapak ilmu sosiologi, sendiri, dalam *magnum opus*-nya *Muqaddimah*, mengatakan:

Kedudukan sebagai raja adalah kedudukan yang terhormat dan diperebutkan, karena memberikan kepada orang yang memegang kedudukan itu segala kekayaan duniawi, dan juga kepuasan lahir dan batin yang luar biasa. Karena itu pula ia menjadi sasaran perebutan, dan jarang sekali dilepaskan dengan suka rela, sebaliknya, selalu di bawah paksaan. Perebutan membawa kepada perjuangan dan peperangan, dan runtuhnya singgasana-singgasana. Kesemuanya itu tidak bisa terjadi kalau tidak dengan solidaritas sosial.

Tentu tidak ada yang gratis dalam politik, *there is no free lunch!* Dalam politik tidak ada makan pisang berkubak. Dan dalam politik pula biasanya tidak bisa mendapatkanangka tanpa getahnya. Politik itu perebutan kekuasaan (secara fair dan sehat berdasarkan aturan main) yang mengharuskan peperangan atau perjuangan yang gigih yang, seperti kata Ibn Chaldun tadi, seringkali mengakibatkan renggangnya sendi-sendi kehidupan dan bahkan mungkin runtuhnya singgasana-singgasana.

Ijtihad politik Muhammadiyah: Apalagi?

Menurut saya rumusan ijtihad politik Muhammadiyah yang sudah ada yang sebagian dinukil di sini, meski terkesan ada aroma romantisme dan sentimentil, sangat lah baik, masih aktual dan relevan. Alhasil, sejauh soal rumusan khittah Muhammadiyah dalam politik persoalan ini sampai disini saya

⁶ Ibid, h. 250-251.

rasa memang sudah selesai. Tidak ada seorangpun warga atau aktivis Muhammadiyah yang menyatakan keinginannya untuk merubahnya dari Tanwir ke Tanwir, dari Mukhtamar ke Mukhtamar, termasuk juga dalam Mukhtamar ke-47 yang akan datang. Secara organisasional memang seperti itu ketentuannya. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang keliru. Dan itu sudah berjalan bertahun-tahun yang lalu.

Hanya saja fakta di lapangan menunjukkan bahwa implementasi atau penerapan atas ketentuan-ketentuan yang normatif tersebut sudah barang pasti sangat tidak sederhana dan tidak selalu paralel antara yang tertulis dan yang ternyata. Pertanyaannya disini adalah apakah pelaksanaannya atau implementasinya di lapangan semulus dengan rumusan yang normatif dan estetik itu? Dr. Alfian⁷ mengatakan:

Sebagai gerakan sosial besar yang terorganisasi terbaik di Indonesia, Muhammadiyah tampaknya tidak mampu menghindar untuk terlibat dalam politik. Ternyata, kadang-kadang, Muhammadiyah benar-benar bermain politik secara langsung dan terbuka. Pendek kata, Muhammadiyah berbeda sikap dengan yang dinyatakan dengan karakter nyatanya yang nonpolitik sebagaimana dirumuskan dalam dokumen-dokumen tersebut di atas.

Muhammadiyah selama ini, kata Dr. Alfian, memainkan tiga peranan yang saling terkait, yaitu, *pertama*, sebagai reformis keagamaan (antara lain melakukan gerakan memurnikan agama Islam dengan antara lain **memberantas takhayul, bid'ah**, dan khurafat, alias TBC); *kedua*, sebagai pelaku perubahan sosial (bertujuan memodernisasi umat Muslim Indonesia agar terangkat dari ketertinggalannya mencapai tempat terhormat di dunia moderen); dan *ketiga*, sebagai kekuatan politik.

Peran yang ketiga ini dapat dianalisis dari: *pertama*, pandangan filosofis Islam (anti sekulerisme atau pemisahan agama dan negara); dan *kedua*, perkembangan Muhammadiyah sebagai kelompok kepentingan besar dalam politik Indonesia. Tentu, seperti kata Dr. Alfian lagi:

Karena Muhammadiyah sebagai kelompok kepentingan merupakan gerakan yang nyata-nyata nonpolitik maka keterlibatannya sangat boleh jadi berbeda dengan keterlibatan organisasi-organisasi yang menjadikan politik sebagai profesinya. Sebagai organisasi nonpolitik tampaknya Muhammadiyah bila dimungkinkan, kapan saja, berupaya untuk tidak memainkan politik secara langsung dan terbuka (seperti dulu menyerahkannya pada SI, Masyumi, Parmusi, dan seterusnya sesuai dengan situasi baru politik Indonesia). Tipe-tipe logika situasional (baik lokal dan maupun nasional) inilah yang menentukan peran politik Muhammadiyah.

Ringkasnya, perkembangan Muhammadiyah sebagai kelompok kepentingan dengan tujuan-tujuan keagamaan dan sosialnya menunjukkan melalui berbagai cara bahwa ia benar-benar terlibat dalam politik, yang

⁷ *Islamic Modernism in Indonesian Politics, the Muhammadiyah Movement during the Dutch Colonial Period 1912-1942.*

kadang-kadang secara langsung dan terbuka. Karena itu, Muhammadiyah benar-benar tampak memiliki peranan ketiga sebagai salah satu kekuatan politik.

Parpol, multipartai, politik beaya tinggi

Kini memasuki abad kedua usianya, Muhammadiyah tidak pernah kehilangan *elan vital*-nya. Sebagai gerakan, Muhammadiyah terus melaju menuju cita-citanya untuk mewujudkan cetak biru (*blue print*) berdasarkan pandangan dunia (*worldview*)-nya. Kini setelah satu setengah dasawarsa reformasi Muhammadiyah memasuki era politik yang sama sekali baru sebagai logika situasional yang menentukan corak peran politiknya. Era baru politik dengan ciri-ciri: peran partai politik sangat sentral dan strategis; sistem multipartai; dan politik beaya tinggi. Ketiga ciri ini terkait satu sama lain. Berdasarkan pengalaman politik hampir dua dasawarsa dan setelah melalui permenungan mendalam, saya sampai pada kesimpulan bahwa reformulasi ijtihad politik Muhammadiyah harus berangkat dari ketiga ciri tersebut.

Hal ini perlu mendapatkan penekanan oleh karena tidak banyak warga dan kader Muhammadiyah siap menghadapi era baru seperti itu. Bahkan untuk yang paling elementer sekalipun, seperti multipartai. Warga Muhammadiyah belum bisa sepaham dengan (Dr. Yusuf Qardawi, *al Fatawa Jilid 3*).⁸ atau Dr. Fahmi Huwaidy (Mizan, 1996)⁹ bahwa multipartai itu sebanding saja dengan multi madzhab dalam fiqh. Artinya, jika dalam fiqh ada multi madzhab maka dalam politik ada fenomena multi partai. Walhasil, jika dalam fiqh orang bisa menerima kenyataan banyaknya madzhab, maka dalam politik harus juga bisa menerima banyaknya partai politik. Fatalnya, di negeri ini, bahkan mungkin di kalangan Muhammadiyah, perbedaan partai dipandang sebagai bukan hanya sekedar perbedaan politik (*political opponent*), bahkan musuh politik (*political enemy*). Sikap dan cara pandang warga Muhammadiyah terhadap multipartai kurang cair. Masih ada nuansa sakral dalam memandang keanekaragaman partai politik. Muhammadiyah kurang santai memandang fenomena politik multipartai.

Politik beaya tinggi adalah kenyataan dunia politik Indonesia pasca demokrasi langsung dan deliberatif sekarang ini yang harus menjadi bahan pertimbangan dalam reformulasi ijtihad politik Muhammadiyah di awal abad kedua usianya ini. Hal ini tidak perlu saya menjelaskan kecenderungan politik beaya tinggi sekarang ini. Namun, yang pasti dalam kehidupan politik Indonesia sekarang ini bukan hanya telah terjadi fenomena oligarki, melainkan juga plutokrasi. Politik uang sudah sedemikian banalnya dalam pemilihan dan rekrutmen kepemimpinan parpol serta dalam pemilu itu sendiri sampai-sampai ungkapan *vox populi vox dei* telah berubah menjadi *vox populi vox argentum*. Fenomena ini tentu menjadi salah satu faktor penting dalam perumusan upaya reformulasi ijtihad politik Muhammadiyah. Apalagi faktanya

⁸ Lihat Fatwa-Fatwa Kontemporer (*Al-Fatawa Mu'ashirah*), Jilid 3.

⁹ Lihat *Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani: Isu-Isu Besar Politik Islam (Al-Islam Wa 'l-Dimuqratiyah)*, Mizan, 1996.

sebagai komunitas yang mestinya terbaik dan menjadi pilihan Tuhan, Muhammadiyah bukanlah pemenang di negeri ini secara finansial atau ekonomi.

Selanjutnya mengenai sentral dan strategisnya partai politik perlu mendapatkan penekanan yang lebih, karena itu ciri yang ketiga ini saya letakkan di bagian akhir. Suka atau tidak, politik sekarang ini adalah politik kepartaian. UUD 1945 memang memberikan posisi yang sangat penting, sentral dan strategis dalam perpolitikan nasional melebihi lembaga manapun. Lantas bagaimana dengan posisi Muhammadiyah yang *nota bene* bukan partai politik, melainkan ormas?

Muhammadiyah Perlu "Memiliki" Parpol

Sebagai masukan, saya ingin menunjukkan sebuah ilustrasi yang menunjukkan betapa pentingnya partai politik bagi Muhammadiyah. Seperti kita ketahui bersama, dan kalau kita jujur, Kabinet Kerja bentukan Presiden Jokowi sama sekali nihil dari kader Muhammadiyah. Padahal ada tokoh-tokoh Muhammadiyah yang *nota bene* merupakan pribadi-pribadi berpengaruh (*eminent person*) jelas-jelas berada dan bekerja dalam Tim Sukses Jokowi-JK. Hal ini merupakan kenyataan yang tidak bisa dinafikan. Tetapi kenyataan keberadaan para *eminent person* Muhammadiyah tersebut tidak diperhitungkan sama sekali sebagai faktor dalam pembentukan kabinet: tidak ada seorang pun kader Muhammadiyah diangkat menjadi menteri oleh Presiden Jokowi.

Mengapa hal ini bisa terjadi? Salah seorang tokoh Muhammadiyah yang berada dekat dengan pusat kekuasaan, bahkan sampai hari ini (mungkin saking ikhlasnya), memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut secara rinci dan komprehensif dalam 6 (enam) point yang kesemuanya menurut saya *make sense*. Tapi di atas segalanya, suka atau tidak suka, wajah politik Muhammadiyah masih tetap diwakili oleh Prof. Dr. Amien Rais yang *nota bene* mempunyai partai politik, yaitu Partai Amanat Nasional (PAN). Kita juga mengetahui semua bahwa Prof Amien Rais dan PAN berada di mana dalam Pilpres 2014 yang lalu. Walhasil, keberadaan, sebut saja, *eminent person group* (EGP) di sisi sebelah hanya dianggap bunga-bunga yang secara politik dianggap tidak bisa mengimbangi *political leverage* dan *political magnitude* ketokohan Prof. Amin Rais yang di belakangnya ada gerbong partai politik.

Dalam konteks dan perspektif ini maka partai politik memang benar-benar menjadi wahana (*vehicle*) yang bukan hanya sangat instrumental, melainkan menentukan, dalam perpolitikan nasional sekarang ini. *'Ala kulli hal*, berdasarkan pengalaman politik saya selama duapuluh tahun, saya sampai pada kesimpulan bahwa **Muhammadiyah harus "memiliki" partai politik**. Saya sengaja masih **mencantumkan tanda kutip dalam kata "memiliki" sebab pengertian "memiliki" ini harus dijabarkan lebih lanjut**. Satu hal yang pasti adalah bahwa bagi Muhammadiyah memiliki partai politik ini bukan sesuatu yang tanpa preseden dan ahistoris. Muhammadiyah pernah **"memiliki" Masyumi** dalam modus anggota istimewa, Partai Islam Indonesia

(PII) secara organisasional juga, Parmusi secara institusional, Sekber Golkar secara eksponensial, dan -dalam batas tertentu secara organisasional- PAN.

Satu hal yang juga harus dipertimbangkan dengan serius adalah, sesuai dengan adagium *man yazra' yakhsyud, no pain no gain, sing sopo nandur bakal ngunduh*, bahwa bagi organisasi seperti Muhammadiyah ini **"memiliki" partai politik untuk konteks sekarang ini** (saya tidak tahu sampai kapan) merupakan keniscayaan. Bagaimana **format "memiliki"-nya dan bagaimana "hubungan"** antara Muhammadiyah dan partai politik tersebut adalah termasuk yang krusial yang harus dipikirkan secara mendalam dan sungguh-sungguh. Pasti, upaya pencarian rumusan ini tidaklah mudah. Tetapi Muhammadiyah mempunyai banyak pengalaman masa lalu yang dapat dijadikan preseden keterlibatan dalam partai politik yang dapat dijadikan bahan pelajaran dan inspirasi dengan cara mengkaji manfaat dan madharatnya, *plus and minus*-nya, bahkan *pluses and minuses*-nya. Ijtihad politik di masa lalu tentunya terbuka untuk dievaluasi dan diformulasikan kembali sesuai dengan konteks dan logika situasi yang menyertainya. Sebagai contoh, pada Tanwir tahun 1955 Muhammadiyah juga mengevaluasi keterlibatannya secara institusional dalam Masyumi sebagai anggota istimewa karena dirasa keterlibatan yang sangat istimewa tersebut ternyata dianggap juga merugikan dakwah Muhammadiyah.

Sebelum itu Muhammadiyah juga mempunyai rumusan yang semula diajukan Mas Mansur dan kemudian diterima dalam sidang Tanwir (1939). Rumusan tersebut kira-kira begini: bahwa bagi Muhammadiyah (1) politik itu penting, tetapi (2) tidak menjadi bidang garapan Muhammadiyah. Dan jika orang Muhammadiyah ingin berjuang di bidang itu maka (3) harus dibuat wadah atau lembaga tersendiri yang (4) berada di luar organisasi Muhammadiyah yang (5) tidak berhubungan secara organisasional atau kelembagaan dengan Muhammadiyah, tetapi (6) keduanya harus bisa bekerjasama secara simbiosis mutualisma. Akhirnya, *last but not least*, (7) dalam mengembangkan lembaga atau wadah politik tersebut harus bekerja sama dengan kekuatan umat Islam lainnya.

Mengapa wadah politik itu mesti berada di luar Muhammadiyah yang tidak berhubungan secara institusional? Jawaban selama ini: Muhammadiyah adalah organisasi dan gerakan dakwah. Muhammadiyah --betapa sentimentil **dan romantisnya rumusan "doktrin" ini**-- bukanlah organisasi politik, tidak memiliki afiliasi dengan partai politik manapun juga, dan sampai kapanpun tidak akan menjadi partai politik, serta dalam Pilpres bersikap netral. Muhammadiyah tidak memiliki hubungan kelembagaan dengan partai politik manapun juga, *hatta* dengan Partai Amanat Nasional (PAN) yang didirikan oleh Prof. Amien Rais yang *nota bene* mantan ketua sekaligus Penasihat PP Muhammadiyah itu. Padahal di satu sisi sudah seberapa besar Muhammadiyah berkorban untuknya dan di sisi lain sudah berapa banyak juga partai yang tersebut terakhir ini mengantarkan kader-kader Muhammadiyah menjadi menteri, kepala daerah, anggota DPR/MPR, dan pejabat-pejabat negara lainnya.

Semuanya ini terjadi karena penghimpitan dan identifikasi yang cukup dalam di antara keduanya. Oleh sebab itu, itu menurut saya sah-sah saja.

Salah satu eksek dari penghimpitan yang terlampau dalam itu, suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, bahwa Muhammadiyah dan PAN dipandang sebagai *two sides of one coin*. Bahkan ada orang yang mengatakan PAN adalah sayap politik Muhammadiyah. Saya rasa kita jangan lagi bersikap *tiba di mulut dimuntahkan, tiba di perut dikempiskan*.

Tentu dalam era multipartai keberadaan sejumlah kader **Muhammadiyah di dalam partai yang tidak "dimiliki" Muhammadiyah** ini akan tidak bisa dihindarkan. Tetapi anggap saja itu sebagai warna-warni atau bunga-bunga demokrasi yang harus dihormati.

Walhasil, perumusan kembali ini jauh lebih baik dari pada kita selalu saja merumuskan sikap-sikap yang negatif, apatis dan pesimis terhadap politik dengan mengatakan politik itu kotor, memecah belah, atau malah ada yang mengutip pernyataan Mohammad Abduh, seorang pembaru Islam dari Mesir, kepada Jamaluddin Al-Afghani "**mari kita tinggalkan politik, *A'udzubillah min al-siyasah*, dari kata politik, dari maksud politik, dari semua huruf yang diucapkan dari akar kata politik, dari semua ilusi yang terbersit dari hatiku tentang politik, dan dari semua orang yang berbicara, belajar, gila atau berakal pada politik, dan barang siapa yang berpolitik, memimpin, maka ia akan terganggu**" (Mahmud 'Awad, *Mutamarridun li wajhillah: Ibn Hazm, Ibn Taimiyah, Rifa'at ath-Thahtawi, Jamaluddin Al-Afghani, wa Abdullah Annadim*, Daru al-Syuruk, Mesir, 1986, 151), yang jika tidak pas justru akan cenderung dipersepsi orang sebagai pelarian (*escapism*) saja dari kegagalan memasuki pusat-pusat kekuasaan. Tetapi, tetap saja pada kenyataannya sikap-sikap seperti itu seringkali tidak konsisten, mengandung paradoks, dan ada sedikit hipokrisi di sana: buktinya jika tidak diakomodasi dalam kekuasaan marah-marah dan *jempling-jempling*, menyesali kenyataan. *Wallahu a'lam bi 'l-shawab*.

Jakarta, 16 April 2015.

REFORMULASI IJTIHAD POLITIK MUHAMMADIYAH

Oleh Muhadjir Effendy dan Asep Nurjaman*

Pendahuluan

Sepanjang yang dimaksud politik adalah politik praktis agaknya memang bukan bawaan lahir Muhammadiyah. Ibarat kendaraan, Muhammadiyah itu Bus. Sedang kendaraan yang *compatible* dengan politik praktis itu adalah *Dump Truck*. Maka betapa canggungnya Muhammadiyah ketika harus memodifikasi diri, dari Bus Sekolah menjadi *Dum Truck* pengangkut sampah.

Memasuki usia abad ke dua, Muhammadiyah dihadapkan pada tantangan dan persoalan yang lebih rumit dan kompleks. Oleh karena itu, Muhammadiyah perlu melakukan refleksi atas peran yang telah dilakukan selama ini sebagai organisasi gerakan da'wah amar ma'ruf nahi munkar, kemudian menerawang kedepan untuk melakukan ijtihad dalam berbagai bidang dakwah, tak terkecuali bidang politik. Retorika yang selama ini dikemukakan oleh berbagai pihak adalah bahwa di Muhammadiyah secara organisasi harus lebih berorientasi pada *soft politics* ketimbang *hard politics*, sedang secara pribadi-pribadi kader diberi kebebasan untuk berkiprah di politik praktis. Kendatipun di dalam praktiknya tentu masalahnya tidak sesederhana itu.

Muhammadiyah yang terlahir sebagai gerakan budaya tandingan (*counter-culture*). Dalam *Merriam Websters Dictionary*, *counter-culture* diartikan sebagai : "*a culture with values and customs are very different from and usually opposed to those accepted by most of society*". Begitulah Muhammadiyah, ia datang dengan menawarkan nilai-nilai dan adat kebiasaan yang berbeda bahkan melawan arus terhadap nilai-nilai dan adat kebiasaan yang diterima dan dilakukan oleh sebagian besar masyarakat waktu itu.

Pada ranah politik, --tatkala berhadapan dengan pemerintah kolonial-- dalam taktik Muhammadiyah memilih politik kooperatif, ketika kebanyakan perkumpulan dan pergerakan memilih non-kooperatif. Adapun yang tidak terkompromikan dari Muhammadiyah adalah dalam

hal cita-cita ke-Islaman dan kemerdekaan. Dalam praktik "politik" sehari-hari KH Dahlan Sang Pendiri, selalu menjalin hubungan bahkan menjadi bagian dari pihak-pihak yang memiliki pilihan beda itu. KH A Dahlan menjalin kedekatan dengan tokoh-tokoh Boedi Oetomo (BO) seperti dr. Wahidin Soediro Hoesodo. Bahkan Kyai Dahlan pernah menjadi Penasehat BO. Begitu juga dengan tokoh-tokoh Syarikat Islam (SI) seperti, H.O.S Tjokro Aminoto. Sang Kyai juga pernah menjadi anggota dan Penasehat organisasi ini. Pada waktu SI mengadakan kongres di Cirebon, 1921, Muhammadiyah membantu penyelenggaraannya bahkan Kyai Dahlan diminta memberi prasaran.

Tatkala SI melarang adanya keanggotaan rangkap (yang membuat anggota-anggota Muhammadiyah harus keluar dari SI) dan mempertegas sikap dengan melakukan "Politik Hijrah" yang artinya non kooperatif, Muhammadiyah memandang penting untuk melakukan Politik "Ghairul-Hijrah". Untuk itu Muhammadiyah melalui KH Mas Mansur mendirikan Partai Islam Indonesia (PII-1938).

Apa yang terpapar ini hanyalah sebuah *snapshot* yang menggambarkan adanya pola tertentu ijtihad Muhammadiyah dalam ranah politik. Hal yang mirip telah terjadi sebelumnya, ketika Muhammadiyah ikut membidani lahirnya Majelis Islam A'la Indonesia (1937) dan setelahnya, ketika Muhammadiyah memelopori berdirinya partai Masyumi (1945), melahirkan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi-1968), dan membidani lahirnya Partai Amanat Nasional (1998). Di samping adanya keajegan yang bersifat institusional-struktural, tentu varian perilaku elite Muhammadiyah, sebagaimana yang ditipologikan oleh Haedar Nashir juga sangat mempengaruhi pola-pola ijtihad politik Muhammadiyah dari waktu ke waktu (Nashir: 2000).

Ijtihad Politik

Gerakan Muhammadiyah yang dimulai dari Kampung Kauman Yogyakarta, pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H/18 Nopember 1912 oleh KHA Dahlan, memiliki dua sisi. Di mana masing-masing sisi saling menguatkan. Satu sisi Muhammadiyah adalah merupakan gerakan pemurnian ajaran Islam (*tajridu al Islamiyah*), di sisi yang lain juga merupakan gerakan pembaharuan peradaban (*tajdidu al Hadharah*). Setiap persoalan yang timbul dalam pembaruan peradaban dilakukan pembobotan persoalan (*tarjih al masail*). Relasi *Tajdid-Tajrid-Tarjih* ini bisa disebut "Dialektika Muhammadiyah". Oleh karena itu, orang Muhammadiyah di dalam pikirannya selalu digairahkan untuk menemukan hal-hal yang

baru, namun selalu waspada dan mempersoalkan segala kebaruan yang hadir untuk dibobot (ditarjih) dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang otentik. Dengan demikian perkembangan dan kemajuan peradaban akan tetap berada di jalan yang benar. Ketiga anasir ini (*Tajdid-Tajrid-Tarjih*) adalah merupakan landasan metodologis praktik Ijtihad di dalam Muhammadiyah

Di dalam ijtihad, bagaimanapun Muhammadiyah dituntut selalu membuat langkah-langkah yang kreatif, inovatif, dan responsif terhadap perkembangan zaman. Begitu pula halnya Ijtihad dibidang politik. Sebagai perwujudan dari gerakan tajdid, Muhammadiyah selalu bangkit untuk membuat prestasi baru dan pencapaian baru dalam seluruh aspek, tidak kecuali dalam bidang politik.

Hingga saat ini ijtihad politik Muhammadiyah bisa dibilang lebih terfokus pada upaya menjaga jati diri Muhammadiyah, sekaligus cerminan dari kurang memuaskannya --untuk tidak menyebut gagal-- hasil yang dicapai dalam berijtihad politik, bahkan terkadang hal itu menjadi sebuah pengalaman pahit. Sebagai misal apa yang tercermin pada sikap organisasi yang dicetuskan pada Mukatamar ke-38 tahun 1971 di Ujung Pandang, di mana Muhammadiyah menyatakan tidak melibatkan diri di dalam politik praktis. Walau Muhammadiyah menyadari bahwa politik menjadi bagian dari denyut kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, maka gerak dan langkahnya tidak akan bisa lepas dari kehidupan politik.

Muhammadiyah, sejak fase pertama berdirinya memandang kehidupan politik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam. Oleh karena itu, walau Muhammadiyah tidak melibatkan diri dalam politik praktis secara langsung, kiprah politik harus tetap dilakukan Muhammadiyah dalam berbentuk yang lain, paling tidak berupa pemikiran yang dibutuhkan bangsa dan negara tanpa mengabaikan aksi gerakannya yang bersifat konkret. Sampai pertengahan tahun 1998, eksistensi Khittah Muhammadiyah memang masih dapat terjaga sesuai amanat Mukatamar Ujung Pandang tahun 1971. Walaupun perubahan konstelasi politik nasional yang ditandai dengan tumbangnya rezimnya Orde Baru telah membawa angin perubahan bagi wacana perpolitikan Muhammadiyah.

Sebagai bagian dari kekuatan sosial di Indonesia, Muhammadiyah tidak mungkin membiarkan kemungkinan politik yang dapat dimainkan berlalu begitu saja. Tumbangnya rezim Orde Baru

menghadirkan harapan politik baru yang kemudian ditandai dengan munculnya berbagai macam partai politik.

Pada sidang tanwir tanggal 5-7 Juli di Semarang merekomendasikan kepada pimpinan pusat Muhammadiyah untuk melakukan ijtihad politik. Hasil dari rekomendasi tersebut berdirilah Partai Amanat Nasional yang di deklarasikan pada hari ahad tanggal 23 Agustus 1998 di Senayan Jakarta, dengan *branded* ketokohan pada diri Prof. M. Amien Rais sebagai pelaku utama gerakan reformasi. Pada saat itulah pembaharuan politik yang lebih berperadaban diharapkan terjadi. Di dalam platformnya PAN didesain menjadi partai terbuka. Hal ini juga bisa dilihat dari komposisi kepengurusannya. Walaupun demikian, anggapan yang menyamakan PAN dengan Muhammadiyah tidak bisa dielakkan begitu saja, mengingat Amien Rais, *nota bene* pada saat berdirinya PAN merupakan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kelahiran PAN merubah peta relasi politik warga Muhammadiyah, sekaligus menimbulkan dampak disharmoni antar warga Muhammadiyah karena daya tarik menarik antara elit Muhammadiyah dengan kader Muhammadiyah yang selama ini telah berkecimpung di partai politik lain yang lebih dulu lahir, seperti di Golkar-PPP-PBB-PK/S dan lainnya.

Fenomena terkait dengan disharmonisasi di internal organisasi sangat tidak menguntungkan perjuangan pergerakan Muhammadiyah, walaupun harus diakui selalu ada hal positif dari kelahiran PAN bagi Muhammadiyah. Oleh karena itu, mengingat kondisi internal yang diakibatkan dari tarik menarik kepentingan politik dan tantangan Muhammadiyah ke depan, baik Nasional maupun Internasional, maka perlu perenungan ulang terhadap teologi politik Muhammadiyah terkait penginterpretasian dan pemahaman yang selama ini berkembang.

Muhammadiyah dan Politik: Sebuah Tinjauan Historis

Ketika memperbincangkan hubungan Muhammadiyah dan politik, maka kesan kuat yang muncul dari pertautan itu ialah keterlibatan Muhammadiyah dalam kegiatan-kegiatan politik yang disebutnya sebagai berpolitik-praktis atau *hard politics*. Politik (*hard politics*) dipahami dalam kaitan dengan kegiatan *struggle for power* (Morgenthau, 1987) atau *who get what, when and how* (Lasswell, 1978) yang menjadi tugas dari kegiatan partai politik, yang secara populer disebut dengan istilah “politik praktis” atau *real politics* yang membedakan dari kegiatan politik

yang bersifat *moral force* atau *soft politics* sebagaimana sering dimainkan oleh kelompok kepentingan (*interest group*).

Secara historis, keterlibatan Muhammadiyah dalam *hard politics* dalam artian *real politics* bisa dilacak sejak Indonesia merdeka, tahun 1945, namun kalau bersifat *soft politics*, sejak berdirinya Muhammadiyah telah menjalankannya. Aktivitas politik yang bersifat *soft politics*, Muhammadiyah telah melakukan seangkaian aksinya, seperti dikemukakan oleh Alfian (1987) antara lain: (1). Menentang pemerintah Hindia Belanda yang mewajibkan pajak atas ibadah kurban. Hal ini berhasil dibebaskan; (2). Pengadilan agama di zaman kolonial berada dalam kekuasaan penjajah yang tentu saja beragama Kristen. Agar urusan agama di Indonesia, yang sebagian besar penduduknya beragama Islam, juga dipegang oleh orang Islam, Muhammadiyah berjuang ke arah cita-cita itu; (3). Ikut menanamkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air Indonesia di kalangan umat Islam Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia dalam tabligh-tablighnya, dalam khotbah ataupun tulisan-tulisannya; (4). Pada waktu Jepang berkuasa di Indonesia, pernah seluruh bangsa Indonesia diperintahkan untuk menyembah dewa matahari, Tuhan bangsa Jepang. Muhammadiyah pun diperintah untuk melakukan Sei-kerei, membungkuk sebagai tanda hormat kepada Tenno Heika, tiap-tiap pagi sesaat matahari sedang terbit. Muhammadiyah menolak perintah itu.

Dalam konteks *real politics*, keterlibatan Muhammadiyah bisa dilacak dalam usahanya ikut memelopori berdirinya Partai Islam Indonesia (PII), dan pada tahun 1945 menjadi pendukung utama berdirinya partai Islam Masyumi dengan gedung Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta sebagai tempat kelahirannya. Selama waktu tahun 1945 hingga 1959, kita melihat 50 % keanggotaan Masyumi adalah kader-kader Muhammadiyah. Hubungan Muhammadiyah dan Masyumi bukannya tanpa pertentangan di internal Muhammadiyah sendiri, utamanya terkait persoalan posisi status keanggotaan Muhammadiyah di Masyumi. Terkait status Muhammadiyah di Masyumi telah beberapa kali dibahas dalam Sidang Tanwir, namun selalu menemui jalan buntu ketika dibahas dalam Mukhtamar.

Dalam sidang Tanwir Muhammadiyah 1956 di Yogyakarta merekomendasikan peninjauan ulang status keanggotaan Muhammadiyah di Masyumi. Hal serupa terulang pada Sidang Tanwir Muhammadiyah 1957, dengan rekomendasi yang lebih jelas, agar Muhammadiyah keluar dari

anggota istimewa Masyumi. Hal ini pun tidak menjadi kenyataan, karena pada pada sidang Tanwir tahun 1958, justru Sidang menyerahkan kepada PP Muhammadiyah. Selanjutnya pada Sidang Tanwir tahun 1959 di Jakarta, sempat muncul lagi sampai diadakan voting dan hasilnya sudah bisa diduga kelompok yang pro Masyumi menang. 13 orang setuju keluar, 18 orang menolak, dan 3 orang abstain. Pada akhirnya persoalan ini bisa tuntas ketika PP Muhammadiyah menyelenggarakan Pleno tahun 1959, dan memutuskan Muhammadiyah keluar dari keanggotaan Masyumi.

Pada masa Orde Baru keterlibatan Muhammadiyah dalam politik (*hard politics*) nyaris tidak ada. Di bawah rezim Orde baru yang represif tidak memberi ruang kebebasan politik bagi warga Negara. Justru Negara melakukan intervensi ke dalam kehidupan politik masyarakat, partai politik di “bonsai” dengan cara memberlakukan fusi partai. Partai politik dibagi ke dalam tiga kelompok, pertama kelompok agama, kedua kelompok nasionalis, ketiga golkar. Pada masa ini, secara kelembagaan Muhammadiyah tidak memiliki hubungan apapun dengan partai politik. Namun dampak dari situasi politik ini bagi Muhammadiyah, juga terhadap ummat Islam umumnya adalah tiadanya ikatan emosional yang kuat dengan partai politik manapun. Realitas politik di era Orde Baru telah melahirkan sebuah ijthihad politik baru yang kita kenal dengan *high politics*, dalam posisi ini Muhammadiyah lebih menekankan perjuangan politik melalui sumbangan konsep-konsep, baik itu konsep kenegaraan maupun ekonomi.

Gerakan *high politics* Muhammadiyah muncul dibawah pimpinan Amien Rais yang berstatus sebagai Ketua PP Muhammadiyah dengan melakukan menuver langsung ke area legitimasi kekuasaan Orde Baru. Dengan isu yang sangat sensitive pada masa itu, yaitu Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) Amien Rais menyuarakannya dengan sangat lantang sehingga menimbulkan tensi tinggi antara Pemerintahan Orde Baru dan Muhammadiyah. Keberhasilan Amien Rais dalam mendorong terjadinya reformasi telah membawa semangat baru bagi sebagian warga Muhammadiyah yang ingin mengembalikan romantisme politik dengan Masyumi. Oleh karena itu pada Sidang Tanwir 1999 di Semarang (setahun setelah jatuhnya rezim Orde Baru), dorongan Muhammadiyah untuk

menjadi Parpol amat besar. Akan tetapi keputusan Sidang Tanwir tidak berpihak pada arus besar saat itu karena lebih mengutamakan kemaslahatan bagi Organisasi Muhammadiyah itu sendiri. Keputusan Tanwir menyatakan bahwa Muhammadiyah tidak akan menjadi partai politik, namun warga Muhammadiyah dipersilahkan mendirikan partai politik atau bergabung dengan partai yang ada, dan secara institusional tidak ada hubungan antara parpol manapun dengan Muhammadiyah.

Orientasi Teologi Politik Muhammadiyah

Konsep teologi politik Muhammadiyah secara longgar dapat dikatakan sebagai usaha melacak “akar pemikiran keagamaan yang fundamental dalam Muhammadiyah mengenai politik”. Hal demikian dapat dijadikan landasan sebagai pandangan dunia Muhammadiyah mengenai kehidupan politik. Di samping itu juga dapat dijadikan sebagai arah kehidupan politik yang dicita-citakan Muhammadiyah dalam kehidupan bangsa. Sementara peran politik Muhammadiyah dapat diartikan sebagai aktivitas yang dapat dilakukan oleh Muhammadiyah dalam percaturan politik nasional di Indonesia, dengan tetap memposisikan diri sebagai gerakan Islam yang berorientasi dibidang sosial-keagamaan tanpa harus menjadi partai politik atau mensubordinasikan diri dalam kekuatan politik tertentu.

Secara umum, politik meliputi supra struktur dan infra struktur politik. Dalam konteks supra struktur politik, melingkupi kehidupan politik diranah kekuasaan formal negara/pemerintahan, sementara dalam konteks infra struktur politik melingkupi kehidupan politik masyarakat yang memberi arah pada kehidupan politik formal melalui input politik yang berupa tuntutan dan dukungan. Dengan demikian, walaupun partai politik bisa jadi penghubung, namun posisi Muhammadiyah sebagai infra struktur politik (interest group) bisa secara langsung memberikan input pada pemerintah sebagai bagian dari misi da'wah. Dengan demikian untuk melakukan misi da'wah kepada pemerintah, Muhammadiyah tidak perlu lagi masuk terlalu jauh dalam partai politik, tetapi dapat melakukan berbagai fungsi sebagai kekuatan politik yang masuk ke berbagai kalangan. Fungsi atau peran politik ini harus dimainkan secara terencana, sistematis, dan proaktif sehingga benar-benar berada dalam

komponen sistem gerakan Muhammadiyah dan bukan lagi bersifat reaktif.

Sebagai persyarikatan Islam yang sejak awal telah mencanangkan dirinya sebagai gerakan dakwah amar ma`ruf nahi munkar, Muhammadiyah perlu melakukan evaluasi secara lebih serius, apakah yang dilakukan oleh Muhammadiyah selama ini dalam dakwah *ilal khoir* dan *amar ma`ruf nahi munkar* sudah sesuai dengan yang dituntut dan dituntunkan oleh agama, atau paling tidak sudah sesuai dan memenuhi apa yang tertera dalam segala dokumen resmi persyarikatan, di antaranya cita-cita hidup Muhammadiyah.

Secara normative, Muhammadiyah tentu harus istiqomah sebagai organisasi sosial-keagamaan dan dengan posisi yang demikian dapat berperan lebih leluasa dalam kehidupan ummat dan bangsa. Muhammadiyah harus tetap sebagai organisasi sosial-keagamaan, Muhammadiyah tidak boleh menjadi partai politik, Muhammadiyah juga tidak perlu secara resmi mendirikan partai politik maupun mensubordinasikan diri pada kekuatan politik tertentu. Adapun keterlibatan dalam partai politik dibiarkan untuk diperankan dan menjadi tanggung jawab orang-orang Muhammadiyah. Kendati tidak berpolitik praktis, Muhammadiyah dituntut berkiprah di dalam dinamika politik nasional melalui saluran atau artikulasi lain yang lebih sejalan dengan kepribadian dan khittah gerakannya. Muhammadiyah kendati tidak berpolitik praktis sebagaimana halnya partai politik, tidak harus menjauhi politik dan tidak melakukan apapun yang berkaitan dengan politik. Hal yang diperlukan adalah penyesuaian kebijakan, strategi, dan taktik untuk menjalankannya.

Penyesuaian kebijakan, strategi, dan taktik Muhammadiyah dalam politik yang bermuara pada hasil Mukatamar ke-38 tahun 1971 di Ujung Pandang, dimana sikap politik Muhammadiyah itu ditegaskan secara gamblang. Pertama, Muhammadiyah dengan seluruh organisasi otonom (ortom) yang dipayunginya tidak berafiliasi, dan tidak ada hubungan organisatoris dengan Partai Politik apapun. Kedua, anggota Muhammadiyah dari berbagai tingkat secara pribadi bebas untuk memasuki atau tidak memasuki Partai Politik yang sesuai dengan kesukaan yang bergayut pada hati-nuraninya. Sampai memasuki usia abad ke dua Muhammadiyah kini, keputusan politik itu, tetap menjadi acuan baku bagi Muhammadiyah.

Perlunya Jaringan dan Sinergi

Arah dan masa depan perjalanan Muhammadiyah dalam mengimplementasikan gerakan tajdid perlu re-definisi, re-interpretasi, dan sekaligus re-aktualisasi. Dalam bidang politik perlu tetap dan selalu mengedepankan *soft politics* ketimbang *hard politics*. *Soft politics* merupakan arena perjuangan yang sangat penting dan sekaligus menantang karena memberikan *based line* bagi *grand design* bangsa dan negara ke depan, dan juga sekaligus memberikan inspirasi bagi pola hubungan antar bangsa dan negara di era global yang penuh kompetisi tanpa kompromi.

Walaupun demikian, kita harus tetap menyadari bahwa *hards politics* yang langsung bersentuhan dengan aktivitas kekuasaan juga penting, hal ini mengingat banyaknya amal usaha Muhammadiyah yang perlu dilindungi dari intervensi kekuasaan Negara. Oleh karena itu, kader Muhammadiyah perlu diberi kebebasan dan sekaligus didukung untuk berkiprah dalam *hard politics* baik di legislative, eksekutif, maupun yudikatif. Hal ini penting, karena untuk menjalin ikatan antara kader Muhammadiyah yang aktif di politik dan birokrasi dengan Muhammadiyah secara organisasi. Kader Muhammadiyah yang berkiprah di manapun termasuk di partai politik, tetap pada akhirnya harus kembali ke Muhammadiyah. Hal tersebut dimaksudkan agar kader harus punya kontribusi bagi perjuangan persyarikatan, sekaligus membawa nilai-nilai yang diperjuangkan persyarikatan di manapun dia berada.

Kader Muhammadiyah yang bergerak di *soft politics* dan *hard politics* perlu saling tegur sapa dan saling bekerja sama, yang dipersatukan oleh kepentingan bersama yaitu memperjuangan visi dan misi persyarikatan. Atmosfir yang demikian, perlu dikongkritkan dan direalisasikan dalam setiap kepemimpinan Muhammadiyah. Dalam Muhkatamar ke 47 di Makasar, di mana Muhammadiyah menapaki abad ke dua usianya, akan sangat membutuhkan pemikiran dan pengkajian ulang atas apa yang selama ini telah dilakukan sebagai organisasi soal keagamaan yang menyandang gelar sebagai gerakan tajdid. Oleh karena itu perlu bagi Muhammadiyah dalam menapaki babak baru ini melakukan redefinisi, reorientasi dan sekaligus reaktualisasi peran sebagai organisasi gerakan da'wah yang bernapaskan tajdid agar selalu selaras dengan tuntutan dan perkembangan zaman.

Dengan mengacu pada kepentingan Muhammadiyah ke depan, dan sekaligus mengukuhkan perjuangan Muhammadiyah dalam mewujudkan Indonesia dan dunia yang berkemajuan, maka dibutuhkan kemampuan mobilisasi sumber daya manusia. Oleh karena itu Pimpinan Muhammadiyah, khususnya Majelis Pendidikan Tinggi harus menjadi *Biro Kompas* yang memberi antara serta ancar-ancar ke arah mana peran Perguruan Tinggi Muhammadiyah harus dikonstruksikan bagi perjuangan persyarikatan. Bagi Majelis Hikmah dan Majelis Kader perlu memberikan rambu-rambu dan tidak kenal menyerah mengingatkan kader Muhammadiyah yang terlibat dalam kegiatan politik praktis agar tetap berada dalam pusran misi Muhammadiyah. Mengingatkan perlunya sinergisitas para kader yang berjuang di arena *soft politics* dan *hard politics*.

Kemampuan Muhammadiyah dalam mengoptimalkan, mengkoordinasikan, dan mensinergikan semua potensi merupakan modal dasar bagi suksesnya perjuangan Muhammadiyah dalam ikut membangun peradaban. Keberhasilan perjuangan Muhammadiyah dalam meluruskan arah dan perjalanan bangsa melalui perjuangan konstitusional yang diprakarsai Prof Dr. Din Syamsuddin sebagai Ketua Umum merupakan ijtihad politik nyata yang berada dalam ranah *soft politics*. Perjuangan seperti ini, kiranya perlu diperluas, tidak hanya dalam scope nasional, akan tetapi kalau memungkinkan berskala internasional. Perjuangan dalam lingkup internasional, Muhammadiyah sudah banyak melakukannya, namun masih lebih banyak pada ranah agama, khususnya dunia Islam, namun belum banyak menyentuh ranah kemanusiaan, keadilan internasional, maupun peradaban umat manusia secara umum. Guna meningkatkan peran internasional, Muhammadiyah perlu mengembangkan *networking*, merintis dan mempererat jalinan kerja sama dengan lembaga-lembaga internasional baik yang bergerak di bidang sosial, ekonomi, lingkungan, kemanusiaan dan lain sebagainya. Hal ini penting tidak hanya karena usia Muhammadiyah yang matang setelah memasuki aba ke dua, namun karena kultur dunia yang kian berubah menuntut perubahan strategi perjuangan Muhammadiyah juga.

* Prof Dr Muhadjir Effendy, MAP adalah guru besar Universitas Negeri Malang dan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang. Dr Asep Nurjaman, MSi adalah Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Malang.

Bahan Bacaan

Abdul Munir Mulkam, 1990, *Pemikiran KH. Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah dalam Perspektif perubahan Sosial*, Jakarta, Bumi Aksara.

Abdul Aziz Thaba, 1996, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Jakarta, Gema Insani Press.

Agus Nurhadi MA., "Gerakan Islam Reformis di Era Reformasi : Studi Kasus Gerakan Tajdid Muhammadiyah" dalam Ari Anshori dkk., *Reaktualisasi Tajdid Muhammadiyah*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1998.

Abdul Sani, 1998, *Lintasan Sejarah dan Pemikiran dan Perkembangan Modern dalam Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo.

Andi Wahyudi, 1990, *Muhammadiyah dalam Gonjang-Ganjing Politik : Telaah Kepemimpinan Muhammadiyah Era 1990*, Yogyakarta, Media Presindo.

Asmuni Abdul Rahman, 2003, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah : Metode dan Aplikasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Haedar Nasher, 2010, *Muhammadiyah Gerakan Pembaruan*, Yogyakarta, Suara Muhammadiyah

Junus Salam, *K.H Ahmad Dahlan Amal dan Perjuangannya*, al Wasath, 2009

Mukti Ali, 1990, *Muhammadiyah dan Tantangan Masa Depan : Dialog Intelektual*, Yogyakarta, Tiara Wacana.

Syaifullah, 1997, *Gerakan Politik Muhammadiyah dalam Masyumi*, Jakarta, Grafiti

BUDAYA POLITIK MUHAMMADIYAH¹

Oleh : Achmad Jainuri²

Dalam majalah bulanan *the New Yorkers* edisi akhir tahun 1988,³ terdapat artikel dua terbitan berturut-turut yang ditujukan bagi siapa saja yang ingin berhasil usahanya di Indonesia disarankan untuk mendekati kelompok “baju hijau,” satu militer yaitu Angkatan Darat (AD), dan kedua Islam. Dua symbol warna “hijau” ini merupakan kekuatan riil politik saat itu di Indonesia. Karena era itu yang berkuasa adalah “hijau” yang pertama, tulisan itu menyarankan untuk mendekati AD, yang sedang memegang kendali kekuasaan di Indonesia, dari desa sampai pucuk kekuasaan nasional. Artikel itu sesungguhnya ditujukan untuk para pelaku bisnis Amerika Serikat yang melakukan aktifitas bisnisnya di Indoensia.

Dari tulisan itu, jelas bahwa Islam dalam kancah politik di Indonesia merupakan kekuatan politik yang sangat diperhitungkan oleh orang, karena kuantitas jumlah yang mayoritas. Apalagi, dalam sistem demokrasi sekarang yang memberikan hak setiap individu warga negara untuk mengekspresikan sikap politik mereka melalui dukungan suara dalam proses politik untuk menentukan kepemimpinan nasional dan kebijakan negara. Tetapi persoalannya, kekuatan politik yang besar itu mudah tercabik karena persoalan internal, yang tidak mudah untuk bersatu. Selain itu, hasrat kekuatan politik beberapa rezim penguasa yang tergoda untuk berusaha mendegradasi kekuatan politik umat melalui kebijakan untuk memperlemah Islam politik, menjadikan Islam selalu dipandang sebagai lawan yang harus diperhitungkan dan dianggap membahayakan bagi kelompok politik tertentu.

Pada masa pemerintahan Kolonial Belanda di Indonesia ada kebijakan Politik Islam Belanda, yang memandang Islam politik sebagai ajaran yang sangat berbahaya, (Aqib Suminto, 1984). Pada masa Orde Baru berbagai upaya pelemahan Islam sebagai kekuatan politik dilakukan melalui rekayasa peristiwa, seperti “Komando Jihad.” Di Jawa Timur, kalangan yang menjadi korban peristiwa ini adalah ditahannya banyak tokoh Islam modern, yang secara politik, dinilai oleh rezim Orde Baru sebagai kelompok yang sangat vocal dalam mengkritisi kebijakan penguasa, dan karenanya sangat berbahaya. Pelemahan kekuatan politik Islam inilah yang mendorong Cak Nur mengeluarkan pernyataan “Islam Yes, Partai Islam No,.” Bagi Cak Nur, masa itu dinilai tidak menguntungkan bagi umat Muslim untuk aktif dalam politik praktis, karena tidak menguntungkan dan rezim penguasa tidak segan-segan akan

¹ Disampaikan dalam Seminar Nasional Muhammadiyah, Civil Society, dan Negara, Panitia Pusat Mukhtar Muhammadiyah ke-47, di Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 25 April 2015. Lihat “Tradisi dan Etika Politik “Politisi” Muhammadiyah,” disampaikan dalam Dialog IDEOPOLITOR Regional 3 (Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta), 18-20 Juni, 2014, di Bandung.

²Achmad Jainuri, penulis *The Formation of the Muhammadiyah's Ideology, 1912-1942*, Montreal, Canada. IIS, McGill University, 1997.

³Kopi jurnal ada pada penulis, tetapi catatan nomor waku terbit terhapus, karena kesalahan teknis foto kopi.

memberangusnya. Cukuplah yang telah aktif di partai (PPP) saat itu, jangan ditambah lagi. Hal yang lain diharapkan bisa meningkatkan kualitas diri melalui peningkatan pendidikan.

Menjamurnya kaum cerdas pandai Muslim pada decade 90-an adalah bagian dari kesadaran di atas. Namun, sebagian aktifis Muslim menuduh Cak Nur sebagai seorang sekuler, karena ingin memisahkan antara Islam dan politik. Ada indikasi bahwa upaya pelemahan Islam politik juga dilakukan pada era pemerintahan rezim Megawati, melalui pelabelan dengan menghidupkan kembali isu DI, TII sebagai contoh upaya inkonstitusional untuk merebut kekuasaan. Tetapi upaya itu mati premature karena reaksi masyarakat saat itu.

Muhammadiyah dan Politik

Dalam sejarah pergerakan Muhammadiyah setelah kemerdekaan, hubungan antara politik dan Persyarikatan mengalami tarik menarik antara kubu yang menghendaki Muhammadiyah terlibat langsung dalam politik praktis dan kelompok yang menghendaki Muhammadiyah tetap istiqomah sebagai gerakan sosial keagamaan. Kelompok pertama beralasan bahwa dengan terjun ke partai politik Muhammadiyah bisa terlibat secara langsung dalam menentukan arah dan kebijakan negara dan pemerintahan. Sedang kelompok kedua berkeyakinan bahwa keterlibatan dalam politik praktis akan berakibat pada terbelenggalnya program utama Persyarikatan dalam menangani masalah sosial keagamaan.

Tarik ulur antara dua keinginan warga Muhammadiyah yang berbeda ini berlangsung hingga sekarang. Kelompok yang tidak tertarik aktif di politik praktis berketetapan ingin menjaga khittah Muhammadiyah awal. Kelompok yang tertarik terlibat dalam politik praktis, selain alasan seperti yang disebutkan di atas, memandang bahwa keberhasilan dalam berpolitik praktis akan berdampak pada adanya pengaruh Muhammadiyah di kekuasaan yang selanjutnya bisa membantu mengembangkan amal usaha yang selama ini ditekuni oleh Muhammadiyah. Alasan ini disampaikan karena selama rezim Susilo Bambang Yudhoyono, warga Persyarikatan merasakan akan dampak kebijakan yang "pilih kasih" terhadap Muhammadiyah dan amal usahanya.

Jika politik praktis ini yang menjadi pilihan, pertanyaannya kemudian adalah: apakah para "politisi Muhammadiyah" siap mengemban misi politik luhur dalam setiap proses politik guna menciptakan sistem pemerintahan dan negara di dalam bingkai *baladun toyyibatun wa rabun ghafur*, yang menjadikan rakyatnya mengalami *gemah ripah loh jinawe tata tentrem karto raharjo*. Karena pada kenyataannya, banyak politisi dari Muhammadiyah larut dalam tradisi politik yang jauh dari nilai etika dan moral agama. Bahkan, sebagian dari mereka ini terlibat pada kasus penyimpangan yang telah dan sedang menjalani proses hukum. Oleh sebab itu, beberapa pertanyaan dikemukakan untuk kita jawab bersama: bagaimana sebenarnya warga Muhammadiyah memaknai politik itu; politik sebagai suatu proses memiliki tujuan, yakni terbangunnya sebuah sistem pemerintahan guna menjalankan fungsi negara; untuk mencapai cita-cita ini sikap politik yang bagaimana yang harus dipilih oleh warga Muhammadiyah;

etika serta tradisi politik yang bagaimana yang harus dijadikan dasar komitmen warga Muhammadiyah dalam mengikuti proses politik di Indonesia kontemporer.

Memahami Makna Politik

Dalam rumusan teori sosial dikatakan bahwa politik adalah proses untuk menciptakan sebuah tatanan sosial yang baik yang ditempuh melalui kontrol terhadap sumber-sumber kekuasaan yang ada di masyarakat dengan cara persuasif atau konflik (G.A. Theodorson, 1979). Dalam kaitan ini yang dimaksudkan dengan tatanan adalah tegaknya sebuah sistem negara yang fungsinya dijalankan oleh roda pemerintahan untuk mencapai tujuan negara, yakni kesejahteraan hidup rakyat. Dalam sistem ini ada pemangku dan penentu kebijakan, yang disebut pemimpin, dimana mereka ini ditetapkan melalui sebuah proses pemilihan. Untuk itu, para calon pimpinan biasanya menawarkan program-program kepada masyarakat. Penawaran program ini dilakukan dengan mendatangi simpul kekuasaan yang ada di masyarakat, yakni elit agama dan adat, untuk memperoleh dukungan. Cara persuasif dalam penggalangan suara pemilih melalui penyampaian program kepada masyarakat menimbulkan kesan bahwa politik itu baik.

Namun, sebagian orang menganggap bahwa politik itu kotor, karena dalam prosesnya dilakukan melalui cara-cara konflik, kampanye hitam, fitnah, politik uang dan sebagainya. Fenomena politik uang ini membenarkan apa yang dikatakan Lasswell (1936) bahwa politik itu sama dengan “siapa dapat apa, kapan, dan bagaimana” (*who gets what, when, and how*). Dalam Teori Pertukaran (*Exchange Theory*) setiap interaksi dan tindakan seseorang selalu dilandasi oleh motif untuk memperoleh sesuatu. Sehingga, seperti yang terindikasikan dalam Pilihan Legislatif pada Pemilihan Umum 2014, transaksi pembelian suara, baik di tingkat pemilih maupun di tingkat rekapitulasi, merupakan fenomena yang menggambarkan asumsi teori ini. Kalau seseorang memilih A, misalnya, ia akan mendapat apa ?

Meskipun dalam pilihan Presiden sering diungkapkan tidak didasarkan pada semangat bagi-bagi kekuasaan, tetapi kenyataannya memberikan posisi tertentu di pemerintahan bagi para pendukung merupakan fakta yang tidak bisa dibantah. Akibat politik transaksional ini muncul kecenderungan nepotisme, kolusi, dan korupsi. Tidak keliru apabila ada yang mengatakan bahwa “*power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Great men are almost always bad men.*” (Baron Acton atau yang dikenal sebagai Lord Acton, 1834-1902). Karena untuk memperoleh kedudukan orang harus mengeluarkan uang, maka setelah berkuasa tujuan utama adalah mengumpulkan uang. Sedang orang besar hampir selalu menjadi orang jahat. Contohnya dapat dilihat pada para Kaisar Romawi yang mendeklarasikan dirinya sendiri sebagai tuhan dan Napoleon Bonaparte menganggap dirinya sebagai Kaisar. Semua orang besar seperti ini jatuh karena kebesaran mereka sendiri.

Dalam tradisi Islam klasik, politik bukanlah sebuah tindakan kotor, tetapi merupakan tindakan terpuji yang didasarkan pada nilai etika moral agama. (Lewis, 1991). Kaum Muslimin memandang bahwa Allah telah memberikan dasar ajaran yang dijadikan pedoman hidup agar mereka bisa mencapai

kesuksesan di dunia ini maupun di akherat nanti. Dalam filsafat politiknya, Ibnu Khaldun menegaskan bahwa agama merupakan kekuatan yang melekat dengan sumber kekuasaan politik. Agama adalah dasar pembangunan negara, karena bisa menyatukan elemen dalam negara dan menjadikan negara terlalu kuat untuk bisa dikalahkan. Agama menjamin moral kolektif, kebaikan, dan pengabdian, bukan sumber kerusuhan, ambisi individu, dan pengingkaran sipil (Stowasser, 1983). Nilai-nilai agama seperti ini yang dalam istilah modern disebut sebagai “budaya politik” (Lewis, 1991).

Negara Yang Dicitakan.

Pada masa awal Islam nilai-nilai agama dirumuskan menjadi dasar Negara Madinah, *Mithaq al-Madinah* (Piagam Madinah) yang memuat prinsip-prinsip: keadilan, kemerdekaan, persamaan, pluralitas, dan toleransi, yang semua ini dikemas dalam institusi yang disebut syura. Meskipun pada masa awal Islam syura belum melembaga seperti lembaga legislatif sekarang ini, tetapi syura telah berfungsi dengan baik. Nabi Muhammad selalu bermusyawarah dengan para sahabat dalam menentukan masalah kebijakan negara termasuk perang. Politik yang didasarkan pada nilai agama inilah yang Ibnu Khaldun menyebutnya sebagai *siyasah diniyah*, yang orientasinya lebih pada capaian kebahagiaan akherat. Dalam perkembangan berikutnya, tradisi politik ini dikembangkan dan melahirkan beberapa konsep filsafat politik Islam, seperti *al-Madinah al-Fadhilah* (Al-Farabi) yang identik dengan *The City* (Plato).

Karya-karya ini menjelaskan tingkat kedewasaan warga anggota masyarakat dalam hidup bernegara. Karena tingkat kesadaran warga anggota masyarakat sangat tinggi untuk bisa mengatur diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari, maka institusi formal negara terasa tidak diperlukan lagi. Visi ini yang menjadi acuan “gerakan masyarakat madani” untuk menegakkan kehidupan dalam rangka mencapai tujuan *Baldatun Toyibatun wa Rabbun Ghafur*, yang oleh Ibnu Khaldun dikelompokkan sebagai *Siyasah Madaniyah*.

Sikap Politik Warga Muhammadiyah

Salah satu cara untuk mencapai cita-cita politik, yakni tegaknya sebuah sistem berdasarkan nilai-nilai agama. Muhammadiyah telah lama menganut politik adiluhung (*high politics*) yang menekankan pada penanaman etika moral agama ke dalam setiap individu Muslim. Upaya ini ditempuh melalui proses pendidikan guna membentuk manusia yang secara etis memiliki integritas diri. Ahmad Dahlan sendiri memulai misi ini dengan mengajar agama di sekolah Pamong Praja di Magelang. Menurutnya, para lulusan sekolah ini akan menjadi pejabat di daerah yang akan menentukan kebijakan bagi kehidupan orang banyak. Oleh karena itu, membekali mereka dengan pengetahuan agama yang cukup diharapkan bisa membentengi diri dari tindakan dan kebijakan yang merugikan rakyat yang dipimpinya.

Meskipun secara institusional Muhammadiyah condong pada politik *adiluhung*, namun ada juga warga anggotanya yang aktif dalam partai politik (*low politics*). Muhammadiyah memandang bahwa politik di Indonesia sekarang ini mengarah pada perilaku politik yang pragmatik. Para politisi dengan mudah berpindah partai atau mendirikan partai baru serta menjadikan politik bukan sebagai lahan perjuangan untuk menciptakan sistem sosial yang baik, tetapi

sebagai lahan mencari keuntungan materi. Kecenderungan ini menimbulkan perilaku politik yang mengedepankan kepentingan diri dan kelompok di atas kepentingan bangsa dan negara (*Revitalisasi Visi dan Karakter Bangsa*, 2009). Tradisi politik seperti ini lebih mengedepankan kompromi politik yang didasarkan atas kepentingan jangka pendek dan mendorong terjadinya praktik politik transaksional dan uang.

Etika Politik Politisi Muhammadiyah

Mencermati kondisi politik di Indonesia dewasa ini, para “politisi Muhammadiyah” dihadapkan pada situasi yang delematis. Pada satu sisi, “politisi Muhammadiyah” yakin bahwa nilai-nilai etika moral agama yang mereka miliki dirasakan menjadi modal yang sangat penting sebelum terjun ke dunia politik. Modal ini diyakini perlu untuk mendasari setiap proses politik dan pemerintahan sehingga tercipta *good governance* dan *clean government*. Tetapi, pada sisi lain, di lapangan para “politisi Muhammadiyah” melihat kenyataan yang berbeda. Sistem politik yang sangat longgar berdampak pada rekrutmen politisi yang tidak selektif dan tidak berkualitas. Nilai etika moral agama seperti yang disarankan oleh Ibnu Khaldun untuk melandasi setiap proses politik, ternyata tidak nampak dalam proses rekrutmen serta praktik politik Indonesia kontemporer.

Di Indonesia, orang yang memiliki cacat moral tidak sulit untuk menjadi pejabat publik, apakah di partai atau di birokrasi pemerintahan. Di negara yang paling sekular di dunia, yakni Amerika Serikat, hal ini tidak akan terjadi. Di sana, seorang pejabat publik harus seteryl dari cacat moral. Hal ini sangat ironis apabila diingat bahwa mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama, ternyata, nilai etika moral agama tidak mampu mewarnai perilaku para politisi dan proses politik. Pertanyaannya, siap dan mampukah “politisi Muhammadiyah” merubah praktik politik seperti yang terjadi selama ini. Bahasa yang ambigu, yang sering merefleksikan perbedaan antara ucapan dan tindakan, politik uang, manipulasi, dan tindakan lain yang bertentangan dengan etika moral agama dan hati nurani merupakan gejala yang mewabah di dunia politik Indonesia. Di sinilah para “politisi Muhammadiyah” dihadapkan pada pilihan yang sangat dilematis: terjun ke politik praktis harus mampu merubah praktik politik seperti ini, berada di luar politik berarti membiarkan praktik ini akan terus berlanjut.

Tradisi Politik Muhammadiyah

Disebabkan karena Muhammadiyah bukan partai politik, maka orang luar mengalami kesulitan untuk memahami tradisi politik yang berkembang di Muhammadiyah. Tetapi, paling tidak, ada tiga ungkapan yang sering diucapkan oleh para petinggi Persyarikatan. Pertama, ungkapan “menjaga jarak yang sama” dengan semua partai. Jika ditafsirkan kata “jarak” di sini disamakan dengan “jauh,” yang bisa juga diartikan berada di luar, tidak masuk ke dalam partai. Kalau makna ini yang dimaksudkan, maka Muhammadiyah sebenarnya adalah gerakan non-politik praktis, yang mengekspresikan sikap politiknya ke dalam format *high politics*.

Kedua, “menjaga kedekatan yang sama,” yang dalam Tanwir di Samarinda 22-25 Mei, 2014 lalu disampaikan oleh Wakil Ketua PP Muhammadiyah, Dahlan Rais. Apakah ini maknanya bahwa Muhammadiyah mendekati dan berkomunikasi dengan semua partai politik? Kalau hal ini ya, maka bagaimana bentuknya? Ataupun bermakna bahwa warga Muhammadiyah dibebaskan untuk memilih dan masuk ke partai politik yang sesuai dengan aspirasi politik masing-masing? Kelemahan pilihan ini akan menjadikan Muhammadiyah sebagai basis konstituen mereka. Akibatnya, tarik ulur di antara “politisi Muhammadiyah” akan terjadi, karena semuanya merebutkan suara dukungan dari basis warga Muhammadiyah. Bahayanya, kalau tarik ulur itu diikuti oleh konflik di antara mereka, bukan tidak mungkin hal ini juga akan berpengaruh terhadap kondisi internal Persyarikatan.

Ketiga, “mendirikan amal usaha politik” yang digagas oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin. Meskipun ini masih merupakan wacana, tetapi dampak terhadap Persyarikatan harus dihitung sebelum wacana ini benar-benar direalisasikan. Karena, “amal usaha politik” pasti berbeda watak dan karakternya dengan amal usaha Muhammadiyah lain yang telah berjalan. Jika politik Indonesia dewasa ini sarat dengan uang, transaksional, bahasa yang *ambiguous*, yang tidak jelas antara ungkapan dan tindakan, fakta yang diucapkan belum tentu benar dengan yang dimaksudkan (*front stage* dan *back stage*). Oleh sebab semua ini akan kontradiksi dengan budaya amar makruf nahi munkar, keikhlasan, sedikit bicara banyak kerja, hidup-hidupilah Muhammadiyah jangan mencari hidup di Muhammadiyah yang selama ini menjadi karakter Muhammadiyah.

Penutup

Berdasarkan dari pengalaman yang nampak, karena ketidaksiapan menghadapi budaya politik seperti yang diuraikan di atas, banyak dari “politisi Muhammadiyah” memperoleh julukan sebagai politisi “amar makruf nahi munkar,” karena tingkah laku, arah politik, serta pernyataan politiknya mudah ditebak (bisa jadi karena ketulusannya). Tetapi, banyak dari mereka ini yang belum bisa, tidak bisa, atau bahkan tidak ingin menyesuaikan dengan lingkungan politik pragmatis, transaksional yang mementingkan kelompok. Padahal, mereka ini sudah terlanjur masuk ke dunia, yang sebelumnya dihindari, namun sebagian mereka sangat mengimpikannya.

Yogyakarta, 25 April 2015

Politik “Narsis” Muhammadiyah: Darwinisme Vs Welas-Asih, Antara Gengsi dan Kebutuhan¹

Oleh: Abdul Munir Mulkhan²

Pendahuluan

Seperti partai Islam umumnya, Muhammadiyah, dalam perkembangannya cenderung elitis, kegiatannya kurang menyantuni lapis bawah warga negara yang mayoritas memeluk Islam. Akibatnya, partai-partai Islam dan Muhammadiyah kurang memperoleh apresiasi lapis bawah umat tersebut. Sepanjang sejarah pemilu, seluruh partai Islam belum pernah didukung mayoritas pemilih di negeri ini yang mayoritas memeluk Islam.³

Pembaruan sosio-ritual memang telah menjadi tradisi kehidupan keagamaan umat negeri ini, namun tanpa formula politik negara-bangsa yang dirancang sebagai realisasi ajaran Islam. Di bidang pendidikan gerakan ini lebih pada akomodasi sistem pendidikan modern dilengkapi pendidikan agama yang sekarang dianut pemerintah. Perumusan ide dasar pendidikan baru dimulai pada Muktamar ke-46 di Yogyakarta tahun 2010 lalu.

Setelah Masyumi bubar, peran Parmusi semakin memudar bagi kepentingan politik Muhammadiyah. Dalam perkembangan Partai Persatuan Pembangunan, Parmusi juga semakin kehilangan posisi. Nasib serupa juga dialami partainya kaum muslim modernis seperti Partai Bulan Bintang. Partai Amanat Nasional yang menempatkan kader terbaik persyarikatan, Amien Rais, sebagai pendiri dan tokoh besar, relatif juga kurang berhasil memanggil aktivis gerakan ini untuk mendukung dan terlibat di dalamnya. Muhammadiyah sendiri bukanlah magnet yang mampu menyerap mayoritas umat lapis menengah ke bawah yang merupakan mayoritas pemilih muslim negeri ini untuk memilih partai kaum muslim modernis tersebut.⁴

¹). Disusun dan disampaikan dalam Seminar Nasional Pra-Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makasar dengan tema “Muhammadiyah dan Negara; Arah Pemikiran dan Gerakan Abad Kedua” diselenggarakan Pascasarjana UMY tanggal 25 April 2015 di Yogyakarta untuk topik “*Budaya Politik Muhammadiyah*”. Beberapa pemikiran dalam makalah ini pernah disampaikan dalam Seminar Kebangsaan dengan Tema “Islam dan Kaum Pinggiran (Reaktualisasi Peran Pemuda dalam Pemberdayaan Kaum P:inggiran)” diselenggarakan oleh IMM Komisariat Universitas Airlangga Surabaya pada 19 April 2015 di Gedung Dakwah Muhammadiyah Jl Sutorejo Surabaya.

²). Guru Besar Ketua Senat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Komisioner Komnas HAM-RI 2007-2012, Wk Sekretaris PP Muhammadiyah 2000-2005; Anggota Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah 1986-2000, 2005-2015

³). Abdul Munir Mulkhan, *Politik Santri: Cara Menang Merebut Hati Rakyat* (Yogyakarta: Kanisius, 2009).

⁴). Ibid.

Pengguna jasa amal usaha pendidikan dan rumah sakit Muhammadiyah di atas, mayoritas datang dari kelas menengah-bawah dan kaum tradisional. Namun, gerakan ini merasa gagal saat tidak bisa mengubah perilaku keagamaan pengguna jasa sosialnya tersebut menjadi pendukung dan aktivis gerakan ini. Kecenderungan demikian berbeda dari program gerakan pada masa kepemimpinan pendirinya, Kiai Ahmad Dahlan. Muhammadiyah pada masa itu bisa disebut sebagai pembela kaum miskin, dhu'afa, proletar (lihat pidato dr. Soetomo saat meresmikan rumah sakit yang kedua tahun 1924 di Surabaya, juga Asas PKO).⁵

Penempatan sasaran program pada konversi pengguna jasa sosial gerakan ini menjadi hambatan bagaimana membangun hubungan dialogis dengan masyarakat lapis bawah dan menengah. Akibatnya, gerakan ini gagal tidak mampu membangun basis politiknya di lapis akar rumput, mayoritas pengguna jasa sosialnya. Tampilan politik gerakan ini yang cenderung "narsis" dan "galau" tersebut mungkin karena menganut strategi politik *nothingness* (tidak kesana-kemari).

Sikap "galau" dan "gamang" di atas bisa dibaca pada doktrin sosial-politik yang disusun di awal kemerdekaan yang semakin kukuh sesudah Masyumi bubar. Relasi dengan (politik) negara relatif diwarnai penuh kegamangan, *benci tapi rindu, menolak politik praktis tapi berhasrat besar memegang jabatan di pemerintahan*. Saat tidak diapresiasi pemenang pemilu, aktivis gerakan ini sering berkomentar: "negara ini akan merugi jika tidak bersedia mendudukkan kader gerakan dalam pemerintahan" atau "jasa Muhammadiyah terhadap bangsa ini terlalu besar untuk hanya diukur dari dukung-mendukung bagi peserta pemilu presiden", dan komentarkomentar semacam itu.

Perilaku Politik Muhammadiyah

Kecenderungan sikap dan perilaku politik Muhammadiyah di atas, terutama berbasis Mukaddimah Anggaran Dasar dan penjelasannya (tafsir) yang di dalamnya terdapat penjelasan tentang strategi perjuangan politik Muhammadiyah. Di dalam tafsir Mukaddimah Anggaran Dasar dinyatakan bahwa Muhammadiyah secara sadar tidak menjadikan politik praktis wilayah perjuangannya karena wilayah itu merupakan medan perjuangan partai politik. Namun gerakan ini secara sadar hendak membangun masyarakat yang adil, sejahtera, bahagia dalam suatu bentuk

⁵). Abdul Munir Mulkhan, *Marhaenis Muhammadiyah: Ajaran dan Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan* (Yogyakarta: Galang Pustaka, 2013).

dan sistem yang disebut sebagai *baldatun thoyyibatun wa robbun ghafur*. Bagaimana hubungan gagasan masyarakat Islam sebenar-benarnya tersebut dengan sistem dan bentuk negara-bangsa, tidak terdapat cukup penjelasan yang bisa dijadikan rujukan, sehingga yang terlihat kemudian ialah semacam strategi politik *nothingness*, tidak kesana dan tidak kemari, tidak menolak partai, tapi juga tidak mendukung satu partai politik.

Rumusan Mukaddimah dan penjelasannya tersebut kiranya patut dikaji ulang sehingga bisa menjadi panduan aktivis gerakan ini dalam memecahkan persoalan politik kebangsaan. Peninjauan ulang atau sekurangnya penafsiran ulang doktrin juga strategi politik itu sudah saatnya dilakukan mengingat saat ini Muhammadiyah tidak lagi menjadi anggota istimewa partai politik seperti Masyumi. Bukan hanya karena Mukaddimah Anggaran Dasar itu disusun tahun 1950-an menjelang Pemilu pertama tahun 1955, Masyumi sudah bubar, tapi juga atas pertimbangan bahwa saat ini tidak ada partai yang representatif bagi kepentingan politik persyarikatan.

Tanpa peninjauan ulang atau penafsiran ulang, “galau” dan “narsis” akan terus menjadi semacam “ideologi” dan doktrin politik bagi aktivisnya, bagai gadis cantik yang rindu dilamar namun tidak gaul, tidak suka saliturahim, bahkan soliter dan tidak memiliki teman bermain. Walaupun kita tahu, terdapat sejumlah tokoh besar dalam dunia politik praktis, sebut saja antara lain Prof. Dr. Amien Rais, namun yang dilakukan tokoh ini lebih sebagai tindakan pribadi, diikhhlaskan, diwakafkan, bukan ditugaskan atas nama gerakan ini. Tidak ada hubungan fungsional atau organis di antara aktivis yang terlibat dalam politik praktis dengan program dan kegiatan persyarikatan.

Dokumen Mukaddimah Anggaran Dasar (MAD) Muhammadiyah tersebut adalah hasil keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-31 di Yogyakarta tahun 1950. Di satu sisi, MAD disusun dalam suasana politik pasca perang kemerdekaan dalam pergolakan politik yang kemudian memicu munculnya gerakan DI/TII dengan NII Kartosuwiryo. Saat itu seluruh gerakan Islam berhasil mencapai konsensus untuk bergabung bersama ke dalam satu wadah Partai Masyumi, walaupun kemudian berantakan. Amal usaha Muhammadiyah belum berkembang seperti sekarang, dan belum seluruh tradisi sosio-ritual yang dipelopori gerakan ini belum menjadi tradisi warga muslim negeri ini.

Sementara situasi politik pasca Orde Baru tidak lagi relevan bagi penerapan gagasan dalam MAD dan penjelasannya. Saat ini hampir seluruh warga Muslim di negeri ini secara relatif sudah menerima tradisi sosio-ritual yang dulu dipelopori Muhammadiyah, bahkan cenderung memaksa diri menjadi modern meniru apa yang dilakukan gerakan ini. Namun, gerakan ini gagal membangun relasi “politik” dengan pengguna jasa sosialnya yang merupakan mayoritas pemilih.

Muhammadiyah dan Gerakan Politik

Jumlah pengikut serta pengguna jasa sosial Muhammadiyah beserta keluarga akan meliputi beberapa puluh juta orang. Muncul sejumlah pertanyaan yang bisa menjadi penanda budaya politik gerakan ini. Pertanyaan yang perlu diajukan itu ialah bagaimana gerakan ini dalam mengelola relasi dengan komunitas pengguna jasa sosialnya tersebut. Selama ini Muhammadiyah bisa disebut belum menggarap pengguna jasa sosialnya bagi kepentingan politik atas alasan yang bersumber dari doktrin berbasis Mukaddimah Anggaran Dasar beserta penjelasannya seperti telah disinggung sebelumnya. Sudah waktunya gerakan ini meninjau ulang atau menafsir ulang doktrin sosial-politiknya tersebut jika ingin mengembangkan gerakan di dalam dinamika politik bangsa.

Beberapa penjelasan berikut ini mungkin bisa memperjelas perlunya gagasan baru atau reinterpretasi atas doktrin politik Muhammadiyah tersebut. Atau, aktivis gerakan ini memilih jalan sunyi dalam dinamika politik Tanah Air. Jika itu yang dipilih, maka tidak perlu mengeluh ketika seluruh kekuatan politik negeri ini tidak tertarik melamar aktivisnya untuk ikut berperan dalam pemerintahan, kecuali hanya saat diperlukan.

Jika kita ingin memahami budaya politik Muhammadiyah, bisa dilihat dari perilaku politik atau bagaimana Muhammadiyah menempatkan partai atau politik kebangsaan dalam dinamika gerakannya. Masalah ini mungkin bisa dibaca dari rumusan tujuan gerakan ini sejak pertama kali berdiri, yang lebih terkait dengan kawasan/ wilayah politik dimana gerakan ini berada. Seperti telah disinggung sebelumnya, Muhammadiyah tidak secara jelas merumuskan bagaimana gerakan ini memandang ide dan praktik Negara-Bangsa, kecuali cita-cita sosial yang disusun sebagai terapan ajaran Islam yang dipahaminya.

Dalam Anggaran Dasar pertama 1914, gerakan ini merumuskan tujuannya seperti tertera pada Statuten hajat persyarikatan artikel 2 yaitu: “a. memajukan dan

menggembirakan pengajaran dan pelajaran agama Islam di Hindia Nederland, dan b. Memajukan dan menggembirakan cara kehidupan sepanjang kemauan agama Islam kepada lid-lidnya (segala sekutunya).”⁶ Artikel ini menunjuk wilayah kerja dalam lingkup kekuasaan politik Hindia Nederland (Belanda).

Setelah kemerdekaan rumusan tujuan gerakan ini menjadi “menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya”. Rumusan tujuan itu berkaitan dengan rumusan Mukaddimah AD pokok pikiran ketiga bahwa “Masyarakat yang sejahtera, aman, damai, makmur dan bahagia hanyalah dapat diwujudkan di atas dasar keadilan, kejujuran, persaudaraan dan gotong royong bertolong-tolongan dengan bersendikan hukum Allah yang sebenar-benarnya lepas daripada pengaruh syaitan dan hawa nafsu. Agama yang dibawa dan diajarkan oleh sekalian Nabi yang bijaksana dan berjiwa suci, adalah satu-satunya pokok hukum dalam masyarakat yang utama dan sebaik-baiknya.”⁷

Perilaku politik gerakan ini antara lain bisa dilihat dari bagaimana gerakan ini menempatkan diri dalam praktik kekuasaan pada masa kolonial dan praktik negara-bangsa pada masa kemerdekaan yang namanya Indonesia seperti terlihat dari kutipan di atas. Lebih jelas masalah ini bisa dibaca di dalam penjelasan atau tafsir Mukaddimah Anggaran Dasar yang disusun Sekretaris PP Muhammadiyah (M. Djindar Tamimi) tahun 1965 seperti uraian berikut.

Dalam topik “Muhammadiyah dan Politik” tafsir Mukaddimah Anggaran Dasar tersebut dinyatakan bahwa: “Muhammadiyah bukan dan tidak akan menjadi partai politik. Muhammadiyah pada dasarnya tidaklah memasuki lembaga-lembaga karya politik. Semuanya itu bukanlah karena meremehkan, takut ataupun benci politik, tetapi semata-mata karena teori dan strategi perjuangannya, serta menyadari bahwa tugas dalam menghadapi bidangnya itu (bidang kemasyarakatan) adalah sudah cukup berat dan mulia. Anggota-anggota Muhammadiyah yang duduk dalam lembaga-lembaga kerja politik seperti dewan-dewan perwakilan, pemerintahan, partai-partai politik atas nama perorangan, tidak atas nama organisasi.”⁸

Dinyatakan bahwa: “Sedang mengenai soal pokok/ prinsip politik atau teori politik yang menyangkut kepentingan Islam atau kepentingan Muhammadiyah,

6). *Statuten Moehammadiyah*, Gouvernements besl. 22 Augustus 1914 No. 81; Dioebah dengan Gouv. Besl 16 Augustus 1920 No. 40; dan Dioebah lagi dengan Gouv. Besl. 2 Sepetmber 1921 No. 36.

7). Djindar Tamimi, *Tafsir Mukaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah* (Yogyakarta, PP Muhammadiyah, 1965), hlm 8-9.

8). *Ibid.*, hlm 43-44.

Muhammadiyah dapat menghadapi secara organisatoris. Hanya caranya menurut Muhammadiyah yang khas, antara lain ialah dengan tanpa ambisi politik, tidak sebagaimana yang lazim dilakukan oleh sesuatu partai politik. Semata-mata adalah Da'wah Islam dan amar-ma'ruf nahi-mungkar."⁹

Dalam naskah di atas, Muhammadiyah menyatakan: "Yang menjadi tujuan dan cita-cita Muhammadiyah secara mutlak ialah terwujudnya suatu masyarakat dimana kesejahteraan, kebahagiaan dan kebaikan/ keutamaan luas merata: masyarakat yang ditegakkan di atas keadilan, kejujuran persaudaraan gotong-toyong bertolong-tolongan, dengan bersendikan hukum Allah yang sebenar-benarnya lepas dari pengaruh syaitan dan hawa nafsu. Masyarakat yang demikian itulah yang diformulir dengan singkat: Masyarakat Islam Yang Sebenar-benarnya. Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu, adalah merupakan rahmat Allah bagi seluruh alam, yang akan menjamin sepenuhnya: keadilan, persamaan, keamanan, keselamatan dan kebebasan bagi semua anggautanya."¹⁰

Muhammadiyah membagi wilayah perjuangannya yaitu masyarakat dalam dua wilayah atau front. Dalam topik tentang "teori perjuangan Muhammadiyah" dinyatakan: "Untuk mencapai maksud dan tujuan perjuangan Islam, ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, segala saluran yang akan langsung mempengaruhi bentuk dan sifat kehidupan masyarakat haruslah dipergunakan. Saluran yang akan langsung mempengaruhi bentuk dan sifat kehidupan masyarakat ada dua, ialah: a. Bidang kenegaraan/ Politik (memegang kekuasaan negara dan pemerintahan), untuk membuat undang-undang, peraturan-peraturan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaannya. b. Bidang kemasyarakatan (menguasai masyarakat), untuk memberi pengertian dan membentuk kesadaran masyarakat."¹¹

"Dilihat dari segi perjuangan Islam umum adalah menjadi kewajiban ummat Islam untuk mengisikan perjuangannya dalam kedua bidang tersebut, agar keduanya dikuasai ummat Islam untuk melaksanakan maksud dalam mencapai tujuan cita-citanya. Menurut Muhammadiyah sejak dahulu, membagi perjuangan ummat Islam menjadi dua front, masing-masing menghadapi tiap-tiap bidang tersebut (bidang kenegaraan/ politik dan bidang kemasyarakatan). Masing-masing berjalan

⁹). Ibid., hlm 44.

¹⁰). Ibid., hlm 47.

¹¹). Ibid., hlm 39-40.

sendiri-sendiri dan dengan caranya sendiri-sendiri, tetapi tetap dengan saling pengertian dan dalam tujuan yang sama.”¹²

Karena itu “Muhammadiyah secara organisatoris dan dengan kesadarannya telah menempatkan dirinya dan memilih berjuang dalam bidang kemasyarakatan. Muhammadiyah berjuang merebut massa dengan memberikan pengertian dan membentuk kesadaran masyarakat, agar masyarakat mau menerima dan melaksanakan ajaran-ajaran Islam dan ketentuan-ketentuannya. Sedang untuk mengisi perjuangan dalam bidang kenegaraan/ politik, Muhammadiyah berpendapat haruslah dilakukan dengan alat perjuangan lain (alat perjuangan politik) di samping dan di luar Muhammadiyah, yang dapat memperjuangkan cita-cita kenegaraan menurut faham dan visi Muhammadiyah. Dalam pada itu, demi untuk keselamatan perjuangan Muhammadiyah, perlulah para anggota dan terutama para pemimpinnya memiliki kesadaran dan pandangan politik (orientasi politik).”¹³

Muhammadiyah menyatakan bahwa: “Menentukan teori, strategi dan taktik perjuangan bukanlah termasuk sesuatu yang diatur secara mutlak oleh agama, tetapi hal itu adalah merupakan pikiran dan perhitungan yang termasuk masalah keduniaan. ...Muhammadiyah tidak mengerjakan praktik politik. Muhammadiyah bukan dan tidak akan menjadi partai politik. Muhammadiyah pada dasarnya tidaklah memasuki lembaga-lembaga karya politik. Semuanya bukanlah karena meremehkan, takut ataupun benci politik, tetapi semata-mata karena teori dan strategi perjuangannya, serta menyadari bahwa tugas dalam menghadapi bidangnya itu (bidang kemasyarakatan) adalah sudah cukup berat dan mulia. Anggota-anggota Muhammadiyah yang duduk dalam lembaga-lembaga karya politik seperti dewan-dewan perwakilan, pemerintahan, partai-partai politik atas nama perseorangan, tidak atas nama organisasi.”¹⁴

Muhammadiyah Pasca Masyumi

Kini, setelah partai Masyumi bubar, nampak tidak ada lagi partai politik yang dipercaya Muhammadiyah sebagai penyalur kepentingan politiknya. Penjelasan MAD menyatakan: “Pada suatu waktu bisa terjadi bahwa alat perjuangan politik umat Islam yang dapat memperjuangkan cita-cita kenegaraan menurut faham dan

¹²). Ibid., hlm 40.

¹³). Ibid., hlm 41.

¹⁴). Ibid., hlm 41-44.

visi Muhammadiyah tidak ada. Maka pada ketika itu sebagai keadaan darurat. Muhammadiyah disamping menghadapi tugas pokoknya dalam bidang kemasyarakatan, pun dibebani pula untuk lebih aktif dan intensif memperhatikan persoalan-persoalan politik. Dalam keadaan yang demikian perlulah diatur cara kerja yang sebijaksana-bijaksana mungkin.”¹⁵

Di awal berdirinya, sasaran program (dakwah) gerakan ini selalu terkait nasib penduduk Hindia Timur, tidak terbatas kaum muslimin secara eksklusif, tapi lebih pada dimensi kemanusiaanya. Menjelang dan masa kemerdekaan, gerakan ini lebih berorientasi nasib umat Islam, tanpa eksplisit menempatkan masalah kebangsaan sebagai problem gerakan, tapi khusus nasib umat Islam. Baru setelah Orde Baru, gerakan ini mulai menaruh perhatian pada persoalan kebangsaan seperti muncul gagasan tiga tingkat pengkaderan, yaitu: kader bangsa, kader Islam dan kader persyarikatan. Dalam tor buku ini juga mempertanyakan relasi gerakan ini dengan problem kebangsaan. Format tujuan Muhammadiyah tidak secara eksplisit menunjuk bangsa, tapi masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, diubah menjadi masyarakat utama, kemudian diubah kembali pada gagasan tentang masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Pertanyaannya, apa relasi masyarakat Islam yang sebenar-benarnya atau masyarakat utama dengan gagasan kebangsaan? Dalam MAD disebutkan bahwa sasaran dakwah gerakan ini ialah umat dakwah dan umat ijabah. Umat dakwah ialah mereka yang belum nenerima Islam, sementara umat ijabah ialah umat yang sudah menerima Islam dengan sasaran pelurusan dan pemurnian keislamannya. Lalu apa hubungannya dengan berbagai ide kebangsaan? Mungkinkah akibat pemikiran Islam memang tidak atau kurang mengenal ide bangsa dalam sistem republik atau kerajaan, tetapi sistem khilafah tanpa batas teritori negara bangsa? Apa hubungan kecenderungan ini dengan gagasan Kartosuwiryo dengan Darul Islam dan NII-nya?

Di abad kedua usia gerakan ini perlu menjawab pertanyaan tersebut secara jernih sebagai bagian dari kecerdasan dan kearifan lokal dalam rangka penegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam yang sebenar-benarnya. Jawaban atas beberapa pertanyaan tersebut akan menjadi pemandu kerja politik kebangsaan bagi aktivis gerakan ini di masa depan, saat publik muslim negeri ini bahkan “memaksa diri” menjadi Muhammadiyah walaupun tetap enggan mengaku sebagai pengikut

¹⁵). Ibid., hlm 48.

Muhammadiyah. Di masa lalu, mayoritas warga Muslim negeri ini menolak atas inovasi ijtihadi yang dilakukan Muhammadiyah yang dinilai haram, tapi kini mereka ramai-ramai menjadi Muhammadiyah tapi tetap enggan mengaku sebagai warga atau pengikut dari persyarikatan Muhammadiyah.

Aktivis gerakan ini memang terlihat lebih mandiri dan hidup soliter, karena itu mudah digerakan dimobilisasi untuk kerja-kerja kreatif profesional dalam tata-kelola modern seperti di bidang pendidikan dan rumah sakit. Setiap sekolah dan rumah sakit di daerah memiliki cara kerja dan tata kelola unik, berkembang dan tumbuh secara unik pula. Sementara kerja politik memerlukan aura komunal dan solider dalam satu komando, yang sulit bagi aktivis gerakan ini untuk dikordinasi. Mungkin penting dikembangkan sebuah paradigma gagasan yang implementasinya bisa berbeda-beda dalam organisasi partai politik yang juga berbeda. Namun gerakan ini perlu melakukan langkah-langkah strategis dalam mengelola paradigma tersebut.

Di saat yang sama, Muhammadiyah itu merasa besar dan memiliki kekuatan politik yang harus diperhitungkan partai dan kelompok politik di negeri ini. Aktivis gerakan ini beragumen bahwa jika partai dan kelompok politik itu tidak melakukan hal tersebut, bukan Muhammadiyah yang rugi, melainkan negeri ini yang akan rugi. Perasaan besar (narsis?) itu bagaikan khutbah di atas bukit tanpa ada jamaah yang mendengar. Indah dan menenteramkan ketika dalam praktik politik ternyata tidak ada kader aktivisnya yang diundang untuk terlibat dalam pemerintahan.

Sesudah bubarnya Masyumi, saat itu Muhammadiyah ialah anggota istimewa (bahwa anggota Muhammadiyah eks-officio anggota masyumi), gerakan ini tampak gamang dalam menghadapi dinamika politik nasional, juga di tingkat lokal. Jika di masa lalu, kepentingan politik gerakan ini diperankan Masyumi, kini tidak ada lagi partai yang ditempatkan Muhammadiyah sebagai organ politik seperti Masyumi. Berdalih netral dalam politik, tapi menggerutu saat tidak diundang untuk terlibat dalam jabatan pemertintahan, menempatkan gerakan ini seperti selalu dihadapkan pada posisi dilematis lima tahunan. Para aktivisnya selalu menghibur diri bahwa Indonesia akan merugi ketika tidak melibatkan Muhammadiyah melalui undangan kadernya untuk duduk dalam pemerintahan.

Jika di masa lalu ekspresi politik muslim modernis tergolong terkonsolidasi dalam Masyumi, saat ini terpolarisasi ke dalam banyak partai yang kadang bukan hanya tidak terkordinasi, bahkan saling menikam. Di antara aktivis beda partai pun

sulit berkordinasi, selain tidak ada upaya dari Muhammadiyah untuk melakukan kordinasi. Sementara gerakan ini belum merumuskan bagaimana memperjuangkan kepentingan politik dalam sistem politik mutakhir, gerakan ini lebih sibuk mengajak orang luar untuk menaruh perhatian pada kekuatan “politik” yang dirasa dimiliki, tapi “kurang gizi” itu.

Memihak Kaum Mustad’afin

Gelar *The biggest Islamic Organization* lebih terbatas pada lembaga pendidikan dan rumah sakit, sebentar lagi akan mendapat saingan serius dari sesama organisasi Islam yang lahir lima belas tahun kemudian sesudah Muhammadiyah. Seluruh dunia memang mengakui kepiawaian gerakan ini mengelola pendidikan dan rumah sakit, tapi patut dipertanyakan mengenai apa yang disumbangkan gerakan ini pada pembaruan pendidikan dan rumah sakit tersebut, kecuali membuka mata publik muslim negeri ini untuk sadar pendidikan dan sadar kesehatan. Mukhtamar ke-46 di Yogyakarta baru merumuskan *blueprint* pendidikan, termasuk di dalamnya Filsafat Pendidikan Muhammadiyah, tapi bagaimana hubungannya dengan praktik di lapangan, belum juga terumuskan secara jelas.

Di masa lalu gerakan ini selalu menjadikan penderitaan penduduk Hindia Timur sebagai sasaran tanpa pretensi mengubah mengkonversi keagamaan dan paham keagamaan. Kini tidak ada lagi penduduk muslim negeri ini yang menolak pendidikan dan rumah sakit. Kaum tradisionalis kini bahkan sudah “memaksa” diri menjadi Muhammadiyah dengan daya upaya mendirikan sekolah hingga perguruan tinggi dan rumah sakit, serta mengelola zakat, infaq dan korban dengan manajemen modern, namun enggan mengaku Muhammadiyah. Nasib lebih tragis dialami di dunia politik, ketika aktivis gerakan ini memandang seluruh kekuatan politik negeri ini wajib mengakomodasi dan mengundang kader gerakan ini untuk ditempatkan pada beragam jabatan politik, namun selalu berakhir dengan harapan “gigit jari”.

Di saat kampanye partai dalam pemilu legislatif atau pemilu presiden, Muhammadiyah melarang aktivisnya secara terbuka terlibat mendukung partai atau Capres, namun gerakan ini berharap segera dilamar elite pemenang pemilu. Hingga di akhir cerita, ramai-ramai *ndaku* para anggota parlemen dan kabinet sebagai kader dengan berbagai indikator antara lain “asal berbau” Muhammadiyah (pernah mengenyam pendidikan SD walau cuma setahun, dlsb). Sementara yang jelas-jelas warga persyarikatan, anak ketua cabang atau ketua PDM, sekolahnya di pesantren

modern (seperti Kapolri Komjen Badrodin Haiti) dalam praktik keseharian jabatan kurang tersentuh tradisi gerakan tapi lebih dekat tradisi Islam Jawa yang dituduh TBC-an, Islamnya belum selesai, atau bahkan menyimpang dari Islam.

Kepentingan politik Muhammadiyah, mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dalam *baldatun thoyyibatun wa robbun ghafur* lebih mungkin dicapai ketika gerakan ini kembali menjadi pembela kaum tertindas, papa, pinggiran dan proletar. Mayoritas penduduk negeri ini adalah pemeluk Islam, mayoritas bekerja sebagai buruh dan tani, pendapatan setingkat UMR. Di abad kedua, ketika seluruh gerakan Islam sudah menerima gagasan pembaruan sosio-ritualnya, adalah strategis jika gerakan ini memantapkan kembali keberpihakannya pada kaum buruh, papa, dan pinggiran serta dluafa di luar batas-batas keagamaan seperti yang di masa lalu dirumuskan dalam Asas PKO.

Asas PKO (U): "Pertolongan Moehammadijah b/g PKO itoe, boekan sekalkali sebagai soatoe djaring kepada manoesia oemoemnja, soepaja dapat menarik hati akan masoek kepada agama Islam atau perserikatan Moehammadijah, itoe tidak, akan tetapi segala pertolongannja itoe semata-mata karena memenoehi kewadajiban atas agamanja Islam terhadap segala bangsa, tidak memandang agama, tidak mengandoeng maksoed oentoek membela sesoetaoe kepentingan diri dan bangsanja, soepaja tetap dalam kemenangan di atas fehak bangsa jang tertolong. Atau tidak poela bermaksoed, soepaja sisengsara itoe tinggal tetap dalam pertolongannja, akan tetapi bermaksoed segala bahaya kesangsaraan dan kehinaan terhindar dari pada masing-masing diri dan bangsanja".¹⁶

Saat menyambut peresmian rumah sakit (poliklinik) yang kedua tahun 1924 di Surabaya, dr. Soetomo menyatakan: "...Perserikatan kami ini, sebagai juga perserikatan lainnya yang memang macam Jawa, yang bertabiat (bersifat) menjadikan dan memperbaiki, lahirnya Vorstenlanden, yakni tempat yang orang Jawanya masih memegang kejawaannya."¹⁷

dr. Soetomo selanjutnya menyatakan: "Meskipun perserikatan kami itu kelihatannya dan wujudnya ada berlainan dengan perserikatan lainnya, yang timbul

¹⁶). Lihat Azas PKO dalam *Almanak Moehammadijah 1354 H (1935)*, hlm 120.

¹⁷). Lihat Pidato dr. Soetomo "Etika Welas-Asih Vs Darwinisme" saat meresmikan RSU-PKU Surabaya Tahun 1924. Teks Pidato dr. Soetomo (Medisch Adviseur H.B. PKO Muhammadiyah) dalam Pembukaan Rumah Sakit Muhammadiyah Surabaya, di Sidodadi Rumah Nomor 57, pada 14 September 1924 (teks asli dalam bahasa Belanda dikutip dari Suara Muhammadiyah Tahun ke 5 Oktober 1924 hlm 170-171). Teks itu disajikan seperti yang termuat di SM tahun 1924, kecuali ejaan yang disesuaikan dan pemberian judul seperti rumusan judul "Etika Welas-Asih Vs Darwinisme".

di dunia pada waktu yang kurang lebih bersama-sama, yakni Perserikatan kami ini ada bersifat Islam, tetapi pada hakikatnya Perserikatan kami itu tiada lain hanya satu dari pada beberapa pertunjuk lahirnya pikiran baru, yang menggetarkan bahagian antero dunia yang berfikir. Lagi pula boleh dikatakan akan timbangan atau perlawanan pengajaran Darwin. Bukankah pengajaran Darwin itu berasas peperangan hidup? Sudah tentu saja kejadiannya pengajaran ini menindas dan memusnakan yang bersifat lembek. Karena bermaksud untuk diri sendiri, supaya dalam dunia ini mendapat tempat yang baik."¹⁸

Selanjutnya, dr. Soetomo menyatakan: "Sedang fikiran baru itu timbul dari pada asas yang lain, yakni asas cinta-kasih. Asas cinta-kasih ini sudah barang tentu tiada mengijinkan, tiada memberi kesempatan, beberapa untuk keperluan diri sendiri. Akan tetapi mewajibkan berkorban untuk mencapai hidup mulia bagi umum. Dan kalau begitu, apakah yang disebut cinta-kasih pada orang-tua, pada isteri dan anak atau lainnya? Tiada lain hanyalah mengurbankan diri untuk keselamatan dan bahagiaan orang lain. Begitu juga Perserikatan kami ini kemasukan (kentelan, Jawa) fikiran cinta-kasih, yang akan kita curahkan kepada sesama manusia, supaya dengan cinta-kasih dan kurban dapatlah tercapai hidup mulia yang kita maksud seperti tersebut di atas."¹⁹

dr. Soetomo selanjutnya menyatakan: "Kita mendirikan sekolahan, kita ada mendirikan Hizbul Wathan untuk memajukan badan kita. Anak yatimpun dapat pemeliharaan dari kita. Banyaklah jalan yang hendak kita jalani. Tetapi, haruslah disebutkan di sini, bahwa start kita ada sempit. Besuk pagi akan kita buka poliklinik (rumah sakit/pen) ini. Siapa juga, baik orang Eropa, baik orang Jawa (orang Bumi), baik Cina atau bangsa Arab, boleh datang kemari, akan ditolong dengan cuma-cuma, asalkan betul miskin. Kami mengharap tuan-tuan dan nyonya-nyonya, hendaknya luluslah poliklinik ini berdirinya, juga oleh bantuan tuan-tuan sekaliannya. Pekerjaan poliklinik yang penuh dengan kurban dan kemanusiaan."²⁰

Penutup

Pada akhirnya gerakan ini perlu menghidupkan kembali keberpihakan pada kaum dluafa, pinggiran, miskin, papa, dan proletar, seperti terlihat dalam Asas PKO di landasi etika yang disebut dr. Soetomo Welas Asih. Menurut dr. Soetomo aksi

¹⁸). Ibid.

¹⁹). Ibid.

²⁰). Ibid.

kemanusiaan berbasis welas asih adalah paradigma baru tandingan paradigma Darwinisme peradaban Barat.²¹ Dari sana berbasis ketertiban organisasi, warga yang soliter, masyarakat sipil yang tiada tandingannya, Muhammadiyah akan memiliki daya tawar politik yang tinggi.

²¹). Abdul Munir Mul Khan, *Jejak Pembaruan Sosial-Kemanusiaan Kiai Ahmad Dahlan* (Jakarta: Penrbit Buku Kompas, 2010).

KOMPLEKSITAS RELASI MUHAMMADIYAH DAN POLITIK

Oleh: DR H Haedar Nashir, M.Si.

**"Dari Makassar ke Makassar
Khittah jadi pegangan dasar"**
(Prof. H. M. Din Syamsuddin)

Hubungan Muhammadiyah dengan politik selalu aktual untuk dibahas sekaligus menjadi agenda yang krusial dalam perkembangan gerakan Islam ini. Lebih khusus jika berkaitan dengan politik kekuasaan menyangkut perjuangan menempati posisi dalam pemerintahan, yang dikenal sebagai politik praktis atau *real-politics*. Momentum Pemilu lima tahunan, termasuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dengan segala rangkaianannya selalu memunculkan isu hangat dan tuntutan perpolitikan Muhammadiyah. Apalagi ketika Muhammadiyah tidak mendapatkan jabatan dalam pemerintahan tensi dan semangat berwacana pentingnya menggarap lahan politik makin tinggi.

Pertanyaannya cenderung sama, bagaimana sebaiknya hubungan atau keterlibatan Muhammadiyah dengan dunia politik praktis? Apakah Muhammadiyah tetap berjarak dan tidak mengambil bagian dengan resiko tidak memperoleh posisi di pemerintah? Jika Muhammadiyah mengambil peran dalam politik harus seperti apa? Bagaimana hubungan Muhammadiyah dengan partai politik? Apakah Muhammadiyah harus mendirikan atau memiliki partai politik? Sederet pertanyaan sejenis selalu muncul, lebih-lebih ketika jelang bermuktamar.

Karena demikian semangat dalam mewacanakan relasi Muhammadiyah dan politik maka tidak jarang memberikan vonis yang cenderung negatif atau kurang proporsional terhadap gerakan Islam ini. Sebagian menilai Muhammadiyah tidak memiliki pandangan dan sikap yang jelas tentang politik, bahkan tidak memiliki rancang-bangun mengenai negara. Pandangan lain menyebutkan Muhammadiyah itu alergi dan anti-politik karena tidak mau terlibat dalam kancah politik praktis. Terdapat pula yang berpendapat lebih keras bahwa Muhammadiyah itu hanya menginginkan posisi di pemerintahan tetapi tidak ingin terlibat dalam perjuangan politik praktis, ibarat ingin nangkanya tetapi tidak ingin getahnya alias "tidak ingin bekeringat". Penilaian negatif bahkan ada yang menyentuh ke ranah teologis dengan menyatakan Muhammadiyah itu sekuler karena memisahkan agama dan politik.

Beragam penilaian, pendapat, dan pandangan tersebut tentu niatnya baik sebagai kritik dan masukan agar Muhammadiyah melalui orang-orangnya mendapat tempat dalam ranah pemerintahan untuk kepentingan dakwah. Namun pendapat atau pemikiran yang dikemukakan itu tentu perlu dikaji secara mendalam dan matang dalam berbagai faktor, aspek, dan kaitan. Hal itu karena hubungan Muhammadiyah dengan dunia politik praktis sangatlah kompleks, melibatkan banyak pihak, dan rumit. Dunia politik praktis bahkan seringkali keras, berliku, bahkan tidak jarang penuh permainan yang dikenal dengan siasat dan muslihat. Ini bukan opini tetapi realitasnya memang demikian. Hal tersebut bukan soal berani atau takut atau terlalu hati-hati, tetapi karena menyangkut urusan yang rumit dan kompleks sekaligus menyangkut keberadaan dan masa depan Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang besar dan telah berkembang lebih satu abad.

Pandangan Politik

Politik dalam khazanah ilmu politik luas sekali cakupannya. Jika diklasifikasikan dari sudut ilmu politik, politik itu menyangkut lima aspek penting yang berkaitan dengan benegara. Kelima aspek itu pertama, ialah pengoperasian negara, yaitu bagaimana negara sebagai pilar utama politik diatur dengan prinsip dan cara-cara bernegara sebagaimana lazimnya dalam sistem politik modern. Kedua, perjuangan kekuasaan (power struggle), yaitu bagaimana memperebutkan, mempertahankan, dan mengurus hal ihwal yang berkaitan dengan kedudukan atau jabatan dalam pemerintahan. Aspek kedua inilah yang sering disebut "real politics", yang dalam istilah Prof Amien Rais disebut "low politics" (politik rendah) sebagai lawan dari "high politics" (politik adiluhung), sedangkan dalam Muhammadiyah dikenal dengan istilah politik-praktis yang diperkenalkan pada Sidang Tanwir tahun 1959 di Kaliurang Yogyakarta ketika membahas hubungan Muhammadiyah dengan Masyumi.

Dimensi ketiga dari politik ialah tentang *public policy*, yaitu bagaimana kebijakan-kebijakan umum yang menyangkut hajat hidup orang banyak ditetapkan dan dijalankan. Keempat, soal *public interest*, yaitu bagaimana kepentingan-kepentingan umum diintegrasikan atau diakomodasikan untuk menjadi keputusan yang menguntungkan hajat hidup rakyat atau warga negara. Kelima, public good, yaitu berkaitan dengan kebaikan umum, termasuk kehidupan moral, keadilan, dan hal-hal yang membawa nilai serta dampak positif dalam kehidupan berangsa dan bernegara.

Dari cakupan politik tersebut tampak sekali luas dimensi kehidupan politik yang harus digarap dalam sebuah negara dan bangsa. Politik dalam makna politik-praktis yang berkaitan dengan memperebutkan jabatan atau posisi dalam pemerintahan baik dalam eksekutif maupun legislatif dan yudikatif serta lembaga kenegaraan lainnya hanyalah salah satu aspek dari politik. Semuanya penting, tetapi tentu yang disebut aspek kedua itu menjadi lebih penting karena menyangkut aktor atau pelaku yang menempati kedudukan dalam pemerintahan dengan segala otoritas dan sumberdaya yang dimilikinya.

Muhammadiyah membagi politik ke dalam dua kategori pokok yaitu bersifat umum politik kebangsaan atau politik kenegaraan, yang khusus politik kekuasaan atau politik praktis. Prof Amien Rais membaginya yang pertama disebut *high-politics* dan yang kedua *low-politics*. Dua ranah tersebut dapat tidak dapat dipisahkan tetapi dapat dibedakan satu sama lain. Dalam sistem politik modern politik dalam makna umum menjadi urusan seluruh kekuatan bangsa dan alat-alat negara, sedangkan politik praktis secara khusus salurannya harus melalui dan dilakukan oleh partai politik. Hingga batas tertentu kekuatan masyarakat dapat melakukan peran politik praktis dalam fungsi sebagai kelompok kepentingan (*interest group*) atau menurut Prof Din Syamsuddin disebut kelompok aspiran murni, yang berperan melakukan lobi, komunikasi, kritik, dan memberikan tekanan kepada pemerintah atau pihak-pihak yang berkaitan dengan kehidupan bernegara. Jihad konstitusi yang dilakukan Muhammadiyah termasuk fungsi kelompok kepentingan, demikian pula ketika melakukan apresiasi atau sebaliknya kritik terhadap pemerintah.

Muhammadiyah sebenarnya memahami betul pemikiran dan dinamika politik, baik dalam makna umum maupun khusus. Jika dibaca Khittah tahun 1956, 1969, 1971, 1978, dan 2002 maka tampak sekali pemahaman Muhammadiyah mengenai politik dengan segala dimamikanya. Kiprah Muhammadiyah maupun para elitnya dalam dunia politik juga luar biasa, yang melahirkan sejumlah Khittah tersebut. Maka tidak benar jika ada yang menilai Muhammadiyah tidak paham politik, alergi politik, anti politik, maupun gamang dan galau dalam menghadapi dunia politik. Penilaian tersebut terluar menyederhanakan persoalan dan memandang Muhammadiyah seolah "anak kemarin sore" di dunia politik.

Muhammadiyah juga tidak nihil pandangan mengenai politik. Dalam konteks pandangan keagamaan, Muhammadiyah juga memiliki pemahaman yang jelas mengenai politik. Muhammadiyah tidaklah sekuler hanya karena tidak berpolitik-praktis.

Muhammadiyah memiliki pandangan yang jelas tentang politik berdasarkan pandangan Islam yang dipahaminya. Muhammadiyah juga memiliki argumentasi yang jelas kenapa tidak berkiprah dalam perjuangan politik praktis atau politik untuk memperebutkan jabatan dalam pemerintahan. Cobalah simak antara lain dalam Khittah Denpasar tahun 2002, tampak sekali pandangan Muhammadiyah mengenai politik.

Dalam "Khittah 2002" yaitu "**KHITTAH MUHAMMADIYAH DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA**" (Keputusan Tanwir Muhammadiyah di Denpasar tahun 2002) dinyatakan secara gamblang dan rinci dengan kutipan lengkap sebagai berikut:

Muhammadiyah adalah Gerakan Islam yang melaksanakan Dakwah Amar Makruf Nahi Munkar dengan maksud dan tujuan menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah berpandangan bahwa Agama Islam menyangkut seluruh aspek kehidupan meliputi aqidah, ibadah, akhlaq, dan mu'amalat duniawiyah yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan harus dilaksanakan dalam kehidupan perseorangan maupun kolektif. Dengan mengemban misi gerakan tersebut Muhammadiyah dapat mewujudkan atau mengaktualisasikan Agama Islam menjadi rahmatan lil-'alamin dalam kehidupan di muka bumi ini.

Muhammadiyah berpandangan bahwa berkiprah dalam kehidupan bangsa dan negara merupakan salah satu perwujudan dari misi dan fungsi melaksanakan dakwah amar makruf nahi munkar sebagaimana telah menjadi panggilan sejarahnya sejak zaman pergerakan hingga masa awal dan setelah kemerdekaan Indonesia. Peran dalam kehidupan bangsa dan negara tersebut diwujudkan dalam langkah-langkah strategis dan taktis sesuai kepribadian, keyakinan dan cita-cita hidup, serta khittah perjuangannya sebagai acuan gerakan sebagai wujud komitmen dan tanggungjawab dalam mewujudkan "Baladun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur".

Bahwa peran dalam kehidupan bangsa dan negara dapat dilakukan melalui dua strategi dan lapangan perjuangan. Pertama, melalui kegiatan-kegiatan politik yang berorientasi pada perjuangan kekuasaan/kenegaraan (*real politics*, politik praktis) sebagaimana dilakukan oleh partai-partai politik atau kekuatan-kekuatan politik formal di tingkat kelembagaan negara. Kedua, melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang bersifat pembinaan atau pemberdayaan masyarakat maupun kegiatan-kegiatan politik tidak langsung (*high politics*) yang bersifat mempengaruhi kebijakan negara dengan perjuangan moral (*moral force*) untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik di tingkat masyarakat dan negara sebagaimana dilakukan oleh kelompok-kelompok kepentingan (*interest groups*).

Muhammadiyah secara khusus mengambil peran dalam lapangan kemasyarakatan dengan pandangan bahwa aspek kemasyarakatan yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat tidak kalah penting dan strategis daripada aspek perjuangan politik kekuasaan. Perjuangan di lapangan kemasyarakatan diarahkan untuk terbentuknya masyarakat utama atau masyarakat madani (*civil society*) sebagai pilar utama terbentuknya negara yang berkedaulatan rakyat. Peran kemasyarakatan tersebut dilakukan oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti halnya Muhammadiyah. Sedangkan perjuangan untuk meraih kekuasaan (*power struggle*) ditujukan untuk membentuk pemerintahan dalam mewujudkan tujuan negara, yang peranannya secara formal dan langsung dilakukan oleh partai politik dan institusi-institusi politik negara melalui sistem politik yang berlaku. Kedua peranan tersebut dapat dijalankan secara objektif dan saling terkait melalui bekerjanya sistem politik yang sehat oleh seluruh kekuatan nasional menuju terwujudnya tujuan Negara.

Muhammadiyah sebagai organisasi sosial-keagamaan (organisasi kemasyarakatan) yang mengemban misi dakwah amar makruf nahi munkar senantiasa bersikap aktif dan konstruktif dalam usaha-usaha pembangunan dan reformasi nasional sesuai dengan

khittah (garis) perjuangannya serta tidak akan tinggal diam dalam menghadapi kondisi-kondisi kritis yang dialami oleh bangsa dan negara. Karena itu, Muhammadiyah senantiasa terpenggil untuk berkiprah dalam kehidupan bangsa dan negara dengan berdasarkan pada khittah perjuangan sebagai berikut:

1. Muhammadiyah meyakini bahwa politik dalam kehidupan bangsa dan negara merupakan salah satu aspek dari ajaran Islam dalam urusan keduniawian (*al-umur ad-dunyawiyat*) yang harus selalu dimotivasi, dijiwai, dan dibingkai oleh nilai-nilai luhur agama dan moral yang utama. Karena itu diperlukan sikap dan moral yang positif dari seluruh warga Muhammadiyah dalam menjalani kehidupan politik untuk tegaknya kehidupan bangsa dan negara.
2. Muhammadiyah meyakini bahwa negara dan usaha-usaha membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, baik melalui perjuangan politik maupun melalui pengembangan masyarakat, pada dasarnya merupakan wahana yang mutlak diperlukan untuk membangun kehidupan di mana nilai-nilai Ilahiah melandasi dan tumbuh subur bersamaan dengan tegaknya nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, perdamaian, ketertiban, kebersamaan, dan keadaban untuk terwujudnya "Baladun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur".
3. Muhammadiyah memilih perjuangan dalam kehidupan bangsa dan negara melalui usaha-usaha pembinaan atau pemberdayaan masyarakat guna terwujudnya masyarakat madani (*civil society*) yang kuat sebagaimana tujuan Muhammadiyah untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan kenegaraan sebagai proses dan hasil dari fungsi politik pemerintahan akan ditempuh melalui pendekatan-pendekatan secara tepat dan bijaksana sesuai prinsip-prinsip perjuangan kelompok kepentingan yang efektif dalam kehidupan negara yang demokratis.
4. Muhammadiyah mendorong secara kritis atas perjuangan politik yang bersifat praktis atau berorientasi pada kekuasaan (*real politics*) untuk dijalankan oleh partai-partai politik dan lembaga-lembaga formal kenegaraan dengan sebaik-baiknya menuju terciptanya sistem politik yang demokratis dan berkeadaban sesuai dengan cita-cita luhur bangsa dan negara. Dalam hal ini perjuangan politik yang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan politik hendaknya benar-benar mengedepankan kepentingan rakyat dan tegaknya nilai-nilai utama sebagaimana yang menjadi semangat dasar dan tujuan didirikannya negara Republik Indonesia yang diproklamasikan tahun 1945.
5. Muhammadiyah senantiasa memainkan peranan politiknya sebagai wujud dari dakwah amar makruf nahi munkar dengan jalan mempengaruhi proses dan kebijakan negara agar tetap berjalan sesuai dengan konstitusi dan cita-cita luhur bangsa. Muhammadiyah secara aktif menjadi kekuatan perekat bangsa dan berfungsi sebagai wahana pendidikan politik yang sehat menuju kehidupan nasional yang damai dan berkeadaban.
6. Muhammadiyah tidak berafiliasi dan tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan kekuatan-kekuatan politik atau organisasi manapun. Muhammadiyah senantiasa mengembangkan sikap positif dalam memandang perjuangan politik dan menjalankan fungsi kritik sesuai dengan prinsip amar makruf nahi munkar demi tegaknya sistem politik kenegaraan yang demokratis dan berkeadaban.

7. Muhammadiyah memberikan kebebasan kepada setiap anggota Persyarikatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam kehidupan politik sesuai hati nurani masing-masing. Penggunaan hak pilih tersebut harus merupakan tanggungjawab sebagai warga negara yang dilaksanakan secara rasional dan kritis, sejalan dengan misi dan kepentingan Muhammadiyah, demi kemaslahatan bangsa dan negara.
8. Muhammadiyah meminta kepada segenap anggotanya yang aktif dalam politik untuk benar-benar melaksanakan tugas dan kegiatan politik secara sungguh-sungguh dengan mengedepankan tanggungjawab (amanah), akhlak mulia (akhlaq al-karimah), keteladanan (uswah hasanah), dan perdamaian (ishlah). Aktifitas politik tersebut harus sejalan dengan upaya memperjuangkan misi Persyarikatan dalam melaksanakan dakwah amar makruf nahi munkar.
9. Muhammadiyah senantiasa bekerjasama dengan pihak atau golongan mana pun berdasarkan prinsip kebajikan dan kemaslahatan, menjauhi kemudharatan, dan bertujuan untuk membangun kehidupan bangsa dan negara ke arah yang lebih baik, maju, demokratis, dan berkeadaban.

Dari pemikiran yang terkandung dalam "Khittah Denpasar" di atas, maka Muhammadiyah memiliki pandangan yang jelas tentang politik, bahwa politik sebagai *al-umur al-dunyawiyyat*, yakni perkara dunia yang diletakkan dan dikelola sebagai ranah ijtihad. Artinya politik sebagai bagian dari urusan mu'amalah merupakan ranah "al-ibahah", yaitu pilihan bebas mengenai cara melakukannya, sehingga tidak harus tnggal alias model satu cara. Ketika Muhammadiyah tidak menempuh perjuangan politik-praktis dan lebih memilih perjuangan dakwah kemasyarakatan maka langkah tersebut dibenarkan oleh agama sebagai jalan ijtihad yang kategorinya "al-ibahah" atau suatu kebolehan dan tidak dilarang dalam Islam. Muhammadiyah juga menghormati pilihan pihak lain yang menghimpitkan perjuangan politik praktis dan dakwah kemasyarakatan, namun Muhammadiyah tidak memilihnya.

Adapun pandangan tentang Islam sebagai "Din wa Daulah" sesungguhnya merupakan jargon dan hasil pemikiran ijtihad, bukan perintah ajaran Islam yang bersifat *qothiy*. Menurut sebagian pandangan, jargon yang dikenal sebagai dasar politik Islam tersebut, diambil dari tradisi politik Persia yang masuk dalam dunia politik Islam di masa lalu. Namun manakala hal tersebut menjadi pilihan politik umat Islam maka baik adanya, tetapi Muhammadiyah sampai saat ini masih berijtihad tidak menghimpitkan perjuangan dakwah dan politik-praktis. Jika disimpulkan Muhammadiyah berpandangan bahwa perjuangan politik tidak dapat dipisahkan dari perjuangan Islam dan bagian dari urusan mu'amalah dalam ajaran Islam, namun mengenai format dan strategi mewujudkannya sepenuhnya merupakan pilihan ijtihad. Inilah pandangan keagamaan Muhammadiyah.

Dalam hal pemikiran politik, saat ini muncul kritik kalau Muhammadiyah sejak kelahirannya tidak dirancang untuk mengurus negara. Boleh jadi pendapat itu benar, sejauh menyangkut pemikiran politik yang komprehensif mengenai seluk-beluk urusan bernegara, Muhammadiyah generasi awal tidak memilikinya. Gerakan Islam ini sejak awal memang jurusannya tidak ke dunia politik dan Kyai Dahlan bukan ahlinya soal urusan negara. Menurut Kyai Hadjid, ketika tahun 1918 dalam sidang tahunan oleh Agus Salim diusulkan agar Muhammadiyah menjadi gerakan politik seperti Sarekat Islam, Kyai Dahlan menolaknya. Nahdlatul Ulama yang lahir 1926 pun tampaknya tidak memilikinya, demikian pula organisasi Islam yang lain kala itu. Mungkin Sarekat Islam dengan tokohnya HOS Tjokroaminoto sampai batas tertentu memiliki konsep tentang mengurus negara, yang kemudian gerakan ini menjadi partai politik. Namun sejarah justru membuktikan Sarekat Islam dilanda konflik keras sehingga terbelah menjadi SI Putih dan SI Merah. Di belakang hari Sarekat Islam sebagai partai politik Islam bahkan makin meredup dan banyak dilanda

konflik internal. Tetapi sebagai catatan positif gerakan-gerakan Islam yang lahir di era kebangkitan nasional itu sungguh besar peranannya dalam perjuangan umat Islam dan bangsa Indonesia, yang tidak dapat dinilai dan divonis secara sederhana dengan ukuran hari ini.

Dalam pandangan Muhammadiyah sebagaimana terkandung dalam Khittah, bahwa jalan mengurus negara itu ada dua jalur atau pintu, yaitu melalui partai politik untuk memperebutkan kursi kekuasaan dan melalui fungsi kelompok kepentingan maupun jalur kekuatan civil society. Muhammadiyah sampai saat ini lebih memilih jalur non-politik praktis. Bagaimanakah upaya strategis maupun praktis dalam mengurus negara melalui jalur-jalur politik tersebut, tentu Muhammadiyah terbuka untuk menerima masukan yang terbaik. Beragam pengalaman politik Muhammadiyah telah dilalui, jika masih terdapat jalur dan format baru yang lebih baik agar Muhammadiyah makin kuat dan hebat dalam berperan mengurus negara, maka Muhammadiyah sebagai organisasi besar yang terbiasa bermusyawarah dalam segala urusan tentu membuka ruang atas pemikiran dan rekomendasi yang penting seperti itu. Apalagi jika usulan itu dipandang terbaik bagi masa depan Muhammadiyah, umat, bangsa, dan dunia secara keseluruhan. Pemikiran dan jalan politik bernegara yang seperti apa yang paling tepat dan dianggap alternatif terbaik bagi Muhammadiyah ke depan? Itulah yang dinanti Muhammadiyah. Kalau boleh berharap hendaknya pemikiran itu jika memang ada ditulis secara jelas, komprehensif, dan benar-benar memberikan jalan terbaik dengan tawaran langkah dan strateginya yang bersifat alternatif. Bukan pemikiran serpihan dan berujung dengan pertanyaan atau pernyataan yang jawaban dan caranya diserahkan kepada pihak lain. Bila perlu seperti jargon pegadaian, "memecahkan masalah tanpa masalah", bukan sebaliknya "memecahkan masalah dengan masalah baru".

Berpolitik Praktis

Muhammadiyah sejak kelahirannya hingga saat ini memang tidak berkecimpung dalam politik praktis atau politik kekuasaan sebagai pilihan ijtihad yang dibenarkan oleh agama. Menurut riwayat yang ditulis KH RH Hadjid, murid dan sahabat Kyai Ahmad Dahlan, tahun 1918 dalam rapat tahunan di Yogyakarta sempat oleh Agus Salim diusulkan agar Muhammadiyah menjadi partai politik seperti Sarekat Islam. Diketahui Kyai Haji Ahmad Dahlan waktu itu terdaftar di Sarekat Islam dan juga Boedi Oetomo, sebagai wujud memperluas arena pergaulan dan berkiperah untuk menguatkan Muhammadiyah yang masih perlu dukungan dan kerjasama pihak lain. Namun, waktu itu melalui penjelasan panjang lebar mengenai hakikat Islam dan perjuangan Muhammadiyah Kyai Dahlan menolak usulan Agus Salim itu. Agar tidak menjadi perdebatan, dikisahkan sempat Kyai Dahlan tampak tidak berkenan hingga mengetuk palu cukup keras waktu itu.

Kisah tersebut menunjukkan Kyai Dahlan secara sadar memang tidak memperuntukkan Muhammadiyah sebagai partai politik atau pergerakan politik praktis. Kebetulan saat itu ada saluran pergerakan politik bagi umat Islam yaitu Sarekat Islam, sehingga terwadahi artikulasinya. Namun juga di belakang hari menjadi masalah, sehingga setelah Sarekat Islam tahun 1926 menerapkan disiplin tidak merangkap, maka pimpinan dan orang-orang Muhammadiyah kemudian lebih memilih Muhammadiyah ketimbang Sarekat Islam.

Peristiwa tersebut tidak menunjukkan arti larangan rangkap jabatan dengan partai politik dalam Muhammadiyah saat ini tidak sejalan dengan sikap Kyai Dahlan waktu itu aktif di Sarekat Islam. Kebijakan Muhammadiyah saat ini berdasarkan kepentingan dan keputusan organisasi atas berbagai pertimbangan kemaslahatan Muhammadiyah sebagai bentuk penerapan Khittah yang juga ditetapkan oleh Muktamar dan Tanwir, sehingga merupakan sikap resmi organisasi. Tentu dalam hal kebijakan tidak harus sama dengan masa awal Muhammadiyah, karena berbeda situasi dan kondisi.

Pelajaran lain yang juga penting dari relasi Muhammadiyah dan Sarekat Islam itu menunjukkan, pelarangan rangkap itu justru dilakukan oleh partai politik terhadap Muhammadiyah dan bukan sebaliknya. Karenanya tidak lantas mengandung pengertian jika Muhammadiyah saat ini menerapkan larangan rangkap jabatan dengan partai politik maka akan sama nasibnya dengan Sarekat Islam yang menjadi kecil dan ditinggalkan orang. Kenyataan justru menunjukkan Muhammadiyah sudah puluhan tahun menerapkan larangan rangkap jabatan ternyata tetap besar dan stabil, bukan sebaliknya. Lebih dari itu karena larangan rangkap jabatan itu merupakan keputusan organisasi dan bukan hasil orang perorang maka semestinya ditepati jika ingin berorganisasi secara benar. Jika Muhammadiyah akan bernasib buruk dan jatuh gara-gara larangan rangkap jabatan tentu tidak akan dilakukan dan dipertahankan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dari periode ke periode.

Pengalaman Muhammadiyah dan Sarekat Islam di masa Kyai Dahlan juga memberikan sisi lain sebagai pelajaran. Menurut Dr Nurcholish Madjid, Muhammadiyah dan Sarekat Islam itu dulu berpacu seperti terlibat dalam peperangan dan pertempuran. Karena kehebatan tokohnya HOS Tjokroaminoto yang karismatik dan daya tarik politik, Sarekat Islam pada awalnya maju pesat dan memperoleh dukungan luas umat Islam. Muhammadiyah yang dipimpin oleh sosok yang tenang tetapi pembaru sejati, kelihatan lambat dan awalnya memperoleh penentangan. Namun sejarah menunjukkan, akhirnya nasib berbalik Muhammadiyah menjadi organisasi yang besar dan Sarekat Islam menjadi tertinggal. Ibaratnya, "Muhammadiyah awalnya kalah dalam pertempuran, tetapi kemudian memenangkan perang", ujar Nurcholish di hadapan forum Pengajian Ramadhan tahun 1987 di Gedung PP Muhammadiyah lama di Yogyakarta.

Karenanya mengenai hubungan Muhammadiyah dengan politik khususnya politik praktis perlu diletakkan secara proporsional, jangan disederhanakan. Apakah dengan demikian lantas Muhammadiyah menjadi mundur? Ternyata tidaklah sesederhana itu. Apakah kemudian Muhammadiyah harus menjadi alergi atau anti politik? Tentunya juga tidak. Muhammadiyah sebagaimana Khittah Denpasar justru memandang perjuangan politik praktis itu penting dan mulia, tetapi salurannya harus melalui partai politik. Partai politik itu tentu berada di luar Muhammadiyah dan tidak berhimpitan dengan Muhammadiyah, itulah sikap resmi Muhammadiyah yang harus dihormati dan diikuti oleh seluruh anggotanya tanpa kecuali.

Muhammadiyah memberi jalan keluar yang elegan, bahwa para anggota Muhammadiyah dipersilakan menempuhnya melalui partai politik. Partai politik itu berada di luar organisasi Muhammadiyah. Ke depan tentu perlu didorong dan dibina secara terorganisasi kepada para kader Muhammadiyah yang berminat dan memiliki kapasitas untuk berkiprah di politik praktis, sehingga mereka berkualitas dan beintegritas tinggi selaku politisi yang membawa misi gerakan. Jika ada yang ingin mendirikan partai politik juga dipersilakan sejauh mampu dan tidak mengatasnamakan Muhammadiyah. Muhammadiyah sampai saat ini setelah pengalaman di Masyumi dan Parmusi memang tidak "memiliki" maupun mendirikan partai politik, maka sikap ini harus menjadi acuan seluruh institusi dan anggota Muhammadiyah dengan sikap hormat dan positif. Jika ada anggota Muhammadiyah yang ingin mendirikan dan memiliki partai politiknya dipersilakan dengan bebas, namun bukan partai politiknya Muhammadiyah.

Secara kelembagaan, meski Muhammadiyah tidak berpolitik praktis dan tidak memiliki hubungan afiliasi, Muhammadiyah dapat membangun komunikasi dengan kekuatan politik dan pihak mana pun sesuai prinsip dan kepribadiannya. Apakah hubungan itu dekat atau jauh sangat relatif, jangan hariah. Jika hendak membangun kedekatan yang sama juga tak masalah, yang penting jangan sampai berhimpitan dan berperilaku sama dengan partai politik. Membangun kedekatan yang sama juga harus benar-benar berhubungan sama baiknya dengan semua pihak, jangan berhubungan dekat

dengan satu pihak, tetapi menjauh dari pihak lain. Semuanya jangan karena interes personal tapi demi organisasi.

Muhammadiyah dapat memperjuangkan kepentingan politik yang bersifat strategis seperti menyangkut kebijakan-kebijakan pemerintah yang jika dibiarkan akan merugikan persyarikatan, umat, dan bangsa. Fungsi tersebut dijalankan melalui lobi dan komunikasi yang baik, harus tetap terukur dan ditempuh dengan mengindahkan posisi Muhammadiyah sebagai ormas, serta sejalan dengan cara dan Kepribadian Muhammadiyah. Muhammadiyah jangan sampai dibawa dan dikelola mirip partai politik, sehingga kesehariannya yang dibahas dan dilakukan menyerupai kegiatan partai politik. Jangan sampai irama gerak Muhammadiyah layaknya partai politik.

Bagi kader Muhammadiyah yang aktif berpolitik-praktis, tentu harus bersungguh-sungguh dan mengindahkan akhlaq politik yang Islami, serta bersedia membawa misi Muhammadiyah. Jangan berpolitik serba instan dan menerabas, apalagi dengan menghalalkan segala cara. Berjuang di dunia politik praktis itu sama mulia dan strategis, namun jangan menganggap semuanya gampang dan seolah serba indah. Karenanya diperlukan kader politik Muhammadiyah yang berkomitmen dan berintegritas kuat serta didukung profesionalitas dan keseriusan yang tinggi. Kaum muda Muhammadiyah yang berpolitik praktis juga harus memiliki idealisme yang kokoh. Jika berhasil jangan bersikap seperti "kacang lupa kulit" karena menganggap kesuksesannya itu hanya hasil dari perjuangan diri semata. Tidak jarang terdapat aktivis Muhammadiyah di dunia politik setelah sukses merasa lebih hebat, sehingga kurang menghargai perjuangan dakwah Muhammadiyah. Muhammadiyah jangan selalu dinilai minor atau negatif karena ukuran kesuksesan gerakan Islam ini hanya ditakar dari sudut politik.

Adapun mengenai jabatan dalam pemerintahan seperti posisi Menteri dan sebagainya juga jangan cenderung disederhakan. Dalam periode tertentu terdapat Menteri atau jabatan penting dalam pemerintahan, sementara dalam periode lain tidak memperolehnya. Kondisi seperti itu tidak perlu terlalu dirisaukan seolah Muhammadiyah luar biasa ketika memperolehnya, sebaliknya jatuh diri ketika tak meraihnya. Menurut Ketua Umum PP Muhammadiyah, jabatan dalam Kabinet itu sesungguhnya bukan jalur atau jatahnya organisasi kemasyarakatan, tetapi jatah partai politik. Kalaupun organisasi mendapatkannya karena faktor atau kondisi situasional, tidak selamanya dan merupakan keniscayaan. Jangankan organisasi kemasyarakatan, bahkan banyak partai politik juga tidak memperolehnya tergantung pada pertarungan atau kompetisi politik yang berlangsung. Karena itu soal jabatan dalam pemerintahan itu hendaknya diletakkan dalam porsi yang wajar bagi Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyaakaan. Kalaupun harus mengkhitiarkannya hendaklah ditempuh secara elegan, bermartabat, cerdas, dan tidak terlalu memaksakan diri melebihi takaran yang mengoyak prinsip, idealisme, dan keberadaan organisasi. Hidup itu penuh dinamika dan perjuangan yang tidak linier, yang mesti ditempuh dengan ikhtiar tetapi juga mengikuti hukum pasang-surut, tidak perlu merasa kehilangan segalanya ketika tak memperoleh posisi dalam pemerintahan. Muhammadiyah masih memiliki banyak hal yang selama ini menjadi kekuatan dirinya yang harus terus dirawat dan dikembangkan.

Partai Politik

Sejatinya dalam sistem politik modern termasuk di Indonesia pejuangan politik kekuasaan untuk memperebutkan jabatan di pemerintahan itu merupakan kadang partai politik dan bukan lahannya organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah. Kalaupun ada ormas yang berperan seperti partai politik dan orang-orangnya berperangai politisi sesungguhnya merupakan anomali alias tidak lazim dari sistem politik yang berlaku, sehingga bukan sesuatu yang harus ditiru oleh ormas lain. Namun dalam sistem politik modern pula ormas dapat memainkan fungsi sebagai kelompok kepentingan (interest group), kelompok penekan (pressure group), yang menurut Ketua Umum PP

Muhammadiyah disebut kelompok aspiran murni. Kelompok ini dapat melakukan lobi, kritik, komunikasi, dan usaha-usaha lain sesuai kapasitas dan daya dukungnya untuk memperjuangkan aspirasi rakyat di luar partai politik. Dalam bahasa Muhammadiyah disebut fungsi amar makruf dan nahi munkar.

Persoalannya, apakah Muhammadiyah harus memiliki partai politik demi kepentingan perjuangan di bidang politik? Bagaimana jika Muhammadiyah mendirikan atau memiliki partai politik yang dapat diperlakukan seperti amal usaha? Gagasan seperti ini kelihatan menjanjikan, tetapi perlu untuk dicermati dan dikaji secara mendalam dan komprehensif plus-minusnya dari segala aspek dan faktor, jangan hanya dari satu sisi dengan melihat harapan akan hasilnya belaka. Sebab dunia partai politik itu, lebih-lebih saat ini, sangatlah tidak mudah dan sederhana.

Kita coba simulasi. **Pertama**, jika Muhammadiyah memiliki partai politik itu dengan mendirikan partai politik. Partai tersebut tentu bagus seperti amal usaha, segalanya bisa diurus dan dikendalikan sesuai kemauan Muhammadiyah, para kader Muhammadiyah pun dapat sepenuhnya tersakurkan dan memimpin maupun menjadi aktivis partai ini. Tapi harap diingat, mendirikan parpol itu sungguh perlu modal besar, jaringan luas, dan energi yang luar biasa. Setelah berdiripun belum tentu lolos electoral threshold seperti pengalaman Partai Mahatari Bangsa, karena harus bersaing dengan partai yang sudah berdiri lama, sementara warga Muhammadiyah pun biasanya sudah memiliki afiliasi dan aspirasi politik sendiri ke partai lain. Kalaupun lolos kotak Muhammadiyah itu hanya melalui partai itu, sehingga radius aspirasi politik Muhammadiyah menjadi terbatas dan harus berhadapan dengan berbagai partai politik lain dengan para konstutuenya masing-masing. Muhammadiyah pun akan ikut pasang surut partai yang didirikan itu dengan segala konflik kepentingannya.

Kedua, memiliki partai politik dengan cara "mengakuisisi" partai politik yang sudah ada. Jika partai politik itu kecil apalagi besar, persoalannya adakah parpol yang bersedia diakuisisi oleh Muhammadiyah? Langkah ini pun tidak mudah, jika berhasil tentu sama dengan resiko yang pertama bahwa Muhammadiyah akan terkotak dan berhimpitan dengan parpol yang bersangkutan dengan segala resiko, dinamika, dan konflik kepentingannya.

Ketiga, jika memiliki partai politik itu dilakukan dengan menjalin hubungan khusus kepada partai politik tertentu, tentu akan bermasalah juga dengan partai politik yang lain. Karena Muhammadiyah sudah memiliki hubungan khusus dengan parpol tersebut, parpol lain akan tidak mudah berhubungan dan mengakomodasi kepentingan Muhammadiyah karena sudah ada yang partai "milik" Muhammadiyah itu.

Tiga pilihan tersebut memiliki kerumitan dan kompleksitas politik yang tidak sederhana dengan segala resikonya. Sebagian orang tentu akan berpendapat, memang politik itu beresiko dan hidup di mana pun seperti itu. Namun resiko-resiko politik itu tidak sederhana, jika sukses memang beruntung, sebaliknya manakala gagal "buntung". Persoalannya, akankah Muhammadiyah benar-benar siap dengan segala resiko politik tersebut? Padahal Muhammadiyah itu bukan organisasi "kemarin sore" yang "tidak memiliki apa-apa". Muhammadiyah itu besar dengan amal usaha, aset, kiprah, dan kepercayaan publik yang cukup besar karena posisi dan perannya selama ini sebagai organisasi kemasyarakatan yang non-politik praktis. Maukah Muhammadiyah dipertaruhkan dengan partai politik dan perjuangan politik praktis yang penuh resiko itu? Masalah ini penting untuk dipertimbangkan ketika Muhammadiyah diwacanakan harus memiliki partai politik.

Muhammadiyah sebenarnya kenyang dengan pengalaman dalam hal partai politik dan dunia politik praktis. Tahun 1998 Muhammadiyah memberi ijin kepada Prof Amien Rais yang waktu itu sebagai Ketua PP Muhammadiyah untuk melakukan ijtihad politik yang kemudian mendirikan Partai Amanat Nasional (PAN) yang berdiri di luar Muhammadiyah. Boleh dikatakan PAN memiliki kaitan historis tertentu dengan Muhammadiyah tetapi tegas tidak memiliki hubungan organisatoris dan afiliasif dengan

Gerakan Islam ini. Selain itu mayoritas pendiri dan pendukung PAN ialah para pimpinan dan anggota Muhammadiyah, bahkan pada awal berdirinya Pimpinan Persyairkatan ikut membidani dan bersusah-susah dalam mendirikan dan membesarkan partai ini. Namun menurut banyak pandangan di internal Muhammadiyah lama kelamaan dirasakan PAN makin jauh dari Muhammadiyah dan cenderung terasing, meski mayoritas anggota Muhammadiyah masih mendukungnya. Inilah salah satu masalah hubungan Muhammadiyah dengan partai politik.

Mirip kasus PAN, tahun 1937 Kyai Mas Mansur selaku tokoh Islam sekaligus Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah saat ini pernah mendirikan Partai Islam Indonesia (PII) bersama tokoh Islam lainnya, tetapi partai ini tidak berumur panjang. Demikian halnya ketika mendirikan Partai Masyumi di masa pendudukan Jepang yang sering disebut partai "bentukan" Dai Nippon itu, umur dan keberadaannya pun tidak pasti sehingga akhirnya bubar. Fakta ini menunjukkan pengalaman Muhammadiyah mendirikan partai politik, yang kenyataannya tidak mudah dan sarat masalah. Artinya mendirikan dan memiliki partai politik itu mudah diwacanakan tetapi tidak mudah dijalankan. Ketika dicoba dilakukan ternyata penuh onak dan duri, sehingga energi Muhammadiyah pun terkuras.

Muhammadiyah secara resmi dan tegas bahkan pernah menjadi Anggota Istimewa Masyumi sejak partai ini didirikan tahun 1945 di Madrasah Muallimin Yogyakarta hingga dibubarkan atau disuruh bubar oleh Presiden Soekarno tahun 1962. Hubungannya juga tidak sederhana terutama dengan pilar pendukung Masyumi lain sehingga karena ketidakpuasan Sarekat Islam tahun 1948 dan Nahdlatul Ulama tahun 1952 mengundurkan diri. Karena terbawa arus politik Masyumi maka hubungan Muhammadiyah dengan pemerintah dan banyak pihak yang berseteru dengan partai Islam ini juga berpengaruh pada Muhammadiyah. Akibat lebih jauh, karena sibuk di Masyumi maka kiprah dakwah dan amal usaha Muhammadiyah terbengkalai. Selan itu, setelah Masyumi bubar banyak elite Muhammadiyah yang kembali mengurus Muhammadiyah tetapi dengan cara partai politik. Karena dampak masalah politik tersebut itulah maka lahirlah Kepribadian Muhammadiyah tahun 1962. Para perumus Kepribadian itu tahu betul akibat buruk berpolitik, karena mereka jua pelaku politik Masyumi waktu itu.

Muhammadiyah tahun 1968 pernah terlibat mendirikan Partai Muslimin Indonesia, tetapi selain waktu mendirikannya banyak gesekan dengan pemerintah Soeharto, setelah itu partai ini kemudian dikudeta. Ketua Parmusi Djarnawi Hadikusumo dan Sekretaris Umum Lukman Harun dikudeta J. Naro, sehingga Parmusi lepas dari tangan Muhammadiyah. Pengalaman buruk ini kemudian menyadarkan Muhammadiyah untuk tidak melibatkan diri dalam dan dengan partai politik, sehingga lahirlah Khittah tahun 1969 dan Khittah Ujung Pandang tahun 1971 yang terkenal itu. Bahwa Muhammadiyah tidak memiliki afiliasi dengan partai politik manapun dan memberi kebebasan kepada anggota untuk memilih maupun tidak memilih sesuai hak asasinya.

Pengalaman ini menunjukkan Muhammadiyah pernah mendirikan dan terlibat dalam urusan partai politik berkali-kali. Karenanya lahirlah Khittah yang menydahai percobaan dan sikap afiliasif terhadap partai politik. Pasca PAN sebagian anak muda Muhammadiyah berusaha mendirikan Partai Matahari Bangsa, yang hasilnya diketahui bersama haya mampu meraih 0,4% suara dalam Pemilihan Umum. Pengalaman politik tersebut semakin menguatkan Muhammadiyah untuk tidak lagi tergoda mendirikan atau memiliki partai politik. Fakta tersebut merupakan bukti nyata dan bukan opini tentang kerumitan dan dampak buruk berpolitik bagi Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan dan bukan sebagai partai politik. Nahdlatul Ulama bahkan pernah menjadi partai politik dua kali di zaman Orde Lama dan Orde Baru, dengan pengalaman yang sama akhirnya tahun 1984 kembali ke Khittah 1926. Kenyataan ini membuktikan Muhammadiyah bukan akan dan harus, tetapi pernah mengalami pasang-surut berpolitik praktis yang membuat fokus pada dakwah dan amal usaha terbagi serta terbengalai.

Ketika sekali Muhammadiyah terlibat dalam perebutan kekuasaan melalui partai politik maka mau tidak mau akan menyeret Muhammadiyah pada konflik politik dengan partai politik dan para aktivis serta pendukungnya, sehingga energi Muhammadiyah pun akan terkuras. Memang setiap langkah politik selalu memerlukan resiko, tetapi apakah Muhammadiyah sudah siap dengan resiko politik seperti itu? Ini bukan soal berani atau takut mengambil resiko, tetapi apakah hasilnya akan sepadan dengan resiko dan dampaknya yang luas bagi masa depan Muhammadiyah? Masalah seperti ini perlu dipikirkan matang dari berbagai pihak dan aspek, bukan sekadar pikiran sekilas dari orang-perorang. Pengalaman panjang Muhammadiyah membuktikan betapa rumit dan kompleksnya berurusan dengan partai politik. Politik jangan hanya dilihat hasilnya yang kelihatan besar ketika berhasil, tetapi juga terpuruk tatkala gagal. Apakah Muhammadiyah lahir dan hadir untuk pertarungan dan pertarungan politik seperti itu?

Ketika muncul usulan agar Muhammadiyah memiliki atau mendirikan partai politik sendiri dan terlibat dalam perebutan atau usaha menempatkan orang-orangnya dalam kursi pemerintahan bersaing dengan kekuatan lain, maka selain Muhammadiyah hingga saat ini secara resmi dan organisatoris masih istiqamah tidak tertarik untuk melakukannya, maka perlu dipertimbangkan matang mengenai dampak buruk dan masalahnya sebaaimana pengalaman masa lalu. Profesor Ahmad Syafii Maarif dan Profesor Azyumardi Azra ketika sesi dialog Seminar Pramuktamar ke-47 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta memperoleh usul dari peserta agar Muhammadiyah memiliki partai politik sebagai amal usaha, keduanya dengan tegas tidak setuju dan agar Muhammadiyah tetap istiqamah dengan Khittahnya yang mengambil jarak dari pergulatan politik praktis.

Kerumitan Politik

Muhammadiyah memandang penting politik praktis, sebagaimana sama pentingnya fungsi politik kebangsaan secara umum yang selama ini diperankan Muhammadiyah sebagai kekuatan *civil society* dan kelompok aspiran murni. Namun perlu disadari bahwa dunia politik praktis itu meskipun penting dan positif, dalam kenyataannya bukan suatu arena perjuangan yang sederhana dan tanpa masalah. Jangan memandang dunia politik itu serba indah dan mudah. Kehidupan politik praktis itu sejatinya memperebutkan jabatan kekuasaan yang melibatkan banyak pihak yang berkepentingan. Di situ terjadi konflik keras dan tidak jarang menggunakan segala cara. Pandangan ini bukan terkesan alergi politik, tetapi kenyataan di lapangan baik menurut pengalaman para insan politik maupun para ahli membuktikan, bahwa dunia politik praktis itu keras dan sarat konflik kepentingan.

Dunia politik itu rumit. Meski politik kekuasaan itu penting namun budaya dan perilakunya sangat berkarakter saling berebut, yang berbeda dengan karakter organisasi kemasyarakatan yang cenderung bersifat kultural. Politik itu tulis Harold Lasswell patokannya ialah *who gets what, when and how* yaitu siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana caranya. Esensinya dalam politik itu harus selalu ada transaksi saling mendapatkan dan akhirnya harus saling berebut. Barang yang diperebutkan konkret yakni jabatan, uang, aset, dan pengaruh. Buya Syafii Maarif bahkan dengan tegas dalam Pidato Iftitah Tanwir menyatakan, "politik itu memecah, dakwah itu merangkul".

Coba simak dalam Pilpres 2014, apa jadinya jika Muhammadiyah mendukung resmi salah satu calon, maka akan terjadi perebutan dan konflik politik keras dengan berbagai pihak. Muhammadiyah tentu akan disenangi oleh pihak yang didukung, sebaliknya akan dimusuhi oleh yang tidak didukung. Internal Muhammadiyah pun terbelah. Inilah bukti politik itu memecah-belah. Belum termasuk soal prinsip dan idealisme dalam melakukan pilihan politik, yang seringkali diabaikan demi mendukung yang menang dan memperoleh jabatan politik tertentu. Ketika amal usaha Muhammadiyah dijadikan ajang kampanye atau pengenalan tokoh atau partai politik tertentu, sontal timbul pro dan kontra, yang jika dikembangkan dan tidak diredam menimbulkan konflik internal yang berkepanjangan.

Kejadian tersebut bukan rekaan dan asumsi, tetapi fakta dan kenyataan, betapa rumit dan pro-kontra dunia politik praktis.

Jika Ketua Umum PP Muhammadiyah dan Ketua Umum PP Aisyiyah misalnya secara terbuka mendeklarasikan diri mengatasnamakan organisasi mendukung dan bahkan menjadi tim sukses salah satu peserta Pilpres misalnya, dengan harapan organisasi dan dirinya menjadi Menteri, apa yang akan terjadi dalam organisasi ini? Baik secara kelembagaan maupun sikap warga Persyarikatan selain akan mengeritisi dan kemudian menjadi kontroversi, maka iklim atau budaya politik seperti akan berpengaruh terhadap kondisi dan soliditas gerakan. Perlu diingat Muhammadiyah dengan seluruh organnya itu bersifat sistem yang mapan layaknya sebuah " Holding", yang mungkin berbeda dengan organisasi Islam yang lebu bertumpu pada kyai dan pesantren yang cenderung ala waralaba, sehingga tokoh atau perorangan tidak dapat bertindak sekehendaknya. Di sinilah perbedaan Muhammadiyah dengan yang lain, tentu plus minus, tetapi Muhammadiyah selama ini mampu bertahan dan nyaman karena karakter organisasinya yang sistemik. Selain itu Khittah dan berbagai regulasi organisasi Muhammadiyah memang mengatur demikian. Hal seperti itu mungkin dengan mudah dilakukan oleh organisasi Islam tetangga, sehingga kemudian mendapat jatah Menteri. Persoalannya, apakah Muhammadiyah dan Aisyiyah harus melakukan langkah politik seperti itu demi meraih posisi dalam pemerintahan?

Pengalaman juga menunjukkan sisi politik yang lain. Terdapat kecenderungan pimpinan Muhammadiyah atau para tokohnya memberikan dukungan politik kepada calon tertentu, dengan resiko menimbulkan pro dan kontra karena terdapat calon lain dengan para pendukungnya yang tentu tak menyetujui langkah tersebut. Setelah menang yang didukung, ternyata tidak memperoleh kursi yang diharapkan, padahal normalnya tentu mendapatkan. Ternyata keputusan politik itu kompleks karena menyangkut banyak pihak yang berkepentingan dan faktor yang mempengaruhi, sehingga sudah memberikan dukungan pun tak berbuah hasil. Jangankan organisasi kemasyarakatan, bahkan partai politik pendukung pun ada yang mendapat kursi sesuai harapan namun ada pula yang jauh dari harapan. Beragam analisis dapat dikemukakan, tetapi kenyataannya politik memang rumit serta tidak sederhana dan tidak semudah yang didiskusikan.

Saksikan pula dampak Pilpres 2014 terhadap partai politik. Dua partai politik besar terpecah dua karena perbedaan sikap politik, apakah berada di luar pemerintahan atau masuk dalam pemerintahan. Kondisi ini membuat partai politik yang bersangkutan centang perenang dan membuat jagad politik nasional terus gaduh. Para elite pimpinan dan politisinya pun terlibat dalam perseteruan yang tak berkesudahan. Sekali konflik dimulai maka susah menariknya kembali. Pengadilan pun menjadi sarana penyelesaian konflik, yang berketiak ular. Pihak lain ikut campur yang membuat keadaan makin rumit. Elite yang tidak kebagian atau sebagian tidak tahan akan kondisi politik seperti itu menyingkir. Masyarakat luas terbelah dan akhirnya memiliki persepsi yang negatif mengenai dunia politik. Akankah panorama konflik dan hiruk-pikuk politik seperti itu ditularkan atau diujicobakan kepada Muhammadiyah yang telah mapan dan tidak memiliki budaya politik sebagaimana partai politik? Partai politik saja yang habitatnya berebut kursi dan konflik mengalami penderitaan politik yang nestapa, maukah Muhammadiyah mencoba mencicipinya demi harapan-harapan mendapat jabatan di pemerintahan?

Jika didaftar masih banyak lagi masalah, kerumitan, dan dilema Muhammadiyah apabila berhadapan dengan dunia politik praktis yang keras dan penuh pertarungan. Dengan alasan sikap netral aktif pun misalnya, Muhammadiyah dapat juga menjadi terlalu aktif dalam menyikapi urusan-urusan politik, sehingga menyerupai peran dan aktivitas partai politik. Tokoh-tokoh Muhammadiyah pun layaknya para politisi. Selain itu, dengan dalih mengembangkan hubungan kedekatan yang sama, Muhammadiyah pun bisa menjadi berhimpitan dan telalu lengket dengan urusan-urusan politik menyerupai partai politik. Sebaliknya ketika jauh pun beragam kemungkinan bisa terjadi, sehingga tidak

sederhana sebagaimana dipersepsikan. Dunia politik sungguh tidak linier, dari ranah yang terang benderang sampa abu-abu, dari yang halal sampai subhat dan haram. Siapkah Muhammadiyah dan orang-orang Muhammadiyah memasuki dunia yang berdasamuka seperti itu?

Karena politik itu rumit, selain faktor konflik, penting untuk dipahami sifatnya yang tidak linier. Sebutlah tentang sikap nonpartisan Muhammadiyah yang sering disebut netral politik. Konsep netral politik itu jangan dimaknai harfiah. Netral memiliki makna tidak memihak dan memiliki afiliasi pada partai atau kekuatan politik tertentu sebagai sikap dasar Muhammadiyah. Netral dalam makna berjarak sebagaimana sering disebut "mengambil jarak yang sama" (sebuah istilah yang berkembang di kalangan warga Muhammadiyah tetapi sesungguhnya tidak ada dala pemikiran resmi) mengandung pengertian "disengagement", yaitu mengambil jarak dengan tidak menjadi partisan politik dan menghimpitkan diri dengan kekuatan atau partai politik. Apakah jarak itu dekat atau jauh tidaklah bersifat fisik, tetapi berisifat posisi non-afiliasi dan tidak partisan politik sesuai Khittah. Jarak jauh maupun dekat bukan serba verbal dan fisik layaknya ukuran meteran. Jika jauh jangan menjadi anti-politik, sebaliknya kalau dekat jangan berhimpitan seperti melakukan "khalwat politik". Dalam memaknai dan menerapkan jarak politik itu memerlukan ketangkasan, kearifan, kecerdasan, sekaligus kejujuran dari para elite dan warga Muhammadiyah sesuai dengan patokan dasar Khittah dan kemaslahatan Muhammadiyah.

Bagaimana dengan larangan rangkap jabatan? Khittah dan kebijakan Persyarikatan tentang aktif dalam politik praktis maupun larangan rangkap jabatan bukankah untuk menghalangi warganya untuk berjuang di ranah politik, apalagi dilandasi sikap anti dan alergi politik. Semua dilakukan untuk sama-sama menjaga idealisme, posisi, kebaikan, dan peran Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah dan tajdid yang non-partisan politik. Hal tersebut juga sekaligus untuk mengoptimalisasikan peran kadernya yang ingin berkiprah di dunia politik agar tidak sarat beban antara memimpin Persyarikatan dan aktif di partai politik atau dunia politik praktis. Para kader politik sebaiknya berkiprahlah di dunia politik praktis dengan idealisme dan pengkhidmatan yang tinggi, serta fokus dan optimal, jangan bercabang pikiran. Insya Allah warga Muhammadiyah akan memberikan dukungan yang positif. Apalagi jika para kader yang berkiprah di politik itu memiliki idealisme, misi, dan membela kepentingan Muhammadiyah serta konsisten berkhidmat untuk bangsa.

Demikian pula ketika menghadapi pemerintahan dari satu rezim ke rezim berikutnya, Muhammadiyah penuh pengalaman dinamika dalam beragam suka-duka. Karenanya jika demi meraih kursi di pemerintahan tetapi terlalu memaksakan Muhammadiyah masuk ke dunia politik praktis yang pernah dijalaninya tidak-kah hal itu akan merugikan mada depan Muhammadiyah sendiri? Manakala Muhammadiyah secara kelembagaan terus dipaksakan terlibat dalam percayuran politik tentu akan menimbulkan banyak masalah di tubuh Muhammadiyah sendiri. Ini bukan soal berani atau penakut, bukan soal konservatif atau progresif, tetapi menyanhkut keberadaan dan masa depan Muhammadiyah sendiri sebagai organisasi dakwah kemasyarakatan yang besar dan selama ini memiliki kekuatan sendiri. Soliditas dan kebersamaan akan terganggu. Energi mengurus umat, dakwah, dan amal usaha pun ikut terkuras. Sikap orang-orang Muhammadiyah menjadi berperangai politik. Muhammadiyah pun boleh jadi dikelola ala partai politik. Memang itu resiko berpolitik, tetapi mohon diingat Muhammadiyah bukan partai politik yang lahir untuk main resiko seperti itu.

Dalam hal soal jabatan di pemerintahan perlu diletakkan secara proporsional. Jabatan di pemerintahan memang penting dan dapat dikhtiarkan sesuai kepentingan dan prinsip gerakan. Ikhtiar dapat dilakukan melalui komunikasi yang bijak, objektif, dan terhormat. Namun harap diingat, jabatan politi itu tidak mudah diraih dalam posisi organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah. Partai politik pun tidak mudah meraihnya, kadang menang sebaliknya kalah dan seterusnya. Mohon diingat jabatan-jabatan politik yang penting itu diperebutkan oleh banyak pihak, sehingga bakal

menghadapi tarik menarik kepentingan yang keras. Maka dalam mengikhtiarkannya pun tidak perlu memaksakan diri di luar takaran yang semestinya, yang membuat prinsip netralitas terkoyak, warga terbelah, serta organisasi kehilangan martabat dan kepribadian. Sedangkan untuk menjadi pemain tunggal pun tidak semudah persepsi orang.

Dunia politik praktis untuk meraih kekuasaan di pemerintahan memang penting dan strategis. Muhammadiyah tidak menggarapnya secara langsung sebagai perjuangan dakwah bukan karena menjauhi, alergi, dan menganggap tidak penting. Muhammadiyah melalui Khittahnya mengambil jarak dan tidak mengambilnya karena politik praktis semestinya merupakan lahan perjuangan partai politik, bukan lahan Muhammadiyah sebagai Ormas. Muhammadiyah juga memiliki pengalaman panjang ketika berpolitik praktik terbukti banyak masalah, konflik, dan kesulitan yang membuat pekerjaan dakwah kemasyarakatan terbengkalai.

Lantas, bagaimana jalan keluarnya? Sejauh ini sikap resmi organisasi masih tetap dipegang kuat bahwa Muhammadiyah tidak berafiliasi dengan partai politik dan kekuatan politik manapun, Muhammadiyah tidak akan menjadikan dirinya sebagai partai politik, tidak pula mendirikan partai politik, maupun menghimpitkan dirinya secara organisasi dengan partai politik manapun. Jika ingin berpolitik maka siapkanlah kader untuk aktif di partai politik dan kader profesional. Langkah ini jauh lebih realistis dan juga strategis. Buktinya, orang-orang yang menjadi Menteri pada Kabinet Pemerintahan berasal dari partai politik dan kalangan profesional. Kalaupun ada yang berasal dari organisasi kemasyarakatan sifatnya kasuistik dalam proses yang seringkali pragmatis atau kebetulan, sehingga sulit menjadi patokan atau pola bagi organisasi kemasyarakatan.

Muhammadiyah sungguh sudah berpengalaman panjang dan paham akan dinamika politik apapun. Bukan hanya sesudah Indonesia merdeka, bahkan sejak perjuangan kebangkitan nasional melawan penjajahan, gerakan ini menghadapi beragam situasi politik. Karenanya dalam keputusan Tanwir Muhammadiyah di Bandung tahun 2012 tentang Kristalisasi Ideologi Muhammadiyah pada butir ke-3 dan ke-5 dinyatakan secara tegas dua hal sebagai berikut.

Pertama, Muhammadiyah dengan ideologi gerakannya melakukan ijtihad politik lebih memilih strategi perjuangan pembinaan masyarakat dan tidak menempuh perjuangan politik-praktis dalam ranah kekuasaan-negara. Khittah Muhammadiyah tersebut didasarkan pada pandangan bahwa politik merupakan urusan duniawi (*al-umr al-dunyawiyyat*) yang format dan strateginya merupakan ranah ijtihad. Namun Muhammadiyah sejak berdiri tahun 1912 pada masa perjuangan kemerdekaan hingga saat ini dan ke depan terus proaktif menjalankan peran-peran kebangsaan untuk mencerdaskan, memakmurkan, dan memajukan kehidupan bangsa sebagai perwujudan dari dakwah amar ma'ruf dan nahi munkar dalam berbangsa dan bernegara. Khittah Muhammadiyah tidak mengandung makna antipolitik dan apolitik, tetapi memposisikan politik dalam makna yang luas sebagai aspek dan sarana perjuangan membangun kehidupan bangsa dan negara.

Kedua, dalam menghadapi dinamika kehidupan politik khusus yang berkaitan dengan Pemilu dan PemiluKada yang selalu berlangsung reguler lima tahunan hendaknya setiap anggota Muhammadiyah berpartisipasi sebagai pemilih kritis, cerdas, dan menjunjung tinggi akhlak mulia; tidak melibatkan organisasi dalam percaturan politik-praktis; menjauhi politik uang dan hal-hal yang tidak terpuji; memberi teladan berpolitik yang mengedepankan demokrasi berkeadaban, dan senantiasa istiqamah mengindahkan Khittah dan kebijakan organisasi yang berlaku dalam Persyarikatan. Politik berbasis ideologi Muhammadiyah tersebut disertai dengan sikap proaktif dalam menjalankan peran-peran kebangsaan yang membawa pada kemajuan serta mencegah segala bentuk tindakan atau kebijakan yang merusak sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara sesuai prinsip amar ma'ruf dan nahi munkar secara cerdas dan bijaksana.

Dalam forum Konsolidasi Nasional tanggal 6 April 2013 di Yogyakarta juga digariskan Komitmen Muhammadiyah sebagai berikut: "Warga dan Pimpinan Muhammadiyah di seluruh lingkungan Persyarikatan dalam menghadapi perkembangan situasi saat ini sesuai dengan prinsip-prinsip gerakan dan kebijakan organisasi yang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah diminta untuk mengindahkan hal-hal sebagai berikut: (1) Mencermati perkembangan situasi nasional maupun lokal secara jernih, cerdas, dan bijaksana dengan mengikuti arahan dan kebijakan Pimpinan Pusat; (2) Demi kemaslahatan Persyarikatan melaksanakan Khittah dan Kebijakan Organisasi tentang politik dengan konsisten dan etika yang luhur; (3) Mengedepankan kebersamaan, kekompakan, dan kepentingan Persyarikatan serta tidak melibatkan kepentingan-kepentingan yang dapat mengganggu keutuhan dan prinsip-prinsip gerakan; (4) Menunjukkan keteladanan yang baik (*uswah hasanah*) serta menghindarkan diri dari praktik politik uang serta segala bentuk tindakan yang bertentangan dengan akhlak mulia (*al-akhlaq al-karimah*) dan Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah; (5) Berkiprah proaktif dalam memajukan kehidupan bangsa serta menjaga kerukunan, kedamaian, ketertiban, dan kebaikan bersama dalam masyarakat sebagai wujud dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan menyebarkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan kebangsaan dan kemanusiaan universal; (6) Memperkokoh posisi dan peran Muhammadiyah sebagai gerakan kultural yang mengemban misi dakwah dan tajdid untuk mencerahkan (membebaskan, memberdayakan, dan memajukan) kehidupan bangsa dan memperkuat masyarakat madani sebagai pilar strategis bangsa dan negara.

Jadi, Muhammadiyah harus istiqamah dan yakin dengan pilihan strategi perjuangan non-politik praktis sebagaimana Khittah gerakan ini. Hikmahnya terbukti telah membawa gerakan Islam ini mampu berkembang lebih satu abad dengan sejumlah keberhasilannya, meski tentu saja di sana sini masih banyak hal harus diperbarui. Memang tidak semua hal dapat diraih Muhammadiyah, sebutlah kursi Kabinet. Namun jangan menganggap apa yang dimiliki Muhammadiyah sekarang ini kecil, pinggir, dan tidak berguna dibanding capaian dunia politik. Muhammadiyah itu sungguh besar. Inilah yang wajib disyukuri dan dipahami secara jernih oleh seluruh anggota, kader, dan pimpinan Muhammadiyah.

Jalan Keluar

Politik dalam makna apapun memang penting dan tidak dapat dilepaskan dari kehidupan. Manusia itu makhluk berpolitik alias *zoon politicon*. Banyak hal penting atau positif dari politik dan hal itu tak perlu diperdebatkan lagi. Bagi Muhammadiyah, politik itu termasuk *al-umur al-dunyawiyyat*, yakni perkara dunia yang harus diolah sebagaimana mestinya dengan misi dan fondasi nilai-nilai Islam yang utama, dengan format dan caranya bersifat ijtihadiyah. Muhammadiyah berijtihad melalui Khittah, bahwa gerakan Islam ini mengambil bagian dalam perjuangan politik secara umum, yakni membangun masyarakat dan peduli atas kebijakan-kebijakan strategis negara. Inilah peran politik kebangsaan, yang disebut politik adiluhung atau high-politics. Peran politik kebangsaan ini menyatu dengan gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar.

Namun berdasar Khittah pula, Muhammadiyah berijtihad tidak mengambil peran dalam perjuangan politik praktis, yakni politik untuk meraih kedudukan dalam pemerintahan. Saluran politik praktis harus melalui partai politik, bukan melalui Muhammadiyah. Sikap ini bukan ambivalen, tetapi pilihan ijtihad. Di negara dengan sistem politik demokrasi modern manapun perjuangan politik praktis seperti itu hanya lewat partai politik. Muhammadiyah juga tidak berafiliasi dengan partai politik manapun. Inilah Khittah Muhammadiyah yang konsisten masih belaku.

Muhammadiyah sebagaimana Khittah-nya juga berijtihad memilih perjuangan dalam kehidupan bangsa dan negara melalui usaha-usaha pembinaan atau pemberdayaan masyarakat guna terwujudnya masyarakat madani (*civil society*) yang kuat sebagaimana tujuan Muhammadiyah untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan kenegaraan sebagai proses dan hasil dari fungsi politik pemerintahan akan ditempuh melalui pendekatan-pendekatan secara tepat dan bijaksana sesuai prinsip-prinsip perjuangan kelompok kepentingan yang efektif dalam kehidupan negara yang demokratis.

Tanwir di Samarinda tahun 2014, bahkan menegaskan "Sesuai Khittah, Muhammadiyah adalah gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang tidak memiliki afiliasi dengan partai politik manapun. Dalam pemilihan Presiden 2014, Muhammadiyah memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk menggunakan hak pilihnya secara cerdas, bijaksana dan pertimbangan rasional dan spiritual dalam memilih pasangan calon Presiden/Wakil Presiden yang memenuhi kriteria...". Inilah sikap Muhammadiyah, yang harus dipedomani secara objektif oleh seluruh anggota tanpa kecuali.

Meski tidak berpolitik praktis dan memiliki hubungan afiliasi, Muhammadiyah dapat membangun komunikasi dengan kekuatan politik dan pihak mana pun sesuai prinsip dan kepribadiannya. Soal apakah hubungan itu dekat atau jauh sangat relatif, karena relasi dalam dunia politik bukan soal netral dan jarak harfiah. Jika hendak membangun kedekatan yang sama juga tak masalah, yang penting jangan sampai berhimpitan dan berperilaku sama dengan partai politik. Membangun kedekatan yang sama juga harus objektif, yakni benar-benar berhubungan sama baiknya dengan semua pihak. Jangan sampai berhubungan dekat dengan satu pihak, tetapi menjauh dari pihak lain.

Muhammadiyah juga dapat memperjuangkan kepentingan politik yang bersifat strategis seperti menyangkut kebijakan-kebijakan pemerintah yang jika dibiarkan akan merugikan persyarikatan, umat, dan bangsa. Fungsi tersebut dijalankan melalui lobi dan komunikasi sebagai kelompok kepentingan (*interest groups*) atau kelompok penekan (*pressure group*) sesuai prinsip dakwah dan kepribadian Muhammadiyah. Langkah tersebut harus tetap terukur dan ditempuh dengan mengindahkan posisi Muhammadiyah sebagai ormas, serta sejalan dengan cara dan prinsip Muhammadiyah, sehingga tidak sembarangan.

Apakah dengan Khittah bebas masalah? Jangan mengasumsikan meski memiliki Khittah atau karena ada Khittah Muhammadiyah bebas dari persoalan politik. Kehidupan di dunia ini selalu disertai masalah. Dengan ajaran Islam yang sempurna saja umat Islam tidak luput dari masalah, termasuk dalam menjalankan ajaran Islam itu sendiri. Lebih-lebih dengan Khittah yang sifatnya produk kebijakan manusia atau organisasi, tentu selalu saja ada masalah, termasuk dampak dari Khittah itu. Membayangkan Muhammadiyah bebas dari persoalan sungguh tidak realistis. Apalagi menyangkut urusan politik yang seringkali keras dan rumit.

Dengan Khittahnya apakah Muhammadiyah tidak memiliki jalan keluar dalam menghadapi dunia politik? Tentu tidak. Muhammadiyah sejak dulu sampai kapanpun harus tetap berkhtiar sesuai prinsip, ideologi, dan kepribadiannya dalam berhadapan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk yang berkaitan dengan politik kekuasaan. Dalam hal ini dapat dilakukan empat langkah strategis sebagai aktualisasi Khittah sekaligus jalan keluar Muhammadiyah dalam menghadapi dunia politik praktis:

Pertama, menjalin komunikasi yang baik dengan kalangan partai politik dan lembaga-lembaga pemerintahan serta berbagai kekuatan bangsa lainnya dalam memperjuangkan kepentingan Muhammadiyah, umat, dan bangsa. Langkah ini dilakukan sesuai prinsip Kepribadian Muhammadiyah. Dalam berkomunikasi dengan pihak lain, menurut Pak AR Fakhruddin, Ketua PP Muhammadiyah terlama, kita jangan berkakak-pinggang alias angkuh dan mentang-mentang, sebaliknya jangan merendahkan diri sehingga kehilangan martabat diri. Berkimunikasilah dengan wajah dan cara dakwah, insya Allah ada jalan. Soal apakah berhasil atau tidak dalam memperjuangkan setelah berikhtiar, serahkalah kepada Allah, jangan merana ketika gagal dan sebaliknya congkak tatkala berhasil. Kadang muncul pendapat, dengan cara lobi dan komunikasi politik itu

hasilnya tidak seberapa. Memang mau dapat seperti apa? Partai politik saja banyak yang tidak memperoleh kursi Kabinet, apakah Muhammadiyah harus memaksakan diri?

Kedua, siapkan secara terencana dan terorganisasi para kader politik untuk aktif dan masuk ke partai politik agar memperoleh saluran meraih jabatan dalam pemerintahan, apakah di lingkungan eksekutif, legislatif, dan yudikatif maupun institusi lainnya yang penting dan strategis. Langkah ini bisa dilakukan langsung oleh Pimpinan Persyarikatan maupun Unsur Pembantu Pimpinan atau badan khusus tergantung bagaimana efektifnya. Usaha ini harus dilakukan secara sistematis dan terorganisasi secara baik, yang sifatnya jangka menengah maupun panjang. Pada saat yang sama harus didukung oleh para kader atau anggota Muhammadiyah sendiri yang memerlukan komitmen, itikad, dan kesungguhan yang tinggi agar tidak semata menggantungkan diri pada usaha Persyarikatan, sehingga saling dukung antara ikhtiar lembaga dan anggota. Pekerjaan ini memang jangka panjang dan mungkin tidak segera kelihatan hasilnya, memang yang mudah itu apa? Segala hal di dunia ini perlu perjuangan berat dan tidak instan.

Ketiga, siapkan para kader profesional yang dapat diproyeksikan ke berbagai struktur termasuk di pemerintahan. Keduanya dapat dirancang-bangun oleh organisasi terutama melalui lembaga pendidikan dan amal usaha Muhammadiyah, lebih khusus Perguruan Tingginya. Pada saat yang sama juga memerlukan motivasi dan kerja keras para kader Muhammadiyah sendiri sehingga dalam jangka panjang akan membuahkan hasil. Kader profesional itu sangat penting karena dapat menduduki posisi apapun dan di manapun secara objektif, lebih-lebih dalam sistem meritokrasi di era modern, bahwa siapa yang ahli dan unggul di bidang tertentu maka akan dibutuhkan pihak lain. Menyiapkan kader profesional pun memerlukan usaha sistematis, terus menerus, dan kerja keras. Itulah yang musti dijalani dalam perjuangan Muhammadiyah dan orang-orang Muhammadiyah jika ingin meraih keberhasilan.

Keempat, Muhammadiyah terus mendorong terciptanya sistem pemerintahan yang *good governance*, objektif, dan berbasis meritokrasi. Presiden, Wakil Presiden, Menteri, anggota legislatif, pejabat yudikatif, dan pejabat pemerintahan di struktur dan institusi mana pun dari manapun asalnya harus berdiri di atas kepentingan bangsa dan negara serta tidak terjebak pada konspirasi dan kepentingan sempit diri, keluarga, kroni, dan golongannya. Jika pemerintahan berjalan objektif seperti itu maka Muhammadiyah akan diuntungkan, demikian halnya bangsa dan negara. Sudah tidak masanya para pejabat negara berwawasan dan bersikap kerdil, yang pada akhirnya merugikan kepentingan bangsa dan negara. Kini dan ke depan jika ada pejabat negara dan pemerintahan yang berasal dari satu golongan hanya mengurus kepentingan golongannya, ajimumpung memasukkan orang-orang dari golongannya, dan menyingkirkan orang-orang yang bukan dari golongannya maka harus dibawa ke ruang publik sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Dalam sistem politik yang demokratis sudah saatnya perilaku politik yang sektarian dan kerdil seperti itu dikritisi dan disingkirkan dari praktik berbangsa dan benegara. Negara dan pemerintahan Indonesia dari pusat hingga daerah itu milik seluruh rakyat serta dengan susah payah diperjuangkan dan didirikan oleh seluruh kekuatan bangsa, sehingga bukan milik satu kelompok atau golongan.

Sejumlah langkah lain dapat diagendakan dalam menggarap dunia politik secara tidak langsung. Soal apakah akan berhasil atau gagal tergantung pada kesungguhan, komitmen, kerja keras, dan usaha yang dilakukan Muhammadiyah beserta seluruh anggotanya. Tentu tidak mudah dan memerlukan langkah kaki yang panjang. Langkah apapun dalam perjuangan hidup di muka bumi ini memang tidaklah mudah. Bukankah Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga kaum itu mengubahnya sendiri".

Khatimah

Muhammadiyah haruslah istiqamah dengan Khittah untuk tidak mendirikan dan memiliki partai politik, berafiliasi dengan partai politik dan kekuatan manapun, dan terlibat

dalam aktivitas politik praktis. Dalam memperjuangkan kepentingan dan misi Muhammadiyah yang berkaitan dengan politik kebangsaan maupun politik kekuasaan, Muhammadiyah wajib menjalankan usaha-usaha sebagai kelompok kepentingan, melakukan komunikasi dengan berbagai pihak termasuk kalangan partai politik, serta menyiapkan kader politik dan profesional yang berkeunggulan. Semua langkah tersebut dilakukan sesuai prinsip, ideologi, dan jatidiri Muhammadiyah tanpa harus sama dengan organisasi yang lain.

Seluruh proses tersebut juga jangan dianggap mudah dan instan, yang memerlukan langkah organisasi yang tersistem rapih dan baik. Pada saat yang sama dioerlukan sikap para kader muda dan anggota Muhammadiyah yang harus menunjukkan *inner-dynamic* yang kuat agar tidak serba menunggu langkah organisasi semata. Jangan menganggap perjuangan politik itu serba gampang laksana membalik telapak tangan. Perjuangan apapun memerlukan niat, kegigihan, komitmen, kesungguhan, kerja keras, pengkhidmatan, kerjasama, sinergi, dan pengorbanan yang tinggi plus dukungan sistem dan ridla Allah SWT.

Dalam wacana dan tuntutan perjuangan di kancah politik cobalah dudukkan Muhammadiyah secara proporsional sesuai posisi dirinya sebagai gerakan keagamaan-kemasyarakatan yang berbeda dan bukan sebagai gerakan politik seperti partai politik. Dalam sistem politik modern di mana pun fungsi politik untuk meraih kedudukan kekuasaan di pemerintahan ditempuh melalui partai politik, bukan melalui organisasi kemasyarakatan. Selain itu cobalah dudukkan Muhammadiyah sebagai dirinya sendiri yang berbeda misalnya dengan organisasi Islam lain yang memang memiliki watak, prinsip, dan orientasi yang berbeda meskipun sama-sama sebagai organisasi keagamaan. Muhammadiyah tentu selalu berusaha melakukan ikhtiar politik sebagai kekuatan keagamaan dan kemasyarakatan yang bebeda dari dan tidak berperangai sama seperti parpol. Pada saat yang sama Muhammadiyah tidak mesti mengikuti langkah organisasi lain yang bertindak serba pragmatis dan mungkin boleh melakukan apa saja. Perbandingan memang perlu, tetapi menirukan dan menisbahkan dengan orang lain belum tentu cocok bagi Muhammadiyah, masing-maang mempnyai karakter diri yang berbeda dan tidak harus sama.

Kiranya penggalan bait dalam syair lagu Muktamar Muhammadiyah hasil goresan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, MA., patut direnungkan dan menjadi rujukan substantif dalam mengarahkan Muhammadiyah ke depan berkaitan dengan politik. "***Dari Makassar ke Makassar, Khittah jadi pegangan dasar***", demikian petikan lagu yang puitis itu. Dari Muktamar di Makassar tahun 1971 yang mengasilkan Khittah Ujung Pandang yang monumental hingga bersua di Muktamar ke-47 tahun 2015 di Kota Angin Mamiri itu, hendaklah Muhammadiyah tetap menjadikan Khittah yang menggariskan tidak berpolitik praktis sebagai pegangan dasar menuju masa depannya yang berkemajuan. Jangan sampai berbelok arah dan haluan, meski tidak jarang harus berpirau jalan untuk menyelamatkan perjuangan. Gerak Perahu Phinisi perlu jadi bahan pelajaran, meski harus mengarungi samudra luas penuh hantaman gelombang, dia tetap berlayar menuju tujuan! *Wallahu 'alam bi al-shawwab*.

MUHAMMADIYAH DAN POLITIK GLOBAL

Oleh : Tulus Warsito¹

Pendahuluan

Sebagai bagian dari catatan waktu, bentangan abad ke-2 bagi Muhammadiyah memerlukan “flashback” untuk merangkumnya dalam konstruksi prestasi (sejarah) yang bermanfaat bagi sebanyak-banyak umat. Dalam kiprahnya di abad pertama, sekaligus sebagai era awal sejarah Muhammadiyah, tentu saja menghadapi hal-hal yang berbeda dengan tantangan yang ada sekarang, apalagi untuk seabad ke depan. Sebagai gerakan sosial keagamaan Muhammadiyah dihadapkan pada masalah kolonialisme, keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan masyarakat, serta konservatisme keagamaan. Walaupun banyak catatan kekurangan, tetapi tidak sedikit prestasi positif yang membawa Muhammadiyah menjadi organisasi masyarakat (LSM) yang cukup disegani dalam pendidikan, kesehatan, dan dinamika politik pemerintahan di tanah air. Di era globalisasi yang semakin membuka semua sekat komunikasi di seluruh penjuru dunia sekarang ini tentu akan menghadirkan sejumlah permasalahan yang berbeda dengan yang ada pada abad yang lalu. Masyarakat Indonesia yang semakin cerdas dan terdidik, fasilitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin beranekaragam, begitu juga perpolitikan dalam negeri dan isu globalisasi yang semakin kompleks, akan menjadi sumber masalah yang harus segera dikonstruksi solusinya. Tulisan singkat ini ditulis untuk menjelajahi kemungkinan tentang: peluang apa saja yang dihadapi oleh Muhammadiyah pada abad ke-2, baik di dalam negeri maupun (terutama) di aras global?, dan langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk menghadapi semua itu?

Dari semula Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi sosial keagamaan yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan dan keagamaan untuk Indonesia khususnya dan umat Islam pada umumnya. Memasuki abad kedua tantangan dakwahnya tentu tak kalah rumit jika dibandingkan dengan abad pertama, karena Muhammadiyah tidak lagi berdiri sebagai ormas modern berbasis sosial kemasyarakatan di Indonesia, melainkan juga berhadapan dengan berbagai persoalan serius nasional maupun internasional. Persoalan nasional maupun internasional itu merupakan peluang bagi Muhammadiyah untuk semakin berkiprah t secara global. Muhammadiyah yang sejak awal tidak didisain untuk menjadi partai politik dan karenanya sering gamang dalam berhadapan berpolitik, terutama gerakan massif politik praktis yang penuh pragmatisme perlu mendapatkan perhatian serius Muhammadiyah. Muhammadiyah tidak boleh lagi “hanya

¹ Guru Besar Politik Internasional dan Diplomasi Kebudayaan, Ketua Program Studi Doktor(S3) Politik Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

menjadi penonton dan pembantu” negara dengan pelbagai amal usaha yang telah dikerjakan. Muhammadiyah harus menjadi bagian penting dari negara, dan syukur jika Muhammadiyah dapat menjadi “pemuka atau penghulu” di negara ini yang secara kultur berislam moderat dan membutuhkan organisasi sosial keagamaan seperti Muhammadiyah.

Masalah Dalam Negeri dan Isu Non-Teologis

Tulisan singkat ini disusun untuk *plotting* masalah non-teologis, oleh karena itu tidak membahas soal dakwah peribadatan ataupun peran religiusitas, melainkan semata-mata mengenai dimensi sosial dan politik Muhammadiyah di Indonesia. Dibandingkan dengan peranannya dalam aspek politik, peran sosial Muhammadiyah sebagai ormas yang memberdayakan umat tercatat dalam banyak prestasi yang positif. Jaringan perguruan tinggi yang dimiliki lebih dari 170 tersebar di seluruh Nusantara merupakan fakta tak terbantahkan bahwa Perguruan Tinggi Muhammadiyah merupakan jaringan perguruan tinggi terbesar di dunia dengan bendera yang sama. Tidak ada jaringan perguruan tinggi (PT) dengan bendera tunggal yang jumlahnya sebanyak itu. Lebih menarik lagi bahwa pertumbuhan dari semua PT tersebut adalah karena inisiatif dari umat (*bottom-up*), sehingga dipastikan PTM merupakan PT berjejaring terluas berbasis pada *grassroot*, tanpa tandingan.

Dalam aspek politik, yang sejak awal merupakan kesadaran utama terhadap pilihan strategis bagi berdirinya Muhammadiyah, sebenarnya tidaklah begitu buruk prestasinya. Seperti saat Kiai Dahlan “berkompromi” terhadap pemerintah Hindia-Belanda untuk mendapatkan cap “legal” pendirian sebuah ormas. Kiai Dahlan perlu membangun kekuatan di Boedi Oetomo guna memperkuat dukungan agar Muhammadiyah tidak mendapatkan resistensi dari pemerintah kolonial. Dalam perjalanan selanjutnya, Muhammadiyah turut serta dalam kancah politik tahun 1955. Di mana Muhammadiyah menjadi anggota aktif Partai Masyumi dengan semboyan “Berpolitik dengan Masyumi, berdakwah dengan Muhammadiyah”. Peran kebangsaan dalam bidang politik pun terus bergulir di massa Orde Baru. Di mana memuncak saat Kiai AR Fachruddin menerima asas tunggal Pancasila. Pak AR dengan lobby yang kuat kemudian menelorkan istilah “politik helm”. Politik helm menjadi cara Pak AR untuk mendekatkan diri kepada pemerintahan yang sah. Melalui ijtihad itu, Muhammadiyah

pun dapat selamat dari “pembredelan” ala Soeharto. Ijtihad politik Muhammadiyah pun kini memasuki jihad konstitusi. Di mana Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengajukan serangkaian uji materi kepada Mahkamah Konstitusi terkait UU yang tak berpihak kepada umat, seperti UU Migas.

Seperti yang sering didengungkan berbagai pihak, peran serupa itu menempatkan Muhammadiyah belum atau tidak cukup signifikan dalam pengelolaan politik pemerintahan nasional. Gagasan menjadikan orang-orang Muhammadiyah berperan sebagai “imam” bangsa masih terkendala oleh banyak hal. Keengganan untuk tidak ambil bagian dalam organisasi politik formal merupakan salah satu sebab Muhammadiyah menghadapi keterbatasan akses rekrutmen politik nasional.

Jika pendapat tersebut mengandung kebenaran, maka ada beberapa peluang yang mungkin dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan solusi ke depan untuk merangkai *road map* “menjadikan Muhammadiyah sebagai imam di negeri sendiri”.

Kelompok Penekan yang Handal

Jika menjadikan Muhammadiyah sebagai partai politik adalah merupakan sesuatu yang mustahil, seperti halnya kegagalan pada era Masyumi, maka pilihan lain adalah mengembangkan Muhammadiyah sebagai kelompok penekan pemerintah (*pressure group*) yang tangguh melalui penguatan peran organisasi kepakaran yang selama ini (sebenarnya sudah) berkembang di Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Majelis Dikti Muhammadiyah seharusnya mengembangkan sayapnya ke arah divisi-divisi kepakaran yang muncul sebagai kelompok penekan, dengan secara periodik (maupun kapan saja) menampilkan pikiran-pikiran mereka yang dianggap diperlukan oleh bangsa secara publik (bukan dipendam sendirian). Reputasi Muhammadiyah dalam *judicial review* terhadap sejumlah Undang-undang boleh digunakan sebagai referensi.

Gagasan mengenai kelompok penekan ini dimaksudnya sebagai harus muncul bagi kesadaran para puncak pimpinan Muhammadiyah baik (terutama) di pusat maupun di daerah. Kesadaran dalam bentuk strategi organisasi yang konstruktif, jelas arah dan tujuannya, *amar ma'ruf nahi munkar*. Harus terdapat pertemuan-pertemuan terstruktur yang mengurus fungsi Muhammadiyah sebagai *pressure group* ini.

Politik Cangkok (Politik Implantasi)

Fungsi penekan haruslah menunjukkan kemampuan menghadirkan kebijakan alternative atau gagasan-gagasan pemecahan masalah (*problem solving*). Oleh karena itu, ide-ide tandingan dalam setiap “tawaran tekanan” harus didukung oleh sejumlah “faksi politik riil” baik dalam parlemen maupun di luar parlemen (di jalanan atau kampus). Untuk itu diperlukan strategi “menanamkan” sejumlah kader Muhammadiyah di sebanyak mungkin kepengurusan partai politik yang ada. Dengan kata lain, Muhammadiyah harus mempunyai rancangan untuk secara sedemikian rupa mendukung keterlibatan kader Muhammadiyah di sebanyak mungkin partai politik.

“Politik Netral” yang belakangan ini dijalankan oleh Muhammadiyah nampaknya lebih mirip sebagai “politik isolasi”, yang seolah menjauhkan Muhammadiyah dari tampilan partai politik. Pengertian “netral” sudah saatnya diubah, dari pengertian “steril” atau “tidak dimana-mana” menjadi hadir dan memberi nafas ke-Muhammadiyah “dimana-mana”.

Politik Cangkok atau implantasi ini seharusnya menjadi strategi besar Muhammadiyah dalam *road-map* menuju “imam” bangsa. Para petinggi Muhammadiyah seharusnya tidak lagi “alergi” terhadap kadernya yang menjadi pengurus di banyak partai politik di negeri ini. Sikap “steril” yang seringkali nyinyir terhadap partai politik hanya membuat Muhammadiyah ketinggalan kereta kepemimpinan bangsa. Memang selama ini Muhammadiyah tidak melarang anggotanya untuk berpartisipasi di parpol. Tetapi pembiaran semacam ini mengakibatkan yang bersangkutan merasa keberhasilannya pada parpol tersebut bukan sebagai berkat persyarikatan, melainkan sebagai prestasi pribadi. Hal semacam inilah yang perlu direkonstruksi ke depannya. Yang “steril” harus diubah menjadi “implanted” dimana-mana, sehingga diharapkan fungsi *pressure group* menjadi lebih efektif. Persyarikatan sebaiknya mempunyai rencana besar untuk memanfaatkan sebanyak mungkin parpol sebagai mitra strategis mencapai kemajuan bangsa seperti yang diharapkan oleh kiai Dahlan.

Isu Politik Global

Tantangan internasional memiliki rupa yang berbeda dengan aras dalam negeri. Jika pada abad lalu Muhammadiyah (sebagai bagian dari kekuatan masyarakat Indonesia) berhadapan dengan kolonialisme, kemudian ditempa oleh rivalitas ideologi selama

Perang Dingin, maka pada milenium baru ini warna tantangannya sangat berbeda. Isu benturan kebudayaan antara Barat, Islam dan Konfusianisme yang diinisiasi oleh Samuel P Huntington (Huntington, 1996) rupanya memperoleh pembenaran dengan terjadinya tragedi menara WTC 2001. Dunia seolah resmi terbelah dalam rivalitas frontal antara Barat dan Islam. Topik terorisme dan Islam menyeruak memblokir hampir di seluruh *headline* media massa dunia. Berakhirnya Perang Dingin(1990), seolah menobatkan Amerika Serikat (AS) sebagai satu-satunya kutub kekuatan dunia. Di hampir setiap peristiwa besar selalu ada kehadiran AS.

Salah satu akibat dari perkembangan serupa itu menjadikan konsep keamanan, baik keamanan nasional maupun keamanan global, mengalami perubahan. Konsep serangan militer asing dianggap tidak lagi seluruhnya relevan (John Baylis, 2008). Isu-isu keamanan, sebagai isu politik, yang didominasi oleh terorisme, perubahan iklim dan meningkatnya kriminalitas bentuk baru akibat kemajuan teknologi transportasi dan informasi, mendorong terjadinya perubahan makna keamanan dalam pergaulan dunia. Keamanan yang secara tradisional diartikan sebagai persoalan bagaimana suatu negara melindungi ancaman atau serangan dari luar, berubah menjadi Keamanan Non-Tradisional meliputi persoalan bagaimana masyarakat dunia bisa mencegah dan menanggulangi ancaman bencana alam, kelaparan, kemiskinan, wabah penyakit dan lain-lain (bukan sekedar menyelamatkan bangsa).

Isu sentral masalah politik global sekarang adalah *Human Security*, yaitu isu-isu mengenai bagaimana masyarakat manusia dapat menjamin pertahanan dan pengembangan kehidupannya dari semua ancaman. Tidak hanya yang berbasis pada negara, melainkan pada keselamatan manusia secara universal (Martin Griffiths , 2006). Dalam skala global, Muhammadiyah sebagai LSM atau NGO (bisa juga INGO) memperoleh peluang besar untuk dapat ambil bagian dalam isu baru “Keamanan Non-Tradisional” ini. Kalau tentara (militer) di banyak negara sudah mulai dialih fungsikan dari sebagai kekuatan tempur menjadi “relawan” penanggulangan bencana alam dan sejenisnya, maka Muhammadiyah yang sejak awal didesain sebagai gerakan sosial haruslah merasa mendapat “panggilan” dalam era baru global yang namanya keamanan non-tradisional ini.

Human Security: Spiritual Security, Educational Security

Berkembangnya isu *national security* menjadi *human security* betul-betul menghadirkan tantangan global yang menarik bagi Muhammadiyah. Beberapa isu turunan dari human security adalah *spiritual security* dan *educational security*.

Sebagai organisasi sosial keagamaan di negara berpenduduk muslim terbesar di dunia sudah semestinya Muhammadiyah tampil sebagai oase jaminan kedamaian kehidupan beragama. Peran sosio-religiusitas Muhammadiyah mestinya dapat tampil sebagai kekuatan mediator bagi konflik keagamaan regional maupun global. Beberapa kali tokoh Muhammadiyah tampil dalam resolusi konflik di Asia. Tentu upaya ini harus terus dikembangkan sehingga Muhammadiyah bisa muncul sebagai icon penjamin kehidupan beragama secara global.

Educational Security merupakan bidang yang seharusnya tidak sulit bagi Muhammadiyah untuk mengembangkan ke level global. Melalui jaringan PTM perlu diingkatkan lagi program beasiswa internasional yang selama ini sudah dijalankan kepada masyarakat muslim Asia Tenggara, juga (mestinya) kepada masyarakat non-muslim dimana saja sebagai bagian dari strategi program *Spiritual Security* yang disebut diatas.

Program *Educational Security* juga bisa dilakukan melalui insentif dengan pemberian penghargaan akademik (*doctor honoris causa*) maupun non akademik dalam ranah pendidikan (semacam *Muhammadiyah Award* atau *UMY Award*, misalnya) kepada tokoh maupun lembaga internasional yang dianggap berjasa bagi pendidikan masyarakat. Jaringan pendidikan Muhammadiyah sangat diyakini mampu membuat lembaga yang mengurus insentif penghargaan seperti ini. Jaringan PTM se-Indonesia sangat pantas untuk memiliki lembaga Majelis Guru Besar Muhammadiyah yang pada saatnya menyematkan penghargaan akademik bagi tokoh yang berjasa dalam pendidikan.

Selain *Spiritual* dan *Educational Security* masih banyak cabang isu keamanan non-tradisional yang bisa kita berpartisipasi. Isu penanggulangan bencana adalah salah satu diantaranya. Alhamdulillah Muhammadiyah sudah punya Lembaga Penanggulangan Bencana (LPB) atau *Muhammadiyah Disaster Management Centre* (MDMC) walaupun jangkauannya masih belum global. Tinggal merevitalisasi dan mengembangkan lebih jauh lagi.

Health Security bisa kita mulai dengan menyusun program Pusat Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba, setidaknya tingkat regional kalau tidak mungkin secara global. Sebagai awalan bisa saja pelayanan semacam itu didirikan di daerah perbatasan, dalam rangka melayani pasien antar negara.

Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam perubahan iklim global dapat digunakan sebagai alasan untuk membangun dan membesarkan Pusat Studi Lingkungan Muhammadiyah (*Muhammadiyah Enviromental Studies - MES*). Pakar di bidang ini melimpah ruah di jaringan pendidikan Muhammadiyah. Hanya dalam hal pelembagaan pemanfaatan pada level global memang harus ada yang mengurusnya(menginisiasi dan mengelolanya).

Satu lagi yang sangat penting, adalah lembaga studi pemeliharaan perdamaian, juga merupakan isu strategis dari keamanan non-tradisional. Potensi konflik yang tidak lagi hanya berasal dari negara mengakibatkan semakin rentannya masalah perdamaian. Alhamdulillah UMY sudah memiliki MGPS (*Mahathir Global Peace School*) atas kerjasamanya dengan Global Perdana, Malaysia. Untuk kepentingan ke depan bisa saja MGPS dikembangkan lebih luas menjadi *Muhammadiyah Global Peace Studies* (tetap MGPS) dengan pembiayaan yang lebih memungkinkan Muhammadiyah menjadi aktor yang semakin otonom. Reputasi beberapa tokoh Muhammadiyah dalam proses perundingan konflik bangsa Moro di Filipina sangat boleh jadi dijadikan embrio pengembangan gagasan Pusat Studi Perdamaian ini.

Jika diteruskan, masih banyak peluang yang bisa dilakukan oleh Muhammadiyah sebagai INGO (LSM internasional) dalam menyebarkan dakwah dan sedekahnya kepada dunia. Ini semua berpulang kepada pemegang kepemimpinan Muhammadiyah, baik di pusat maupun di bawahnya. Sebenarnya dalam hal mengetahui isu-isu tersebut diatas bukanlah merupakan hal yang baru. Hal yang perlu dilakukan kemudian adalah penguatan kepedulian (revitalisasi) terhadap isu-isu politik global tersebut dalam bentuk lembaga kerja yang konstruktif. Semoga dengan lebih terbukanya peluang global ini amanah *amar ma'ruf nahi munkar* persyarikatan menjadi membahana di seluruh dunia, sehingga nilai Islam yang *rahmatin lil 'alamin* sebagai dasar Muhammadiyah benar-benar bisa kita sumbangkan kepada alam semesta. Inshaallah!

MUHAMMADIYAH DIHADAPAN NEGARA :

MELIHAT PERAN DIARAS GLOBAL

Oleh : Syafiq A. Mughni

Pendahuluan

Sekalipun legalitas Muhammadiyah sebagai perkumpulan berlaku di kawasan Indonesia, gerakannya tidak lagi hanya menjadi fenomena nasional melainkan juga internasional. Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi sosial keagamaan yang memiliki jaringan internasional dan berkolaborasi dengan berbagai institusi di berbagai belahan dunia. Muhammadiyah telah memiliki sister organization di Singapura, Malaysia dan negara-negara lain, dan juga PCIM (Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah) di berbagai negara. Muhammadiyah telah menjadi subyek kajian para peneliti, ilmuwan dan pengamat. Sebagai gerakan “dakwah, amar makruf, nahi munkar,” jangkauannya semakin luas, melewati batas-batas negara dan agama. Fenomena yang cukup menarik untuk dilihat adalah keterlibatan Muhammadiyah dalam Masyarakat Sipil Global (*Global Civil Society*) yang telah berkembang menjadi kekuatan non-pemerintah yang bergerak dalam advokasi untuk kebijakan dan implementasinya. Perkembangan MSG (Masyarakat Sipil Global) itu sesungguhnya merupakan respons terhadap berbagai persoalan yang tidak mungkin diselesaikan oleh negara karena memiliki keterbatasan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Kekecewaan terhadap negara dalam menyelesaikan masalah-masalah menjadi faktor pendorong awal lahirnya MSG.

Masyarakat Sipil Global (MSG)

MSG berkembang sesuai tuntutan masalah internasional. Jika gerakan masyarakat sipil lokal memiliki karakteristiknya tersendiri akibat tuntutan yang bersifat lokal, dan masyarakat sipil nasional merupakan respons atas tuntutan yang bersifat nasional, maka demikian pula MSG (masyarakat sipil global). Fenomena gerakan MSG semakin nyata diperlukan ketika terjadi kecenderungan akibat kebijakan-kebijakan sesuatu negara atau transnegara yang berlawanan dengan tuntutan-tuntutan kemanusiaan universal. Bahkan, seringkali gerakan masyarakat sipil global memberikan tekanan terhadap sesuatu negara yang mengambil kebijakan-kebijakan yang merugikan warga negaranya. Namun demikian, perlu difahami bahwa MSG juga bisa menjadi respons atas kebutuhan masyarakat tanpa ada keterkaitan langsung dengan kebijakan negara.

Beberapa studi, seperti John Keane dalam *Global Civil Society* (2003) telah melihat pertumbuhan MSG sebagai sesuatu yang menarik. Mereka melihat signifikansi potensialnya dari jaringan kebijakan non-pemerintah. Isu yang menjadi fokusnya meliputi pemberantasan korupsi, penegakan hak-hak asasi manusia, kerusakan lingkungan, dan pembangunan yang berkelanjutan. Gradasi pengaruh dari gerakan-gerakan itu terhadap agenda kebijakan tergantung pada kemampuan untuk menghimpun informasi dan membangun jaringan. Dalam perkembangannya kelompok-kelompok masyarakat sipil itu tidak semata-mata merupakan perpanjangan dari gerakan advokasi yang bersifat domestik.

Namun perlu diperhatikan bagaimana kelompok-kelompok itu berkembang dari skalanya yang lokal, nasional dan kemudian menjadi internasional.

Selanjutnya Keane melihat bahwa Masyarakat sipil global adalah kumpulan kelompok-kelompok yang bergerak lintas batas dan di luar jangkauan pemerintah. Organisasi-organisasi semacam itu terdiri dari sebuah domain baru yang cenderung semakin otonom dan tidak semata-mata menjadi produk sampingan dari masyarakat liberal Barat. MSG telah menjadi fenomena yang remang-remang dan secara politik diperdebatkan. Sebagian peneliti berpendapat bahwa MSG sedang membentuk diri tetapi karakter dan implikasinya bagi sistem negara lama tetap tidak jelas. Keragaman kelompok, aktivitas, dan jaringan yang membentuk MSG semuanya memiliki ciri-ciri tersendiri: nirlaba, bisnis, gerakan sosial, wisatawan, akademik, artis, etnik dan lain menjadikan garis pemisahnya tidak jelas. Keane, namun demikian, menyatakan bahwa kesemuanya berfungsi sebagai masyarakat dengan norma-norma dan aturan main. Ia mengakui bahwa MSG masih terus berkembang di ruang yang tak terbatas yang peran pentingnya akan tergantung pada kemampuan untuk menjadi semakin demokratis, terintegrasi ke dalam tata kelola yang lebih terintegrasi, dan memiliki misi nilai-nilai universal.

MSG memiliki ciri-ciri tertentu, kata Keane. Ia merupakan organisasi, yang memiliki struktur dan tatakelola. Ia bukan merupakan gerakan yang sporadis. Ia juga memiliki ciri sebagai organisasi non-government dan karena itu memiliki kebebasan di luar kepentingan-kepentingan politik sebuah negara. Ia adalah gerakan yang tidak berorientasi keuntungan (non-profit). Ia bebas mengatur dirinya sendiri. Ia juga bersifat sukarela.

Lebih lanjut Keane memandang bahwa ada beberapa isu yang menjadi tema dari gerakan MSG. Pertama adalah isu tentang ancaman terhadap demokrasi. Pada awalnya gerakan MSG berpusat pada resistensi terhadap Bank Dunia, IMF, dan WTO yang mengemban misi agenda kebijakan neoliberal, menghilangkan batas-batas ekonomi dan jaminan sosial, MSG mengarahkan perhatiannya pada korporasi global dan pasar keuangan. Kedua adalah sikapnya tentang dua pandangan dunia yang saling bertentangan, antara globalisasi elit dengan kekuatan MSG. Solusi yang diambil dari konflik itu sekarang akan menentukan nasib kemanusiaan untuk beberapa generasi mendatang.

Ketiga adalah bahwa gerakan-gerakan kemerdekaan nasional setelah Perang Dunia II membebaskan dunia dari kolonialisme. Dunia merayakan berakhirnya imperialisme dan munculnya era baru demokrasi, perdamaian, kemakmuran dan komunitas. Perayaan itu ternyata premature. Kekuatan imperialisme segera muncul kembali dalam jubah pembangunan dan janji hilangnya kemiskinan. Namun demikian, pembangunan ternyata menjadi program untuk mengulang kebijakan yang sama, eksploitasi sumber daya alam oleh yang kuat dari yang lemah. Dalam konteks ini, gerakan MSG merupakan respons terhadap situasi ini.

Gerakan MSG menunjukkan gerakan populer yang mendapatkan inspirasi dari gerakan kemerdekaan. Inspirasi itu meliputi hak-hak sipil, hak-hak wanita, perdamaian, lingkungan dan resistensi terhadap globalisasi korporasi. Korporasi itu dilawan dengan model partnership masyarakat.

Program Muhammadiyah

Keterlibatan Muhammadiyah dalam dinamika internasional telah menjadi keputusan Muktamar ke-46 di Yogyakarta, 2010. Keputusan itu menyebutkan bahwa salah satu tujuan Program Jangka Panjang (Visi Muhammadiyah 2025) ialah “Berkembangnya tatanan kehidupan global yang adil, damai, dan bermartabat serta semakin proporsional peran dan tanggungjawab umat Islam (dunia Islam) di antara komunitas dunia yang lain sebagai perwujudan kehadiran Islam sebagai *rahmatan lil- ‘alamin* dalam dinamika peradaban dunia.” Kemudian, dalam Program Bidang Ukhuwah dan Kerjasama Kelembagaan disebutkan bahwa Muhammadiyah perlu “Proaktif membangun dan mengembangkan solidaritas umat dan manusia terhadap berbagai persoalan nasional dan internasional yang menyangkut ketidakadilan, HAM, dan kemanusiaan.”

Dalam keputusan tentang Program Muhammadiyah 200-2015 (Visi Muhammadiyah 2015) disebutkan juga bahwa Muhammadiyah harus “membangun jaringan yang berkaitan dengan hubungan internal dan eksternal Muhammadiyah, yakni (a) Menguatnya peran dan jaringan keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal, (b) Menguat dan meluasnya jaringan amal usaha, kegiatan, dan perangkat Persyarikatan, dan (c) Menguatnya hubungan dan kerjasama internasional.” Lebih lanjut, Keputusan Muktamar itu menyatakan bahwa dalam Program Partisipasi Kebangsaan, Muhammadiyah perlu “memperkuat posisi dan peran Muhammadiyah sebagai organisasi Islam modern terbesar dalam dinamika nasional dan global melalui berbagai keterlibatan yang strategis, selektif, dan produktif dengan tetap mengindahkan prinsip kemandirian dan sejalan Khittah serta Kepribadian Muhammadiyah.”

Program Bidang Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri yang diputuskan dalam Muktamar ke-46 menyebutkan bahwa Muhammadiyah mengembangkan hubungan dan kerjasama dengan lembaga-lembaga di luar negeri baik pemerintah maupun non-pemerintah untuk mewujudkan dakwah yang membawa misi Islam berkemajuan di dunia internasional. Hal itu dilakukan dengan (1) Meningkatkan networking, dialog perdamaian dan *counter terrorism*, pembentukan *core networking*, serta human resources dan capacity building untuk memperkuat jaringan keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal yang diperankan Muhammadiyah, (2) Meningkatkan sosialisasi pemikiran dan peran persyarikatan serta membangun solidaritas dunia Islam di dunia internasional melalui berbagai kegiatan yang mendukung dinamika Muhammadiyah di tengah perkembangan global, (3) Mengembangkan forum-forum kajian khusus tentang berbagai isu internasional yang strategis, termasuk di dalamnya Ambassador Lecture berupa seminar/public lecture mengenai situasi dunia, untuk menjadi bahan penyikapan dan langkah Muhammadiyah dalam menghadapi perkembangan dunia internasional, (4) Meningkatkan kajian dan perhatian untuk kepentingan advokasi dan dukungan proaktif dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi dunia Islam, (5) Memfasilitasi, menjalin hubungan, dan mengembangkan jaringan untuk pengembangan pendidikan kader dan sumberdaya insani Muhammadiyah ke luar negeri yang melibatkan majelis/lembaga terkait, dan (6)

Memfasilitasi dan membuka jalur bagi meningkatkan hubungan, jaringan, dan kerjasama Persyarikatan dengan lembaga-lembaga internasional untuk kepentingan pengembangan berbagai aspek yang menjadi perhatian dan aksi gerakan Muhammadiyah, termasuk dalam menangani konflik, bencana, dan hal-hal penting lainnya yang menjadi perhatian dunia internasional.

Faith-Based Organizations

Perkembangan MSG (Masyarakat Sipil Global) memperlihatkan semakin pentingnya peran ajaran agama dan pengaruh tokoh agama dalam merumuskan kebijakan dan mengimplementasikan program-program Masyarakat Sipil. Para aktivis memandang bahwa ajaran agama masih berpengaruh dalam membentuk alam pikiran atau pandangan masyarakat. Dengan demikian pula, tokoh-tokoh agama masih dipandang sebagai juru bicara yang memiliki otoritas moral, sehingga bisa menjadi aktor yang efektif dalam melakukan perubahan. Banyak segi-segi persoalan yang tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan sekuler karena memiliki kaitan yang erat dengan dimensi agama pemeluknya. Karena itu, MS (Masyarakat Sipil) baik yang sekuler maupun *faith-based* telah berkerja baik secara terpisah maupun kolaboratif untuk tujuan yang sama. Di samping itu, saat ini telah banyak masyarakat sipil yang berlandaskan agama (FBO, *faith-based organization*), juga telah membangun jaringan atau sinergi secara internasional.

Apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah akhir-akhir ini menunjukkan keluasan dan kedalaman partisipasinya dalam kerangka FBO global. Muhammadiyah menjadi bagian penting dari, misalnya, dalam gerakan yang mengadvokasikan kebijakan *family planning*, seperti *Faith to Action Network*, dan kebijakan pola asuhan anak, seperti *Family for Every Child*, dan pertolongan kesengsaraan, seperti *Humanitarian Forum International*.

Gerakan Perdamaian

Keterlibatan Muhammadiyah cenderung semakin meningkat baik dalam kerangka gerakan berbasis agama maupun sekuler. Tidak pernah ada satu masapun di dunia ini yang kosong dari konflik dan peperangan baik dalam skala kecil maupun besar. Karena itu, komitmen Muhammadiyah untuk menciptakan kehidupan yang damai mengantarkannya menjadi bagian dari gerakan perdamaian global. Dalam hal ini ada dua macam keterlibatan. Keterlibatan yang pertama ialah promosi perdamaian. Melalui berbagai macam konferensi dan dialog, Muhammadiyah telah menyampaikan pikiran-pikiran yang mencegah munculnya konflik. Gerakan perdamaian yang dilakukan oleh Muhammadiyah bertumpu pada spirit *peace* (perdamaian) dan *justice* (keadilan) pada saat yang sama. Spirit tersebut mengajarkan bahwa tidak ada perdamaian yang sejati tanpa ditegakkannya keadilan. Ajaran Islam dieksplorasi untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya agama itu mendorong kehidupan yang damai, toleran dan mengedepankan dialog daripada kekerasan. Situasi yang memungkinkan munculnya kekerasan harus dihilangkan karena konflik itu muncul bukan di ranah yang kosong. Ajaran radikal dan ekstrem tidak akan berkembang jika keadilan ditegakkan. Karena itu dorongan terhadap perdamaian harus disertai dengan dorongan terhadap keadilan. Keterlibatan yang kedua ialah bersifat aksi dalam proses penyelesaian konflik dan pascakonflik.

Perundingan antara Pemerintah Filipina dan Bangsa Moro bisa menjadi contoh bagaimana Muhammadiyah sebagai anggota dari Contact Group yang memediasi keinginan yang bersifat konfliktual antara kepentingan kedua belah pihak. Konflik yang telah berlangsung kurang lebih 40 tahun dan menelan ribuan nyawa manusia telah diakhiri sekalipun masih ada persoalan-persoalan lanjutan yang harus diselesaikan di masih adanya kelompok yang tidak menerima hasil perundingan tersebut. Keterlibatan Muhammadiyah untuk memperdayakan masyarakat Muslim di Thailand Selatan dan Filipina Selatan juga bisa menjadi contoh peran perdamaian yang dilakukan.

Konflik internal umat Islam juga menjadi perhatian Muhammadiyah. Perbedaan faham agama yang berkelindan dengan kepentingan politik telah sebab dari konflik. Mazhab-mazhab yang berkembang dalam Islam yang seharusnya menjadi kekayaan intelektual dan budaya Islam ternyata menjadi penyebab konflik. Dalam beberapa kali konferensi internasional, Muhammadiyah telah menyampaikan pikiran-pikiran dalam kerangka *al-taqrib bayn al-mazahib* (pendekatan antarmazhab). Sektarianisme telah menjurus pada radikalisme harus diubah menjadi toleransi di atas keragaman pemikiran yang seharusnya menjadi factor kemajuan dunia Islam.

Konflik yang berkembang di sekitar isu perbedaan agama juga menjadi perhatian Muhammadiyah. *Interfaih dialogue* di berbagai kawasan dunia ini melibatkan Muhammadiyah. Tokoh-tokoh agama dipandang kompeten untuk berbicara tentang ajaran agama yang otentik. Dalam sebuah pertemuan di Yale University, USA, misalnya, ketika tokoh-tokoh Islam, Kristen dan Yahudi berkumpul dalam sebuah konferensi, ditemukan bahwa dalam persoalan-persoalan kemanusiaan, semua agama sepakat bahwa cinta kepada sesama dan harmoni dalam keluarga. Dalam soal-soal akidah dan ritual juga demikian. Persoalan menjadi rumit ketika berbicara tentang politik. Namun demikian, kesamaan pandangan bisa ditemukan pada sebagian isu ketika diletakkan pada moral agama yang menyangkut kemanusiaan.

Humanitarian Actions

Bencana baik alam maupun manusia seringkali melanda bagian dari dunia ini. Bencana alam bisa berupa gempa bumi, angin puyuh, erupsi gunung atau banjir. Bencana manusia bisa berbentuk konflik atau perang yang menyebabkan penderitaan manusia, seperti meninggal dunia, luka, pengungsian, kehilangan harta benda, atau kelaparan. Muhammadiyah menghadiri pertemuan-pertemuan yang membahas mitigasi dan konsep-konsep kebencanaan, misalnya *humanitarian principles* yang merumuskan kode etik untuk para relawan ketika melakukan respons terhadap bencana. Muhammadiyah juga menghadiri pertemuan-pertemuan yang berkaitan dengan jaringan, kordinasi dan prosedur dalam berbagai kebutuhan dalam penanggulangan bencana. Di samping itu, Muhammadiyah terlibat langsung dalam aksi respons internasional, seperti yang dilakukan di Gaza dan Filipina.

Dengan semakin banyaknya lembaga swasta maupun pemerintah yang terlibat, baik sebagai donor maupun *recipient*, maka semakin jelas dirasakan perlunya kesamaan tata pikir humanitarian dan kordonasi, sehingga tidak timbul masalah-masalah baru yang menyimpang dari semangat humanitarian. Dalam hal aksi di bidang humantarian ini tampaknya sampai

saat ini Muhammadiyah memiliki jaringan yang lebih luas dibanding dengan bidang-bidang lain. Kegiatan-kegiatan mitigasi, respons, dan rehabilitasi dalam aksi kebencanaan, telah menarik banyak lembaga-lembaga internasional untuk berpartner dengan Muhammadiyah.

Interfaith Dialogue

Semakin pentingnya peran agama dalam gerakan MSG juga ditunjukkan dengan berkembangnya lembaga-lembaga yang bergerak dalam usaha pembangunan sikap saling memahami, saling menghormati dan bekerjasama. Ideanya adalah bahwa dunia ini harus sepi dari konflik yang bersumber dari pemahaman agama atau konflik untuk tujuan-tujuan agama. Alih-alih, semua agama haruslah bersatu untuk menciptakan kehidupan yang damai. Lebih dari itu, kekuatan agama-agama harus difungsikan bukan saja untuk kebajikan hubungan antarumat tetapi untuk kebajikan umum yang lebih luas lagi, misalnya mengatasi masalah-masalah kesehatan, lingkungan, dan perubahan iklim.

Keterlibatan Muhammadiyah dalam dialog antaragama bukan saja pada level wacana tetapi juga pada level aksi. Pada level dialog, Muhammadiyah telah menjadi partisipan dan bahkan menjadi sponsor dari beberapa konferensi atau dialog interfaith itu. Gerakan-gerakan yang dilakukan itu antara lain dalam forum ACRP (*Asian Conference of Religions for Peace*), *World Peace Forum* (CDCC, Muhammadiyah, *Chengho Multicultural Trust*), *the Alliance of Civilizations*, *World Alliance of Religions for Peace* (HCPWL), *Peace Building Conference* (*Peace Catalyst*), dan lain-lain. Pada level aksi, Muhammadiyah bersama FBO Komunitas Saint'Igidio menjadi bagian dari contact group, seperti disebutkan di depan, untuk menyelesaikan persengketaan antara Pemerintah Filipina dan Bangsa Moro.

Kesimpulan

MSG terus berkembang seiring dengan keterkaitan antara persoalan local, nasional dan global. MSG berfungsi menjadi gerakan advokasi dan aksi yang lebih nyata ketika negara gagal memberikan solusi terhadap problem-problem kemanusiaan universal. Persoalan yang dihadapi bangsa dan umat Islam di Indonesia yang menjadi arena dasar bagi gerakan Muhammadiyah tidak terlepas dari situasi global. Karena itu, tidak ada pilihan lain kecuali ia harus menjangkau area yang lebih luas. Bagaimana gerakan itu dilakukan dan bagaimana partner itu dipilih tentu didasarkan atas kesamaan visi dunia ke depan. Muhammadiyah tidak mungkin bergerak sendirian dan karena itu gerakan-gerakan jejaring, kolaborasi dan sinergi internasional menjadi program yang harus dikembangkan. Tentu saja pilihan peran yang dimainkan harus dengan mempertimbangan *resources* yang dimiliki oleh Persyarikatan Muhammadiyah.

MUHAMMADIYAH DAN NEGARA

: ZULY QODIR

Dalam tulisan ini, penulis hanya akan membahas kontribusi Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang diperkirakan memiliki jamaah sebanyak 40-45 juta jiwa bahkan lebih. Klaim-klaim tersebut belum disertai dengan survei yang akurat.¹ Bagaimanapun juga, dengan pelbagai bentuk amal usaha yang dibangun dan dikembangkan, jumlah pengikut Muhammadiyah cenderung bertambah setiap tahunnya. Penulis dalam tulisan ini juga hanya akan membahas pemahaman Islam yang dikembangkan Muhammadiyah dalam hubungannya dengan nasionalisme sejak Muhammadiyah dipimpin Ahmad Syafii Maarif, pasca Muktamar Jakarta tahun 2000 dan M. Din Syamsuddin hasil Muktamar Malang 2005 serta Muktamar Yogyakarta tahun 2010.

Selama lima belas tahun terakhir itu (2000-2015) Muhammadiyah hemat saya berhadapan dengan pelbagai persoalan, baik di bidang sosial, ekonomi, politik, agama maupun budaya. Terdapat pertanyaan penting disana, apakah Muhammadiyah sebagai organisasi sosial keagamaan yang diharapkan menjadi penopang masyarakat sipil benar-benar mampu menciptakan masyarakat yang mandiri serta memiliki *bargaining power* tinggi saat berhadapan dengan kekuatan-kekuatan asing yang hendak menggerogoti keindonesiaan ataukah Muhammadiyah, atau justru terjatuh dalam kekacauan ideologi dunia yang semakin hegemonik pada salah satu kekuatan sentral di bawah Amerika Serikat bersama sekutunya? Tulisan ini hendak menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan menguraikan kontribusi Muhammadiyah di Indonesia pada abad yang tengah memasuki pertarungan pelbagai kepentingan politik, sosial dan ekonomi, termasuk komodifikasi agama di ruang publik.

Tulisan ini diharapkan memberikan kontribusi pada Muhammadiyah yang hendak melaksanakan Muktamar Satu Abad di Makassar 3-7 Agustus 2015 menuju Abad Kedua Muhammadiyah, ketika harus berhadapan dengan negara yang oleh sebagian orang dikatakan mengalami kegagalan dalam mensejahterakan rakyat, memberikan rasa aman,

¹ Suaidi Asyarie, *Nalar Politik NU dan Muhammadiyah: Over Crossing Java Sentris* (Yogyakarta: LKiS, 2010). Menurut Suaidi, kultur NU dan Muhammadiyah di luar Jawa berbeda dengan di Jawa. Pilihan politik mereka juga sangat beragam dan bisa bertolak-belakang dengan kebijakan pimpinan pusat masing-masing organisasi. Jumlah “pengikut” NU dan Muhammadiyah sekitar 75 juta jiwa itu hanya berdasarkan perkiraan pada saat Idul Fitri dan Idul Adha; orang yang hadir di lapangan kabupaten dan di masjid di rerata kemudian dihitung jumlahnya. Sementara itu Saiful Mujani, peneliti Pusat Pengembangan Islam dan Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, serta Direktur Saiful Mujani Research Centre (SMRC), menyebutkan bahwa jamaah Muhammadiyah diperkirakan mencapai 20 % penduduk muslim Indonesia, terdaftar sebagai pengurus dan anggota tingkat Ranting (desa) dari total penduduk muslim Indonesia, tahun 2010 yang mencapai 88,7 %. Saiful Mujani, *Muslim Moderat*, Gramedia Jakarta 2009. Soal jumlah pengikut (Jamaah Muhammadiyah) Afan Gaffar, ahli politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pernah menyatakan bahwa mereka adalah yang mengikuti sholat Idul Fitri dan Idul Adha di lapangan serta mengerjakan sholat tarawih sebanyak 8 rakaat ditambah shalat witir 3 rakaat, dalam *Politik Indonesia sebelum dan pasca Soeharto menuju Demokratisasi*, Pustaka Pelajar, 2002.

pengayom masyarakat serta berbagai perilaku politisi yang semakin jauh dari rakyat dengan menumpuk kekayaan material seperti juga adanya usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kita untuk membentuk polisi Dewan dengan Kesatuan Kepolisian Pengamanan Parlemen, sekalipun masih diperdebatkan dan dipersoalkan kebutuhannya. Namun DPR telah membuat rencana yang matang untuk membentuk polisi parlemen dengan biaya yang sangat mahal.²

Muhammadiyah dan urusan Politik

Muhammadiyah disibukkan oleh pelbagai masalah yang sejak awal tidak terlalu banyak dipersoalkan, seperti tentang asas organisasi dan pendirian partai-partai politik. Namun dalam kurun setengah periode masa kepemimpinan Amien Rais, senantiasa muncul persoalan ijtihad Muhammadiyah dalam hal pendirian partai sebagai “kendaraan politik” dan pencantuman asas Islam dalam tubuh partai politik dan Muhammadiyah. Sekalipun sebenarnya, selama empat puluh tujuh tahun berkiprah Muhammadiyah itu pernah tidak mencantumkan asas apa pun, *toh* Muhammadiyah “selamat” tidak sebagaimana dibayangkan beberapa kalangan tentang betapa pentingnya asas Islam secara formal disematkan dalam organisasi. Muhammadiyah tetap bisa beraktivitas mendirikan badan amal usaha dan cabang-cabang di pelbagai daerah. Asas Islam ternyata tidak menjadi—seperti dikatakan Buya Ahmad Syafii Maarif—segala hal pintu amal perbuatan orang Muhammadiyah, apalagi jika hanya bersifat gincu.³

Gagasan Ahmad Syafii Maarif untuk membuahkan kader kemanusiaan, kader bangsa, kader umat, dan kader persyarikatan agaknya lamban berkembang. Bahkan dalam beberapa hal gagasan Buya Syafii Maarif tersebut mendapat perlawanan keras sebagian elite Muhammadiyah di pelbagai daerah. Hal ini membuktikan bahwa apa yang dimaksud dengan kader kemanusiaan dan kader bangsa masih sebatas wacana personal dalam tubuh Muhammadiyah. Hal serupa terjadi berkaitan dengan wacana dialog antaragama dan pluralisme agama, dua isu yang sangat sensitif di kalangan Muhammadiyah. Bahkan sempat muncul protes keras ketika Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah dibawah pimpinan HM. Amin Abdullah, menerbitkan buku berjudul *Tafsir Sosial Hubungan Antara Agama* pada 2004, karena dianggap sebagai bentuk tidak kuatnya akidah Muhammadiyah. Islam dalam Muhammadiyah dikatakan oleh para pengkritik adalah Islam yang mengarah pada liberalisme dan mengutamakan relativisme dan rasionalisme, bukan Al Qur’an dan As Sunnah. Muhammadiyah dikatakan telah melenceng dari khitah, matan dan keyakinan, sehingga perlu mendapatkan perhatian agar diluruskan kembali,

² Harian Kompas, *Wakil Rakyat yang Menjauhi Rakyat*, 15 April 2015. Kompas melaporkan bahwa kebutuhan Polisi Parlemen tidak kurang mencapai 2,5 milyar/tahun untuk membayar tenaga manusia dan sarana pengamanan serta sarana lainnya. Kompas, hlm. 5.

³ Lihat, Ahmad Syafii Maarif, *Islam Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Islam dalam Perspektif Sejarah* (Bandung: Mizan, 2009).

agar Muhammadiyah tetap selamat sebagai gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi munkar.⁴

Kesadaran akan kebangkitan Islam Murni muncul ketika reformasi mulai bergulir di Indonesia. Sebelumnya, pada era Orde Baru Soeharto, pemahaman keislaman yang agak ke “kanan” (dalam arti radikal-revivalis) dihambat karena dianggap *vis a vis* negara. Islam yang kemudian berkembang adalah Islam “bawah tanah” yang senantiasa bergerak sembunyi-sembunyi, meski sebenarnya tidak perlu muncul kecurigaan berlebihan dari negara. Islam bawah tanah itu sebenarnya jika bisa dikatakan adalah Islam politik yang dalam beberapa sikap politiknya memang bertabrakan dengan kepentingan dan gagasan keindonesiaan yang menggunakan dasar falsafahnya Pancasila. Beberapa aktivis Islam politik menolak Pancasila, termasuk beberapa ormas Islam yang kemudian dibubarkan oleh negara. Dengan demikian karena negara merasa otoritas yang telah dibangun selama belasan tahun tengah “terancam”, hampir semua organisasi kemasyarakatan, termasuk Muhammadiyah, harus selalu bergerak di bawah bayang-bayang rezim negara otoriter birokratik yang mengontrol dan mengawasi seluruh aktivitas organisasi sosial politik dan ormas keagamaan.⁵

Selama periode negara otoriter-birokratik, aktivitas Muhammadiyah berada di bawah “naungan asas tunggal Pancasila” yang oleh sebagian orang Muhammadiyah dianggap tidak sesuai dengan paham Islam yang sesungguhnya. Pancasila dinilai tidak “kaffah”, meski Kiai Haji AR Fachruddin pernah menjelaskan hal tersebut dengan istilah “wilayah wajib helm” bagi pengendara kendaraan bermotor. Seseorang yang memakai helm di jalur wajib helm bukan berarti kepala si pengendara hilang karena tertutup helm. Kepala si pengendara tetap ada, karena kewajiban memakai helm tidak berarti menghilangkan kepala seseorang. Pancasila sebagai asas organisasi Muhammadiyah bukan berarti menghilangkan Islam yang hendak didakwahkan Muhammadiyah. Muncul perdebatan sengit pada 1984-1985. Sebagian menganggap bahwa bila Muhammadiyah memakai asas

⁴ M. Amin Abdullah dkk, *Majlis tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah*, 2004. Buku tersebut membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan bagaimana umat Islam hidup ditengah masyarakat yang beragama, sehingga perlu melakukan tafsir atas ayat-ayat yang selama ini dianggap sebagai dogma atas hubungan antara agama. Sementara itu, M. Amin Abdullah sendiri menulis buku dengan judul *Islam di Era Multikultural yang menguraikan bagaimana kondisi Islam ditengah masyarakat multicultural*. Lihat, M Amin Abdullah, *Islam di Era Multikultural dan Multireligius* (Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2007).

⁵ Lihat, Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1998). Buku memaparkan tentang sikap politik umat Islam di bawah rezim Orde Baru Soeharto. Ormas Islam selalu diawasi, dicurigai dan dipersoalkan dalam banyak aktivitasnya, sehingga membuat mereka tidak bebas bergerak. Strategi Islam *vis a vis* negara justru membuat umat Islam kian terpuruk. Namun rezim perlahan-lahan mengendurkan sikap politiknya yang keras. Rezim Orde Baru tidak lagi menempatkan Islam sebagai lawan. Sebagian umat Islam pun menjadi lebih akomodatif dan mendorong rezim untuk tidak menggunakan cara-cara kekerasan. Umat Islam mulai mendapatkan tempat di hati rezim. Perubahan sikap politik seperti itu dianggap lebih menguntungkan ketimbang menyengsarakan umat Islam. Terjadi transformasi pemikiran dari “formalistik” menjadi “substansial”, lebih mengutamakan substansi ketimbang wadah. Sejak saat itu, Muhammadiyah dan NU menerima Pancasila sebagai asas berorganisasi dan bernegara.

Islam berarti organisasi ini tidak menerapkan Islam kaffah tetapi Islam *thagut* alias Islam “setan”.⁶

Sebagian aktivis Muhammadiyah bergerak di bawah tanah melakukan aktivitas dakwah Islam ketimbang secara terbuka menyebar paham Islam “kanan” yang dicurigai negara. Gerakan sembunyi-sembuyi tersebut tampaknya mendapatkan ruang di kampus-kampus Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, dan Universitas Brawijaya. Selain di kampus, mereka juga berdakwah di sekolah-sekolah menengah umum negeri. Sejak tahun 1980-an hingga 1998 gerakan Islam murni dan revivalis tidak berkembang di tengah masyarakat luas. Muhammadiyah bersama organisasi-organisasi Islam kampus yang saya sebut revivalis (sebenarnya Islam politik) kemudian menemukan ruang gerak sangat luas pasca-1998. Organisasi apa pun boleh berdiri dalam orde Reformasi. Inilah sumbangan besar yang diberikan BJ Habibie kepada umat Islam dalam kaitannya dengan kebebasan warga negara mendirikan partai politik, ormas keagamaan, dan organisasi sosial kemasyarakatan tanpa keharusan menggunakan asas tunggal Pancasila.⁷

Dalam konteks itu, beberapa aktivis Muhammadiyah yang memendam keinginan *Islamization* di Indonesia, karena dilarang memakai Islam sebagai asas organisasi mencoba dengan penuh semangat mengembalikan Islam sebagai asas Muhammadiyah bersama dengan organisasi politik yang muncul pasca reformasi 1998 seperti PKS, PBB, PKNU, PKU, dan sebagainya. Pada Muktamar di Jakarta tahun 2000, secara resmi Muhammadiyah kembali memakai Islam sebagai asas organisasi. Gejala formalisasi pun mulai mencuat di tubuh Muhammadiyah, meski organisasi ini dipimpin oleh Buya Ahmad Syafii Maarif, salah seorang intelektual muslim Indonesia yang mendorong berkembangnya substansialisme ketimbang formalisme Islam Indonesia. Sejak Muktamar di Jakarta tahun 2000 sampai Muktamar di Malang tahun 2005, “pertarungan” antara mazhab Islam substansialis versus Islam formalis di tubuh Muhammadiyah semakin terlihat jelas. Bahkan, aktivis Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah atau personel Muhammadiyah yang dituding “progresif-liberal” diharamkan duduk dalam jajaran kepemimpinan Muhammadiyah sejak Muktamar Malang sampai Muktamar Yogyakarta 2010.⁸

⁶ Lihat, Syukrianto Ar (ed.), *Meremajakan Pemimpin Muhammadiyah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010).

⁷ Lihat, Haedar Nashir, *Gerakan Islam Syariah: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*, (Jakarta: PSAP, 2007). Buku ini menjelaskan dengan sangat detail tentang pergolakan politik yang dilakukan oleh ormas Islam seperti MMI, FPI, HTI dan KPPSI yang menghendaki adanya negara Islam dan formalisasi syariah ternyata bertabrakan dengan kebijakan NU dan Muhammadiyah yang telah menyatakan final dengan Pancasila dan NKRI.

⁸ Boy Prdana ZTF, *Pembela Islam Murni*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2010. Dalam buku yang merupakan hasil tesisnya di Australian National University, Canberra ini menjelaskan adanya pertarungan antara kelompok Muhammadiyah Muda yang disebut dengan menggunakan istilah Muhammadiyah

Sebagian aktivis Muhammadiyah menganggap penggunaan asas Islam itu sebagai “titik balik” Muhammadiyah yang hendak mengembangkan Islam di Indonesia. Pada era sebelumnya Muhammadiyah tampak sulit bergerak dengan perspektif Islam Murni bersifat revivalis-politis, namun sejak 1999 sampai 2012 aktivitas Islam Murni bercorak revivalis-politis itu bisa menemukan ruang yang sangat luas. Perspektif homogenisasi Islam dan agama serta politik negara otoriter-birokratik sejatinya memang memberi ruang “pembalasan” yang keras dan hasilnya dirasakan sendiri oleh rezim ini yang tumbang pada 1998. Kelompok-kelompok Islam dan politikus yang “sakit hati” kemudian mengagendakan dan membentuk pelbagai perkumpulan sosial-politik dan keagamaan, baik moderat maupun radikal. Presiden BJ Habibie pun memberi ruang sangat lapang kepada semua organisasi sosial-politik dan keagamaan, kecuali bagi mereka yang menyatakan diri sebagai “kaum komunis” atau ateis. Namun demikian, sebagian orang menganggap ruang kebebasan yang diberikan Habibie bukan berkah rezim.⁹

Hal paling menarik untuk ditelaah adalah paham politik Muhammadiyah sebenarnya tidak mengikuti paham Wahabi dan Ikhwanul Muslimin aktivis-aktivis muda Muhammadiyah, tetapi paham “politik moderat”, bahkan dapat dikatakan sebagian dari mereka berpaham “nasionalis.” Paham politik Masyumi yang pernah menjadi kiblat Muhammadiyah tidak menjadi mazhab *mainstream* dalam Muhammadiyah. Buya Syafii Maarif sendiri adalah salah satu tokoh Muhammadiyah yang mengembangkan politik inklusif dalam Muhammadiyah dan Islam di Indonesia. Walaupun mendapat resistansi, sikap dan pikiran Buya Syafii sangat jelas berada dalam posisi Islam moderat yang mengarah pada tradisi Islam yang *rahmatan lil alamin*, bukan revivalisme Islam. Persoalan Islam Moderat dan Islam Puritan dalam Muhammadiyah dapat diperiksa dalam kumpulan tulisan tentang Muhammadiyah, yakni *Muhammadiyah dan Politik Inklusif*, Azyumardi Azra, dkk, 2005. Berbeda dengan M Din Syamsuddin yang pernah berkecimpung dalam Partai Golongan Karya (Golkar). Intelektual muslim (Muhammadiyah) itu oleh sebagian pengamat politik Islam Indonesia ditempatkan

Substansialis-progresif-Moderat versus Muhammadiyah Konservatif, memperlihatkan adanya pertarungan yang keras dalam hal beberapa wacana keislaman dan kemasyarakatan. Tema seperti Pluralisme, Hubungan antara agama dan liberalism menjadi kajian yang sangat mendominasi diantara dua kubu dalam Muhammadiyah sampai Muktamar Malang. Buku lainnya adalah tulisan Biyanto, *Muhammadiyah Moderat dan Konservatif*, LPAM dan PWM Jawa Timur. Buku ini merupakan disertasi Biyanto di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang memberikan penjelasan tentang kubu Progresif dan Moderat versus kubu Konservatif di Muhammadiyah dalam beberapa tema krusial seperti Pluralisme Agama dan inklusivisme. Biyanto, 2012.

⁹ Lihat, *Robert W hefner, Civil islam: Islam dan Demokratisasi di Indonesia*, ISAI dan The Asia Foundation, Jakarta, 2000

sebagai salah seorang yang kerap “bermain mata” dengan kekuasaan; apa yang dilakukannya merupakan salah satu bentuk politik praktis Muhammadiyah.¹⁰

Pada satu kesempatan Din Syamsuddin tampaknya tertarik pada politik kalangan revivalis, namun pada kesempatan lain dia beralih ke kelompok moderat bahkan bisa dikatakan liberal. Dia tidak hanya bisa menjalin hubungan dekat dengan beberapa petinggi Golkar, tetapi juga dengan petinggi Partai Demokrat. Pendek kata, Din Syamsuddin adalah figur Ketua PP Muhammadiyah yang “flamboyan.” Terkadang sulit ditebak suaranya akan diberikan kepada siapa. Selain dekat dengan kelompok revivalis, dia juga tampak dekat dengan kaum nasionalis *abangan*. Sebagaimana dikemukakan Robert Hefner, posisi tersebut adalah posisi yang *safety*. Intelektual muslim ini cenderung dekat dengan rezim, sebagaimana kelompok ICMI yang bersifat “rezimis”.¹¹ Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Din Syamsuddin kembali “mendekati” Partai Golkar. Dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2009, secara tegas dia mendukung pasangan Jusuf Kalla-Wiranto ketimbang Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Itulah salah satu perubahan sikap politik Ketua Umum PP Muhammadiyah yang dapat dikatakan berani dan signifikan. Muhammadiyah dalam berpolitik selama lima belas tahun berbeda dengan negara sehingga membawa dampak yang cukup signifikan pada Muhammadiyah.

Muhammadiyah dalam Politik Kebangsaan

Peran Muhammadiyah dalam membangun dan menumbuhkan politik kebangsaan dan keindonesiaan masih dapat diharapkan bila kita memperhatikan dengan seksama keterlibatan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam organisasi Boedi Oetomo, posisi Muhammadiyah yang tidak berpolitik kepartaian, serta bertanggung jawab terhadap persoalan kebangsaan seperti menanggulangi kemiskinan, mengatasi kebodohan, dan merawat anak-anak yatim sebagai perwujudan dari pengamalan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* sesuai dengan khittah perjuangan Muhammadiyah sebagai gerakan social keagamaan, bukan gerakan politik kepartaian. Muhammadiyah sebagai organisasi social keagamaan, tidak dapat dipungkiri telah demikian banyak memberikan kontribusi dalam hal mendukung kebijakan negara seperti dalam bidang pendidikan, dalam bidang

¹⁰ Abd. Rahim Ghazali dan Saleh Partoanan Daulay, *Muhammadiyah dan Politik Islam Inklusif*, Maarif Institute, Jakarta 2005. Buku kumpulan tulisan untuk mensyukuri 70 tahun Ahmad Syafii Maarif memuat beberapa tulisan untuk dihadiahkan pada Buya Syafii Maarif.

¹¹ Lihat, Robert W Hefner, *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia* (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2002). Robert Hefner menjelaskan bagaimana karakteristik politikus seperti M Din Syamsuddin, ketika menjadi Ketua Pemuda Muhammadiyah, menjadi Kepala Litbang Golkar, dan ICMI yang berdiri tahun 1990-an dan mendapatkan dukungan luar biasa dari rezim politik. ICMI merupakan organisasi Islam yang sangat fenomenal dapat memengaruhi kebijakan rezim politik, terutama dengan Ketua Umumnya, BJ, Habibie yang merupakan orang terkisah Presiden Soeharto, dan beberapa orangnya Habibie yang mengendalikan ICMI. M.Din Syamsuddin adalah salah satu “anak emas” orde baru dibawah Akbar Tanjung yang sangat pandai memainkan perannya di dalam Golkar yang menjadi partai rezim ketika itu.

kesehatan, dalam hal membantu anak-anak yatim pitau, orang terlantar, kesusahan dan seterusnya. Namun dalam hal posisi yang tegas dan kuat dalam pemerintahan tampaknya Muhammadiyah belum seperti ketika berkontribusi dalam hal amal usaha yang selama ini menjadi kekayaan Muhammadiyah. Muhammadiyah masih berposisi sebagai “pembantu pemerintah” dalam masalah kebangsaan seperti pendidikan, kesehatan ataupun mengurus orang miskin.

Namun demikian, hal paling jelas dari bentuk politik kebangsaan Muhammadiyah adalah ketika organisasi ini secara resmi menyatakan tidak akan mendukung dan menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Muhammadiyah bersama NU telah memutuskan kata akhir bahwa Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Itu merupakan sebuah proposisi yang paling tegas di tengah sebagian orang muslim yang masih mempersoalkan masalah formalisme dasar negara dengan Islam dan gempuran kelompok-kelompok kecil Islam seperti HTI, MMI, Ansorud Tauhid, FPI dan Wahdatul Islamiyah yang menghendaki Islam sebagai dasar negara dan mendukung berdirinya negara Islam di Indonesia. Dengan demikian, Muhammadiyah dan NU menjadi benteng terakhir ormas Islam menghadapi ormas Islam lainnya yang menghendaki Islam sebagai dasar negara di Indonesia.¹²

Aktivitas Muhammadiyah dalam gerakan mencerdaskan bangsa dengan membangun sejumlah lembaga pendidikan mulai dari sekolah taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi adalah wujud kecintaan Muhammadiyah agar daya saing anak bangsa tidak tertinggal jauh di belakang negara-negara Asia Tenggara lainnya. Sumbangan Muhammadiyah dalam dunia pendidikan jelas sangat berarti. Menurut Purwo Santoso, Muhammadiyah sebenarnya tidak perlu mengambil alih fungsi negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun belakangan ini Muhammadiyah seolah-olah hendak mengambil alih fungsi tersebut. Hal tersebut muncul karena negara sendiri cenderung abai terhadap kewajiban utama mencerdaskan (kehidupan) bangsa dengan menyelenggarakan pendidikan berkualitas dan merata untuk seluruh rakyat Indonesia hingga jenjang pendidikan menengah.¹³

¹² Lihat, Haedar Nashir *et al.*, *Manhaj Gerakan Muhammadiyah: Ideology, Khittah, dan Langkah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010). Buku ini berisi kumpulan keputusan PP Muhammadiyah hasil Muktamar 2010, Yogyakarta. Salah satu di antaranya adalah tanwir di Yogyakarta pada 2008, menjelang Muktamar Muhammadiyah, yang memutuskan bahwa Pancasila dan NKRI merupakan keputusan “final”, meski Muhammadiyah berasaskan Islam. Muhammadiyah tidak bercita-cita mendirikan negara Islam tetapi masyarakat Islam (*Islamic society*), yakni *baldatul thayibatun wa rabun ghofur* (masyarakat adil makmur yang diridho Tuhan).

¹³ Lihat, Purwo Santoso, Muhammadiyah dan Kepemimpinan Masa Depan, dalam Imam Muhlis (ed) *Islam, Keindonesiaan dan Civil Society* (Padma, 2011). Buku kumpulan karangan hasil seminar yang diselenggarakan Padepokan Musa Asyarie, Yogyakarta, ini terdapat tulisan mengenai Muhammadiyah dan NU yang dianggap sebagai “ibunya *civil-society*” di Indonesia, selain *civil* Islam.

Bila Muhammadiyah tidak berjiwa nasionalis, kemungkinan besar organisasi ini tidak akan tertarik membenahi dunia pendidikan dan kesehatan. Muhammadiyah akan menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai “ladang bisnis” yang menguntungkan, bukan untuk melangsungkan cita-cita negara bangsa ini yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Memang, sejak sepuluh tahun terakhir, muncul kritik terhadap mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan yang diselenggarakan Muhammadiyah. Kelas ekonomi rendah (kaum miskin) semakin sulit mengakses dan menikmati lembaga-lembaga pendidikan dan layanan kesehatan Muhammadiyah. Sejatinya lembaga-lembaga pendidikan dan layanan kesehatan Muhammadiyah seharusnya terjangkau dan diperuntukkan bagi kalangan rakyat bawah ketimbang kelas menengah-atas.¹⁴

Inilah sikap politik kebangsaan dan jiwa nasionalisme yang merupakan sumbangan paling nyata Muhammadiyah pada bangsa ini yang membuatnya bisa bertahan dan mampu melewati kurun satu abad. Namun demikian, memasuki abad kedua, Muhammadiyah agaknya harus melakukan reorientasi dalam hal gerakan social dan gerakan politiknya, sehingga Muhammadiyah tidak hanya “menjadi pembantu” atau dituduh mengambil alih peran pemerintah. Muhammadiyah sampai saat ini memang terus dipercaya oleh masyarakat karena berada di jalur yang tepat, yakni beraktivitas dalam layanan kesehatan, bidang pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Muhammadiyah diharapkan tetap bertahan di jalur yang tidak membuat bangsa ini semakin terpuruk dan salah arah karena diasuh oleh para pemimpin yang tidak berkarakter keindonesiaan dan berjiwa nasionalis. Muhammadiyah diharapkan tetap bisa mempertahankan Pancasila dan keutuhan NKRI. Seandainya tarikan ideologi politik agama menjadi pilihan sebagian warga negara tanpa menghiraukan keberagaman, apa yang pernah terjadi di Uni Soviet pada akhir tahun 1980-an bukan mustahil bisa terulang di Indonesia pada masa mendatang.

Sikap politik yang berlandaskan pada nasionalisme merupakan penyangga sangat penting bagi Muhammadiyah, sebab sepak terjangnya sebagai salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia akan selalu mendapat banyak sorotan. Hitam-putih, berhasil-tidaknya, serta karut-marut bangsa ini, merupakan kontribusi Muhammadiyah bersama NU. Selama ini keberhasilan umat Islam Indonesia dalam menata karakteristik bangsa dan umat selalu disematkan kepada negara, meski dalam banyak hal negara tidak secara langsung mengurus masalah keislaman. Negara ini bukan negara yang khusus mengurus masalah-masalah orang Islam Indonesia. Sebaliknya, umat Islam di Indonesia akan selalu disorot tajam dunia dan masyarakat internasional karena dinilai melanggar konstitusi dan

¹⁴ Lihat, Zuly Qodir, *Muhammadiyah Studies: Reorientasi Gerakan dan Pemikiran Memasuki Abad Kedua* (Yogyakarta: Kanisius, 2010). Buku ini memaparkan tentang Muhammadiyah yang telah “bergerak” selama seratus tahun. Karena itu, hal yang perlu dipikirkan Muhammadiyah adalah bagaimana dengan masa seratus tahun mendatang (abad kedua bagi Muhammadiyah), sebab tantangan yang dihadapi jauh lebih rumit dan berliku.

melakukan aksi-aksi kekerasan (terorisme). Hal seperti itu tertuang dalam karangan-karangan anak muda NU dan Muhammadiyah, seperti Binhad Nurohmad, Zuly Qodir, dan Mohammad Sofwan.¹⁵

Muhammadiyah sebagai Arena

Hal-hal seperti diatas itulah yang sedang dihadapi Muhammadiyah dalam usianya yang telah lebih dari 100 tahun. Hadirnya Muhammadiyah sebagai organisasi sosial keagamaan saat ini diakui atau tidak banyak mendapatkan sorotan tajam dari publik. Secara internasional disorot karena sering dikaitkan dengan organisasi sosial keagamaan yang besar dan berkontribusi besar dalam perkembangan masyarakat madani, muslim yang moderat dan sekaligus dianggap dekat dengan gerakan-gerakan Wahabi yang bercirikan purifikasi. Sebenarnya karakteristik purifikasi tidak menjadi persoalan ketika purifikasi diterjemahkan dengan "memurnikan" ajaran dari hal-hal yang kurang tepat dengan dasar-dasar teologis umat Islam. Muhammadiyah berupaya meluruskan atau melakukan purifikasi atas perilaku masyarakat yang kurang tepat secara teologis, sehingga menjadi penganut Islam yang taat dan sesuai ajaran Tuhan seperti dikatakan oleh Martin van Bruinessen, 2012.¹⁶

Namun dalam perkembangannya, makna purifikasi sering identik dengan "gerakan yang negatif" yakni gerakan radikal yang maknanya juga negatif, yakni dekat dengan perilaku kekerasan umat Islam. Dari pemaknaan semacam itu menyebabkan Muhammadiyah menjadi banyak musuh terutama kalangan yang dianggap kurang "murni" dalam menjalankan Islam, atau dalam bahasa yang lain mereka kaum yang dekat dan praktek teologisnya bercampur dengan tradisi-tradisi lokal yang bahasanya sering identik dengan penyimpangan. Muhammadiyah akhirnya seakan-akan berhadapan-hadapan dengan kaum yang memelihara tradisi lokal. Muhammadiyah yang identik dengan gerakan modernis, reformis menjadi oposan (lawan) dari organisasi dan pengikut kaum yang dikatakan konservatif dan "pembela tradisi" seperti pula yang dikatakan oleh sejarawan Mc. Riclefs, 2012.¹⁷

¹⁵ Zuly Qodir, Islam, Nasionalisme Muhammadiyah, Mohammad Sofwan dan Binhad Nurrohmat, editor, *NU Muhammadiyah, Kaum Muda Bicara Soal Nasionalisme* (Jakarta: LSAF, 2010). Dalam buku ini kaum muda dari Nu dan Muhammadiyah membahas soal padangan nasionalisme yang kian meluntur dan membahayakan ditengah gempuran berbagai macam ideology kapitalis dan neoliberalisme, disamping komunisme. Anak-anak muda Muhammadiyah dan NU membicarakan dalam organisasinya dan Islam yang mereka amati, ternyata NU dan Muhammadiyah sungguh-sungguh nasionalis jika dibandingkan dengan organisasi-organisasi Islam yang munculnya pasca reformasi 1998, seperti FPI, MMI dan seterusnya.

¹⁶ Martin van Bruinessen, *Rakyat Kecil, Islam dan Politik*. Pembahasan Martin tentang persoalan Islam yang menjaga tradisi di Indonesia khususnya pada bab tujuh (7), ketika membahas soal hubungan Islam dan nega di era Soeharto, serta ketika Martin van Bruneissen membahas masalah asal usul radikalisme di Indonesia, pada bab 9 dari buku ini, Gading, Yogyakarta, 2013

¹⁷ MC. Riclef, *Islamisation and Its Opponents in Java 1930 to Present* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2012).

Sedangkan dikalangan dalam negeri, Muhammadiyah sering mendapatkan kritik sebagai organisasi sosial keagamaan yang dipersoalkan misi pembebasan kaum mustad'afin serta pembelaan pada kaum fakir miskin. Hal ini disebabkan terdapat kasus-kasus yang mengarah pada terjadinya penumpukan kapital oleh sebagian amal usaha Muhammadiyah terutama dalam bidang pendidikan yang dianggap mahal membayarnya, selain dalam bidang kesehatan (rumah sakit) yang juga bayarnya mahal namun pelayanannya masih kurang dari yang dikehendaki masyarakat luas, menenangkan, cepat dan terjangkau oleh kocek rakyat miskin. Misi al-maun yang menjadi salah satu karakteristik dari Muhammadiyah oleh sebagian orang dianggap telah ditinggalkan, sekalipun sebagian yang lain mengatakan Muhammadiyah tidak pernah meninggalkan misi al -maun sebab Muhammadiyah tidak hanya berpegang pada qur'an surat al-maun tetapi al- qur'an secara keseluruhan sebagai rujukan utama selain hadist mutawatir. Namun hemat saya kritik internal tentang Muhammadiyah yang oleh sebagian jamaah dan elite Muhammadiyah dianggap lambat dalam merespons masalah-masalah keutaman menunjukkan sebagai bukti bahwa Muhammadiyah kadang tersandera oleh banyaknya jamaah dan amal usahanya.

Selain itu, Muhammadiyah juga diperhadapkan dengan munculnya berbagai gerakan keagamaan yang saya sebut sebagai gerakan keagamaan *Islam non mainstream* seperti Majelis Mujahiddin Indonesia, Front Pembela Islam, Front Pembela Umat Islam Surakarta, gerakan gerakan salafi jihadis dan radikal yang cenderung politis, bahkan Majelis Tafsir al Qur'an (MTA), yang selalu mengidentifikasi tidak berbeda dengan Muhammadiyah, sehingga banyak dari warga Muhammadiyah belakangan menjadi jamaah MTA yang bermarkas di Surakarta Jawa Tengah. Sekedar tambahan informasi bahwa jamaah MTA sekarang berdasarkan kantor cabang yang telah didirikan di 23 Provinsi di Indonesia, diperkirakan mencapai 5 juta. Tentu saja jumlah yang cukup banyak untuk sebuah organisasi Islam yang berdiri 19 September 1972. Pendirian Yayasan MTA ini selanjutnya dikukuhkan dengan akte notaris R. Soegondo Notodisoerjo, nomor 23, tanggal 23 Januari 1974 di Surakarta. Dan tentu saja Muhammadiyah juga diperhadapkan dengan gerakan politik Islam yang secara jelas mengusung panji-panji sebagai gerakan dakwah seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang sebagian kecil dari mereka juga warga Muhammadiyah muda, sebagai lanjutan dari gerakan Tarbiyah dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), serta Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang juga mengatakan tidak berbeda dengan Muhammadiyah dalam pengamalan ajaran Islam, bahkan oleh para pimpinannya dikatakan HTI dalam berteologi sama persis dengan Muhammadiyah, kecuali dalam mazhab politiknya saja yang berbeda. Hal seperti itu seperti dikatakan oleh Sidiq al Jawi, pada saat seminar dengan penulis di Universitas Islam Negeri Yogyakarta (UIN Sunan kalijaga, 12 Juli 2013).

Tantangan dakwah Muhammadiyah juga datang dari hadirnya selebriti yang aktif menyebarkan "islam populer" serta Islam kelas menengah, dan *Islam fashion*. Berbagai fenomena Islam yang hadir melalui media televisi, internet, twitter, face book, dan media cetak seperti majalah adalah hal yang harus juga direspons Muhammadiyah, sebab seringkali yang "diajarkan oleh Islam populer", serta Islam-Islam selebriti sekarang berbeda

dengan model Islam yang diajarkan oleh Muhammadiyah. Benar bahwa yang dijadikan rujukan adalah sama yakni al-qur'an dan sunnah, namun dalam mengemas dan menyampaikan memiliki karakteristik yang berbeda sehingga Islam dalam dunia media, serta Islam dunia artis tampak lebih disukai oleh masyarakat kelas menengah perkotaan, sekaligus Islam rakyat yang berlatar belakang petani, atau pedang kecil, serta para pegawai sipil. Sementara penyampaian dakwah Islam versi Muhammadiyah dianggap kaku, kurang menarik, sekalipun secara substansial tidak ada yang salah. Bahkan, salah satu pendakwah yang paling disenangi adalah model Ustadz. Yusuf Mansur, ustad Jevrie al Buchari (allahu yarham), ustadz Solmed, ustadz Maulana dan Mamah Dedeh. Ada apa dengan masyarakat Islam kita, kenapa masyarakat Islam lebih senang ustadz dan ustadzah seperti itu, bukan ustadz Quraish Shihab, ustadz Yunahar Ilyas, Ustadz Din Syamsuddin, atau ustadz Muhammadiyah yang lain. Hal ini tentu perlu menjadi catatan bagi para ustadz dan ustadzah Muhammadiyah, sebab saya sendiri tidak banyak informasi tentang ustadzah Muhammadiyah yang menjadi "idola" masyarakat islam kelas menengah maupun kelas rakyat biasa yang menjadi jamaah pengajian, baik di televisi maupun masyarakat.

Beberapa kondisi seperti itu jelas membutuhkan respon yang tegas dan cepat dari Muhammadiyah sehingga Muhammadiyah memiliki posisi yang jelas dan memang berbeda dengan gerakan-gerakan Islam *non mainstream* yang belakangan sangat marak dan gencar menawarkan berbagai aktivitas pada umat Islam termasuk pada warga Muhammadiyah. Jika Muhammadiyah tidak mampu merespons dengan cermat, agaknya Muhammadiyah, sekalipun tidak akan ditinggalkan warganya secara keseluruhan, sejatinya perlahan-lahan namun pasti mengalami kemadegan kalau bukan mengalami "pembusukan" secara ideologi gerakan yang selama ini menjadi karakteristik sebagai gerakan Islam moderat, mandiri, dan progresif. Tentu kita tidak berharap Muhammadiyah mengalami "pembusukan" dari dalam sehingga jamaahnya melarikan diri ke organisasi keagamaan yang lain. Kita harus sedikit berterima kasih pada para peneliti dan pengamat yang telah menyampaikan beberapa kritik atas Muhammadiyah yang Bergeraknya belakangan dikatakan kurang cepat, terlalu birokratis (bertele-tele karena memang harus taat asas organisasi), dan kurang dapat berdialektika dengan tradisi-tradisi lokal yang masih samar-samar hukum teologisnya. Muhammadiyah jangan sampai menjadi oposan atas keislaman yang masih dekat dengan tradisi lokal, sebab mereka memiliki kontribusi terhadap Islam Indonesia periksa apa yang ditulis oleh Martin van Bruneisen, 2012 dan MC., Ricklefs, 2012.¹⁸

Itulah pertarungan Muhammadiyah sebagai arena gerakan sosial keagamaan yang telah berdiri dan hadir ditengah masyarakat luas lebih dari 100 tahun. Sebuah fenomena gerakan Islam yang sangat kuat berakar dimasyarakat Indonesia bahkan menyebar diberbagai belahan negara di muka bumi, tetapi menurut Mitsuo Nakamura perkembangan Muhammadiyah dan daya tahan Muhammadiyah karena karakter kekeluargaan yang menjadi pengikatnya, selain karakteristik voluntarisme yang mendasari pergerakan dan perjuangan Muhammadiyah di Indonesia. Semangat, kerelaan, kekeluargaan dan

¹⁸ Martin van Bruinessen, *Rakyat Kecil, Islam dan Politik*, Gading, 2013 dan MC. Ricklef, *Islamisation and Its Opponents in Java 1930 to Present* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2012).

persaudaraan yang dimiliki para pendiri dan pengembang Muhammadiyah telah membawa Muhammadiyah sebagai organisasi sosial keagamaan yang disegani sepanjang beberapa tahun. Namun, semangat kerelaan, kekeluargaan dan persaudaraan yang dimiliki harus dikembangkan menjadi semangat profesional dan gerakan sosial. Nakamura menyatakan bahwa Muhammadiyah adalah organisasi sosial keagamaan yang bisa bersifat profesional dan sebagai gerakan sosial, lihat Nakamura, 2013.¹⁹

Lantas bagaimana seharusnya Muhammadiyah dihadirkan ditengah perubahan dunia yang semakin deras dengan arus informasi, kebudayaan masyarakat yang semakin homogen, tidak ada lagi batas teritorialnya, semakin menyatu dengan berbagai jenis kebudayaan lain dimuka bumi, serta munculnya gerakan-gerakan sosial baru yang berbasiskan etnisitas, agama, dan juga keprihatinan bersama semacam isu kaum lesbi, gay dan kaum marginal lainnya. Muhammadiyah dengan jelas tengah diperhadapkan dengan isu politik identitas dan menguatnya budaya sebagai kultur yang homogen, serta menjadi bagian dari identitas kebudayaan sebuah masyarakat yang gampang terseret oleh berbagai macam isu kontemporer yang tidak akan segera berhenti, namun akan silih berganti menghampirinya.

Penutup

Muhammadiyah sebagai organisasi sosial keagamaan, diakui atau tidak sampai saat ini bersama NU sebenarnya dapat diharapkan menjadi penopang masyarakat sipil di Indonesia. NU berbasis massa perdesaan sementara Muhammadiyah berbasis massa perkotaan, meski sejak tahun 1990-an diferensiasi tersebut sedikit kurang relevan. Begitu pula dikotomi NU yang tradisional dan Muhammadiyah yang modern-rasional sedikit banyak telah bergeser. Dikotomi “perdesaan yang tradisional” dan “perkotaan yang modern-rasional” telah meluruh, sehingga agak sulit mendikotomisasikan kedua organisasi dengan kategorisasi seperti itu. Perubahan karakteristik seperti itu karena adanya faktor internal maupun eksternal. Di kalangan internal NU, kiai-kiai muda yang memiliki pengetahuan keislaman sangat luas banyak yang telah menjadi pengurus di pesantren dan PBNU. Selain itu mereka juga dapat dengan mudah mengakses pelbagai literatur tentang dunia pemikiran Islam internasional. Mereka leluasa “membaca” pemikiran banyak intelektual muslim kelas dunia, seperti Mohammed Arkoun, Hasan Hanafi, Nasir Hamid Abu Zayd, Mohammad Syahrur, Khalil Abdul Karim, Amina Wadud, Fatima Mernisi, Rifat Hasan, dan sebagainya. Baik kaum muda Muhammadiyah seperti Hamim Ilyas, Wawan Gunawan, Munim Assyiri, Sukidi Mulyadi, Zakiyuddin Baedhawiy, Pradana Boy YTF serta Hajriyanto Y Thohari bersama dengan kaum muda NU seperti Ulil Abshar Abdalla, Syafiq Hasyim, Abdul Moqsith Gazali, Zuhairi Misrawi, Rumadi, Hamami Zada, Jadul Maula, Imam Aziz, Mujiburrahman adalah beberapa contoh nama anak muda Muhammadiyah dan NU yang “mampu” memengaruhi

¹⁹ Mitsuo Nakamura, *Banyan Tree : A Study of the Muhammadiyah Movement in Central Java Town 1910-2010, enlarged Edition*, ISEAS, Singapore, 2012

perkembangan pemikiran dan sikap Muhammadiyah dan NU terhadap pelbagai isu yang berkembang di aras nasional maupun internasional.²⁰

Di samping isu tentang pemberantasan korupsi, perbaikan kepemimpinan nasional, *good governance*, demokratisasi, dan lain-lain, Muhammadiyah dan NU juga banyak menyinggung soal organisasi, masalah fikih, serta kemajuan umat Islam. Semua isu yang terjadi di Indonesia dan di tingkat global itu biasanya dibahas dalam Munas Tarjih PP Muhammadiyah sebagai musyawarah para ulama dan ahli dalam Muhammadiyah dan *bahsul masail* (musyawarah para alim-ulama NU). Pendek kata, Muhammadiyah dan NU merupakan organisasi Islam di Indonesia yang sangat *concern* terhadap masalah keindonesiaan dan kebangsaan.²¹

Isu-isu lain seperti fikih soal perempuan, negara Islam, pluralisme, dan hubungan antaragama, Fikih Kemajemukan, Fikih Tanah dan Fikih Lingkungan serta Fikih *Good Governance* juga tidak luput dari perhatian Muhammadiyah dan NU. Dapat dikatakan bahwa Muhammadiyah dan NU memiliki spektrum isu sedemikian luas. Soal korupsi, misalnya, Muhammadiyah bersama NU pernah melakukan kampanye gerakan antikorupsi bersama dibawa Kepemimpinan Syafii Maarif dan Hasim Muzadi. Pengaruh gerakan tersebut memang tidak terlalu besar, namun setidaknya telah “mendorong” pemerintah untuk memberantas korupsi secara sungguh-sungguh. Bisa dikatakan bahwa Muhammadiyah dan NU adalah perintis, karena sebelumnya tidak pernah ada kerja sama masif dalam kegiatan terkait masalah bangsa.²²

Semoga Muhammadiyah dapat menapaki jalan terjal yang kian berkelok dan banyak tikungan. Muhammadiyah diharapkan mampu mengambil peran yang sungguh-sungguh diperhitungkan oleh negara sebagai gerakan social keagamaan yang tangguh, kuat, mandiri sekaligus siap berhadapan dengan gempuran-gempuran dahsyat yang datangnya dari berbagai penjuru. Muhammadiyah di masa depan, memasuki abad kedua tidak lagi

²⁰ Zuhairi Misrawi (ed.), *Menggugat Tradisi: Pergolakan Pemikiran Anak Muda NU* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004). Buku berisi kumpulan makalah yang membahas berbagai tema keislaman dalam konteks kekinian hasil Muktamar Pemikiran Kaum Muda NU ini ditulis oleh sejumlah intelektual muda NU, seperti Ulil Abshar Abdalla, Masdar Farid Masudi, Abdul Moqsih Ghozali, Rumadi, Hamami, Zuhairi Misrawi. Beberapa tema yang dibahas, antara lain, Islam dan HAM, Islam dan Hak Reproduksi Perempuan, Kontekstualisasi Pemikiran Islam, dan Kritik Nalar Islam adalah tema-tema yang kerap dikaji oleh kaum pasca-modernis. Karena itu, sulit untuk dikatakan NU masih berada di dalam “sangkar” tradisional.

²¹ Lihat, Martin van Bruinessen, *NU, Tradisi, Relasi-relasi Kuasa: Pencarian Wacana Baru* (Yogyakarta: LKiS, 1994). Lihat penjelasan Ahmad Syafii Maarif, dalam *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan*, Mizan, 2009 serta edisi baru *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan*, tahun 2015.

²² Lihat, Zuly Qodir, “NU Pasca Muktamar Makassar”, dalam Imam Muhlis (ed.), *Islam, Keindonesiaan dan Civil Society* (Yogyakarta: Padma Books, 2010). Tulisan itu menjelaskan mengenai “nasib” dan masa depan NU pasca-Muktamar Makassar di bawah kepemimpinan Kiai Haji Said Aqil Sirodj. Bila tidak mandiri, NU akan terjerat oleh aktivitasnya sendiri. Jika mampu mandiri, NU akan tetap menjadi sebuah kekuatan sipil di Indonesia. Tentang gerakan Muhammadiyah dan NU dalam memberantas Korupsi, dapat diperiksa dalam buku Pramono U Thantowi (ed), *Membasmi Kanker Korupsi*, PSAP, Jakarta 2005

dipandang sekedar sebagai “pembantu” negara, tetapi sebagai salah satu pembuat kebijakan negara, atau sekurang-kurangnya Muhammadiyah dijadikan referensi oleh negara ketika membutuhkan rujukan pembuatan kebijakan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. []

Wallahu ‘alam bishowab.

Zuly Qodir, Jamaah Muhammadiyah, dan Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

MUHAMMADIYAH DAN GERAKAN MASYARAKAT MADANI DI TENGAH MIMPI NEGARA KESEJAHTERAAN SOSIAL*)

Said Tuhuleley **)

IFTITAH

Tema seminar ini menarik dan menantang. Bagaimana tidak, kita ditantang untuk berpikir bagaimana membangun Masyarakat Madani, atau di Dunia Barat dikenal dengan *Civil Society*, di tengah-tengah situasi masyarakat dan negara yang sepertinya masih bergelut dengan berbagai persoalan, terutama yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial. Bagi penulis yang awam, tentu saja ini pekerjaan super berat. Sebab realitas yang hidup di tanah air memang memperlihatkan bahwa Masyarakat Madani yang diimpikan itu masih sulit diwujudkan dalam *nifo* nasional, apalagi dalam kerangka negara bangsa. Paling-paling yang dapat dibangun dalam waktu dekat ke depan adalah kelompok-kelompok sebagai bagian dari Masyarakat Madani. Sehingga kekuatan Masyarakat Madani sesungguhnya saat ini bertumpu pada adanya kelompok-kelompok tersebut. Membangun Masyarakat Madani pada *nifo* nasional dalam kerangka negara bangsa barangkali perlu dimulai dari membangun kekuatan kelompok, yang nantinya mengarah pada pembentukan Masyarakat Madani.

Oleh karena itu penulis hanya mampu menulis makalah sederhana sebagai pengantar diskusi, itu pun ditulis dengan argumentasi seadanya. Pada awalnya penulis mencoba sedikit menyinggung bagaimana Masyarakat Madani itu, apa saja ciri dari masyarakat seperti itu. Selanjutnya masuk pada pembicaraan tentang realitas masyarakat kita di tengah-tengah himpitan globalisasi ekonomi. Bagian berikutnya dipakai untuk sedikit melihat kiprah Muhammadiyah dalam membangun dirinya menjadi salah satu kekuatan Masyarakat Madani di tanah air. Bagian terakhir berisi agenda strategis apa yang perlu dipertimbangkan untuk membangun kekuatan Masyarakat Madani.

GAGASAN MASYARAKAT MADANI

Gagasan tentang Masyarakat Madani sesungguhnya baru muncul belakangan. Selama ini orang lebih mengenal gagasan kalasik, *Civil Society*. Gagasan *Civil Society* sendiri muncul sejak zaman Romawi kuno. Pemikiran tentang *Civil Society* berawal dari gejala tumbuhnya negara-kota (*city-state*) sebagai model masyarakat berperadaban. Cicero (106-43 SM) menamai masyarakat kota Romawi kuno sebagai *Societas Civilis*, yaitu masyarakat dengan tingkat peradaban yang tinggi dan sangat patuh terhadap hukum.

Nurcholish Madjid berpendapat bahwa kata *Civil Society* juga sejajar dengan pengertian Madinah (Arab) dan Medinat (Ibrani). Menurutnya, kedua kata tersebut

*) Disampaikan pada Seminar Nasional "Muhammadiyah, Civil Society, dan Negara"; Kampus UMY 25 April 2015.

**) Penulis adalah Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah; Pengasuh Pesantren Budi Mulia; Staf Pengajar FAI UMY.

langsung berkaitan dengan pengertian peradaban, khususnya ditunjukkan oleh tashrif Arabnya: madaniyah. Menurut frase Arab *qanun madaniy* adalah padanan frase Inggris *civil law*, suatu pranata hukum yang berkaitan dengan hak-hak pribadi perseorangan serta prosedur hukum yang berkenaan dengan hak-hak tersebut.

Gagasan Masyarakat Madani sendiri adalah suatu upaya untuk menerjemahkan gagasan *Civil Society* tetapi dengan memperkaya gagasan itu dengan nilai Islam. Pemaknaan *Civil Society* sebagai Masyarakat Madani merujuk pada konsep dan bentuk masyarakat Madinah yang dibangun Nabi Muhammad, s.a.w.

Anwar Ibrahim merumuskan masyarakat madani adalah suatu sistem sosial yang subur yang didasarkan pada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan dengan kestabilan masyarakat, serta mendorong daya usaha dan inisiatif individu, baik dari segi pemikiran, seni, ekonomi, maupun teknologi.

Banyak teori yang berkembang di seputar ciri atau karakteristik Masyarakat Madani. Beberapa di antaranya adalah:

1. Individu dan kelompok terintegrasi ke dalam masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial.
2. Adanya kesetaraan individu dalam masyarakat.
3. Tidak adanya kekuatan dominan dalam masyarakat
4. Tumbuhnya kreatifitas.
5. Meluasnya kesetiaan dan kepercayaan sehingga setiap individu mengakui keterkaitannya dengan orang lain.
6. Adanya pembebasan masyarakat melalui kegiatan lembaga-lembaga sosial dengan berbagai ragam perspektif.
7. Mengakui kekuasaan Allah, artinya bahwa masyarakat tersebut adalah masyarakat yang beragama, yang mengakui adanya Allah dan menempatkan hukum Allah sebagai landasan yang mengatur kehidupan sosial.
8. Damai, artinya masing-masing elemen masyarakat, baik secara individu maupun secara kelompok menghormati pihak lain secara adil.
9. Toleran, artinya tidak mencampuri urusan pribadi pihak lain yang telah diberikan oleh Allah sebagai kebebasan manusia dan tidak merasa terganggu oleh aktivitas pihak lain yang berbeda tersebut.
10. Ada keseimbangan antara hak dan kewajiban sosial.
11. Berperadaban tinggi, dalam pengertian masyarakat tersebut memiliki kecintaan terhadap ilmu pengetahuan dan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan untuk umat manusia.
12. Berakhlak mulia.

Karakteristik Masyarakat Madani seperti itu hanya dapat dicapai jika berbagai persyaratan dipenuhi secara baik. Ada lima persyaratan bagi tumbuhnya Masyarakat Madani pada *nifo* nasional dalam kerangka negara bangsa.

1. Terpenuhinya kebutuhan dasar individu, keluarga, dan kelompok dalam masyarakat, serta tegaknya keadilan.
2. Berkembangnya modal manusia dan modal sosial yang kondusif bagi terbentuknya kemampuan melaksanakan tugas-tugas kehidupan.
3. Tidak adanya diskriminasi dalam berbagai bidang pembangunan; dengan kata lain terbukanya akses terhadap berbagai pelayanan sosial.

4. Adanya kohesifitas antar kelompok dalam masyarakat serta tumbuhnya sikap saling menghargai perbedaan antar budaya dan kepercayaan.
5. Terselenggaranya sistem pemerintahan yang memungkinkan lembaga-lembaga ekonomi, hukum, dan sosial berjalan secara produktif dan berkeadilan sosial.

Secara lebih menarik dapat dilihat gagasan besar yang ditunjukkan dalam Piagam Madinah, suatu bentuk perjanjian yang dibuat Rasulullah, Muhammad, s.a.w. Ada dua landasan pokok dalam piagam tersebut yang memperlihatkan bagaimana kedudukan dan relasi setiap individu dalam masyarakat:

1. Semua pemeluk islam adalah satu umat walaupun mereka berbeda suku bangsa.
2. Hubungan antara komunitas muslim dan non-muslim didasarkan pada prinsip-prinsip:
 - a. Berinteraksi secara baik dengan sesama tetangga.
 - b. Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama.
 - c. Membela mereka yang teraniaya.
 - d. Saling menasehati.
 - e. Menghormati kebebasan beragama.

Jelas terlihat bahwa piagam ini bertujuan untuk menciptakan keserasian politik dan mengembangkan toleransi sosio-religius budaya seluas-luasnya dan menempatkan Rasulullah, Muhammad, s.a.w. sebagai pemimpin seluruh kaum, bukan saja kaum muslimin (Muhajirin dan Anshar). Dalam piagam tersebut sangat ditekankan asas kesamaan dan kesetaraan.

MEMAHAMI REALITAS

Ada dua hal utama yang diperoleh dari karakteristik Masyarakat Madani maupun yang dirujuk langsung dari Piagam Madinah, yang menjadi pokok perbincangan dalam makalah ini.

Hal tersebut adalah integrasi sosial dan kesejahteraan sosial. Tentang kesejahteraan sosial, yang perlu ditinjau secara lebih luas adalah fenomena kemelantaran rakyat yang menjadi salah satu permasalahan besar bagi negeri-negeri Muslim Dunia Ketiga.

Kesadaran untuk membangun masyarakat baru di atas unsur-unsur etnisitas, keagamaan, dan kedaerahan, sesungguhnya telah berlangsung lama. Berbagai pengalaman sejarah telah dialami bangsa Indonesia. Proses pembentukan identitas nasional bangsa Indonesia pun telah lama berlangsung. Simbolisasi historis dan sosio-kultural yang berbunyi “*Bhinneka Tunggal Ika*” yang diabadikan pada lambang negara Indonesia pada dasarnya merupakan simbol dan identitas yang berakar dari sejarah dan realitas sosial masyarakat Indonesia.

Konsep “*Bhinneka Tunggal Ika*” sudah barang tentu dirumuskan berdasarkan realitas sosio-kultural masyarakat Indonesia. Telah lama dipahami bahwa struktur masyarakat Indonesia ditandai dua ciri utama. *Pertama*, secara horizontal, ia ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku, agama, adat istiadat, serta kedaerahan. *Kedua*, secara vertikal, struktur struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam (Nasikun, 1989: 30).

Masyarakat Indonesia, dengan demikian, merupakan masyarakat majemuk. Sejak jaman kolonial, kemajemukan masyarakat Indonesia ini telah dipahami. Furnival, misalnya, secara tegas menyebut bahwa masyarakat Indonesia pada masa Hindia Belanda merupakan masyarakat majemuk, yaitu suatu masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembauran satu sama lain dalam satu kesatuan politik (Nasikun, 1989: 31).

Yang menjadi pertanyaan, apakah setelah diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 di mana masyarakat Indonesia kemudian terikat pada satu kesatuan politik, kemajemukan tidak lagi menjadi ciri masyarakat Indonesia? Tentu saja kemajemukan tetap menjadi ciri masyarakat Indonesia dari jaman kolonial sampai saat ini, kendati masyarakat telah terikat pada satu kesatuan politik.

Persoalan yang kita hadapi sehubungan dengan realitas masyarakat Indonesia yang majemuk berada di sekitar integrasi nasional. Sebab fenomena konflik horizontal yang terjadi di Indonesia berbarengan dengan krisis ekonomi yang berkepanjangan, tidak dapat tidak, mengancam keutuhan kita sebagai sebuah bangsa. Bahkan dapat dikatakan, pada penghujung abad XX, fenomena konflik antaretnis telah menjadi gejala yang bersifat mondial atau mendunia. Apa yang terjadi di Afrika, Yugoslavia, dan berbagai kawasan dunia lainnya memperlihatkan secara jelas konflik antaretnis tersebut. Konflik antaretnis ini melibatkan beberapa aspek penting, seperti historis, ideologis, politis, ekonomis, dan sosial budaya (Perwita, 1996: 150). Stephen Ryan, seorang teoritis hubungan internasional dari Universitas Ulster, Irlandia, mengemukakan faktor-faktor yang mendorong terjadinya konflik antaretnis di berbagai kelompok masyarakat dunia.

Pertama, berakhirnya Perang Dingin di satu sisi membawa akibat positif yaitu mengubah pola interaksi negara-negara besar dari konflik menuju kerjasama internasional. Akan tetapi, di sisi yang lain, berakhirnya Perang Dingin dianggap telah mendorong konflik antaretnis di banyak negara Dunia Ketiga.

Kedua, pembangunan ekonomi yang tidak merata dalam suatu negara yang terdiri dari masyarakat majemuk diyakini pula telah mendorong terjadinya konflik antaretnis. Hal ini terutama disebabkan oleh tumbuhnya anggapan yang meluas bahwa penguasa hanyalah melakukan pembangunan ekonomi yang menguntungkan etnisnya sendiri, dan melupakan etnis lainnya.

Ketiga, permasalahan yang dialami oleh negara sedang berkembang tidak melulu menyangkut masalah ekonomi, akan tetapi lebih dari itu adalah kemampuan membangun kesadaran kebangsaan sebagai suatu negara bangsa yang bersatu. Proses pembentukan identitas nasional ini memakan waktu yang lama. Proses ini tidak hanya menyangkut pembangunan ekonomi, namun meliputi perubahan sosial budaya masyarakat dan politik yang merata, baik dari segi geografis, maupun terhadap semua kelompok/etnis yang ada (Perwita, 1996: 150, 151, 152).

Ketiga faktor yang mendorong terjadinya disintegrasi dalam masyarakat, sebagaimana disampaikan Stephen Ryan di atas, sedikit banyaknya dapat kita rasakan di tanah air kita Indonesia belakangan ini. Munculnya berbagai konflik horizontal serta tuntutan merdeka dari beberapa daerah, memperlihatkan bahwa kita memang sedang menghadapi bahaya disintegrasi nasional dalam tingkat yang cukup parah. Keadaan menjadi semakin parah ketika fenomena separatisme muncul ke permukaan pada saat situasi ekonomi nasional sedang berada dalam keadaan yang sangat sulit. Hal ini tentu saja menambah kesulitan, paling sedikit dalam dua hal, yaitu, *pertama*, terpecahnya

konsentrasi bangsa dari upaya-upaya serius yang sangat dibutuhkan untuk membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi yang sangat parah; *kedua*, melemahnya kemampuan bangsa untuk mengatasi berbagai konflik antaretnis termasuk fenomena separatisme itu sendiri. Kedua hal ini saling mendukung. Terlambatnya bangsa Indonesia keluar dari krisis ekonomi akan memperlambat pula penyelesaian konflik antaretnis yang meluas, termasuk munculnya gerakan separatisme di beberapa daerah. Sementara itu, terlambatnya penyelesaian berbagai konflik horizontal yang timbul dalam masyarakat, termasuk munculnya gerakan separatisme, akan menyulitkan bangsa Indonesia keluar dari krisis ekonomi.

Memang, masyarakat majemuk yang mencoba membangun demokrasi secara lebih baik akan mengalami masa-masa krisis. Masyarakat yang sedang dalam krisis itu kemudian menjadi kehilangan pegangan: rasa percaya dirinya melemah, kepercayaan kepada pemerintah pun menurun tajam. Apa saja yang dilakukan pemerintah, sebelum elemen psikologis ini dipecahkan, akan disambut dengan sinisme yang tajam (Makarim, 2000: 60). Di awal abad XXI ini, bangsa Indonesia cenderung berada dalam situasi patologis seperti itu. Dapat dikatakan, hampir tidak ada kebijaksanaan pemerintah yang berlalu tanpa sinisme masyarakat.

R. William Lidle, sebagaimana dikutip Nazaruddin Sjamsuddin, dalam studinya tentang kepolitikan heterogenitas etnis di Indonesia mengidentifikasi dua jenis halangan integrasi nasional yang dihadapi bangsa Indonesia. Pertama, adanya pembelahan horizontal masyarakat yang berakar pada perbedaan suku, ras, agama, dan geografi. Kedua, adanya pembelahan vertikal, yakni celah perbedaan antara elite dan massa; latarbelakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elite berbeda dari massa yang berpandangan tradisional dan pedesaan (dalam Bahar, 1996: 13).

Nazaruddin Sjamsuddin menyebut bahwa dalam arti konfigurasi etnik, agama, dan geografi, Indonesia bukan suatu negeri yang terpadu dengan ketat, kendatipun dalam hal integrasi politik tidak seberat yang dihadapi oleh banyak negara berkembang lainnya. Indonesia tidaklah seperti Amerika Serikat yang hampir semua negara bagiannya terdiri dari satu daratan. Indonesia terdiri dari ribuan pulau, besar dan kecil, dengan keragaman etnik yang luar biasa. Di luar Papua Barat saja, terdapat sekitar 300 suku bangsa. Masing-masing suku ini memiliki identitas kebudayaan sendiri dan menggunakan sekitar 250 bahasa suku yang berbeda pula (Ibid: 13).

Dengan keragaman seperti itu, peluang untuk terjadinya disintegrasi menjadi cukup besar. Bangsa Indonesia memang pernah mengalami situasi disintegrasi yang sangat parah, yaitu ketika munculnya pergolakan daerah di seputar tahun 1950-an. Ketika itu, kedua dimensi, vertikal maupun horizontal, muncul secara bersamaan dalam bobot yang besar. Pergolakan daerah tersebut tidak saja dipicu oleh bagi hasil pusat-daerah yang dirasakan kurang adil, akan tetapi untuk sebagian besar kasus, halangan integrasi sebagaimana disebutkan di atas turut memainkan peranan yang penting.

Dalam kondisi seperti ini, salah satu tindakan strategis yang kita perlukan adalah digalakkannya kembali kesadaran tentang identitas nasional bangsa Indonesia, yang salah satu cirinya adalah majemuk. Penghargaan terhadap perbedaan, baik etnis, agama, politik, kultural, dan sebagainya, dapat membantu tumbuhnya persaudaraan nasional. Sebab bangsa Indonesia memiliki latarbelakang sejarah yang sama dalam melawan kaum penjajah. Sehingga setelah diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 yang didahului dengan komitmen bersama dalam Sumpah Pemuda pada 28 Oktober

1928, peluang bagi pembentukan negara bangsa sebagai suatu kesatuan politik semakin terbuka.

Sementara itu, pada sisi yang lain kemiskinan memang menjadi satu masalah besar. Akan tetapi kesenjangan sosial yang terlalu lebar memperparah keadaan kita. Sejak zaman Kolonial bangsa Indonesia telah mengalami keadaan ini. Sementara saat ini, keadaan belum jauh beranjak. Kesenjangan kaya-miskin masih tetap menjadi kenyataan. Bedanya dengan di zaman kolonial hanyalah dari segi kemerdekaan politik semata; dulu kita dijajah Belanda atas nama cinta “tanah air”, sekarang tidak lagi. Itu saja.

Prof. Dr. Mubyarto menggambarkan keadaan kita di Zaman Kolonial secara menarik dalam artikelnya, “Mengembangkan Ekonomi Rakyat Sebagai Ekonomi Panca Sila” dalam Jurnal Ekonomi Rakyat. www.ekonomirakyat.org, 2003. Sambil mengutip *Pire Van der Eng*, Prof. Mubyarto menulis:

“Tahun 1930, dua tahun setelah Sumpah Pemuda, 51,1 juta penduduk pribumi (Indonesia) yang merupakan 97,4% dari seluruh penduduk yang berjumlah 60,7 juta hanya menerima 3,6 juta gulden (0,54%) dari pendapatan “nasional” Hindia Belanda, penduduk Asia lain yang berjumlah 1,3 juta (2,2%) menerima 0,4 juta gulden (0,06%) sedangkan 241.000 orang Eropa (kebanyakan Belanda) menerima 665 juta gulden (99,4%). Sangat “njomplangnya” pembagian pendapatan nasional inilah yang sulit diterima para pejuang perintis kemerdekaan Indonesia yang bersumpah tahun 1928 di Jakarta. Kemerdekaan, betapa pun sangat “mahal” harganya, harus dicapai karena akan membuka jalan ke arah perbaikan nasib rakyat dan bangsa Indonesia”. (halaman 1).

Bagaimana keadaan setelah merdeka, apakah jurang kesenjangan yang sangat lebar itu berhasil ditutup? Ternyata realitas menunjukkan kepada kita bahwa jauh panggang dari api. Tentang hal ini Prof. Mubyarto menjelaskan:

“Kini setelah Indonesia merdeka 58 tahun, ketimpangan ekonomi tidak separah ketika jaman penjajahan, tetapi konglomerasi (1987-1994) yang menciptakan ketimpangan ekonomi luar biasa, sungguh-sungguh merupakan “bom waktu” yang kemudian meledak sebagai krismon 1997. Dalam 26 tahun (1971-1997) rasio pendapatan penduduk daerah terkaya dan daerah termiskin meningkat dari 5,1 (1971) menjadi 6,8 (1983) dan 9,8 (1997), dan Gini Rasio meningkat berturut-turut dari 0,18 menjadi 0,21 dan 0,24”. (halaman 1).

Persoalannya ialah kita tidak lagi dijajah Belanda, kita sudah menjadi negara merdeka yang berdaulat penuh. Tapi dari sisi ekonomi apakah kita sudah merdeka? Ternyata globalisasi ekonomi muncul sebagai berhalu baru yang digunakan oleh negara-negara industri maju untuk ‘menjajah’ kita, sebagaimana pengakuan jujur dari seorang mantan ‘bandit ekonomi’, John Perkins. Dalam bukunya yang terkenal, *“Confessions of An Economic Hit Man”*, John Perkins secara menarik membongkar hasrat melakukan penghisapan sumber-sumber ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan lintas negara (TNCs). Korporasi global memanfaatkan dukungan politik elit di negara-negara kaya dan lembaga-lembaga kreditor internasional menjadikan utang luar negeri sebagai instrument utama untuk mengakumulasi kekayaan dan menghisap

sumber-sumber penghidupan rakyat. Kini kekuasaan TNCs telah menaklukkan kekuatan ekonomi negara yang sesungguhnya diperuntukkan bagi menegakkan kedaulatan dan kesejahteraan rakyat

Tentu saja kekuasaan TNCs yang besar seperti itu dimungkinkan terjadi karena ada perselingkuhan dengan elite nasional, kaum 'komprador'. Perselingkuhan ini berakibat fatal bagi rakyat banyak. Dapat ditemukan paling sedikit dua akibat langsung yang dialami masyarakat.

Pertama, di dalam "pabrik-pabrik besar pemeras keringat", para buruh dengan upah yang tidak layak dipaksa bekerja ekstra keras untuk terus meningkatkan produksi bagi mengejar keuntungan perusahaan sebesar-besarnya.

Kedua, kegiatan industri, terutama di sektor perkebunan, pertanian, dan pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan raksasa dan transnasional menjadi salah satu penyebab pemanasan global dan penghancuran lahan-lahan produktif masyarakat. Belum lagi akibat langsung yang ditimbulkan karena perubahan iklim yang drastis seperti kekeringan yang berkepanjangan, banjir yang terjadi hampir setiap tahun, longsor, badai. Semuanya menyengsarakan rakyat yang terus menerus mengalami proses pemiskinan. Dalam bidang pertanian, misalnya, dapat ditemukan bagaimana petani harus berhadapan dengan jaringan pabrik pupuk yang merambah sampai ke desa-desa. Padahal penggunaan pupuk kimia yang berlebihan berakibat fatal bagi kondisi tanah pertanian. Belum lagi tercemarnya air tanah karena penggunaan pestisida yang gila-gilaan.

Sementara itu, pada ketika kesengsaraan buruh dan petani di negara-negara Dunia Ketiga sangat sulit diatasi, negara-negara industri maju seperti Amerika dan negara-negara Uni Eropa mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kendatipun belakangan ada krisis keuangan yang menerpa Amerika. Pertumbuhan ini, ditambah dengan laju industrialisasi yang secara rakus menyerap kebutuhan energi dalam jumlah yang sangat besar dan fantastis, ditingkahi dengan pola hidup boros energi masyarakat di Dunia Pertama, menjadi pemicu utama Global Warming saat ini.

Dampak buruk dari globalisme atau globalisasi ekonomi yang didesakkan dari atas, dari pusat ke pinggiran (*periferi*), mulai memperlihatkan sosoknya sebagai ancaman baru bagi perkembangan masyarakat, khususnya di negara-negara Dunia Ketiga. Globalisme telah menyebabkan sulitnya posisi mereka yang lemah, baik secara institusional maupun secara individual. Secara institusional, terjadi kesenjangan yang luar biasa antara negara-negara kaya di belahan Utara dengan negara-negara miskin di belahan Selatan. Globalisasi hutang, misalnya, menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan negara-negara miskin sulit untuk secara cepat membangun dirinya. Sementara itu, secara individual, kesenjangan kaya miskin telah berubah menjadi bencana bagi dunia saat ini. Privatisasi yang dipaksakan dengan dalih "pasar bebas", telah mendorong negara-negara miskin meminimalkan peran negara dalam penyediaan fasilitas pendidikan, pangan, papan, air bersih, lingkungan yang sehat, dan pelayanan publik yang membutuhkan dana besar. Padahal, di negara-negara industri maju seperti Amerika, Eropa, dan Jepang, negara melakukan banyak tindakan proteksionis untuk melindungi rakyat mereka: buruh, tani, nelayan, peternak, dan sebagainya. Bagi rakyat miskin di Negara-negara Dunia Ketiga, akibat dari kebijakan privatisasi yang dipaksakan

dengan dalih pasar bebas ini tentu sangat mudah ditebak, semakin melebarnya kesenjangan kaya-miskin.

Tanpa perlu mengedepankan angka statistik, realitas keseharian kita sudah sangat terang-benderang memperlihatkan betapa kemiskinan masih menjadi persoalan besar rakyat, dan kemiskinan itu berhulu pada semua level, ya struktural, ya kultural, ya individual.

Sampai di sini dapat kita temukan bahwa dua karakteristik utama dari Masyarakat Madani sesungguhnya masih jauh dari harapan. Integrasi sosial maupun kesejahteraan sosial masih harus diperjuangkan secara sungguh-sungguh. Diperlukan langkah jihad yang pasti untuk dua hal ini: jihad untuk membangun integrasi sosial dan jihad untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang kian menggila.

KIPRAH MUHAMMADIYAH SEBAGAI KEKUATAN MASYARAKAT MADANI

Kesadaran tentang kesatuan kemanusiaan sebagai salah satu bagian dari keyakinan atas keesaan Allah ditambah dengan pemahaman yang mendalam terhadap ayat-ayat Allah di dalam Al-Qur'an, tampaknya telah mendorong Muhammadiyah sejak didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan memperhatikan secara sungguh-sungguh persoalan-persoalan kemanusiaan, khususnya permasalahan kaum miskin.

Hal ini dapat dilihat dari dua tindakan yang menjadi langkah besar, yaitu kajian surat Al-Maa'uun yang dilakukan berbulan-bulan secara terus-menerus oleh K.H. Ahmad Dahlan dan didirikannya Bagian Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO) untuk melengkapi tiga bagian yang telah ada pada *Hoofdbestuur* (Pimpinan Pusat) Muhammadiyah. Kedua tindakan ini menjadi menarik sebab merupakan landasan normatif sekaligus praksis bagi langkah Muhammadiyah ke depan.

Kesadaran tentang kesatuan kemanusiaan dan kewajiban menolong orang miskin semakin jelas sosoknya ketika pada 1923 Muhammadiyah mendirikan PKO. Asas PKO dirumuskan dalam kalimat panjang sebagai berikut:

"Moehammadijah b/g P.K.O. bekerdja dan menolong kepada kesangsaraan oemoem itoe, sekali-kali tidak memandang kanan dan kiri oesahanja orang lain jang menolong kesangsaraan oemoem, dan tidak poela oentoek membantoe kapada kahendak orang lain jang akan mendapatkan pengaroeh dari ra'jat oemoem. Akan tetapi mengadakan itoe hanja mengingat dan memakai perintah perintah Agama Islam belaka, jang dibawa oleh joenjoengan kita K. Nabi Moehammad s.a.w. dengan menoeroet dajalan (soennah) nja terhadap kepada oemoem. Djadi seolah-olah dasarnja pertolongan dari pada Moehammadijah b/g. P.K.O. itoe, soeatoe soember (mata air) pertolongan jang djernih lagi bersih, terletak diseboeah tempat jang bisa didatangi oleh segala orang tidak dengan memandang bangsa dan Agama." (Abdul Munir Mulkhan, 2014).

Kesadaran ini pulalah yang diperlihatkan secara jelas ketika Muhammadiyah mendirikan rumah sakit sebagai bagian dari PKO. Pidaro dr. Sutomo ketika meresmikan berdirinya Rumah Sakit Muhammadiyah di Surabaya pada 1924 menjelaskan ini:

..... *Kita mendirikan sekolah, kita ada mendirikan Hizbul Wathan untuk memajukan badan kita. Anak yatimpun dapat pemeliharaan dari kita. Banyaklah jalan yang hendak kita jalani. Tetapi, haruslah disebutkan di sini, bahwa start kita ada sempit.*

Besuk pagi akan kita buka poliklinik (rumah sakit/pen) ini. Siapa juga, baik orang Eropa, baik orang Jawa (orang Bumi), baik Cina atau bangsa Arab, boleh datang kemari, akan ditolong dengan cuma-cuma, asalkan betul miskin. Kami mengharap tuan-tuan dan nyonya-nyonya, hendaknya luluslah poliklinik ini berdirinya, juga oleh bantuan tuan-tuan sekaliannya. Pekerjaan poliklinik yang penuh dengan kurban dan kemanusiaan. Lagi pula terutama adalah kami pentingkan berseru kepada pers (surat kabar), yang memang dapat menolong hal ini yang tiada berhingga. (dokumentasi Abdul Munir Mul Khan).

Dapat dikatakan pada periode awal ketika masih dipimpin K.H. Ahmad Dahlan, seluruh sepak terjang Muhammadiyah adalah bagian dari upaya besar meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya kaum miskin. Pendirian rumah sakit, sekolah, panti asuhan, rumah miskin, tanggap bencana, dan lain-lain, semuanya dalam kerangka yang sama, mengangkat harkat dan martabat orang miskin. Oleh karena itu, rumah sakit maupun sekolah seluruhnya gratis bagi orang miskin.

Akan tetapi perjalanan Muhammadiyah dalam hubungannya dengan perhatian pada kaum miskin mengalami pasang surut seiring dengan semakin sempitnya pengertian Penolong Kesengsaraan Oemoem. Perubahan istilah pun lambat laun terjadi. Terakhir, "Penolong Kesengsaraan Oemoem" dipersempit menjadi "Pembina Kesejahteraan Ummat". Arus utama seluruh amal usaha yang didirikan Muhammadiyah juga mengalami perubahan; tidak lagi sebagai bagian dari upaya besar memberdayakan orang miskin.

Amal usaha Muhammadiyah pun dikelola sebagai industri jasa dan dilepaskan dari pengarusutamaan pemberdayaan rakyat miskin, sebagaimana Muhammadiyah pada periode awal ketika masih dipimpin K.H. Ahmad Dahlan.

Barulah pada Muktamar Muhammadiyah ke 44 di Jakarta, timbul kesadaran baru untuk membawa Muhammadiyah kepada arus utama yang diletakkan pendirinya, yaitu "Penolong Kesengsaraan Oemoem". Disadari bahwa Muhammadiyah harus kembali memainkan peran aktif di tengah-tengah masyarakat miskin dan terpinggirkan. Tiga sektor kemudian disasar, yaitu buruh, tani, dan nelayan.

Setelah Muktamar Muhammadiyah ke 44 itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah kemudian mendirikan suatu lembaga baru, yaitu Lembaga Buruh, Tani, dan Nelayan, dan dipimpin oleh salah seorang pemikir kemiskinan terkemuka di Indonesia saat itu, *Allahyarham*, Dr. Moeslim Abdurrahman.

Pada Muktamar Muhammadiyah ke 45 di Malang, kembali ditegaskan pentingnya pemberdayaan masyarakat yang lebih difokuskan pada pengentasan kemiskinan. Hal ini dilakukan dengan melihat kondisi Indonesia pada sekitar 2005 yang menunjukkan tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi, yaitu sekitar 17,75%, jika menggunakan standar Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu satu dollar per kapita per hari.

Akan tetapi, pada Muktamar ke 45 ini, pemberdayaan masyarakat belum masuk menjadi suatu bagian tersendiri dari Program Muhammadiyah 2005-2010. Muatan programnya yang dimasukkan ke dalam bagian program yang lain.

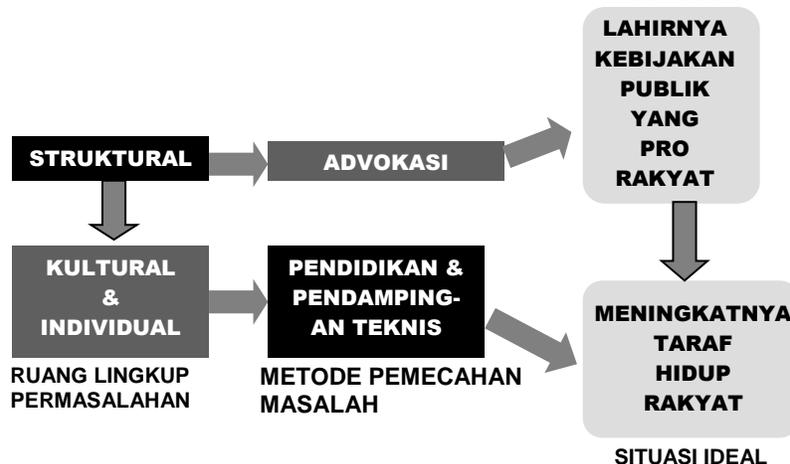
Segera setelah selesai Muktamar, Pimpinan Pusat Muhammadiyah memutuskan untuk membentuk majelis baru dengan tugas khusus memberdayakan masyarakat, khususnya rakyat miskin. Ada pemikiran ketika itu untuk menamakan majelis tersebut dengan nama awalnya ketika didirikan K.H. Ahmad Dahlan. Akan tetapi, dengan mempertimbangkan bahwa kecenderungan saat ini adalah kepada pemberdayaan masyarakat, maka majelis baru tersebut diberi nama Majelis Pemberdayaan Masyarakat disingkat MPM.

Sebagai majelis baru di lingkungan Muhammadiyah, ada dua pekerjaan besar yang harus segera diselesaikan, yaitu *pertama*, menata konsep dasar pemberdayaan masyarakat berangkat dari sejarah gemilang Bagian Penolong Kesengsaraan Oemoem disesuaikan dengan setting sosial era sekarang, untuk selanjutnya menyusun program kerja majelis untuk periode 2005-2010.

Kedua, melakukan sosialisasi ke kalangan internal Muhammadiyah bahwa pengarusutamaan pemberdayaan masyarakat, khususnya kaum miskin, adalah kewajiban keagamaan, dan bahwa pemberdayaan masyarakat itu tidak ditujukan kepada warga Muhammadiyah saja, atau ummat Islam semata, tetapi ditujukan untuk seluruh rakyat tanpa melihat suku dan agama. Hal terakhir ini merupakan konsekuensi dari ikrar syahadat yang pertama.

Untuk hal yang pertama, terlebih dahulu dirumuskan kerangka besar pemikiran tentang pemberdayaan masyarakat, yang dapat dijelaskan dengan dua skema berikut ini. Skema-2 menunjukkan model gerakan secara umum untuk transformasi sosial yang meliputi tiga kawasan, individual, kultural, dan struktural.

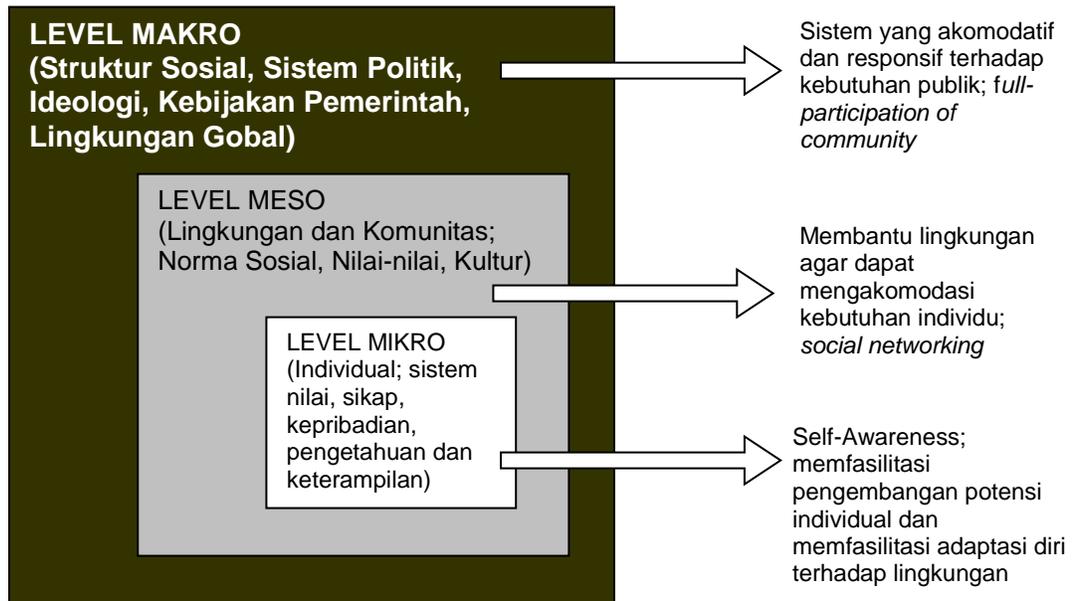
Skema-2. Model Gerakan untuk Transformasi Sosial



Skema-3 berhubungan dengan model pendekatan yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat. Pendekatan yang dapat digunakan dalam proses transformasi sosial adalah pendekatan "ekologi perkembangan manusia dan lingkungannya", yang menyatakan bahwa intervensi sosial harus dapat menyentuh seluruh level relasi antar-individu dan lingkungannya".

Pendekatan ini mengisyaratkan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat seyogyanya menyentuh tiga level sekaligus, yaitu individual, kultural, dan struktural.

Skema-3. Pendekatan Ekologi Perkembangan Manusia dan Lingkungannya



Langkah selanjutnya adalah perumusan visi, misi, tema dan ciri pengembangan. Visi pengembangan 2005-2010 dirumuskan sebagai berikut, “Tertatanya kapasitas organisasi dan jaringan aktivitas pemberdayaan masyarakat yang mampu meletakkan landasan yang kokoh bagi perintisan dan pengembangan kegiatan pemberdayaan serta mendorong proses transformasi sosial dalam masyarakat”

Sedangkan misi pengembangan 2005-2010 dirumuskan dalam dua arah, yaitu *pertama*, menegakkan keyakinan tauhid sosial sebagai spirit aktivitas-aktivitas pemberdayaan masyarakat; dan *kedua*, mewujudkan proses transformasi sosial yang mencakup perubahan kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat yang lebih luas.

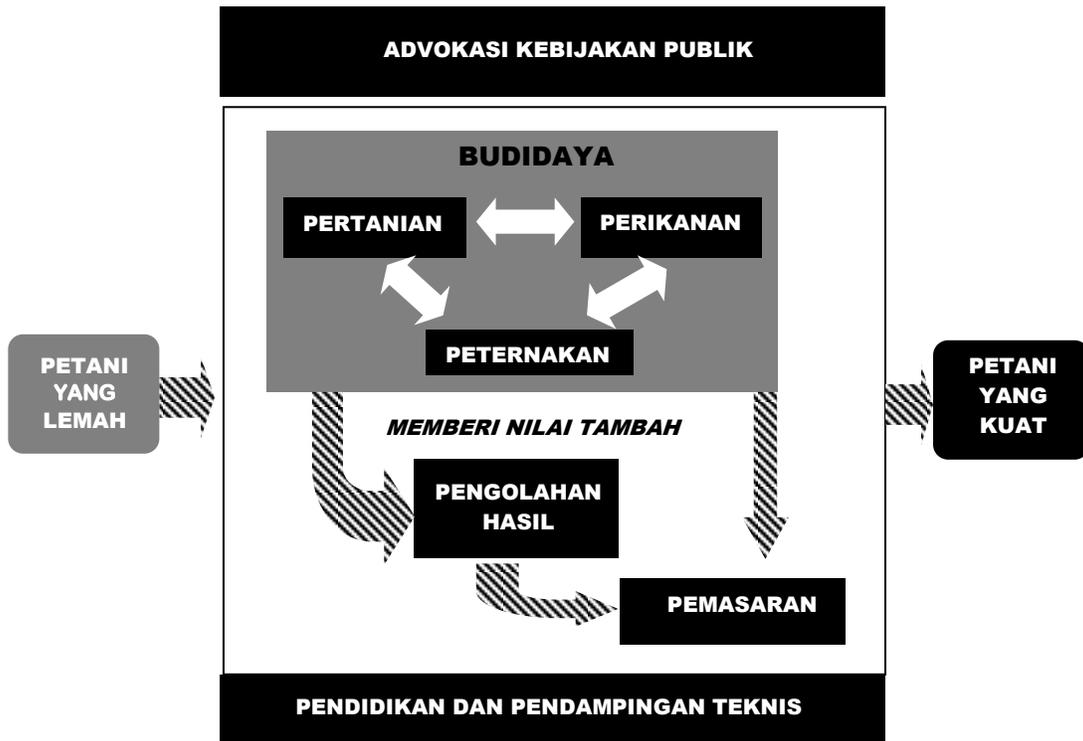
Sesuai dengan visi pengembangan yang telah ditetapkan sebelumnya, tema pengembangan program majelis pemberdayaan masyarakat diarahkan pada dua fokus utama pengembangan, yaitu *pertama*, revitalisasi organisasi yang mencakup penguatan kapasitas sistem, jaringan, dan sumber daya organisasi dari wilayah sampai ke ranting-ranting Muhammadiyah; dan *kedua*, reaktualisasi aksi pemberdayaan masyarakat melalui model perintisan program dan rencana pengembangannya yang dapat menjangkau kebutuhan masyarakat luas.

Ciri-ciri pengembangan dirumuskan dalam empat aspek, masing-masing sistem gerakan, jaringan organisasi, pengembangan sumberdaya, serta aksi dan pelayanan.

Pada periode 2005-2010, secara operasional MPM menetapkan fokus utamanya pada sektor pertanian dengan pertimbangan pada sektor ini mayoritas masyarakat bekerja, dan sebagian dari mereka ada dalam kondisi miskin.

Untuk itu dirumuskan kerangka pemberdayaan masyarakat petani dalam bentuk program pertanian terpadu (*integrated farming*), sebagaimana ditunjukkan dalam Skema-4 berikut.

Skema-4. Pengembangan Program Pemberdayaan Petani, Nelayan, Peternak



Selama satu periode MPM berkonsentrasi penuh untuk merealisasikan gagasan sederhana di atas, selain memberi perhatian pada masalah kemiskinan di kota sebagai akibat dari semakin menurunnya produksi pertanian.

Untuk MPM PP Muhammadiyah, ada dua jenis kegiatan yang dilaksanakan, yaitu, *pertama*, membuat kegiatan percontohan dalam berbagai bidang, seperti pertanaiian, peternakan, perikanan tambah, pendampingan bagi industri mikro pengolahan hasil pertanian berskala rumah tangga, dan abang becak.

Kedua, masuk langsung ke daerah pedesaan di wilayah, daerah, cabang, dan ranting Muhammadiyah, untuk menggerakkan MPM dan pimpinan ranting setempat. Selain juga melakukan proses pelayanan langsung terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Untuk menopang proses pembelajaran bagi petani, dibangunlah tiga sekolah lapang yang dinamakan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (PUSDIKLAT) Pertanian Terpadu di Sawangan Magelang, Kayu Tanam, Sumatera Barat, dan Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dan sementara ini sedfang disiapkan pembukaan Pusklat di Pulau Ambon, Maluku. Kendatipun sederhana, PUSDIKLAT ini sangat mendukung gagasan besar yang dikembangkan di bidang pertanian, yaitu Pertanian Terpadu (*Integrated Farming*), yakni memadukan usaha pertanian, peternakan, dan perikanan tambak/kolam, sedemikian sehingga terjadi efisiensi dalam pembiayaan input; kotoran ternak, baik padat maupun cair dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan pupuk dan pakan ikan, sedangkan limbah pertanian berupa jerami maupun daun-daunan dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan pakan ternak.

Periode pertama MPM ini sesungguhnya adalah suatu proses perintisan atau “*babat alas*”, yaitu suatu usaha untuk meneruskan apa yang sudah dirintis para pengelola Muhammadiyah ketika dipimpin K.H. Ahmad Dahlan. Sebagai suatu proses perintisan, pencarian model yang pas bagi usaha Muhammadiyah dalam bidang pemberdayaan masyarakat langsung di tengah-tengah masyarakat, tentu tidaklah mudah. Apalagi seluruh pengelola majelis adalah tenaga sukarela. Oleh karena itu, langkah awal dalam pengelolaan adalah mendasarkan motivasi gerak pada nilai Islam, terutama pada keyaniban Tauhid dan amanah Allah dalam Al-Qur`an untuk berpihak pada kaum miskin. Al-Maa`uun ditafsirkan dalam gerak praksis di lapangan. Suatu credo yang dipegang segenap pengelola majelis dan menjadi salah satu pendorong semangat selain keyakinan Tauhid adalah: “Selama Rakyat Masih Menderita Tidak Ada Kata Istirahat”. Credo ini sering didengungkan untuk menambah semangat bergerak para pengelola, selain keyakinan yang kuat bahwa pertolongan Allah akan datang bagi siapa yang berjihad di jalan-Nya, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur`an surat Al-‘Ankabuut ayat terakhir:

Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan Kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.

Periode Kedua MPM dimulai setelah Mukhtamar Satu Abad Muhammadiyah di Yogyakarta pada 2010. Pada Mukhtamar ini kegiatan pemberdayaan masyarakat semakin mendapat perhatian. Hal ini dapat dilihat dalam Program Muhammadiyah 2010-2015, dimana pemberdayaan masyarakat sudah dimasukkan sebagai bagian tersendiri dalam program kerja 2010-2015.

Visi pengembangan 2010-2015 dirumuskan sebagai keputusan mukhtamar sebagai berikut: “Peningkatan kapasitas, daya saing, posisi tawar, dan intensitas pemberdayaan masyarakat berbasis misi Penolong Kesegsaraan Oemoem (PKO) dan gerakan Al-Maa`uun, menuju kehidupan sosial yang adil, sejahtera, dan berkeadaban”.

Terdapat empat faktor utama dalam rumusan visi tersebut, yaitu peningkatan kapasitas organisasi dan kelembagaan, peningkatan kapasitas dan daya saing masyarakat, peningkatan intensitas (massifikasi) pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan posisi tawar masyarakat.

Visi maupun faktor utama di atas memperlihatkan secara lebih jelas tiga ranah aktivitas MPM, yaitu individual, kultural, dan struktural.

Faktor utama yang keempat, yakni peningkatan posisi tawar masyarakat, merupakan suatu jawaban langsung Muhammadiyah terhadap salah satu persoalan struktural besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Di dunia pertanian, misalnya, dapat dengan mudah dilihat bahwa para petani Indonesia sebagian besar adalah ‘petani subsisten’, petani yang tergantung segala-galanya, karena posisi tawar mereka sangat lemah.

Menyadari akan besarnya tugas yang diamanatkan Mukhtamar Satu Abad Muhammadiyah, MPM mencoba untuk memberi prioritas pada empat hal utama, belajar dari periode perintisan, 2005-2015, sebagai berikut.

Pertama, massifikasi program pemberdayaan masyarakat yang sudah dikembangkan selama lima tahun kepengurusan, khususnya dalam bidang pemberdayaan

masyarakat petani, peternak, nelayan, kaum miskin kota maupun desa lainnya. Termasuk dalam hal ini adalah pengembangan industri skala mikro/rumah-tangga untuk pengolahan hasil pertanian, peternakan, dan perikanan.

Kedua, memberi perhatian yang lebih serius pada advokasi kebijakan publik yang tidak sensitif dan akomodatif terhadap kehidupan rakyat miskin yang terpinggirkan.

Ketiga, memberi perhatian serius secara khusus kepada Kaum Buruh, baik buruh yang bekerja di dalam negeri maupun para buruh migran.

Keempat, memberi perhatian serius secara khusus kepada Kaum Difabel/Disabilitas, dengan berbagai aktivitas pemberdayaan maupun secara lebih luas lagi mendorong semua amal usaha Muhammadiyah untuk memperhatikan hak-hak Kaum Difabel/Disabilitas.

Empat prioritas ini kemudian digunakan untuk menentukan bidang yang menjadi fokus perhatian dalam penyusunan program majelis sepanjang 2010-2015.

KHATIMAH: BEBERAPA AGENDA PENTING

Langkah-langkah sebagaimana dijelaskan di atas mengarah pada penyelesaian masalah mendasar yang dihadapi bangsa, yaitu integrasi nasional dan kesejahteraan sosial. Dua hal yang menjadi salah satu prasyarat bagi pembangunan Masyarakat Madani atau *civil society* dalam *niffo* nasional.

Ke depan semua kekuatan masyarakat madani tampaknya perlu mengarahkan perhatian pada dua hal penting yang menjadi prasyarat bagi terbangunnya Masyarakat Madani atau *civil society*, yaitu integrasi nasional dan kesejahteraan sosial.

Dua hal tersebut dalam kenyataan sebenarnya saling berkaitan. Sebab integrasi nasional akan sulit dibangun dalam kondisi sosial ekonomi sebagai rakyat masih timpang. Oleh karena itu, di samping memperbaiki kehidupan sosial ekonomi masyarakat, kekuatan masyarakat madani harus juga memberi perhatian pada upaya mempersempit jurang kesenjangan sosial.

Ini artinya harus ada prioritas perhatian kepada kaum miskin, kota maupun desa, yang kesenjanganannya dengan golongan berpunya semakin menganga; hal yang sangat mengganggu integrasi nasional kita.

Ormas Islam di tanah Air, seperti NU, Muhammadiyah, Persis, dan lain-lain, sebagai kekuatan masyarakat madani, telah lama bergelut dengan usaha-usaha besar di bidang pemberdayaan masyarakat. Ormas-ormas tersebut memiliki modal sosial yang besar untuk melakukan usaha pemberdayaan masyarakat. Paling sedikit dapat ditemukan empat unsur pendukung utama dari Ormas Islam di Indonesia:

Pertama, basis nilai yang jelas dan mampu diaplikasikan sebagai daya dorong gerak yang potensial.

Kedua, adanya kepercayaan masyarakat. Ormas Islam masih tetap mendapat kepercayaan dari masyarakat, berbeda dengan partai politik yang semakin kurang dipercaya masyarakat.

Ketiga, rentang organisasi yang luas dan merata di seluruh tanah air. Karena rentang organisasi yang luas seperti itu maka Ormas Islam dapat menutup salah satu kelemahan masyarakat kita yaitu lemahnya jaringan antar-kelompok masyarakat.

Keempat, sumberdaya manusia yang cukup. Dengan sedikit sentuhan pendidikan maupun pelatihan, sumberdaya manusia dapat dikembangkan menjadi pendamping masyarakat yang handal.

Barangkali yang diperlukan ke depan adalah bagaimana usaha-usaha besar tersebut lebih diarahkan pada membangun salah satu prasyarat bagi tumbuhnya Masyarakat Madani dalam *nifo* nasional, yaitu integrasi nasional dan kesejahteraan sosial.

Lepas dari itu semua, persoalannya adalah apakah kita mau atau tidak bekerja untuk membangun Masyarakat Madani, bukan dapat atau tidak dapat. *Wallahualam*.

POLITIK ELEKTORAL MUHAMMADIYAH DI ARAS LOKAL

(DI KABUPATEN SLEMAN DAN KABUPATEN MAROS)

Achmad Nurmandi, Andi Luhur Prianto dan David Efendi

-

JKSG Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makasar

-

Pendahuluan

Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat sipil didirikan tiga puluh tiga tahun sebelum Indonesia merdeka (atau dengan kata lain berdirinya ‘negara bangsa’ Indonesia), yaitu pada tanggal 9 Zulhijah 1330 Hijriyah atau bertepatan dengan 18 November 1912 oleh KH. Ahmad Dahlan. Pada awalnya organisasi ini dirikan secara khusus untuk memberikan pelayanan agama kepada umat Islam di sekitarnya yang masih terkurung dalam budaya sinkretik (Majelis Litbat Muh, 2010) dengan menggunakan metode pelayanan pendidikan dan kesehatan. Anggaran Dasar Muhammadiyah disahkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda pada tanggal 22 Agustus 1914 No. 81.

Pada awal berdirinya—sesuai dengan situasi penjajahan---, maka pola hubungan antara Muhammadiyah dengan negara penjajah, lebih banyak bersifat komplementatif. Artinya Muhammadiyah didirikan untuk memenuhi fungsi-fungsi sosial keagamaan bagi umat Islam, terutama di wilayah Yogyakarta. Peran itu menonjol dijalankan sampai awal menjelang kemerdekaan. Sebagai organisasi masyarakat sipil yang telah berdiri tiga puluh tiga tahun, maka peran kenegaraan Muhammadiyah semakin menonjol, dengan menempatkan wakilnya di PPKI, yaitu Ki Bagus Hadikusumo (Ketua Umum PP Muhammadiyah). Peran Ki Bagus Hadikusumo dalam perdebatan tujuh kata dalam konstitusi dengan diktum “kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dan perubahannya menjadi Ketuhanan yang Maha Esa. Dengan peran ini dapat disimpulkan bahwa Muhammadiyah adalah organisasi penting atau badan yang mendirikan negara atau

arsitek Pancasila (Harun, 1986). Dengan keterlibatan sejarah pendirian negara-bangsa, maka peran Muhammadiyah setelah kemerdekaan tidak lepas dari adanya rasa memiliki negara bangsa Indonesia (nasionalisme). Dalam berbagai kesempatan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Syafii Maarif menyatakan bahwa jika Indonesia ambruk, maka Muhammadiyah pun akan ambruk (2013) dan dikatakannya juga dalam sebuah pengantar buku, "Muhammadiyah yang tidak mampu memberi solusi terhadap masalah-masalah Indonesia, bukanlah Muhammadiyah yang sebenarnya" (Maarif, 2010). Pola hubungan antara pemerintah dan Muhammadiyah mengambil berbagai bentuk sesuai dengan sejarahnya, seperti politik akomodatif, gerakan sosial dan gerakan oposisi (Majelis Litbang Muh, 2010).

Pada orde reformasi atau transisi demokrasi pada saat ini, menarik untuk mengkaji peran Muhammadiyah sebagai bagian pendiri republik dan bagaimana pola hubungan antara pemerintah dan Muhammadiyah pada masa depan. Transisi demokrasi Indonesia menuju tahapan konsolidasi melahirkan anomali-anomali tertentu, seperti situasi politik tidak menentu (*chaos*), fragmentasi sipil, militer frustrasi dan merasa terpojok atas perannya mendukung regime masa lalu dan norma, aturan dan prosedur (*rule of the game*) baru yang mewakili sistem demokrasibelum terbentuk (Nugroho, 2001). Konsolidasi demokrasi dapat diartikan sebagai (proses) penggabungan beberapa elemen demokrasi untuk bersama sama antar a partai politik, elite, masyarakat sipil dan warganegara secara padu memfasilitasi demokratisasi politik (O'Donnel dan Schmitter, 1993: 24). Konsolidasi demokrasi yang berjalan tanpa ujung memancing sikap dari berbagai elit Muhammadiyah seperti secara tidak langsung terlibat dalam politik pemilihan (electoral politics) di tingkat lokal.

Pada tahun 2013, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan kepurusan No. 41/KEP/I.O/B/2013 tentang aktivitas politik pimpinan Muhammadiyah Untuk pencalonan Dewan Perwakilan Daerah RI serta Calon Presiden/Wakil Presiden, Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Calon Walikota/Wakil Walikota. dan Calon Bupati/Wakil Bupati, berlaku ketentuan berikut (a) apabila yang bersangkutan menduduki posisi sebagai Pimpinan Harian pada Pimpinan Persyarikatan, Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan, Organisasi Otonom, Badan Pembina Harian, dan Pimpinan Amal Usaha Muhammadiyah maka harus berhenti dari jabatannya tetapi tetap menjadi anggota Pimpinan Persyarikatan, anggota Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan, anggota Pimpinan Organisasi Otonom, anggota Badan Pembina Harian, dan/atau tenaga tetap/tidak tetap di Amal Usaha Muhammadiyah; (b) di luar posisi

tersebut pada huruf (a) diperbolehkan untuk tetap menduduki posisi dan statusnya sesuai dengan jabatanyang selama ini diamanatkan kepadanya. Keluarnya peraturan ini tidak lepas dari dinamika politik nasional pasca reformasi yang membuka liberalisasi politik.

Pada tahun 2010, secara terang-terangan Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman memobilisasi dukungan politik bagi pasangan Wakil Bupati Sri Purnomo dengan Yuni Satia yang diusung partai gabungan PAN, PDIP, dan Gerindra berhasil meraih suara terbanyak 174.571 suara atau 35,18 persen. Menurutnya, antara basis PDI-P dan Muhammadiyah masih ada pengikut loyal yang tak perlu diimingi uang. Jadi, uang hanya diberikan sebagai imbalan kerja semi-formal bagi kader partai yang bekerja pada malam itu, dalam kerangka target kemenangan satu putaran (Mahadi, 2011).

Di Kabupaten Maros, pada Pemilu 2010 sikap PDM Kab Maros juga secara tersirat memberikan himbuan untuk memperjuangkan dan memilih kandidat yang berlatar belakang Muhammadiyah. Meski tidak dilakukan secara tersurat (SK) tetapi konsolidasi organisasi terus dilakukan. Mengingat jumlah suara koalisi PAN dan PBB berdasarkan Pemilu Legislatif 2009 yang hanya sebesar 22.145 dari total jumlah pemilih 171.263 dengan 6 pasangan kandidat. Setelah melalui kompetisi yang sengit, akhirnya pasangan M. M. Hatta Rahman- Andi Harmil Mattotorang tampil sebagai pemenang dengan perolehan suara 66.138 suara (38,62%).

Khususnya kebijakan di level kelembagaan persyarikatan Muhammadiyah di DIY sangat menarik untuk ditengok yaitu persoalan keterlibatan Muhammadiyah dalam memberikan dukungan pada pemilihan kepala daerah di Kota Yogyakarta dan Sleman serta terhadap pencalonan anggota DPD RI dari DIY sejak tahun 2004 silam. Seorang peneliti memberikan komentar demikian:

“Muhammadiyah have issued some unusual policies (i) to formally support candidate in Local mayoral elections (succeed in Sleman but failed in Yogyakarta city); and (ii) to mobilise its members and affiliates to vote candidate for a seat in Dewan Perwakilan Daerah (Regional Representative Council) representing the Yogyakarta province. Surprisingly, the policy has been welcomed by grass-root Muhammadiyah especially the youths. The formal supports for such candidates in the election are likely to give the new cause and energy for social-religious and political activities beyond their routine jobs in the organisation.” (Wardana, 2014).

Tanggapan dan respon elit, kader, dan warga/anggota Muhammadiyah sangat beragam dan tidak monolitik sehingga tidak bisa disimpulkan bahwa kebijakan ini tidak tepat atau anomoli dalam berpolitik. Bagaimana proses pelebagaan politik di ormas terbesar ini dengan melihat derajat fragmentasi elit-warga dan terutama perilaku dalam merespon

aktifitas politik kepemiluan. Dari berbagai fakta ini, penulis mencoba menganalisis bagaimana perilaku elektoral “elite” dan ‘warga’ Muhammadiyah di aras lokal di era liberalisasi politik?

Kerangka Teori

Perilaku Pilihan Politik (Electoral Politics)

Putnam (2001) menjelaskan elit dengan mengajukan pertanyaan ‘siapa yang memerintah?’ dan ini kemudian memberikan kesempatan dirinya untuk mendefinisikan siapa lapisan kecil dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan tersebut. Putnam fokus pada penggunaan posisi, reputasi, dan analisa keputusan untuk menilai seseorang dapat dikategorikan sebagai elit. Weber juga menempatkan elit yang beragam dalam masyarakat bukan hanya kelas berkuasa dan yang mempunyai kekuasaan. Dua definisi ini apabila digunakan untuk membaca elit Muhammadiyah cukup membantu karena di Muhammadiyah elit sangat otonom dan beragam bentuknya mulai di struktural, kultural, dan elit yang ‘menguasai’ amal usaha. Sangat populer akhir-akhir ini dengan istilah ‘raja kecil’ untuk menyebut mereka yang memegang otoritas di AUM.

Kajian perilaku elit Muhammadiyah dalam pemilihan kepala daerah maupun politik secara umum dikaji sebagai upaya untuk memotret sisi menarik hubungan lembaga keagamaan atau *civil society* dengan politik (Efendi 2008; Jurdi 2010). Penelitian Warner (2000) tentang peran gereja Katholik di Eropa lembaga keagamaan berusaha mencapai target pasar dan menjaga ideologinya. Lembaga keagamaan seperti perusahaan dan berusaha menjaga kepentingannya untuk memasuki dunia politik. Organisasi masyarakat Muslim memainkan peran sosial, politik dan keagamaan untuk menjaga eksistensi organisasinya di Indonesia *organizational survival* (Alfian, 1989; Anderson, 1975). Studi di negara lain menunjukkan bahwa keanggotaan dalam organisasi keagamaan mendorong partisipasi aktif dalam politik dan menggunakan “clues” dan “codes” dalam kampanye (Calfano & Djupe, 2009, p. 329; McVeigh & Sikkink, 2001; Wald, 1992; Wald et al., 1988). Di Turki, organisasi keagamaan mengisi ruang-ruang pelayanan publik yang tidak dapat dilakukan oleh pemerintah pada masyarakat miskin dengan wakaf dan zakat (Gulalp, 2001; Onis, 1997). Sementara itu di Maroko, organisasi keagamaan Islam meningkatkan pelayanan pada masyarakat di tengah krisis ekonomi pada tahun 1990an (Lust-Okar, 2004, p. 166).

Mirip dengan Maroko, di Mesir, Kelompok Ichwanul Muslimin memperoleh suara yang signifikan dalam pemilihan umum karena gerakan sosial dan bantuan ekonomi pada kaum miskin (Sullivan, 1994; Tal, 2005).

Kajian literatur tentang perilaku memilih (*voting behaviour*) pada awalnya berasal dari tradisi pilihan rasional (*rational choice theory*). Teori pilihan rasional pertama dikemukakan oleh Anthony Downs (1959) yang mengajukan asumsi pokok bahwa partai politik dan pemilih mempunyai alasan rasional untuk beraktivitas politik untuk memperoleh benefit dari perilakunya. Teori rasional mengembangkan perilaku partai politik dalam demokrasi kompetitif dibedakan menjadi (1) *vote seeking*; (2) *office seeking*; dan (3) *policy seeking* (Strom, 1990). *Vote seeking party* adalah kumpulan orang-orang yang memaksimalkan dukungan elektoralnya untuk mengawasi pemerintah. *Office seeking party* adalah partai politik yang berusaha untuk menguasai pemerintah guna kepentingan partai yang bersangkutan. Sementara *policy seeking party* adalah partai politik yang berusaha memaksimalkan fungsinya untuk membentuk kebijakan. Jenis terakhir ini dipengaruhi oleh literatur tentang teori-teori koalisi partai politik (Lijphart, 1984, Axelrod, 1970, Browne, 1973).

Teori pilihan rasional dikritik oleh tradisi yang muncul berikutnya yang dikenal dengan "neoinstitutionalism" (pendekatan kelembagaan) yang dikemukakan oleh March dan Olsen (1984) atau yang dikenal dengan "pure theory". Dalam praktek, asumsi *vote seeking party* dikritik karena tidak berlaku secara empiris pada prinsip "catch-all" yang terjadi di Swedia pada People Party (Kirchheimer, 1966) atau kemenangan Labour Party di Inggris pada tahun 1983. Sementara itu asumsi *office seeking party* bahwa partai berusaha berkoalisi untuk berkuasa tidak selalu didukung oleh fakta empiris, karena seringkali koalisi minoritas menguasai pemerintahan di banyak negara, seperti kasus Indonesia. Asumsi ketiga bahwa *policy-seeking party* adalah asumsi yang paling sulit diukur efektifitasnya, karena dalam praktek kebijakan pemerintah seringkali dibuat bukan oleh partai politik tetapi kelompok kepentingan atau aktor-aktor lain atau pihak asing.

Strom (1990) lebih lanjut mengajukan kritik pada tiga pendekatan diatas dengan mengajukan asumsi bahwa perilaku partai politik dianggap statis, aktor-aktor politik dianggap seragam dan tidak dapat dikekang dan mengabaikan faktor lingkungan. Dia lebih lanjut mengajukan sebuah model karena tidak ada partai politik yang murni masuk kedalam

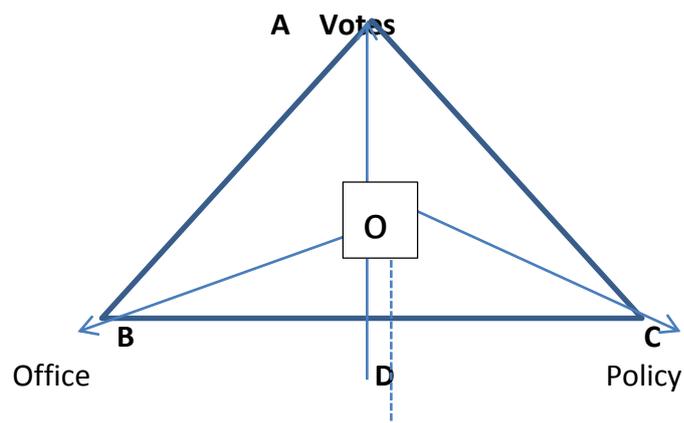
tiga tipe diatas, dalam model terpadu (unified model of party behavior), dengan persamaan sebagai berikut:

$$B = w_1V + w_2O + w_3P \text{ (Strom, 1990), dimana:}$$

B = posisi dalam ruang perilaku V = perilaku vote-seeking O = perilaku office seeking

P = perilaku policy-seeking W n = koefisien (bobot) dari masing-masing perilaku

$$W_1 + w_2 + w_3 = 1$$



Gb. 1. Ruang Kelayakan Perilaku Partai Politik

Sumber: Strom Kaare, "A Behavioral Theory of Competitive Political Parties", *American Journal of Political Science*, Vol. 34, Issue 2, 1990.

Sebagai organisasi, partai politik atau NGO, cenderung melakukan keseimbangan dengan menonjolkan perilaku enterpreneur. Elit partai berusaha menjadi pimpinan partai politik untuk memperoleh benefit dari aktivitas politiknya (Storm, 1990). Partai politik juga berusaha membatasi pimpinannya dengan membangun organisasi untuk membantunya dalam menjaga informasi, memobilisasi pemilih dan melaksanakan kebijakan (Storm, 1990).

Model yang dikemukakan oleh Strom diatas memfokuskan pada kajian perilaku partai politik namun belum melihat bagaimana perilaku organisasi non partai dalam pemilihan umum. Abrams, dkk (2010) mengkritik bahwa teori pilihan rasional atau model Strom diatas gagal menjelaskan perilaku organisasi non partai dalam pemilihan umum. Mereka mengemukakan model baru yang dinamakan dengan *informal social network* (ISN) dengan asumsi bahwa seseorang memilih secara rasional karena dorongan dari jaringan informal, pertemanan, atau organisasi, sehingga mendapat pengakuan sosial (social approval) atau sebaliknya. Asumsi pokok dari model ini adalah bahwa kelompok adalah pemilih yang penting (*probabilistic pivotal voter*) dibandingkan dengan individu (*individual probalistic pivotal voter*). Dalam mobilisasi kelompok, anggota kelompok diberikan isentif

untuk memilih dalam tujuan kepentingan kelompok, atau dalam model etis anggota kelompok melakukan pilihan dengan asumsi etis. Dalam pandangan ISN, NGO atau Muhammadiyah secara politik aktif memobilisasi anggota untuk memilih calon tertentu disebabkan pengakuan sosial dan tidak adanya pengakuan sosial (social approval: A and social disapproval:D). Perilaku untuk memilih anggota NGO dipengaruhi oleh besar dan pentingnya jejaring informal dan keanggotaan yang berada diatas hubungan kekeluargaan (Abram, et, 2010). Dalam penelitiannya di USA, Abram, dan kawan-kawan (2010) menemukan bahwa keanggotaan dalam organisasi, tingkat keagamaan, kehadiran dalam aktivitas gereja mempengaruhi perilaku memilih. Sebaliknya partai politik pun memanfaatkan kelompok-kelompok keagamaan ini sebagai media kampanye yang efektif untuk meningkatkan jumlah suara.

Penelitian Wibowo (2008) di Kabupaten Ponorogo menunjukkan bahwa perilaku elektoral warga Muhammadiyah di kalangan elite menggunakan simbol-simbol organisasi untuk mempengaruhi masa. Simbol di sini berupa kehadiran tokoh Muhammadiyah dalam sosialisasi di tingkat desa, simbol verbal berupa bahasa-bahasa yang sering digunakan dalam lingkungan Muhammadiyah dan juga interaksi antara elite Muhammadiyah dengan jaringan yang selama ini telah tertata. Ada beberapa kasus yang berhasil diungkap oleh Wibowo (2008) dalam wawancara dengan narasumber, misalnya keberanian seorang dokter dan pejabat struktural di Rumah Sakit Aisyiyah yang dengan terang-terangan menolak pasangan yang ditetapkan organisasi dan lebih memilih pasangan partainya, yaitu PKS dan terjadi ketegangan karena dukungannya tidak hanya berupa suara tetapi juga mensuplai sebagian dana untuk pasangan lain dan juga terjadi pada beberapa orang dosen di sebuah perguruan tinggi Muhammadiyah.

Bagaimana lembaga keagamaan mempengaruhi perilaku elektoral? Mengikuti analisis Busse (2012), perilaku elektoral lembaga keagamaan lokal dibagi empat yaitu (1) analisis pemilihan dan perilaku politik (*voting and political behavior*); (2) kekuasaan lembaga keagamaan (*the power of religious bodies as institutional players*); (3) lobi dan partner koalisi (*lobbyists and coalition partners*); (4) peran lembaga dalam kebijakan daerah (*religion's role in the origins of institutions and long-term political outcomes*); (5) dampak terhadap kebijakan (*the impact of religion on attitudes toward and policies of social welfare*); dan (6) pengaruh terhadap pemerintah dan keberlanjutannya (*its broad influence on regime type and durability*).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode eksploratif yang menginvestigasi dinamika politik lokal dan perilaku politik elit lokal Muhammadiyah di dua daerah yaitu di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pilihan pada dua kabupaten ini, disebabkan dukungan formal dari pengurus daerah, secara implisit bertentangan dengan intruksi Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang secara tegas melarang secara organisasi mendukung calon kepala daerah tertentu. Sumber utama informasi penelitian ini adalah dari wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pemilihan kepala daerah maupun pihak yang berseberangan. Dokumen-dokumen yang berhasil dikumpulkan dari tim sukses juga menjadi bahan untuk diolah, dikategorikan, dan dikomparasikan antara kasus di Sleman dengan apa yang terjadi di Maros.

Adapun data yang digunakan adalah data-data yang bersumber dari data sekunder atau penelitian sebelumnya, dan data primer yang bersumber dari wawancara terstruktur dengan elit Muhammadiyah di kedua kabupaten tersebut serta pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan dengan pilihan politik elitnya. Kedua contoh kabupaten ini mengilustrasikan 'keberhasilan' elit mengusung kandidatnya dengan segala pertanyaan yang tersisa—apakah keberhasilan ini merupakan desain untuk keterlibatan politik secara aktif baik dalam masa pemilu maupun pasca pemilu atau lebih digerakkan oleh sentimen atau politik aliran semata dan atau "gengsi politik" di level daerah? Ini merupakan salah satu sub-pertanyaan yang hendak dijawab dalam artikel ini.

Kepercayaan dan Perilaku Politik

Perilaku elit kerap kali tidak terkonsolidasikan sebagai perilaku yang seiring dan sejalan dengan ummat atau jamaahnya. Situasi keterpisahan imajinasi elit dengan jamaah Muhammadiyah ini dipotret oleh David Efendi (2014) dalam bukunya yang berjudul 'Fragmentasi Elit Muhammadiyah dalam pemilu presiden 2009 dan 2014'. Hal ini sangat menonjol di saat panggung politik nasional. Ada banyak alasan yang dapat dijadikan pijakan misalnya ini terkait dengan jarak politik (*political distance*) antara jamaah dengan elit ormas di tingkat pusat. Selain itu, sebagian warga Muhammadiyah tidak menginginkan elitnya terjun secara terang-terangan dalam politik praktis, tapi bisa memainkan apa yang disebut *high politics* atau politik nilai.

Agama dapat berfungsi tidak hanya sebagai sumber kesetiaan komunal dan berbagi identitas dan pemahaman, tetapi juga sumber ideologi yang penting (*powerful ideology*), sebagai seperangkat prinsip dan klaim tentang bagaimana dunia seharusnya menjalankannya fungsinya (Busse, 2012). Sebagai lembaga keagamaan Muhammadiyah menjadi panduan berperilaku bagi anggotanya, karena memiliki ideologi yang jelas, terutama dalam perilaku elektoral. Ibnu Subiyanto dan Sri Purnomo yang didukung PDIP dan PAN menang dalam Pilkada langsung tahun 2005 itu dengan perolehan suara sebesar 39,6 persen sedangkan pesaing terdekatnya pasangan Hafidh Asrom dan Kusbaryanto memperoleh 33,9 persen, yang didukung PKB dan PKS. Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Sleman merasa perlu membuat fatwa khusus untuk mendukung calon ini yang memiliki latar belakang Muhammadiyah. Pada tahun 2009, Sri Purnomo menjadi "real bupati, setelah Bupati Sleman Ibnu Subiyanto ditahan di Rumah Tahanan Cebongan, Kabupaten Sleman karena dugaan kasus korupsi buku ajar Sleman sebesar Rp 12,1 miliar itu berdasarkan surat penetapan majelis hakim Pengadilan Negeri Sleman yang diketuai oleh Sri Andini tertanggal 16 Juni 2009. Pengurus PDM Sleman merasa perlu membuat fatwa khusus untuk mendukung calon ini yang memiliki latar belakang Muhammadiyah.

Pengurus PDM Kabupaten Sleman didasarkan pada perilaku elektoral pada pemilukada pada tahun 2010, yang secara formal mendukung pasangan Sri Purnomo-Yuni Satia Rahayu (dicalonkan PDIP, PAN dan Gerindra). Aktifisme politik juga dilakukan oleh PDM Sleman dalam pemberian dukungan 'formal-kelembagaan' kepada calon anggota DPD RI sejak tahun 2004, 2009, dan tahun 2014. Hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Maros, yaitu PDM Kabupaten Maros pada Pemilukada 2010 secara formal-kelembagaan memberikan dukungan politik kepada pasangan bupati dan wakil bupati H.M. Hatta Rahman-Andi Harmil Mattotorang yang dicalonkan oleh PAN dan PBB serta melakukan praktik politik akomodasi atau apa yang kita kenal sebagai 'politik patronase' (Aspinal, 2015) kepada sejumlah kader Muhammadiyah pada jabatan di lingkungan birokrasi Pemerintah Kabupaten Maros.

Pada periode kedua yaitu 2010-2015, Sri Purnomo mencalonkan kembali dengan didukung Muhammadiyah untuk menjadi bupati dan menggandeng calon dari PDIP, Yuni Setia Rahayu yang didukung oleh PDIP, PAN dan Gerindra. Pasangan ini memperoleh suara sebesar 174.571 suara (35,2 persen) mengalahkan tiga pasangan lainnya yakni pasangan Bugiakso-Kabul mendapat 164.672 suara (21,1 persen), Mimbar-Wening 14.860 suara (2,9

persen), Sukanto-Suhardono 106.838 suara (21,5 persen). Keberhasilan ini membuat pengurus dan kader Muhammadiyah sangat percaya diri bahwa Muhammadiyah dapat memberikan kader terbaiknya untuk memimpin daerah. Hanya di Sleman, di kabupaten/kota lainnya di D.I. Yogyakarta tidak ada pengurus harian PDM yang berhasil menduduki jabatan politik tertinggi di daerah.

Tabel 1. Perolehan Suara Partai Pendukung dan Suara Calon Bupati

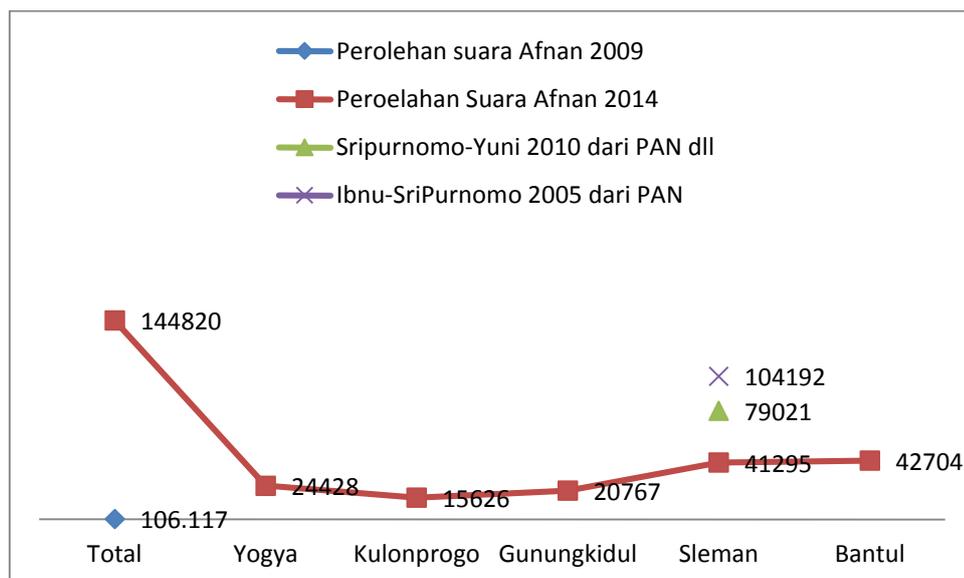
	Pileg 2004	Pileg 2009	Pilkadal 2005 (PDIP dan PAN)	Pilkadal 2010 PDIP, PAN, GERINDRA)	Selisih	
	(A)	(B)	(C)	(D)	C-A	D-B
PAN	104192	52837	104192	52837		
PDIP	104288	96297	104288	96297		
GERINDRA		20146		20146		
Lain			-13016	26184		
Jumlah	208480	169280	195464	174571	-13016	26184

Uji beda terbukti: Sig (2 tailed) 0.746; Sumber: diolah dari data KPUD Kab Sleman.

Dari uji beda antara perolehan suara partai pendukung dalam pemilihan dan suara perolehan calon kepala daerah pada dua kali pilkada, yaitu pada tahun 2005 dan pilkada tahun 2010 terdapat perbedaan yang signifikan setelah diuji secara statistik. Perolehan suara partai politik pada tahun 2004, PDIP dan PAN sebanyak 208.480 suara, namun perolehan suara calon kepala daerah Ibnu Subiyanto dan Sri Purnomo, pada tahun 2005 sebanyak 174.571 suara atau turun 13.016 suara. Pada periode berikut, yaitu pemilu tahun 2009, perolehan suara partai pengusung yaitu PDIP, PAN dan Gerindra sebanyak 169.280 suara, namun perolehan calon yang didukung: Sri Purnomo menjadi calon bupati dan Yuni Setia Rahayu menjadi calon wakil bupati sebanyak 174.571 suara. Jika diasumsikan bahwa seluruh pemilih PAN adalah warga Muhammadiyah, maka porsi dukungan elektoral warga Muhammadiyah pada Sri Purnomo pada posisi tahun 2005 sebagai wakil bupati sebesar 53,3%, dan pada pilkadal tahun 2010 sebagai calon bupati sebesar 30.3%.

Keterpilihan Sri Purnomo pada periode kedua, lebih banyak didukung oleh jaringan Muhammadiyah yang secara formal mendukung penuh, dari tingkat kabupaten sampai tingkat ranting. Pola memilih ini sebagaimana juga ditemukan pada perilaku pemilih dalam pilkadal lainnya yang lebih berdasarkan pada profil calon dan jejaring dengan akar rumput, dan bukan kekuatan ekonomi atau finansial atau program kerja (Buehler, M., 2007 Choi, N. (2005). Adalah menarik untuk membandingkan perolehan suara Sri Purnomo dan suara Afnan Hadikusumo yang juga secara formal menjadi wakil Muhammadiyah untuk menjadi

anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DIY menyeleksi bakal calon anggota DPD untuk didorong menjadi anggota DPD jauh sebelum Pemilu 2014 dan terseleksi Afnan Hadikusumo yang merupakan anggota DPD periode tahun 2009-2014. Setelah ‘tim transisi’ atau dikenal “tim kecil” yang digerakkan oleh LHKP PWM bekerja atas dasar SK PWM No.02/KEP/II.0/D/2013 mengenai panitia penjangkaran calon DPD wakil Muhammadiyah, kemudian pimpinan wilayah membentuk tim sukses resmi yang didaftarkan ke KPU dengan menunjuk Husni Amriyanto Putera (Dosen UMY) sebagai ketua dan dilengkapi perwakilan pengurus harian, ortom, dan pengurus PDM (SK PWM DIY no. 36/KEP/II.0/D/2013) Hasil kerja tim ini kembali menempatkan M Afnan sebagai anggota DPD RI periode 2014-2019 dengan dukungan suara sebanyak 144.820 yang sebagian besar disumbang dari Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. Angka ini jauh lebih banyak dibanding tahun 2009 yang hanya memperoleh 106/117 ribu suara.



Gb. 1. Perolehan Suara Wakil Muhammadiyah di Pilkada dan DPD

Dari data diatas dapat diketahui bahwa jumlah dukungan warga Muhammadiyah di Kabupaten Sleman pada wakilnya yang berbeda posisi tidak sama. Artinya walaupun calon tersebut dicalonkan secara formal oleh Muhammadiyah untuk bertarung dalam pilkada dan anggota DPD, pilihan politik warga Muhammadiyah dapat berubah dan dinamis. Kedua, sebagaimana hasil penelitian terdahulu, perilaku elektoral warga Muhammadiyah cenderung otonom. Dari komposisi organisasi dan sistem pemilihan pimpinan, Muhamamdiyah

mempunyai derajat otonomi yang tinggi. Dalam konteks pemilu nasional, elit Muhammadiyah terfragmentasi menjadi beragam ekspresi baik yang fundamentalis politik, netral aktif, netral kritis, dan 'apolitik' (Efendi, 2014).

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sleman memfasilitasi agenda Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah berupa Turba atau Silaturahmi LHKP PWM DIY ke Sleman, pada hari Jumat 18 November 2011 pukul 18.00 WIB di Rumah Dinas Bupati Sleman. Agenda yang dibahas antara lain: (1) sosialisasi hasil Rakerwil; (2) identifikasi sinergi Muhammadiyah dan Pemda Sleman; (3) inisiasi forum diskusi kebijakan. Acara ini dipimpin Nur Cahyoprobo (caleg PAN) sebagai Ketua LHKP PDM Sleman yang membidangi urusan politik.

Lembaga Hikmah & Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY menyambut baik inisiasi LHKP PDM Sleman untuk hidupkan Forum Kajian & Advokasi Kebijakan. Hal itu sesuai dengan program dan hasil rakerwil LHKP PWM DIY yang telah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Harapan kedepan adalah adanya prioritas oleh Pemerintah daerah dalam mengembangkan dan mendukung gerakan Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah-islam yang mempunyai banyak program sosial kemasyarakatan. Forum tersebut juga diisi dengan dialog interaktif dengan bapak Bupati Sleman Drs.H. Sri Purnomo, M.Si yang juga memaparkan peluang untuk kiprah advokasi di masyarakat.

Otoritas Muhammadiyah sebagai Pemain Politik

Keterlibatan Muhammadiyah dalam politik sama sekali bukan hal baru. Namun demikian, memahami Muhammadiyah sebagai entitas politik *an sich* tentu kurang tepat. Secara kelembagaan bisa jadi tidak memperlihatkan wajah politis, tetapi anggota-anggotanya bisa leluasa terlibat dalam politik. Peta dan dinamika politik yang berubah juga menggiring pilihan-pilihan kelembagaan ormas untuk berubah dalam cara mensikapi perkembangan politik. Terbukanya kran politik memungkinkan secara organisatoris terlibat dalam proses elektoral di daerah—sebagai kebutuhan strategis dakwah maupun sebagai 'korban' tarik menarik kepentingan politik elit tertentu, atau keduanya. Salah satu perubahan 'filosofi' berpolitik Muhammadiyah adalah dari 'menjaga jarak yang sama dengan kekuatan politik' menjadi 'menjaga kedekatan yang sama dengan kekuatan politik'. Ungkapan sederhana ini mempunyai dampak serius dalam perilaku elektoral pengurus Muhammadiyah di daerah secara nasional.

Dalam politik elektoral, walaupun George Kahin (1970) mengatakan sejak tahun 1970-an Islam telah kehilangan kekuatan politiknya, organisasi keagamaan bernama Muhammadiyah memainkan peran sebagai ‘pemain politik’ sebagaimana partai politik dalam batas tertentu—komunikasi politik, kandidasi, mobilisasi dukungan, dan pendidikan pemilih. Dalam kasus pilkada Kabupaten Sleman pada tahun 2010, PDM membentuk tim sukses yang diketuai oleh Parwoto, salah satu pimpinan PDM dan manta politisi Golkar. Tim ini mengkoordinir tim sukses tingkat kecamatan dan kelurahan, yang berbasiskan pada PCM dan PRM (Pengurus Cabang Muhammadiyah dan Pengurus Ranting Muhammadiyah). Dana tim kampanye berasal dari calon bupati dan swadaya warga Muhammadiyah di berbagai tingkat.

Sementara pada Pemilu Kabupaten Maros 2010, meski PDM tidak membentuk tim pemenang secara formal, tetapi modal jejaring organisasi digerakkan untuk kepentingan kandidat berlatar belakang kader persyarikatan. Konsolidasi organisasi pun terus diintensifkan pada masa-masa menjelang pemilihan dengan melibatkan pengurus unit amal usaha serta jejaring organisasi otonom (ortom). PDM sebenarnya tidak mentransformasikan diri menjadi aktor, tetapi secara diam-diam ingin mengalokasikan nilai dengan cara mengeksploitasi modalitas atau basis legitimasi yang dimiliki elit Muhammadiyah untuk bermain politik.

Sementara itu dalam kasus pemilihan anggota DPD pada Pemilu 2014, PWM membentuk tim sukses di tingkat provinsi dan diikuti dengan tim sukses di tingkat kabupaten, kecamatan dan kelurahan yang masing-masing melekat pada fungsi PDM, PCM dan PRM. Rapat-rapat pengurus pada masa kampanye membahas agenda pemilihan anggota DPD dan langkah-langkah untuk keberhasilan meraih suara bagi calon, Afnan Hadikusumo. Pengalaman “keberhasilan” menampilkan kader persyarikatan pada kontestasi pemilihan DPD pun dimiliki oleh PWM Sulawesi Selatan pada Pemilu 2014. Setelah mengalami “kegagalan” meng-endorse elit pada Pemilu 2004 dan Pemilu 2009. Pada Pemilihan DPD Tahun 2004, meski PWM telah merekomendasikan mantan Ketua PWM KH. Nasruddin Razak sebagai calon resmi, tetapi rivalitas internal tetap terjadi dengan tampilnya Ketua PW Aisyiyah Nurhayati Aziz sebagai kandidat DPD. Eksperimen *low-politics* ini terbukti gagal karena fragmentasi elit dan konsolidasi politik organisasi yang tidak berjalan. Situasi yang hampir serupa terjadi pada pemilihan anggota DPD pada Pemilu 2009, setidaknya terdapat empat orang kandidat berlatar belakang kader persyarikatan berkompetisi memperebutkan

kursi senator. Adalah KH. Iskandar Tompo (Wakil Ketua PWM), Nurhayati Aziz (Ketua PW Aisyiyah), A. M. Iqbal Parewangi (Kader IPM), serta Alamsyah Demma (Kader IRM) bersaing memperebutkan dukungan suara pemilih persyarikatan. Hasil pleno PWM telah memutuskan untuk mengusung KH. Iskandar Tompo sebagai kandidat yang mendapat restu organisasi, tetapi munculnya beberapa kader persyarikatan dalam kandidasi DPD ini membuat modalitas sosial dan politik mengalami fragmentasi yang berujung kegagalan. Situasi yang sangat berbeda terjadi ketika pemilihan DPD pada Pemilu 2014, A. M. Iqbal Parewangi, kandidat yang berlatar belakang pendidikan Muallimin Muhammadiyah ini, berhasil meraih rekomendasi PWM untuk menjadi representasi persyarikatan dalam pemilihan DPD ini. Kompetisi internal kader persyarikatan kali ini tidak terjadi, sebagaimana rivalitas kader dalam pemilihan DPD pada Pemilu 2004 dan 2009. Eksperimen politik formal cukup berhasil mengantarkan A.M. Iqbal Parewangi meraih kursi senator DPD mewakili provinsi Sulawesi Selatan. Dengan melihat praktek *low-politics* yang diperankan oleh PWM Sulawesi Selatan dalam setiap kompetisi pemilihan senator DPD, maka pergumulan Muhammadiyah di gelanggang politik sungguh unik. Dikatakan unik karena meskipun corak hubungan Muhammadiyah dan politik bersifat fluktuatif, namun Muhammadiyah dalam sejarahnya selalu membangun komunikasi yang intensif dengan kekuatan-kekuatan politik. Kedekatan itu untuk mempermudah saluran-saluran (alokasi nilai-nilai) di kekuatan politik tersebut.

Agama dan Politik Alokatif

In a more moderate articulation of this thesis, Protestantism facilitates democracy: the doctrine encourages individual conscience, with the Bible as key authority rather than priests or religious authorities, and its tenets "tend towards separation and independence from ancient church structures and traditions as well as political authorities" (Woodberry & Shah 2004p. 48).

Organisasi keagamaan seringkali hadir dalam kancah politik sebagai pembawa pesan, nilai dan formula kemaslahatan bersama. Meskipun demikian, perilaku organisasi keagamaan seringkali menampilkan perilaku politik dengan wajah sektarian, berpihak serta terjebak pada *low-politics*. Secara normatif, konstruksi ideal relasi Muhammadiyah dan politik sudah cukup terang. Khittah 1971 hasil Muktamar Muhammadiyah ke-38 di Ujungpandang masih berlaku dan menjadi pegangan kuat warga Muhammadiyah dalam berpolitik hingga saat ini. Khittah 1971 menandakan bahwa "Muhammadiyah adalah

gerakan dakwah Islam yang beramal dalam bidang kehidupan manusia dan masyarakat, dan tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan dan tidak merupakan afiliasi dari suatu partai politik atau organisasi apapun". Diktum itu sangat jelas, Muhammadiyah tidak menghimpitkan diri dan berhimpitan dengan partai politik manapun. Kalau Muhammadiyah tidak memiliki artikulasi partai politik, pertanyaannya adalah, bagaimana wujud dakwah politik Muhammadiyah untuk memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara? Pertanyaan selanjutnya, sudah efektifkah pilihan strategi politik yang dilakukan Muhammadiyah selama ini (Ali, 2010).

Artikulasi dakwah politik Muhammadiyah, yaitu: *high politics* yang diperkenalkan Amien Rais, untuk membedakannya dengan *low politics* sebagaimana dilakukan oleh partai-partai politik (Maarif, UQ/1995) dan *allocative politics*, untuk membedakan dengan *constitucional politics*, model Din Syamsuddin (1990: 163-206). Keduanya menunjukkan idealisme politik Muhammadiyah, yaitu politik adiluhung berpayung amal shaleh sebagai terjemahan dari semangat dakwah *amar ma'ruf nahi mungkar* untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, bukan untuk menempati kekuasaan di legislatif ataupun eksekutif sebagaimana dilakukan partai politik.

Secara konsepsional, garis demarkasi antara *high politics* dan *low politics*: bisa dilakukan, yakni dengan mendefenisikan *high politics* sebagai perilaku yang terkait dengan politik moral, aktivitas yang terkait dengan fungsi kontrol atau pengawas terhadap kekuasaan, serta aktivitas bidang kemasyarakatan seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial; di sisi lain perihal yang menyangkut *low politics* merujuk pada politik praktis atau perilaku nyata yang terkait pengelolaan kekuasaan secara langsung, atau sebagai pemain kekuasaan.

Formulasi politik alokatif atau *high-politics* ala Muhammadiyah yang selama ini pegang tersebut ternyata juga diartikulasikan dengan nuansa yang berlainan oleh elit pimpinan Muhammadiyah. Bentuk artikulasi politik alokatif dalam konteks kenegaraan perlu dibaca secara jernih dan obyektif. Pembacaan terhadap gerak politik alokatif Muhammadiyah bisa menjadi cermin sekaligus bahan evaluasi untuk menilai sejauhmana efektifitasnya dalam mengalokasikan nilai-nilai/moral Islam kepada para pemegang otoritas kekuasaan. Keberhasilan kader-kader Muhammadiyah menduduki jabatan-jabatan dalam ranah kekuasaan politik dan pemerintahan lokal menjadi arena untuk menerjemahkan semangat dakwah *amar ma'ruf nahi mungkar* untuk mewujudkan masyarakat Islam yang

sebenarnya. Ruang demokrasi yang menyediakan arena kontestasi bagi seluruh kelompok, dapat menyerap sumberdaya persyarikatan untuk terlibat pada urusan-urusan politik formal, menerjemahkan politik konstitusi (Din Syamsuddin, 1990) sebagai aktor-aktor kekuasaan lokal.

Di Kabupaten Maros, dan secara umum di Provinsi Sulawesi Selatan, *euphoria* masa-masa awal demokratisasi dan desentralisasi dimanfaatkan sebagai ruang aktualisasi nilai dan matan keyakinan organisasi massa berbasis Islam, untuk kembali meneguhkan nilai-nilai Islam dalam politik kekuasaan formal. Maraknya perjuangan islam formal di Sulawesi Selatan di masa awal desentralisasi melalui Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) mendorong bebarapa daerah bereksperimen untuk memproduksi Perda berbasis syariah. Beberapa Perda Syariah yang diproduksi di Kabupaten Maros antara lain: (1) Perda No.9/2001 tentang Larangan Peredaran, Memproduksi, Mengonsumsi Minuman Keras Beralkohol, Narkotika, dan Obat Psikotropika; (2) Perda No.16/2005 tentang berpakaian muslim dan muslimah; (3) Perda No.15/2005 tentang Gerakan Buta Aksara dan Pandai Baca Al-Qur'an; terakhir, perda No.17/2005 tentang Pengelolaan Zakat.

Meskipun pelembagaan syariat Islam melalui Peraturan daerah syariah ini bukan wacana *mainstream* pemikiran persyarikatan Muhammadiyah, tetapi kader-kader persyarikatan di lembaga kekuasaan politik lokal memilih jalan politik akomodasi dan kompromi terhadap tuntutan pelembagaan islam formal ini. Sebagian elit Muhammadiyah memandang bahwa nilai-nilai persyarikatan bisa diwujudkan melalui pada perjuangan politik formal dalam bentuk formalisasi syariah. Sedangkan kader yang berada di PAN lebih terlihat dalam memperjuangkan platform Muhammadiyah yang diimplementasikan ke dalam pembahasan rancangan peraturan daerah. Salah satunya ialah perda tentang pembatasan peredaran minuman beralkohol yang telah disahkan pada awal tahun 2012 (Tanjung, 2012).

Muhammadiyah dan Rezim Politik

Terdapat dua indikator penting dalam sub bahasan ini adalah bagaimana Muhammadiyah menggunakan bupati untuk menjaga 'mainstream' keagamaan di daerah sesuai dengan paham organisasi tersebut. Peran Bupati menggunakan kekuasaan untuk mensyiarkan paham Muhammadiyah kepada masyarakat dan terkait perwakilan jumlah pengurus Muhammadiyah yang menjadi pimpinan di lingkungan pemerintah daerah

setempat. “Politik nilai” dalam beragam forum pimpinan sangat menonjol bahwa pilihan politik Muhammadiyah untuk mendukung mempunyai misi untuk dakwah amar maruf mani munkar sebagaimana ini doktrin organisasi yang sangat populer. Hal ini terungkap dalam beberapa rekaman, di antaranya adalah:

“Kita mendudukan kader kita di pemerintahan adalah untuk kepentingan dakwah Muhammadiyah, untuk menjaga oaham keagamaan Muhammadiyah. Kabupaten Sleman adalah kabupaten yang strategis bagi Muhammadiyah, dan banyak pihak lain juga berkepentingan dalam kepemimpinan politik Selain itu, Muhammadiyah memiliki banyak amal usaha di kabupaten ini sehingga Muhammadiyah harus menjaganya.”¹

Kabupaten Sleman dikenal dengan kabupaten yang memiliki tingkat pluralitas yang tinggi dengan gesekan antar pemeluk agama yang cenderung intensif. Beragam bentuk kekerasan terus terjadi hingga tahun 2014 ini. Peristiwa perusakan Gereja yang tidak berijin terjadi ketika puluhan orang “tidak dikenal” melakukan perusakan sebuah gereja di Sleman, (KR, 1/6/2014). Massa menganggap gereja Kristen yang ada di wilayah Panggukan, Desa Tridadi, Kecamatan Sleman, tidak berizin. Hubungan islam dengan kristen kerap kali menunjukkan hubungan yang pasang naik dan pasang surut. Muhammadiyah sebagai organisasi moderat juga sering kesulitan untuk mengambil posisi tengah karena warga Muhammadiyah sendiri sudah menjadi bagian dari kelompok yang mengambil jarak dan ‘oposisi’ terhadap aktifitas gereja. Di sini seringkali menunjukkan ‘posisi sulit’ hubungan antara Muhamadiyah sebagai gerakan islam dan pemerintah daerah yang harus mengayomi beragam komunitas walau pucuk kekuasaan dijabat orang Muhammadiyah.

Salah satu dari kesulitan kebijakan Muhammadiyah adalah ketegasan mengenai keberadaan kelompok Syiah sehingga celah ini dimanfaatkan untuk “oknum” Muhammadiyah yang mengarahkan wacana bahwa Syiah sesat dan bukan islam dan tidak ditolerir berada. Bupati Sleman pun akhirnya berada dalam arus yang sama untuk ‘menolak’ Syiah. Sri Purnomo (SP) sebagai pimpinan deklarasi masyarakat pecinta sunnah (KR, 16/12/2013) di masjid kampus UGM dinilai mencederai HAM sekaligus diduga melanggar konstitusi oleh beberapa LSM, seperti LBH dan Makaryo. Sejumlah pegiat anti kekerasan DIY tersebut konsolidasi di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk merespon situasi yang berkembang. Dalam pernyataan sikapnya, Makaryo menduga Sri Purnomo melanggar salah satu pasal UUD 45 yaitu “Negara berdasarkan Pancasila memiliki UUD 45 sebagai dasar konstitusi mengatur hak sipil dan politik. Dalam konteks berbangsa dan bernegara Sri

¹ Wawancara dengan salah seorang pengurus PDM Kabupaten Sleman tanggal 7 Agustus 2014.

Purnomo telah mencederai mandatnya sebagai pejabat publik. Pernyataan sikap tersebut lantas diikuti dengan beberapa tuntutan. Pertama mendesak Presiden hingga Gubernur DIY untuk melakukan teguran kepada Bupati Sleman, Sri Purnomo.

Fenomena yang terjadi di Sleman adalah ilustrasi penting bagaimana nilai-nilai agama menjadi bagian tidak terpisahkan dari proses pengambilan kebijakan dan pengaturan masyarakat. Dalam pandangan kelompok tertentu dalam Muhammadiyah, apa yang dilakukan oleh Sri Purnomo untuk 'memerangi' Syiah adalah keputusan yang tepat dan mencerminkan keberpihakan kepada nilai ajaran Islam yang secara langsung juga dapat diartikan telah menjalankan "misi" dakwah Islam Muhammadiyah. Tapi kelompok lain akan memadamkan sebaliknya, karena secara kelembagaan Muhammadiyah tidak pernah memutuskan bahwa Syiah itu sesat dan bukan Islam. Tafsir keagamaan memang tidak tunggal, begitu juga Muhammadiyah selalu mempunyai banyak wajah dalam merespon isu politik di daerah. Upaya menjaga identitas dan gerak Muhammadiyah tentu semua jamaah Muhammadiyah setuju, tetapi jika dilakukan dengan cara-cara yang diskriminatif dan tidak adil tentu ada juga warga Muhammadiyah juga akan melawan. Mukti Ali (1981) melihat karakteristik ini ada, bahwa nampak dari luar Muhammadiyah itu terkesan "agresif dan fanatik, namun dalam kenyataannya perkembangbiakannya berangsur-angsur dan toleran."

Di Maros, kehidupan sosial budaya masyarakat diwarnai nilai-nilai keagamaan yang cukup kental. Ormas keagamaan yang berbasis Islam, selama ini cukup mewarnai interaksi sosial kemasyarakatan. Secara kultural, nuansa keagamaan di Kabupaten Maros telah terintegrasi dengan kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya serta sosial politik. Kabupaten Maros cukup populer sebagai basis beberapa tarekat mu'tabarrah yang ada di Indonesia. Turikale sebagai Ibu Kota Kabupaten Maros merupakan tempat "bermula" dimana beberapa Tarekat masuk dan dikembangkan. Tarekat Sammaniah atau Tarekat Khalwatiyah Samman mulai masuk dan berkembang di Kampung Pacelle, wilayah Regenschap Turikale. Tarekat Tajul Khalwatiyah atau yang populer sebagai Tarekat Khalwatiyah Yusuf juga masuk dan berkembang di wilayah Distrik Turikale, yakni di Kampung Labuang. Selain kedua tarekat tersebut, Tariqatul Muhammadiyah (Tekolabbua) dan beberapa tarekat lainnya seperti Tarekat Naqshabandiyah juga menjadi Tarekat yang cukup populer bagi masyarakat Maros.

Secara kultural, jamaah tarekat ini memiliki kedekatan dengan ormas Nahdatul Ulama (NU) sehingga sering menjadi cara untuk mengidentifikasi jumlah pengikut NU di Kabupaten Maros. Ada pendapat bahwa selain bahwa selain warga Muhammadiyah yang

ada di pesantren Darul Istiqamah Maccopa, semuanya adalah warga NU. Klaim ini hampir serupa bahwa bahwa seluruh warga selain Muhammadiyah adalah warga Nahdiyyin, padahal terdapat organisasi dan tarekat-tarekat keagamaan yang tidak mengaku sebagai warga bintang Sembilan tersebut, misalnya Darul Dakwah wa-Irsyad (DDI), tarekat Naksabandiyah, tarekat Khalwatiah dan lain sebagainya.

Persyarikatan Muhammadiyah sendiri yang telah hadir sejak tahun 1929 di kabupaten Maros, secara kuantitas tidaklah besar, yang membedakan adalah konsolidasi organisasi yang berjalan dengan ritme yang baik. Peran Ortom-ortom berjalan dan memperlihatkan kiprahnya di tengah-tengah masyarakat. Hal inilah yang membuat kekuatan persyarikatan sangat diperhitungkan secara politik. Kemampuan organisasi dalam mengkonsolidasi kekuatan secara rapih dan mengoptimalkan modalitas jaringan menjadi faktor pembeda antar Muhammadiyah dengan organisasi berbasis masas islam yang lain.

Pada kontestasi Pemilukada Maros 2010 yang dilakukan pada tanggal 1 Juli 2010 oleh KPUD Maros. Pasangan Hatta Rahman-Harmil Mattotorang (Hatita) 66.138 suara (38,62%) sebagai pemenang dengan perolehan suara sekira 37%. Dan berdasarkan perhitungan manual di tingkat TPS memang terlihat pasangan nomor urut 6 ini mendominasi perolehan suara mengalahkan lima kandidat yang menjadi pesaingnya yaitu Nurhasan-H.A. Karim Saleh 31.823 suara (18, 58%) , H.A. Syahriwijaya-A. Burhanuddin 24..347 suara (14,22%), Drs. H. A. Paharuddin-D. Khaddafi 33.328 suara (19,46%), Prof. Dr. Muh Asdar, SE. M.Si-H.A. Rijal Assegaf 14.197 suara (8,29%), dan Zainal Abidin Noer-Saladin Hamat 1.430 (0,83%).

Meskipun banyak peristiwa yang dianggap telah mencederai proses demokrasi ini sehingga menyebabkan ketidakpuasan masyarakat, tetapi kemenangan ini mengukir sejarah baru bagi PAN pada daerah yang selama ini menjadi basis suara Partai Golkar. Keberhasilan ketua PAN menduduki kursi Bupati Maros kemudian berlanjut pada kemenangan PAN pada Pemilu Legislatif 2014.

Peningkatan suara pemilih PAN yang sangat signifikan dari 17.442 pada Pemilu Legislatif 2009 menjad 57.725 pada Pemilu Legislatif 2014, merupakan resultante dari kemampuan PAN memanfaatkan modalitas sosial, ekonomi dan politik atas ketokohan Bupati dan jejaring birokrasi kekuasaannya. Kemenangan PAN pada Pileg 2014 sangat dipengaruhi oleh kedudukan Ketua PAN sebagai Bupati. Sebagai Bupati, ketua PAN telah melakukan beberapa hal : konsolidasi organisasi sampai di level desa, investasi politik, modal

(finansial) politik, serta pergerakan birokrasi. Meskipun di tuntutan netral, tetapi loyalitas birokrasi di kendalikan oleh partai politik.

Secara sosial budaya, kekuatan persyarikatan Muhammadiyah di tidaklah dominan tetapi berbeda secara social politik, sudah mulai tampak pada posisi dominan. Hal ini dapat diindikasikan dengan semakin banyaknya kader persyarikatan Muhammadiyah yang memiliki posisi-posisi strategis dalam jejaring birokrasi dan lembaga politik lokal. Posisi ini banyak digunakan untuk tujuan *policy seeking* organisasi. Kekuatan kader dalam kekuasaan politik dan birokrasi di Kabupaten Maros, seperti yang pada tabel 2 dan 3 berikut ini:

**Tabel 2. Kader Pesyarikatan Muhammadiyah
Dalam Kekuasaan Politik dan Birokrasi di Kabupaten Maros**

No	Nama	Jabatan di Pemerintahan	Periode	Jabatan di Muhammadiyah	Periode
1	Ir.HM.Hatta Rahman,MM	Bupati Maros	2010-2015	Kader	
2	A.Chaidir Syam,S.IP	WakilKetua DPRD (Partai PAN)	2010-2014	Ketua PDPM	2010-2015
		Ketua DPRD (PAN)	2014-2019		
3	Ir.Amri Yusuf	Anggota DPRD (PAN)	2005-2010	Kader	
		Anggota DPRD (PAN)	2010-2014	Kader	
		Anggota DPRD (PAN)	2014-2019	Kader	
4	Ir.Khaeriah Rahman	Anggota DPRD (PAN)	2014-2019	Kader	
5	Ir.HIkram Rahi,	Anggota DPRD (PAN)	2014-2019	Kader	
6	Drs.M. Arsyad	Anggota DPRD (PDIP)	2014-2019	Kader	
7	Dr.H.NasiruddinRasyid,M.Pd	Sekretaris Dinas Pendidikan	2010-2013	Ketua PDM	2010-sekarang
		Plt Kepala Dinas Pendidikan	Desember 2013-Januari 2014	Ketua PDM	2010-sekarang
		Kabag Bina Mental Spirirtuald & Pemberdayaan Ummat	Januari-Desember 2014	Ketua PDM	2010-sekarang
		Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi & Keuangan	Januari 2015-sekarang	Ketua PDM	2010-sekarang
8	Drs.H.Rahmat Burhanuddin,M.Si	Kadin Pariwisata &Kebudayaan	2007-sekarang	Kader	
9	Ir.H.Ansyahrullah M.Si	Kadin Peternakan & Perikanan	2010-sekarang	Kader	
10	Drs. Abd.Baddar	Direktur PDAM	2010-sekarang	Wakil Ketua PDM	2010-sekarang

				Kab.Maros	
11	Drs.H.Ashar Salam	Kabid Kurikulum Dinas Pendidikan	2010-sekarang	Pengurus PDM	2010-sekarang
12	Drs.Amran Arsyad,M.Si	Kabid PNPTK Dinas Pendidikan	2010-sekarang	Pengurus PDM	2010-2015
13	Ir.Suardi Halid,M.Si	Sekretaris Dinas Tanaman Pangan	2010-sekarang	Pengurus PDM	2010-2015
14	Norman Salam, SKm,M.Kes	Kabid Dinas Kesehatan	2010-sekarang	Pengurus PDM	2010-2015
15	Drs.H.Muh.Saing,M M	Pengawas Dinas Pendidikan	2012-sekarang	Wakil Ketua PDM	2010-sekarang

Sumber : Hasil wawancara dengan Nasiruddin Rasyid (Jum'at 6 Maret 2015)

Tabel 3. Kader Pesyarikatan Muhammadiyah Dalam Kekuasaan Politik dan Birokrasi di Sleman

No	Nama	Jabatan di Pemerintahan	Periode	Jabatan di Muhammadiyah	Periode
1	Drs. Sri Poernomo	Wakil Bupati Sleman Bupati Sleman	2005-2010 2010-2015	Wakil Ketua	2004-skr
2	Arif Haryoo	Kadinas Dikpora	2010-2014 2014-2019	Pengurus	2010-2015
3	Samsul Bahri	Camat Kalasan	2014-2019	Kader	
4	Mustain Aminun	Camat Moyudan	2014-2019	Kader	
5	Joko Hastaryo	Dirut RSUD	2014-skr	Kader	
6	Priyo Handoyo	Camat Gamping	2014-2019	Pengurus	2010-2015
7	Arifin MLow	Sekcam Godean	2014-2019	Pengurus PDM	2010-2015
8	Heru Saptono	Sekt BPBD	2014-2019	Pengurus	2010-2015
9	Bowo Krisnandito	Kasi Dikpora	2014-2019	Pengurus	2010-2019
10	Aswino	Komisioner KPUD	2014-2019	Pengurus PDPM	2012-2015
11	Arif Mahfudz	Ketua KUA	Sekarang	Sekretaris PDM	2011-2016

Untuk Kab. Sleman, sebenarnya masih sangat banyak pengurus atau kader Muhammadiyah yang menjabat di lembaga birokrasi pemerintahan misalnya di KUA tetapi tidak semua kita sajikan di sini. Data-data tersebut dalam dua tabel di atas adalah bukti empirik bahwa Muhammadiyah mempunyai banyak urusan dengan pemerintahan lokal. Politik akomodasi yang dilakukan oleh kepala daerah terpilih atas dukungan Muhammadiyah adalah suatu keniscayaan. Bukan hanya untuk Muhammadiyah, tetapi semua ormas yang melakukan memobilisasi dukungan dan menang tentu juga akan mendapatkan 'apresiasi' yang setara. Karena jarak politik yang dekat, semua memungkinkan dan begitu juga kontrol juga akan lebih mudah dilakukan oleh publik atas nama perseorangan maupun kelembagaan.

Sementara itu, dinamika yang sama terjadi di Kabupaten Maros Ir.HM. Hatta Rahman, M.Si sebagai Kader Muhammadiyah terhadap Pemerintahan di Kab.Maros. Hari lebaran yang sering menjadi perdebatan, pada awal periode tahun 2010 sampai dengan pada tahun 2014, Bupati Maros melaksanakan Sholat Idul Fitri dan Idul Adha lebaran di tempat dan di waktu yang telah disepekat oleh PDM Kabupaten Maros. Pada tahun 2014 Bupati Maros mengeluarkan Surat Edaran yang berisi bahwa Pemerintah Kab.Maros akan melaksanakan hari raya Idul Fitri yang sesuai dengan intruksi Pimpinan Pusat Muhammadiyah ditempatkan di lapangan Pemda Kab.Maros dan ikut bergabung pada hari raya tersebut antara lain semua pejabat struktural Pemerintah Kabupaten Maros, khususnya kepala kementerian agama serta Ketua Majelis Ulama Indonesia yang keduanya memimpin takbiran, serta pada tahun 2014 tersebut kepala bagian mental spiritual yang menangani adalah Ketua PDM Kab.Maros. Kebijakan ini merupakan suatu kebijakan yang sulit diambil di daerah yang dikenal bukan basis Muhammadiyah. Selain itu pula Kabupaten Maros menyusun Peraturan Daerah keagamaan yang sejalan dengan Muhammadiyah yaitu: a) Perda tentang Penyelenggaraan Haji; b) Perda tentang Pendidikan Diniyah Takmiliyah.

Kesimpulan

Sebagaimana juga dari sejarah politik Indonesia, sebelum era demokratisasi, warga Muhammadiyah aktif di berbagai partai politik. Pada saat yang sama Muhammadiyah sebagai organisasi juga mendorong warganya untuk memilih dalam pemilihan umum, dengan kapasitas mobilisasi terbatas. Logika kelembagaan ini memiliki tujuan untuk tidak memecah organisasi kedalam sekat-sekat politik (Nashir, 2010; Jung, 2014). Namun yang menarik dalam era liberalisasi justru logika kelembagaan ini menampakkan fakta yang berbeda di tingkat lokal. Secara organisasi, Muhammadiyah secara formal memainkan peran aktif politik elektoral dalam pemilihan kepala daerah.

Tumbangnya Suharto pada tahun 1998 setelah tiga dekade berkuasa merupakan babak baru kebangkitan organisasi islam untuk ambil bagian dalam proses pembangunan politik atau apa yang disebut oleh Amin Rais (2002) sebagai upaya membangun 'demokrasi inklusif'. Upaya ini mensyaratkan pembenahan kelembagaan politik—partai politik dan elitnya (Cipto 2002, Imawan 2004). Artinya, Muhammadiyah sebagai entitas *civil society* wajar apabila mengambil bagian dari proses politik baik di level lokal maupun nasional.

Politik lokal atau desentralisasi demokrasi sendiri menghendaki peran masyarakat lebih luas dan semakin mengecilnya dominasi partai politik (Sulistiyanto, 2006; Kawamura, 2013). Dan ini membenarkan tesis Nakamura (1983) bahwa Muhammadiyah adalah pergerakan yang bermuka banyak.

Dari penjelasan panjang di atas, setidaknya kasus Muhammadiyah di Sleman dan Maros ini memberikan kesimpulan bahwa perilaku politik electoral elit Muhammadiyah dapat dijelaskan dari tiga jenis motif. Pertama, ditemukan argumen yang kuat mengarah kepada kecenderungan bahwa keterlibatan Muhammadiyah dalam politik lokal adalah untuk menjaga “identitas” paham keagamaan sekaligus nilai-nilai lokalitas (*local wisdom*) yang diyakininya. Muhammadiyah menggunakan politik elektoral sebagai sarana untuk tujuan agama dan integritas dalam pengikutnya. Muhammadiyah mampu memprioritaskan identitas sosial dan religiusnya di atas identitas politik walaupun anggotanya berusaha membawa organisasi ke ranah politik (Jung, 2014). Selain itu, obsesi dakwah di ruang public tentu juga menjadi landasan ideologis yang sangat perlu karena ini yang dianggap dakwah yang bersifat pembaharuan (*tajdid* dalam bidang politik).

Kedua, apa yang terjadi pada Muhammadiyah di kedua kabupaten ini adalah fenomena elit untuk mendapatkan representasi dari kekuasaan politik formal (*office seeking*). Tentu ini bukan dalam konotasi negatif karena Muhammadiyah sebagai organisasi *civil society*, peran *high-politics* atau politik alokatif Muhammadiyah dapat dimaknai sebagai wadah ‘produsen’ pemimpin yang tangguh. Pragmatism politik sebagai salah satu jalan yang dipilih sebagian elit Muhammadiyah menjadi menarik untuk dikontekstualisasikan pada peluang demokratisasi dan desentralisasi di aras lokal. Pengalaman-pengalaman di daerah yang berjuang memadukan *high-politics* dan *low-politics* atau politik alokatif dan politik konstitutif dalam merebut ruang kekuasaan (*office seeking*) dan ruang kebijakan (*policy seeking*) menjadi kekuatan baru organisasi. Jarak politik menjadi penjelas yang masuk akal, karena sehari-hari Muhammadiyah mempunyai urusan dengan pemerintahan di mana segala keputusan politik dapat dan perlu dinegosiasikan. Berbeda dengan level politik nasional, jarak territorial dan jarak politik yang tidak terjangkau mengakibatkan orientasi politik menjadi kurang penting.

Sejalan dengan temuan Abram di atas, perilaku elektoral warga Muhammadiyah memang lebih dipengaruhi oleh kebijakan organisasi daripada hanya sekedar keterlibatan individu dalam politik (Bush, 2014). Dalam konteks ini maka secara organisasi, perilaku

politik organisasi Muhammadiyah dalam pemilihan umum di tingkat lokal seperti PDM Sleman yang mendukung calon kepala Daerah dan juga dukungan kelembagaan terhadap keputusan “konvensi” internal Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengajukan Afnan Hadikoesumo sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah mendekati motif sebagai *office-seeking*. Untuk menjalankan fungsi tersebut secara optimal, tidak ada pilihan lain bahwa proses desentralisasi kekuasaan semakin nyata, dimana kepala daerah memiliki otoritas kekuasaan yang jauh lebih besar dari pada pemerintah pusat, maka Muhammadiyah tidak bisa lagi mengandalkan kekuatan diplomasi hanya di tingkat Pimpinan Pusat (PP). Muhammadiyah harus mampu menyiapkan kader-kader di tingkat daerah (lokal) yang handal untuk berkomunikasi dan berdialog secara langsung dengan pimpinan daerah setempat. Hal ini bisa dilakukan dengan konsolidasi organisasi dan pemanfaatan modalitas jaringan kader pada berbagai tingkatan.

Terakhir, perilaku elit Muhammadiyah ini dapat dilihat sebagai mobilisasi sentiment ‘aliran/agama/ideology’ untuk membangun nilai tawar kepada kekuatan politik/agama di luarnya dan untuk mengkonsolidasikan ‘keyakinan’ pada jamaahnya. Situasi ini muncul pada beragam pertemuan yang memperlihatkan bahwa Muhammadiyah harus diperhitungkan dalam kanca politik dengan beragam legitimasi ideologis. Sentiment atau gengsi ini mendapatkan pijakannya juga, ketika Muhammadiyah secara material tidak banyak mendapatkan keuntungan setelah pesta pemilukada usai. Pemilu selesai, Muhammadiyah kembali mengurus dirinya sendiri, amal usaha dan dinamika internalnya sendiri. Sedikit mengubah kalimat Nakamura, politik hanyalah merupakan perhatian sampingan bagi kehidupan sehari-hari warga Muhammadiyah.

References

- Ali, Marpuji.(2010) “Reposisi Politik Alokatif Dalam Kancah Kenegaraan”, Makalah Seminar Nasional “Mencari Format Ideal Relasi Muhammadiyah dan Politik”, Universitas Muhammadiyah Makassar, 24 Agustus 2010.
- Aspinal, Edward. 2015. Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientalisme pada Pemilu Legislatif 2014 . Yogyakarta: PolGov
- Buehler, M. (2007). Local elite reconfiguration in post-New Order Indonesia: the 2005 election of district government heads in South Sulawesi. *Review of Indonesian and Malaysian affairs*, 41(1), 119-47.

- Choi, N. (2005). *Local elections and democracy in Indonesia: the case of the Riau Archipelago*.
- Cipto, Bambang (2002), 'Perilaku Elit Politik' dalam Geoff Foster (ed), *Indonesia Pasca Suharto*. Yogyakarta: Tajidu Press, hal.173-184.
- Syamsuddin, Dien. "Muhammadiyah dan Rekayasa Politik Orde Baru" dlm. Din Syamsuddin (ed.). *Muhammadiyah Kini dan Esok* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990).
- Efendi, David. 2014. *Fragmentasi Elite Muhammadiyah dalam pemilu Presiden 2009*. Yogyakarta: Reviva Cendekia.
- Efendi, David dkk. 2004. *Peran Civil Society Organization dalam Pilkada di Bantul 2004 (studi tentang peran PD Muhammadiyah Kab. Bantul dan PC NU Bantul)*. Laporan Penelitian Jurusan Ilmu Pemerintahan UGM.
- Ghazali, Abd Rahim dan Daulay, SP. 2005. *Muhammadiyah dan Politik Islam Inklusif*. Jakarta: Maarif Institute.
- Jurdi, Syarfuddin. (2010). *Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia 1966-2006*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Karakoç, E., & Başkan, B. (2012). Religion in Politics How Does Inequality Affect Public Secularization?. *Comparative Political Studies*, 45(12), 1510-1541.
- Kris Nugroho, "Konsolidasi Demokrasi," *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Th XIV, No 2, April 2001, 25-34.
- Grzymala-Busse, A. (2012). Why comparative politics should take religion (more) seriously. *Annual Review of Political Science*, 15, 421-442.
- Jung, E. (2014). Islamic organizations and electoral politics in Indonesia: the case of Muhammadiyah. *South East Asia Research*, 22(1), 73-86.
- Ma'arif, Ahmad Syafii "Muhammadiyah dan High Politics" *Jurnal Ulumul Quran* No.2/Vol..VI/1995.
- Mahadi, Helmi (2011), *Pragmatisme Politik: Studi Kasus Proses Rekrutmen Politik PDI-P Pada Pilkada, Kabupaten Sleman*, *Jurnal Studi Pemerintahan* Volume 2 Nomor 1 Februari.
- Nakamura, Mitsuo. 1983. *Bulan Sabit Muncul dari Balik Pohon Beringin*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rais, Amien (2002), 'Islam dan Politik dalam Indonesia Kontemporer' dalam Geoff Foster (ed), *Indonesia Pasca Suharto*. Yogyakarta: Tajidu Press, hal.360-368
- Sulistiyanto, P. 2006. Muhammadiyah, Local Politics and Local identity in Kotagede. *Journal of Social Issues in Southeast Asia* Vol.21, No.2, Oktober 2006.
- Tanjung, Masda (2012). *Kader Muhammadiyah dalam Partai Politik di Kabupaten Bantul 2009-2012: Perspektif Politik Islam (Disertasi)*, Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga.

- Putnam, Robert.D (2001), "Studi Perbandingan Elite Politik" dalam Mochtar Mas'ood dan Andrew dalam buku Perbandingan Sistem Politik, Gadjah Mada University Press, hal.76-94.
- Wibowo, Sugeng (2008), Penguatan Peran Civil Society dalam Politik Lokal: Telaah Perilaku Politik Warga Muhammadiyah dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Ponorogo, Fenomena, Vol. 5, No. 2, Juli.
- Warner, Carolyn (2000), Confessions of an Interest Group: The Catholic Church and Political Parties in Europe, Princeton University Press, Princeton, NJ
- Wardana, Amika (2014), Political Islam beyond Islamic Political Parties: The Case of Muhammadiyah in Yogyakarta, The paper is presented at Discussion Forum Networking Event UK/CHEVENINGALUMNI of Indonesia & Timor Leste, placed in PubMed, Melia Purosani Hotel, Yogyakarta.